

LAPORAN KINERJA

2022



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**



FOTO : [HTTPS://MARITIM.GO.ID/](https://maritim.go.id/)

ARAHAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi *Group of Twenty* (KTT G20) tahun 2022 mendapatkan apresiasi sangat tinggi dari para delegasi asing negara-negara anggota G20. Kendati perhelatan G20 dilaksanakan disaat situasi di dunia sendiri penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, salah satunya adalah dengan terjadinya konflik geopolitik antara Rusia dengan Ukraina, kemudian terjadi kenaikan harga komoditas hingga energi yang semakin memperburuk risiko inflasi dunia.



Di tahun yang sama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kembali memimpin langsung gelaran *Archipelagic and Island States Forum-AIS* Forum dan sukses dilaksanakan. Kedua agenda tersebut untuk bersama-sama bangkit dari pandemi Covid-19.

Suksesnya gelaran G20 dan AIS Forum membawa dampak yang luas dan mempengaruhi ekonomi masyarakat secara signifikan. Fakta dan data menunjukkan kalau fundamental perekonomian yang dimiliki oleh bangsa ini terus membaik, kendati negara lain justru mengalami inflasi hingga sempat mengalami resesi ekonomi. Momentum ini menjadi kebangkitan ekonomi, hal ini terbukti beberapa negara asing sangat ingin menanamkan modal di Indonesia ini. KTT G20 mampu untuk pulih dan bangkit menghadapi berbagai krisis dunia.

Menyongsong kebangkitan ekonomi tersebut, Pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangkap dan meralisasikan peluang tersebut. Hal ini agar tidak menimbulkan krisis dan ekonomi terus membaik. Rencana pembangunan, penyusunan strategi dan modifikasi kebijakan, merupakan bentuk upaya yang terus dilakukan untuk kebangkitan Negeri ini.

Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi juga dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah tersebut. *Refocusing* anggaran menjadi pemantik dalam pencapaian target pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah melakukan upaya formulasi strategi dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembangunan di Bidang Kemaritiman dan Investasi, hasil tersebut terlihat dari beberapa capaian target kinerja. Beberapa program prioritas yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan memiliki capaian yang maksimal.



Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, Laporan Kinerja ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat luas. Bagaimana langkah optimal Kemenko Marves dalam pencapaian setiap target kinerja yang telah diperjanjikan, serta kendala yang dihadapi dan langkah penguatan strategi ke depan.

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, Kemenko Marves terus meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, memberikan layanan regulasi melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, meningkatkan tata kelola, meningkatkan Profesionalitas ASN dan pengelolaan keuangan yang berkualitas. Perjanjian Kinerja setiap individu yang telah disepakati di awal tahun 2022, dipastikan mengarah untuk mendukung pencapaian kinerja Kemenko Marves secara keseluruhan sebagai bentuk penggerakan sumber daya dalam pencapaian target pembangunan bidang kemaritiman dan investasi.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan kemaritiman dan investasi. Menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia tetap menjadi tujuan besar kita. Apresiasi kepada seluruh pegawai yang telah menjaga integritas dan profesionalitas dalam mengawal pembangunan kemaritiman dan investasi. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan informasi bagi semua pihak. Masukan dan saran sangat kami harapkan untuk terus meningkatkan kinerja pembangunan kemaritiman dan investasi.

Jakarta, Februari 2023

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi

LUHUT B. PANDJAITAN

KATA PENGANTAR

Penyusunan laporan kinerja merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PermenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenko Marves Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pelaksanaan Rencana Strategis Kemenko Marves periode 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Permenko Marves Nomor 6 Tahun 2020.



Ucapan syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada seluruh unit kerja yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan informasi komprehensif mengenai progres pencapaian target dalam mewujudkan kondisi ideal yang diinginkan melalui indikator kinerja yang terukur.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Marves, Laporan Kinerja Tahun 2022 disajikan dengan tetap memperhatikan validitas, keandalan dan keakuratan data sebagai salah satu upaya mewujudkan laporan kinerja yang berkualitas. Kemenko Marves telah melakukan berbagai upaya untuk tetap berkinerja optimal dalam pencapaian target kinerja sepanjang tahun 2022.

Kemenko Marves senantiasa memperhatikan harapan masyarakat agar tetap terus menghasilkan kebijakan yang berkualitas dalam menyelesaikan *the bottle necking* dalam pembangunan kemaritiman dan investasi. Banyak permasalahan strategis di bidang kemaritiman dan investasi dan penugasan khusus dari Presiden yang berhasil diselesaikan sepanjang tahun 2022. Meskipun secara keseluruhan belum tercapai secara optimal pada tahun 2022, namun melalui berbagai terobosan, target kinerja tahun 2022 tetap berada dalam kategori baik.

Kemenko Marves senantiasa akan melakukan perbaikan atas hasil evaluasi kinerja yang dilakukan, menyusun langkah-langkah perbaikan dan mengkonsolidasikan sumber daya yang ada di Kemenko Marves. Kemenko Marves juga terbuka untuk semua masukan dan kritikan yang konstruktif, yang akan menjadi acuan dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2023

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

AYODHIA G. L. KALAKE



FOTO: [HTTPS://WWW.SETKAB.GO.ID](https://www.setkab.go.id)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Guna mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”** Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memiliki cita-cita menjadikan **“Indonesia menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia”**. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Kemenko Marves menyusun Rencana Strategis 2020-2024 yang memuat aksi nyata berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita pembangunan kemaritiman dan investasi tersebut.

Sebagai periode ketiga pelaksanaan Renstra, pada tahun 2022 Kemenko Marves telah menetapkan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicascading kepada 7 (tujuh) unit Eselon I dan 41 unit Eselon II secara berjenjang, guna memastikan bahwa setiap kinerja mendapatkan dukungan dalam pencapaiannya. Secara garis besar pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target IKU dapat terlaksana dengan baik, hal ini didukung dengan masa transisi Pandemi Covid 19 menjadi endemi sehingga sudah ditarik kembali kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, yang berdampak terlaksananya agenda-agenda kerja pada Tahun 2022.

Capaian kinerja Kemenko Marves tahun 2022 adalah sebesar 99,98%. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,77 poin dimana kinerja Kemenko Marves pada tahun 2021 adalah sebesar 99,21%. Dari 17 IKU, jumlah IKU yang dapat mencapai target adalah sebanyak 11 IKU atau sebesar 64,70%. Sedangkan IKU yang belum mencapai target adalah sebanyak 6 IKU atau sebesar 35,30%.

Capaian *Stakeholders Perspective* adalah sebesar 102,23%, sedangkan capaian *Customer Perspective* sebesar 102,83%, *Internal Business Process Perspective* sebesar 100% dan capaian *Learning and Growth Perspective* adalah 94,67%. IKU yang mencapai target sebagai berikut:

1. IKU 1 Efektifitas Kepemimpinan Maritim dengan capaian 100%
2. IKU 2 PDB Maritim dengan capaian 108,73%
3. IKU 4 Indeks Kedaulatan Maritim dengan capaian 120%
4. IKU 6 Indeks Disparitas Ekonomi dengan capaian 100%
5. IKU 7 Indeks Kesehatan Laut Indonesia dengan capaian 108,07%
6. IKU 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian 106,97%
7. IKU 9 PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa dengan capaian 113,16%
8. IKU 10 Tingkat Komponen dalam Negeri dengan capaian 108,33%
9. IKU 12 Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan dengan capaian 100%
10. IKU 13 Persentase Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti dengan capaian 100%
11. IKU 17 Opini BPK dengan capaian 120%

Sedangkan IKU yang belum memenuhi target, yaitu:

- 1. IKU 3 Indeks Daya Saing Global (IDSG) dengan capaian 97,97%
- 2. IKU 5 Indeks Kinerja Logistik dengan capaian 95,45%
- 3. IKU 11 Indeks Kapabilitas Inovasi dengan capaian 70,63%
- 4. IKU 14 Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian 73,85%
- 5. IKU 15 Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves dengan capaian 98,38%
- 6. IKU 16 Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan capaian 86,45%

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mendorong terwujudnya target pembangunan bidang kemaritiman dan investasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, pencapaian target tersebut juga didorong melalui pelaksanaan arahan langsung dari Presiden. Salah satu arahan Presiden yang menjadi perhatian adalah untuk terus mendorong masuknya investasi. Tingkat capaian investasi sangat memegang peranan penting untuk mengakselerasi tercapainya seluruh target pembangunan, termasuk di bidang kemaritiman dan investasi.

Sepanjang tahun 2022, nilai investasi tercapai sebesar Rp 1.207 triliun melampaui target Rp 1.200 triliun. Sebanyak 54,2% atau Rp654,4 trilyun dari nilai investasi tersebut merupakan Penanaman Modal Asing atau PMA, sedangkan 45,8% atau Rp552,8 trilyun merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN). Investasi asing tersebut naik 44,2% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan investasi PMDN mengalami kenaikan 23,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, nilai investasi di Luar Jawa adalah sebesar Rp.636,3 Trilyun (52,7%), sedangkan investasi di Jawa sebesar Rp.570,9 Trilyun (47,3%). Dari data tersebut terlihat, nilai investasi di Luar Jawa lebih besar dibandingkan di Jawa, walaupun dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Namun, upaya menarik investasi di semua wilayah terus dilakukan untuk mewujudkan pemerataan penyebaran investasi berkualitas.

Pagu anggaran Kemenko Marves TA. 2022 telah disahkan pada tanggal 17 November 2021, dengan terbitnya DIPA Induk Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2022 dimana Kemenko Marves memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp260.926.167.000,00 (dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Namun, selama periode 2022 Kemenko Marves mendapatkan pagu blokir, melakukan pengajuan usulan pembukaan *Automatic Adjustment*, dan melakukan pengajuan usulan revisi. Sehingga sampai dengan triwulan IV, total anggaran Kemenko Marves berjumlah Rp345.169.102.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Ribu).

Anggaran tersebut pada tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp327.357.404.180,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) atau sebesar 94,84%. Secara garis besar terdiri dari 3 jenis belanja, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja pegawai dengan pagu Rp71.047.049.000,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp70.663.883.864,00 (Tujuh Puluh Milyar Enam Puluh Enam Rupiah) atau 99,46%;
- Belanja barang dengan pagu anggaran Rp272.358.913.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp254.963.922.766,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau 93,61%; dan
- Belanja modal dengan pagu Rp1.763.140.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.729.597.550,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 98,10%.

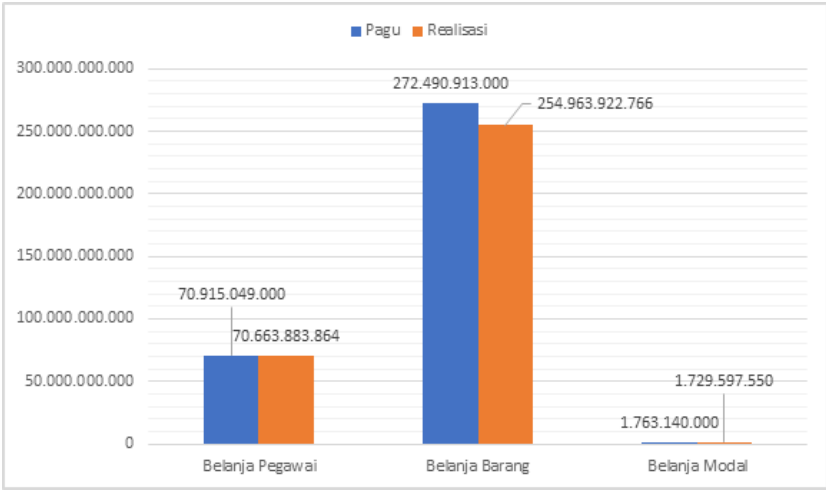
Secara detail pagu anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 terlihat pada tabel dan grafik berikut ini:

TABEL 1
REALISASI BELANJA TAHUN 2022

DESKRIPSI		PAGU	REALISASI	SISA	%
TOTAL BELANJA		345.169.102.000	327.357.404.180	17.811.697.820	94,84%
51	Belanja Pegawai	70.915.049.000	70.663.883.864	383.165.136	99,46%
52	Belanja Barang	272.490.913.000	254.963.922.766	17.394.990.234	93,61%
53	Belanja Modal	1.763.140.000	1.729.597.550	33.542.450	98,10%

Sumber: Aplikasi SAKTI, 2022 (diolah)

GRAFIK 1
REALISASI BELANJA TAHUN 2022



Sumber: Aplikasi SAKTI, 2022 (diolah)



DAFTAR ISI

ARAHAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	iii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xviii
DAFTAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi	1
B. Organisasi Kemenko Marves	3
C. Peran Strategis	4
D. Sumber Daya Kemenko Marves	5
1. Sumber Daya Manusia	5
2. Sarana dan Prasarana	7
3. Sumber Daya Keuangan	9
4. Sistematisasi Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Program dan Kegiatan Tahun 2022	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
1. Indikator Kinerja Utama	18
D. Perhitungan Capaian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	23
B. Realisasi Anggaran	28
C. Analisa Kinerja	31
(1) <i>Stakeholders Perspective</i>	31
(2) <i>Customer Perspective</i>	55
(3) <i>Internal Business Process Perspective</i>	115
(4) <i>Learning and Growth Perspective</i>	146
D. Capaian Kinerja Lainnya	160
E. Prestasi Kemenko Marves	187
F. Inovasi	190
G. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	197

	1.	Analisa Sumber Daya Anggaran	197
	2.	Penyederhaan Birokrasi (<i>Delaying</i>)	203
	3.	Implementasi Aplikasi	203
	4.	Konsolidasi Perangkat Infrastruktur TIK dan Perangkat Pengguna	205
	5.	Efisiensi Anggaran	206
	6.	Implementasi Kebijakan SDM	207
	7.	Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa	208
	8.	Efisiensi Ruang Kerja melalui Implementasi Konsep ABW	208
	9.	Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai	209
BAB IV	PENUTUP		213
	A.	Kesimpulan	213
	B.	Langkah Perbaikan Kedepan	214
Lampiran 1			215
Lampiran 2			218
Lampiran 3			219
Lampiran 4			220
Lampiran 5			221
Lampiran 6			222
Lampiran 7			223
Lampiran 8			225
Tim Penyusun	LKJ KEMENKO Marves Tahun 2022		243

DAFTAR GAMBAR		
Gambar 1	7 K/L di bawah Koordinasi Kemenko Marves	2
Gambar 2	Struktur Organisasi Kemenko Marves	3
Gambar 3	Jumlah Pegawai Kemenko Marves	6
Gambar 4	Peta Strategis Kemenko Marves	14
Gambar 5	Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Validitas IKU	19
Gambar 6	Bobot Bukti Hasil Kinerja	20
Gambar 7	Cakupan 12 Cluster Kemaritiman Berdasarkan Aktivitas	40
Gambar 8	Arsitektur aplikasi dashboard satu data kemaritiman Indonesia	47
Gambar 9	Dashboard Satu Data Kemaritiman Indonesia	48
Gambar 10	Peringkat IDSG Indonesia Tahun 2018 - 2022	51
Gambar 11	Skor Masing-Masing Variabel IDSG Indonesia tahun 2021	52
Gambar 12	Dasar Penilaian LPI	70
Gambar 13	Depo Gerai Maritim	74
Gambar 14	5 Besar Lokasi (PMA & PMDN) Januari – Desember 2022	79
Gambar 15	5 Besar Negara Investasi di Indonesia Januari – Desember 2022	80
Gambar 16	Nilai PDB Kehutanan	96

Gambar 17	7 pilar Penilaian Indeks Inovasi Global	109
Gambar 18	Skor 7 (tujuh) Pilar GII untuk Indonesia	111
Gambar 19	7 (tujuh) pilar penilaian GII Indonesia Tahun 2022	112
Gambar 20	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	150
Gambar 21	Pelaksanaan SPBE di Kemenko Marves	153
Gambar 22	Capaian SPBE	154
Gambar 23	Piagam dan Plakat Penghargaan Opini BPK Tahun 2022	159
Gambar 24	Pelaksanaan Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional	161
Gambar 25	Penandatanganan MoU Establishing a High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM)	161
Gambar 26	Histori Pengembangan <i>Food Estate</i> Sumatera Utara di Kab. Humbang Hasundutan	164
Gambar 27	Tampilan Sismonev <i>Food Estate</i> Sumatera Utara	165
Gambar 28	Kunjungan Lapangan Pengembang <i>Food Estate</i> di Sumatera Utara (Kiri) dan Kalimantan Tengah (Kanan)	165
Gambar 29	Over View JTTS s.d Tahun 2022	185
Gambar 30	Key Milestones Menuju COD Juni 2023	186
Gambar 31	Penghargaan ASN Culture Fest 2022 (Best Starter Overall Indeks BerAKHLAK) dari KemenPANRB	187
Gambar 32	Opini BPK atas Laporan Keuangan dari BPK	188
Gambar 33	Sinergitas Awards	188
Gambar 34	Menerima Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik I	188
Gambar 35	Penghargaan yang diterima Kemenko Maritim Tahun 2022	189
Gambar 36	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2022	189
Gambar 37	Dashboard SIK-Maritim	194
Gambar 38	Marves Core	194
Gambar 39	Aplikasi MarvesHR	194
Gambar 40	Aplikasi Marves Dalam Angka	195
Gambar 41	Website JDIH Marves	195
Gambar 42	Tampilan Dashboard Aplikasi Sismonev <i>Food Estate</i>	195
Gambar 43	Dashboard Aplikasi PCM Marves	195
Gambar 44	Aplikasi Satu Garpu	195
Gambar 45	Aplikasi E-RB	196
Gambar 46	Aplikasi E-TALA	196
Gambar 47	Aplikasi Untuk Database Smelter Melalui Information And Communication System For Indonesian Mineral-Downstreaming Stakeholders (ICOS FOR IMDOS)	196

DAFTAR GRAFIK		
Grafik 1	Realisasi Belanja Tahun 2022	ix
Grafik 2	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kemenko Maritim Tahun 2015 s.d 2021	24
Grafik 3	Realisasi Belanja Tahun 2022	29
Grafik 4	Perbandingan Persentase Realisasi Tahun 2022 dan 2021	30
Grafik 5	Nilai PDB Kemaritiman (Triliun Rp) & Kontribusi PDB Kemaritiman (%) Tahun 2017-2021	41
Grafik 6	Pertumbuhan PDB Kemaritiman Indonesia Tahun 2018-2021 (%)	42
Grafik 7	Cluster Maritim Pembentukan PDB Kemaritiman	43
Grafik 8	Skor seluruh Indikator Capaian Logistic Performance Index Indonesia Tahun 2007-2018	72
Grafik 9	Perkembangan Realisasi Investasi Per Triwulan tahun 2017 s.d 2022	78
Grafik 10	Nilai OHI Indonesia Tahun 2016 - 2021	83
Grafik 11	Perbandingan Capaian Indikator Penunjang Penghitungan IKLH tahun 2022 - 2015	90
Grafik 12	Perbandingan Target - Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 - 2015	90
Grafik 13	Perbandingan Share PDB Sumberdaya Alam dan Jasa Tahun 2020 s.d 2022	94
Grafik 14	Distribusi PDB Sub Sektor Kehutanan	95
Grafik 15	Distribusi PDB Sub Sektor Perikanan Tahun 2022	97
Grafik 16	Kenaikan PDB Pertambangan dan Penggalan Antara Tahun 2022 dan 2021	100
Grafik 17	Perbandingan Share PDB Sektor Pariwisata Tahun 2022-2021	101
Grafik 18	Perbandingan Peringkat GII Indonesia (2023-2022)	111
Grafik 19	Skor GII Negara Asia Tenggara Tahun 2022	113
Grafik 20	Perkembangan Land Clearing dan Jumlah Petani di <i>Food Estate</i> Sumatera Utara di Kab. Humbang Hasundutan	165

DAFTAR TABEL		
Tabel 1	Realisasi Belanja Tahun 2022	ix
Tabel 2	Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas Kemenko Marves	7
Tabel 3	Pagu Anggaran Masing-Masing Program Tahun 2022	9
Tabel 4	Pagu Anggaran Masing-Masing Unit Kerja Eselon I Tahun 2022	10
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kemaritiman Indonesia Tahun 2020-2024	14

Tabel 6	Sasaran Strategis Kemenko Marves 2022	15
Tabel 7	Pagu Anggaran Tahun 2022 per Program	17
Tabel 8	Target Kinerja Kemenko Marves Triwulanan Tahun 2022	18
Tabel 9	Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif Tahun 2022 dan 2021	24
Tabel 10	Target Kinerja Kemenko Marves Tahun 2022	25
Tabel 11	Capaian Kinerja Kemenko Marves Tahun 2022	26
Tabel 12	Pagu Anggaran Tahun 2022 per Program	28
Tabel 13	Realisasi Belanja Tahun 2022	29
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021	30
Tabel 15	Data Perbandingan Realisasi Anggaran per Bulan TA 2022 dan 2021	31
Tabel 16	Konversi Nilai Tingkat Kedaulatan Maritim	33
Tabel 17	Konversi Indeks Kepemimpinan Maritim Indonesia	33
Tabel 18	Capaian Kinerja IKU Efektivitas Kepemimpinan Maritim Tahun 2022	33
Tabel 19	Perhitungan Efektivitas Kepemimpinan Maritim	34
Tabel 20	Perhitungan Tingkat Kedaulatan Maritim	34
Tabel 21	Perhitungan Efektivitas Diplomasi Maritim	34
Tabel 22	Partisipasi Aktif Indonesia dalam Forum Maritim Regional dan Global	35
Tabel 23	Penempatan Wakil Indonesia di Organisasi Internasional Bidang Kemaritiman	35
Tabel 24	Perbandingan Realisasi dan Target IKU	36
Tabel 25	Capaian Kinerja IKU PDB Maritim Tahun 2022	41
Tabel 26	Perbandingan Realisasi dan Target IKU PDB Maritim	43
Tabel 27	Peringkat Indeks Daya Saing Global Tahun 2019 Negara ASEAN	49
Tabel 28	Capaian Kinerja IKU Indeks Daya Saing Global 2022	49
Tabel 29	Peringkat Indeks Daya Saing Global Indonesia Tahun 2018-2019	50
Tabel 30	Peringkat IDSG Tahun 2022 dan 2021 dan (Peringkat Indonesia 2016-2022)	51
Tabel 31	Perbandingan Realisasi dan Target IKU	52
Tabel 32	Nilai Tingkat Kedaulatan Maritim	57
Tabel 33	Capaian Kinerja IKU Tingkat Kedaulatan Maritim Tahun 2022	57
Tabel 34	Nilai Tingkat Kepastian Kewilayahan	58
Tabel 35	Persentase Zona maritim	58
Tabel 36	Persentase Posisi kepentingan Indonesia	59

Tabel 37	Nilai Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim	59
Tabel 38	Persentase kualitas ketahanan maritim	60
Tabel 39	Persentase Optimalisasi Keamanan maritim	61
Tabel 40	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	63
Tabel 41	Perbandingan Realisasi dan Target IKU Indeks Kedaulatan Maritim	65
Tabel 42	Capaian Kinerja IKU Indeks Kinerja Logistik dan Indeks Disparitas Ekonomi Tahun 2022	69
Tabel 43	Perbandingan Realisasi dan IKU Indeks Kinerja Logistik	71
Tabel 44	Peringkat LPI Negara Asean Tahun 2018	71
Tabel 45	Perbandingan Realisasi dan Target IKU Indeks Kinerja Logistik Tahun 2022	72
Tabel 46	Capaian Kinerja IKU Indeks Disparitas Ekonomi Tahun 2022	75
Tabel 47	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran - Tahun 2022 (Dalam Juta Rupiah)	76
Tabel 48	PDRB Pulau Jawa dan Luar Jawa - Tahun 2022 (Dalam Juta Rupiah)	77
Tabel 49	Perbandingan Realisasi dan Target IKU Indeks Kinerja Logistik Tahun 2022	80
Tabel 50	Capaian Kinerja IKU Indeks Kesehatan Laut dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022	81
Tabel 51	Nilai OHI Indonesia per Variabel Tahun 2022	82
Tabel 52	Nilai OHI Negara di Asia Tenggara Tahun 2021	83
Tabel 53	Goals Indeks Kesehatan Laut	84
Tabel 54	Perhitungan IKLI Tahun 2022	84
Tabel 55	Capaian Kinerja IKU Indeks Kesehatan Laut Tahun 2022	85
Tabel 56	Perbandingan Realisasi dan Target IKU Indeks Kesehatan Laut	85
Tabel 57	Rincian Capaian Indikator	87
Tabel 58	Capaian Kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022	88
Tabel 59	Perbandingan Realisasi dan Target IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	91
Tabel 60	Capaian Kinerja IKU PDB Sumberdaya Alam dan Jasa Tahun 2022	93
Tabel 61	Formula Perhitungan PDB Sektor Sumberdaya Alam Tahun 2022	93
Tabel 62	Capaian IKU PDB Sumberdaya Alam dan Jasa tahun 2022	94
Tabel 63	Perbandingan Share PDB Sektor Sumberdaya Alam Tahun 2022 dan 2021	94

Tabel 64	Estimasi Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Triwulan IV Tahun 2022	99
Tabel 65	Perbandingan Capaian IKU PDB Sumberdaya Alam dan Jasa	101
Tabel 66	Capaian Jumlah Sertifikat TKDN tahun 2020 s.d 2022	105
Tabel 67	Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN Berdasarkan Kelompok Barang tahun 2022	105
Tabel 68	Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN Berdasarkan Berdasarkan Tahun Terbit	106
Tabel 69	Capaian Kinerja IKU Tingkat Komponen Dalam Negeri Tahun 2022	106
Tabel 70	Perbandingan Realisasi dan Target IKU Tingkat Komponen Dalam Negeri	107
Tabel 71	Capaian Kinerja IKU Indeks Kapabilitas Inovasi Tahun 2022	110
Tabel 72	Peringkat GII Indonesia (2020 – 2022)	110
Tabel 73	Penilaian GII Pilar Infrastruktur Indonesia Tahun 2022	112
Tabel 74	Peringkat Indonesia antar Negara Asia Tenggara pada Indeks Inovasi Global Tahun 2022	112
Tabel 75	Kekuatan dan Kelemahan Indikator Indonesia Pada GII 2022	113
Tabel 76	Perbandingan Realisasi dan Target IKU Indeks Kapabilitas Inovasi	114
Tabel 77	Capaian Kinerja IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Tahun 2022	128
Tabel 78	Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan	128
Tabel 79	Capaian Kinerja IKU Persentase Hasil Pengendalian yang Ditindaklanjuti	145
Tabel 80	Perbandingan Capaian IKU Persentase Hasil Pengendalian yang Ditindaklanjuti	145
Tabel 81	Capaian IKU IP ASN Tahun 2022 Kemenko Marves	147
Tabel 82	Perbandingan Realisasi dan Target IKU IP ASN	147
Tabel 83	Capaian IKU Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022	149
Tabel 84	Rincian Hasil Evaluasi RB Kemenko Marves 2022	150
Tabel 85	Perbandingan Realisasi dan Target IKU Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Maritim pada Tahun 2022	151
Tabel 86	Capaian Kinerja IKU Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022	153
Tabel 87	Perbandingan Realisasi dan Target IKU Nilai Penyelenggaraan	154

Tabel 88	Capaian Kinerja IKU Opini BPK Tahun 2022	157
Tabel 89	Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Marves	157
Tabel 90	Perbandingan Realisasi dan Target IKU Opini BPK Tahun 2022	157
Tabel 91	Progres Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung	185
Tabel 92	Inovasi Kemenko Marves	190
Tabel 93	Realisasi IKU Pendukung SS 1	198
Tabel 94	Realisasi IKU pendukung SS 2	198
Tabel 95	Realisasi IKU pendukung SS 3	198
Tabel 96	Realisasi IKU pendukung SS 4	199
Tabel 97	Realisasi IKU pendukung SS 5	199
Tabel 98	Realisasi IKU pendukung SS 6	200
Tabel 99	Realisasi IKU pendukung SS 7	200
Tabel 100	Realisasi IKU pendukung SS 8	201
Tabel 101	Realisasi IKU pendukung SS 9	201
Tabel 102	Realisasi IKU pendukung SS 10	201
Tabel 103	Realisasi IKU pendukung SS 11-14	202
Tabel 104	Anggaran Belanja TIK Unit Eselon I Kemenko Marves Tahun 2022	206
Tabel 105	Rincian Redistribusi Pegawai Kemenko Marves 2022	208
Tabel 106	Pembagian Ruang Kerja	209
Tabel 107	Data Pegawai Berdasarkan Gender	210
Tabel 108	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	210
Tabel 109	Data Pegawai Berdasarkan Usia	210
Tabel 110	Data Pegawai Berdasarkan Pangkat	211
Tabel 111	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	211

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Jumlah Pegawai Kemenko Marves berdasarkan Jabatan	6
Diagram 2	Persentase Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I Tahun 2022	10
Diagram 3	Realisasi Investasi PMA dan PMDN Januari – Desember 2022	78
Diagram 4	Realisasi Investasi Jawa-Luar Jawa Januari-Desember 2022	78
Diagram 5	Data PNS Struktural Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	211



DAFTAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN

ASN	:	Aparatur Sipil Negara
D1	:	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
D2	:	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
D3	:	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
D4	:	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
D5	:	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
D6	:	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
Kemenko Marves	:	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Menko	:	Menteri Koordinator
PDB	:	Produk Domestik Bruto
RB	:	Reformasi Birokrasi
Renstra	:	Rencana Strategis
SAKIP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja
Setmenko Kemaritiman	:	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Sesmenko Kemaritiman	:	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
SPIP	:	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SS	:	Sasaran Strategis
TA	:	Tahun Anggaran
TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKM	:	Tingkat Keselamatan Maritim
TKW	:	Tingkat Kepastian (ke) Wilayah
TKKM	:	Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim
TW	:	Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim



PENDAHULUAN

BAB 1

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Maritim) Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2022. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Kemenko Marves tahun 2020-2024. Dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kemenko Marves yaitu pembangunan bidang kemaritiman dan investasi yang menitikberatkan pada upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat, menuju poros maritim dunia melalui pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi.

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, tugas dari Kemenko Marves yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Dalam melaksanakan tugas, Kemenko Marves menyelenggarakan fungsi:

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi

01

Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi

02

Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi

03

Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet

04

Penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud

05

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

06

Berdasarkan peraturan dimaksud, kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves yaitu:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
8. Instansi lain yang dianggap perlu.

GAMBAR 1
7 (TUJUH) K/L DIBAWAH KOORDINASI KEMENKO MARVES

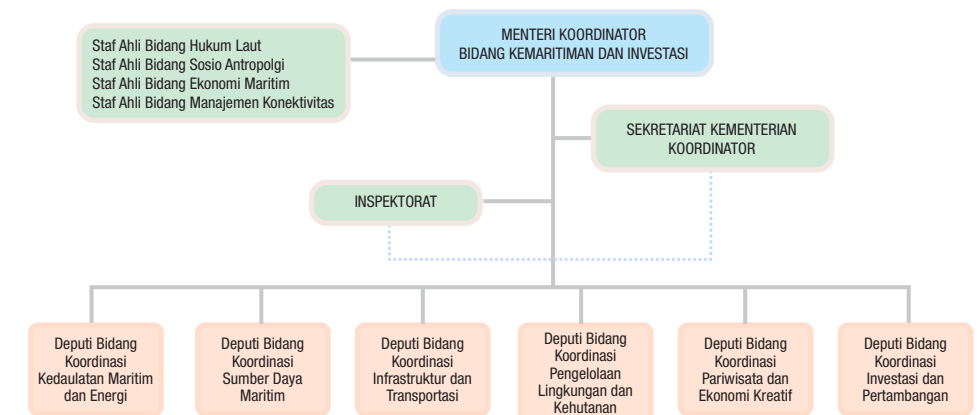


B. Organisasi Kemenko Marves

Kemenko Marves dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Organisasi Kemenko Marves sampai dengan unit eselon I selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sesuai Permenko Nomor 10/2020 tersebut, Kemenko Marves terdiri atas Sekretariat Kementerian Koordinator; 6 (enam) Deputi yaitu Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan; dan 4 (empat) Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Antropologi, Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim, Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas, Staf Ahli Bidang Hukum Laut, dan Inspektorat.

Susunan organisasi Kemenko Marves berdasarkan Perpres Nomor 92 Tahun 2019 terlihat seperti gambar di bawah ini:

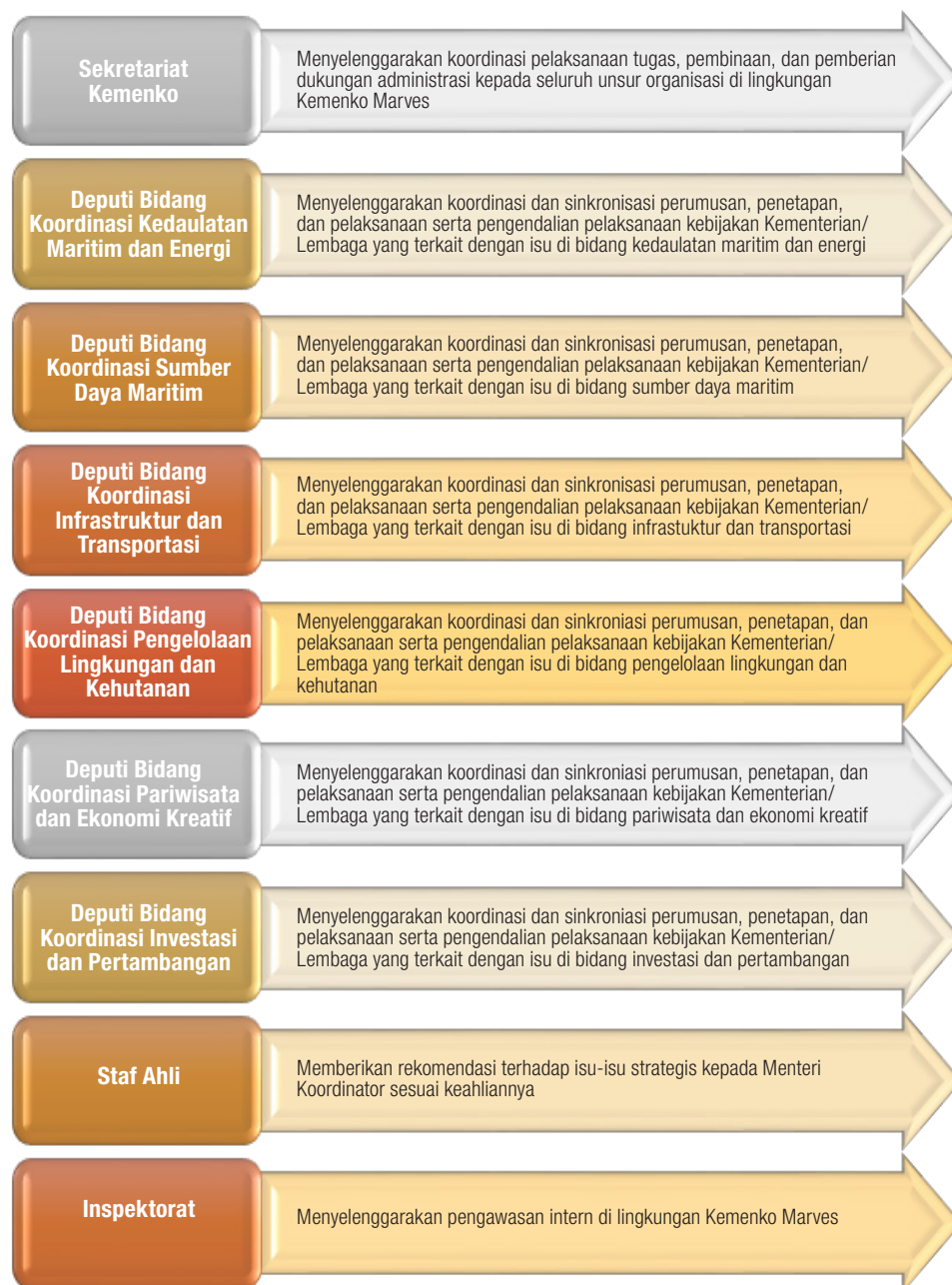
GAMBAR 2
STRUKTUR ORGANISASI KEMENKO MARVES



Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugasnya dibantu juga oleh Staf Khusus Menteri Koordinator, yang terdiri dari:

1. Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
2. Staf Khusus Menteri Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim
3. Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi
4. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional dan Perjanjian Internasional
5. Staf Khusus Menteri Bidang Infrastruktur dan Teknologi

Tugas dan fungsi Unit Kerja Lingkup Kemenko Marves, sebagai berikut :



C. Peran Strategis

Peran strategis Kemenko Marves dalam melaksanakan pembangunan dibidang kemaritiman dan investasi yaitu dengan adanya 3 (tiga) mandat langsung dari Presiden Jokowi kepada Menko Marves pada pengumuman Kabinet Indonesia Maju, yaitu: 1) Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai "Poros Maritim Dunia; 2) Menangani hambatan-hambatan investasi; dan 3) Merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar.

Selanjutnya arahan Presiden Jokowi dipertegas terkait tugas Menko yang harus dilaksanakan di Bidang Marves yaitu:

Energi

- Meningkatkan produksi migas dalam negeri
- Implementasi dan kebijakan energi baru dan terbarukan (EBT) juga harus dipercepat

Industri dan Maritim

- Pengurangan pada barang barang impor
- Tidak mengekspor bahan mentah
- Mengembangkan produk-produk petrokimia dan membangun kawasan petrokimia

Infrastruktur dan Konektivitas

- Penambahan proyek
- Peningkatan frekuensi
- Pengendalian monopoli terhadap pasokan
- Penurunan biaya logistik dan biaya transportasi

Pariwisata

- Fokus penyiapan program-program terobosan untuk mengatasi neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan
- Pastikan pada peningkatan investasi terus dilakukan
- Iklim investasi harus kita bangun dan benahi

Investasi

- Fokus penyiapan program-program terobosan untuk mengatasi neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan
- Pastikan pada peningkatan investasi terus dilakukan
- Iklim investasi harus kita bangun dan benahi

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi fokus pada 6 program prioritas yaitu bidang kedaulatan maritim dan energi, bidang sumber daya maritim, bidang infrastruktur dan transportasi, bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dan bidang investasi dan pertambangan.

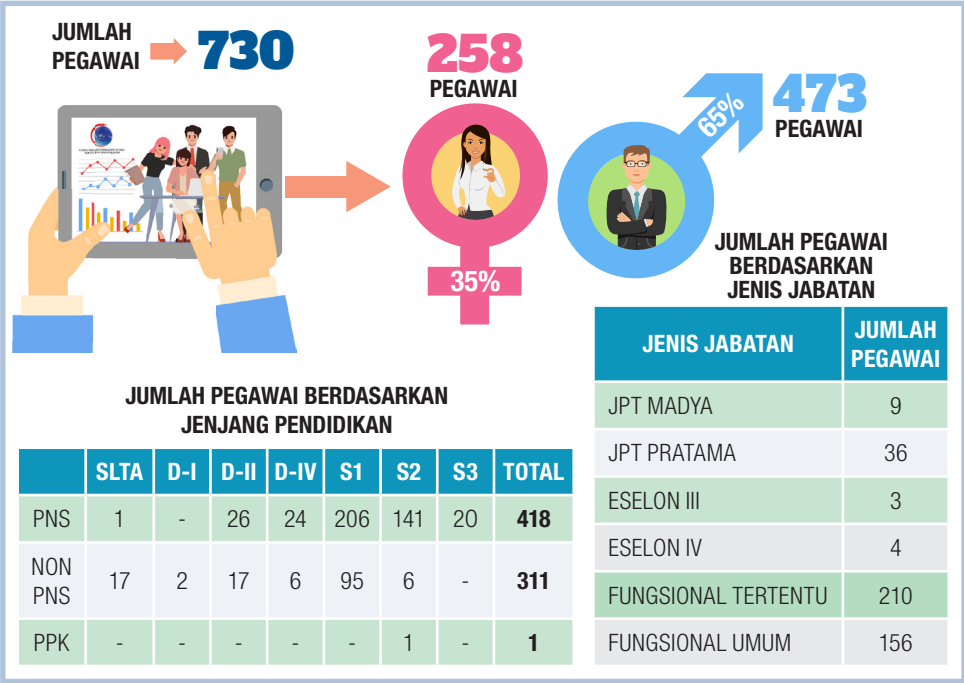
D. Sumber Daya Kemenko Marves

1. Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves sampai dengan saat ini memiliki 730 pegawai terdiri dari 473 pegawai berjenis kelamin laki-laki (65%) dan perempuan 258 pegawai (35%), dengan rincian PNS 418 pegawai, Tenaga PPPK 1 pegawai dan TTK 311 pegawai. Jumlah pegawai berstatus PNS berjenis kelamin laki-laki 254 orang,

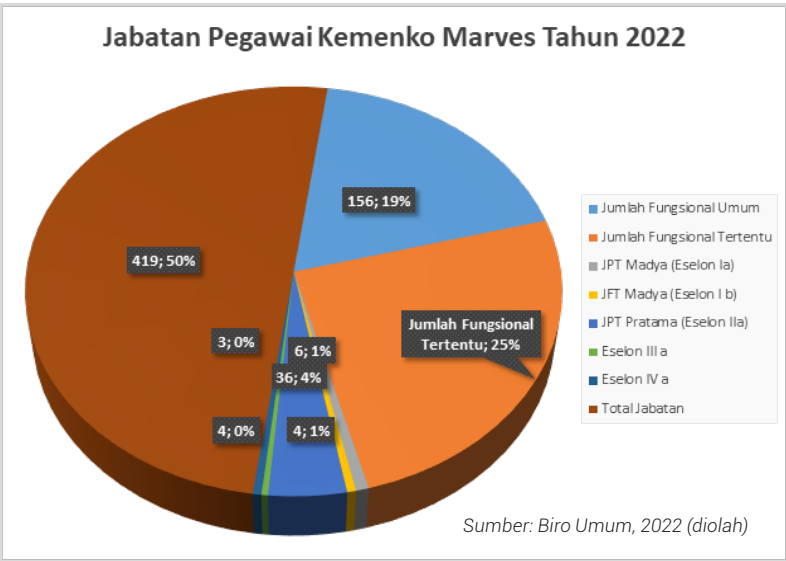
dan perempuan 165 orang. Sedangkan pegawai yang berstatus TKK berjenis kelamin laki-laki 218 orang dan perempuan 93 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

GAMBAR 3
JUMLAH PEGAWAI KEMENKO MARVES



Sumber: Biro Umum, 2022 (diolah)

DIAGRAM 1
JUMLAH PEGAWAI KEMENKO MARVES BERDASARKAN JABATAN



Sumber: Biro Umum, 2022 (diolah)

Seperti terlihat pada gambar dan diagram di atas, jumlah pegawai Kemenko Marves berdasarkan jabatan dari jumlah PNS 418 pegawai dengan rincian jabatan sebagai berikut: Jabatan Fungsional Umum berjumlah 156 pegawai; Jabatan Fungsional Tertentu berjumlah 210 pegawai; JPT Madya (Eselon Ia dan Ib) berjumlah 10 pegawai; JPT Pratama dengan jumlah 36 pegawai; Eselon III berjumlah 3 pegawai; dan Eselon IV dengan jumlah 4 pegawai.

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas, Kemenko Marves didukung dengan adanya sumber daya berupa prasarana dan sarana yang memadai. Selain memiliki gedung perkantoran yang beralamat di Gedung Kemenko Marves, Jl M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, juga didukung beberapa prasarana dan sarana perkantoran. Adapun data yang kami sajikan diantaranya sebagai berikut:

TABEL 2
ASET KEMENKO MARVES TAHUN 2015 S.D 2022

URAIAN	2022			KETERANGAN
	JUMLAH	SATUAN	NOMINAL (Rp)	
KAS				-
TANAH/GEDUNG/BANGUNAN				Alih Status (BPPT/BRIN)
SERTIFIKAT				SHM
a. Tanah			229.663.659.000	
Jl. Thamrin - Jakarta	1.976	m2	223.987.714.000	Alih Status (BPPT/BRIN)
Semenan - Kalideres	613	m2	5.675.945.000	Penyerahan Kemenkeu ke Marves
b. Gedung/Bangunan			196.497.132.618	
Jl. Thamrin - (Kantor)	21.307	m2	195.592.602.618	Alih Status (BPPT/BRIN)
Semenan - Kalideres (Gudang)	780	m2	904.530.000	Penyerahan Kemenkeu ke Marves
KENDARAAN BERMOTOR				
1. Roda 2	19	unit	334.116.800	Belanja Modal (APBN)
2. Roda 4	65	unit	21.980.120.000	Belanja Modal (APBN)
INVENTARIS LAINNYA				
1. Electric Generating Set	1	unit	12.747.544.600	Belanja Modal (APBN)
2. Alat Bengkel Bermesin	3	unit	7.623.000	Belanja Modal (APBN)
3. Alat Bengkel Tak Bermesin	1	unit	3.477.250	Belanja Modal (APBN)
4. Alat Ukur	30	unit	241.040.818	Belanja Modal (APBN)
5. Alat Kantor	677	unit	9.558.989.615	Belanja Modal (APBN)
6. Alat Rumah Tangga	3409	unit	29.735.981.959	Belanja Modal (APBN)
7. Alat Studio	272	unit	4.816.433.379	Belanja Modal (APBN)

URAIAN		2022			KETERANGAN
		JUMLAH	SATUAN	NOMINAL (Rp)	
8.	Alat Komunikasi	140	unit	916.144.778	Belanja Modal (APBN)
9.	Alat Pemancar	10	unit	133.453.500	Belanja Modal (APBN)
10.	Alat Kedokteran	25	unit	329.374.630	Belanja Modal (APBN) dan Hibah (Pemerintah RRT)
11.	Alat Kesehatan Umum	3	unit	76.560.000	Belanja Modal (APBN)
12.	Alat Kebersihan dan Kesehatan	28	unit	148.344.300	- Extraction Filter, Vacuum Cleaner Wet & Dry, TV Monitor, Microwave Oven, Water Distillation Purifier, Wash Bak - Belanja Modal (APBN)
13.	Recorder	3	unit	47.511.954	Belanja Modal (APBN)
14.	Infrared Thermometer	5	unit	20.557.000	Belanja Modal (APBN)
15.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1	unit	24.300.000	- Transciever - Belanja Modal (APBN)
16.	Alat Pengelola Air	2	unit	687.385.000	- Cooling Tower, Wireless Data Transmission System - Belanja Modal (APBN)
17.	Alat untuk Metal Detector	1	unit	49.555.555	- Alat Khusus Keamanan Lainnya - Belanja Modal (APBN)
18.	Alat Pembaca Barcode	15	unit	48.190.000	- Barcode Reader, Battery Handycam - Belanja Modal (APBN)
19.	Komputer Unit	981	unit	16.653.033.041	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
20.	Alat Komputer	753	unit	20.607.344.829	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
21.	Alat Pelindung Kesehatan	1	unit	21.450.000	Belanja Modal (APBN)
22.	Alat SAR	7	unit	97.845.000	Belanja Modal (APBN)
23.	Alat Kerja Persidangan	7	unit	12.053.600	- Voice Recorder - Belanja Modal (APBN)
24.	Unit Peralatan Proses/Produksi	1	unit	1.518.000	Belanja Modal (APBN)
25.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	unit	6.400.000	Belanja Modal (APBN)
26.	Alat Olah Raga	6	unit	97.385.200	Belanja Modal (APBN)
27.	Aset Tetap Dalam Renovasi	3	unit	9.507.063.636	Belanja Modal (APBN)
28.	Aset Tetap Lainnya	211	unit	258.032.100	Belanja Modal (APBN)
29.	Aset Tak Berwujud	47	unit	5.758.012.790	Belanja Modal (APBN)

3. Sumber Daya Keuangan

Pagu anggaran Kemenko Marves TA. 2022 telah disahkan pada tanggal 17 November 2021, dengan terbitnya DIPA Induk Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2022 dimana Kemenko Marves memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp260.926.167.000,00 (dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Namun, Kemenko Marves mendapatkan pagu blokir sebesar Rp11.036.120.000,00 (Sebelas Miliar Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Jenis blokir ini merupakan kode 2 yaitu diperlukan data dukung lainnya untuk membuka blokir tersebut. Akun yang diblokir merupakan akun belanja Jasa Sewa dan akun belanja Jasa Konsultan.

Pada bulan Oktober 2022, Kemenko Marves mengajukan usulan pembukaan blokir *Automatic Adjustment* dalam Hal IV.A DIPA dan revisi anggaran antar komponen belanja operasional untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Selanjutnya, Kemenko Marves mengajukan usulan Revisi administrasi pembukaan blokir AA sebesar Rp19.188.393.000,- (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dalam rangka memenuhi alokasi anggaran detail kegiatan yang direkomendasikan dalam surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor S-433/MK.2/2022, sehingga sampai dengan triwulan IV total anggaran Kemenko Marves berjumlah Rp345.169.102.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Ribu) dengan rincian anggaran per program sebagai berikut:

TABEL 3
PAGU ANGGARAN MASING-MASING PROGRAM TAHUN 2022

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU AWAL (RP)	TAMBAHAN PAGU ANGGARAN (RP)	JUMLAH PAGU ANGGARAN (RP)	%
I	Program Dukungan Manajemen	173.276.257.000,00	15.396.516.000,00	188.672.773.000,00	54,66
II	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan	87.649.910.000,00	68.846.419.000,00	156.496.329.000,00	45,34
II.1	Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	13.524.070.000,00	59.825.833.000,00	73.349.903.000,00	21,25
II.2	Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	15.026.990.000,00	2.135.470.000,00	17.162.460.000,00	4,97
II.3	Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	13.524.095.000,00	1.960.603.000,00	15.484.698.000,00	4,49
II.4	Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	13.523.980.000,00	1.052.356.000,00	14.576.336.000,00	4,22
II.5	Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.524.295.000,00	2.137.403.000,00	15.661.698.000,00	4,54
II.6	Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	18.526.480.000,00	1.734.754.000,00	20.261.234.000,00	5,87
JUMLAH		260.926.167.000,00	84.242.935.000,00	345.169.102.000,00	100

Sumber: Biro Umum, Juni 2022 (diolah)

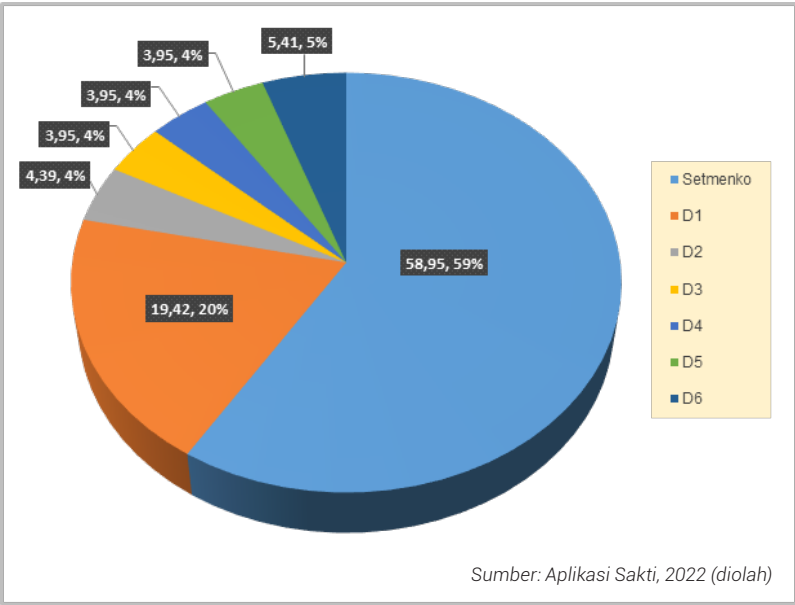
Adapun rincian pagu anggaran masing-masing unit kerja eselon I tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 4
PAGU ANGGARAN MASING-MASING UNIT KERJA ESELON I TAHUN 2022

ES1	DESKRIPSI	PAGU
	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	345.169.102.000
S	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	188.672.773.000
D1	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	73.349.903.000
D2	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	17.162.460.000
D3	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	15.484.698.000
D4	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	14.576.336.000
D5	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15.661.698.000
D6	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	20.261.234.000

Sumber: Aplikasi Sakti, 2022 (diolah)

DIAGRAM 2
PERSENTASE PAGU ANGGARAN UNIT KERJA ESELON I TAHUN 2022



Sumber: Aplikasi Sakti, 2022 (diolah)

4. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja tahun 2022 ini secara umum berisi tentang capaian kinerja Kemenko Marves Tahun 2022 (periode bulan Januari s.d Desember) tahun 2022. Sebagai tolak ukur analisis keberhasilan kinerja yaitu membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*). Dari hasil analisis capaian kinerja tersebut, diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, serta sistematika penyajian.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2022, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- Realisasi kinerja Kemenko Marves : menguraikan realisasi kinerja Kemenko Marves berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.
- Realisasi Anggaran : menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.
- Realisasi Kinerja lainnya : menyajikan capaian kinerja lainnya yang meliputi (1) Tugas Tambahan program dan kegiatan Kemenko Marves; (2) Capaian lainnya

BAB 4 PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

Berisi perjanjian kinerja tahun 2022, kegiatan tahun 2022, penghitungan pencapaian IKU unit kerja, Data dukung lainnya terhadap pencapaian IKU.



PERENCANAAN KINERJA

BAB 2

A. Rencana Strategis

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai Kementerian yang membantu presiden dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kemenko Marves telah menetapkan Visi Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Visi ini merupakan implementasi Visi Presiden yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

Visi tanpa misi hanyalah sebuah cita-cita. Misi diperlukan untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan. Sehubungan dengan visi tersebut di atas, untuk mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kemenko Marves berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 dari 9 Misi Presiden yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

MISI
01

Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

MISI
02

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;

MISI
03

Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

MISI
04

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

MISI
05

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

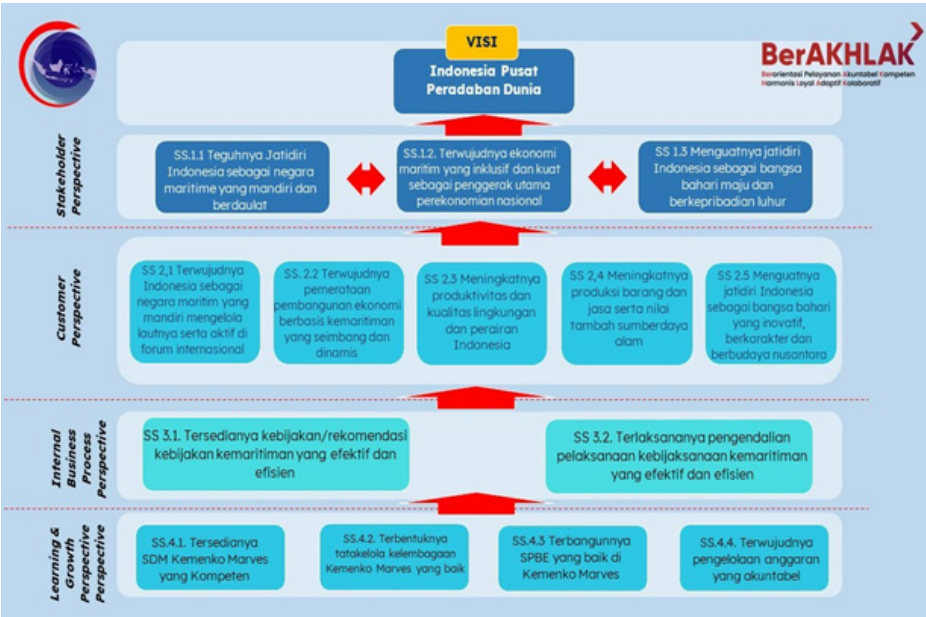
Berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kemaritiman dan investasi Indonesia dalam jangka menengah tahun 2020-2024 sebagai berikut:

TABEL 5
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN INDONESIA TAHUN 2020-2024

TUJUAN	SASARAN
1. Meneguhkan jatidiri Indonesia sebagai negara maritim dan berdaulat	1. Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dalam mengamankan dan mengelola potensi laut serta berperan aktif di forum internasional
2. Mewujudkan ekonomi maritim Indonesia yang kuat dan inklusif, sebagai penggerak utama perekonomian nasional	2. Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis
3. Memperkuat jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju berkepribadian luhur	3. Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia
4. Meningkatkan tatakelola Kemenko Marves yang efektif dan efisien dalam mengakselerasi pembangunan bidang kemaritiman dan investasi	4. Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam
	5. Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter, dan berbudaya nusantara

Sasaran Strategis untuk pencapaian visi dan misi Kemenko Marves menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4 di bawah ini:

GAMBAR 4
PETA STRATEGIS KEMENKO MARVES



Peta strategis Kemenko Marves membagi sasaran kementerian ke dalam 4 (empat) *perspective*, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal bussines process perspective* dan *learning and growth perspective*. Peta strategi tersebut memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada para *stakeholder* melalui 3 (tiga) sasaran strategis utama pembangunan kemaritiman dan investasi Indonesia, Customer dengan 5 (lima) sasaran; *Internal Business Process* dengan 2 (dua) sasaran; serta *Learning and Growth* dengan 4 (empat) sasaran.

Sasaran strategis pembangunan kemaritiman dan investasi merupakan kondisi yang diinginkan dan akan dicapai oleh Kemenko Marves sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kemenko Marves tahun 2020-2024 seperti tabel di bawah ini:

TABEL 6
SASARAN STRATEGIS KEMENKO MARVES 2022

PERSPECTIVE		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	UNIT PENANGGUNGJAWAB
 Stakeholder	SS.1	Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	Seluruh Deputi
	SS.2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	PDB Maritim	Seluruh Deputi
	SS.3	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	Indeks Daya Saing Global (IDSG)* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjukkan kinerja investasi	Seluruh Deputi
 Customer	SS.4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	Indeks Kedaulatan Maritim	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
	SS.5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	Indeks Kinerja Logistik* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjukkan kinerja investasi	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
			Indeks Disparitas Ekonomi	1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Transportasi 2. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
	SS.6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	Indeks Kesehatan Laut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERSPECTIVE	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	UNIT PENANGGUNGJAWAB
	SS.7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa*	Seluruh Deputi
			Tingkat Komponen dalam Negeri*	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
	SS.8	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	Indeks Kapabilitas Inovasi*	1. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 2. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Internal Business Process	SS.9	Tersedianya Kebijakan/ Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	Seluruh Deputi
	SS.10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	Persentase Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	Seluruh Deputi
 Learning and Growth	SS.11	Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Sekretariat Kemenko
	SS.12	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	Sekretariat Kemenko
	SS.13	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sekretariat Kemenko
	SS.14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK	Sekretariat Kemenko

Adapun penjelasan dari masing-masing indikator kinerja beserta capaiannya pada Bab III LKj ini.

B. Program dan Kegiatan Tahun 2022

Kemenko Marves pada tahun 2022 memiliki 2 program yaitu: 1) Program Dukungan Manajemen dengan 1 kegiatan dan 2) Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dengan 7 kegiatan. Penyusunan anggaran tahun 2022, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU).

Pagu anggaran Kemenko Marves TA. 2022 telah disahkan pada tanggal 17 November 2021, dengan terbitnya DIPA Induk Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2022 dimana Kemenko Marves memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp260.926.167.000,00 (dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Namun, Kemenko Marves mendapatkan pagu blokir sebesar Rp11.036.120.000,00 (Sebelas Miliar Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Jenis blokir ini merupakan kode 2 yaitu diperlukan data dukung lainnya untuk membuka blokir tersebut. Akun yang diblokir merupakan akun belanja Jasa Sewa dan akun belanja Jasa Konsultan.

Pada bulan Oktober 2022, Kemenko Marves mengajukan usulan pembukaan blokir Automatic Adjustment dalam Hal IV.A DIPA dan revisi anggaran antar komponen belanja operasional untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Selanjutnya, Kemenko Marves mengajukan usulan Revisi administrasi pembukaan blokir AA sebesar Rp19.188.393.000,- (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dalam rangka memenuhi alokasi anggaran detail kegiatan yang direkomendasikan dalam surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor S-433/MK.2/2022, sehingga sampai dengan triwulan IV total anggaran Kemenko Marves berjumlah Rp345.169.102.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Ribu) dengan rincian anggaran per program sebagai berikut:

TABEL 7
PAGU ANGGARAN TAHUN 2022 PER PROGRAM

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU AWAL (RP)	TAMBAHAN PAGU ANGGARAN (RP)	JUMLAH PAGU ANGGARAN (RP)	%
I	Program Dukungan Manajemen	173.276.257.000,00	15.396.516.000,00	188.672.773.000,00	54,66
II	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan	87.649.910.000,00	68.846.419.000,00	156.496.329.000,00	45,34
II.1	Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	13.524.070.000,00	59.825.833.000,00	73.349.903.000,00	21,25
II.2	Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	15.026.990.000,00	2.135.470.000,00	17.162.460.000,00	4,97
II.3	Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	13.524.095.000,00	1.960.603.000,00	15.484.698.000,00	4,49
II.4	Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	13.523.980.000,00	1.052.356.000,00	14.576.336.000,00	4,22
II.5	Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.524.295.000,00	2.137.403.000,00	15.661.698.000,00	4,54
II.6	Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	18.526.480.000,00	1.734.754.000,00	20.261.234.000,00	5,87
JUMLAH		260.926.167.000,00	84.242.935.000,00	345.169.102.000,00	100

Sumber: Biro Umum, Desember 2022 (diolah)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

1. Indikator Kinerja Utama

Perjanjian kinerja Kemenko Marves tahun 2022 telah disusun dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator pada 26 Januari 2022. Kinerja tersebut di cascading ke seluruh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya secara berjenjang sampai dengan level individu setiap pegawai. Selanjutnya kinerja tersebut dibagi habis kepada seluruh pegawai untuk menunjukkan dukungan setiap pegawai terhadap pencapaian kinerja organisasi. Kinerja pada level Kemenko Marves berisi indikator kinerja utama (IKU) yang mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, dan target Kemenko Marves Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 8
TARGET KINERJA KEMENKO MARVES TRIWULANAN TAHUN 2022

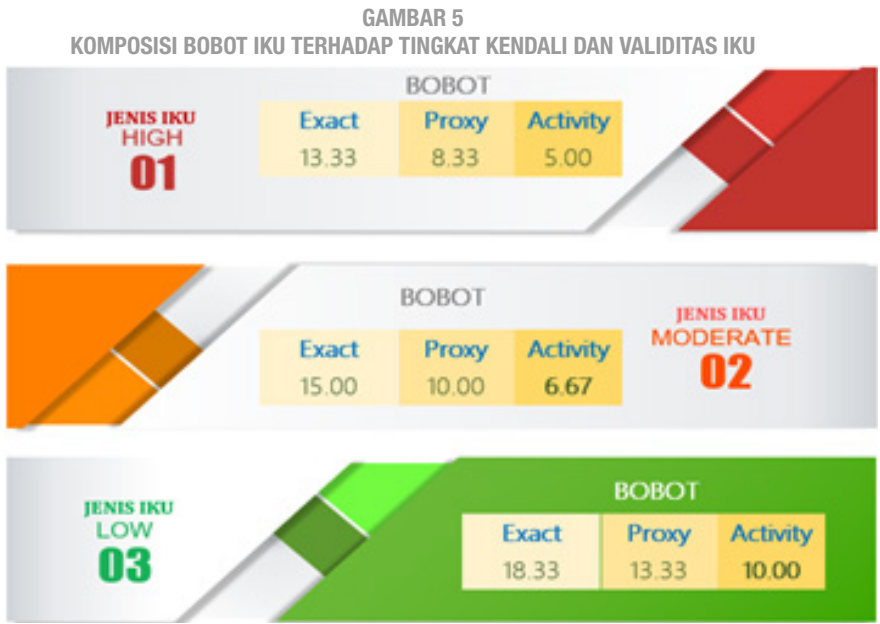
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2022
SS.1	Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	1	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	Nilai	>=3
SS.2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	2	PDB Maritim	%	6,99
SS3	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	3	Indeks Daya Saing Global (IDSG)* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjukkan kinerja investasi	Nilai	64,6
SS4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	4	Indeks Kedaulatan Maritim	Nilai	3
SS.5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	5	Indeks Kinerja Logistik* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjuk-kan kinerja investasi	Nilai	3,3
		6	Indeks Disparitas Ekonomi	Nilai	~0,17
SS.6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	7	Indeks Kesehatan Laut	Nilai	70
		8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,7
SS.7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	9	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjuk-kan kinerja investasi	Nilai	16,79
		10	Tingkat Komponen dalam Negeri* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjuk-kan kinerja investasi	Nilai	46
SS.8	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	11	Indeks Kapabilitas Inovasi* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjukkan kinerja investasi	Nilai	39,5

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2022
SS.9	Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	12	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	%	100
SS.10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	13	Persentase Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	%	100
SS.11	Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional	14	Indeks Profesionalitas ASN	%	81
SS.12	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik	15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	Nilai	80
SS.13	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi	16	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,1
SS.14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	17	Opini BPK	Predikat	WTP

D. Perhitungan Capaian Kinerja

Dalam menghitung capaian realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut:

- Menghitung Capaian IKU
 - Penghitungan capaian dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - Tingkat kendali dan tingkat validitas suatu IKU, dengan komposisi bobot sebagai berikut :



- 2) Bukti hasil kinerja, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

GAMBAR 6
BOBOT BUKTI HASIL KINERJA



- b. Menghitung persentase capaian Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

- c. Menghitung persentase capaian final IKU, yaitu dengan menjumlahkan eviden dengan capaian IKU kemudian total penjumlahan dibagi 2

$$\text{Capaian Final IKU} = \frac{\text{Eviden} + \text{Capaian IKU}}{2}$$

2. Menghitung Capaian Sasaran Strategis

Penghitungan didapatkan dengan perkalian antara capaian final IKU dan bobot final kemudian dibagikan terhadap total bobot final IKU per SS yang ada targetnya

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Capaian Final IKU} \times \text{Bobot Final IKU}}{\text{Total bobot final IKU yang ada targetnya per SS}}$$

3. *Perspective* didapat dari hasil perkalian capaian sasaran dan bobot sasaran kemudian dibagi terhadap total bobot sasaran per *Perspective*

$$\text{Perspective} = \frac{\text{Capaian Sasaran} \times \text{Bobot Sasaran}}{\text{Total bobot sasaran per Perspektif}}$$

4. Capaian Kerja Unit dihasilkan dari perkalian capaian *Perspective* dengan bobot *Perspective* yang dibagi terhadap total bobot *Perspective*

$$\text{Capaian kerja Unit} = \frac{\text{Capaian Perspective} \times \text{Bobot perspective}}{\text{Total bobot perspective}}$$

5. Bobot *Perspective* :1) *Stakeholders Perspective* (15); 2) *Customer Perspective* (25); 3) *Internal Business Process Perspective* (40); dan 4) *Learning and Growth Perspective* (20).

6. Range warna nilai Kinerja yang dicantumkan dalam Aplikasi SIK-Marves yakni:

RANGE NILAI	KETERANGAN WARNA
0 - 60	Merah
61 - 80	Kuning
81 - 100	Hijau
101 - 120	Biru



AKUNTABILITAS KINERJA

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja Kemenko Marves merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja ini tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis dari kondisi ideal yang ingin diwujudkan Kemenko Marves. Sejak tahun 2016 Kemenko Marves telah menerapkan model *Balanced Score Card* (BSC) dalam pengelolaan kinerjanya. Salah satu keunggulan pengelolaan kinerja dengan konsep BSC adalah disusunnya Strategi Kemenko Marves yang komprehensif dalam suatu peta strategi yang mencakup empat perspektif, yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Dalam implementasinya, Kemenko Marves terus berusaha untuk menyempurnakan model pengelolaan kinerja dengan konsep BSC agar sesuai dengan kondisi riil dan selaras dengan best practice sektor publik secara internasional. Dari masing-masing perspektif tersebut, Kemenko Marves kemudian merumuskan sasaran strategis (SS), indikator kinerja utama (IKU), dan target kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kemenko Marves. SS, IKU dan target kinerja tersebut kemudian dimuat dalam dokumen Komitmen Kinerja Menko Marves dan Deputi. Dokumen tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah *dashboard* yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi Kemenko Marves yang dikenal dengan nama Peta Strategi Kemenko Marves.

Peta strategi tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) dan diselaraskan (*alignment*) ke seluruh unit eselon I sampai dengan level terendah di Kemenko Marves, serta dituangkan dalam dokumen kontrak kinerja. Dengan dilaksanakannya proses *cascading* dan *alignment*, pencapaian strategi Kemenko Marves diharapkan selaras dan didukung oleh seluruh unit dan pegawai pada setiap level. Secara umum, pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenko Marves meliputi seluruh tahapan dalam eksekusi strategi Kemenko Marves yakni perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, reviu, dan penyempurnaan kontrak kinerja.

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

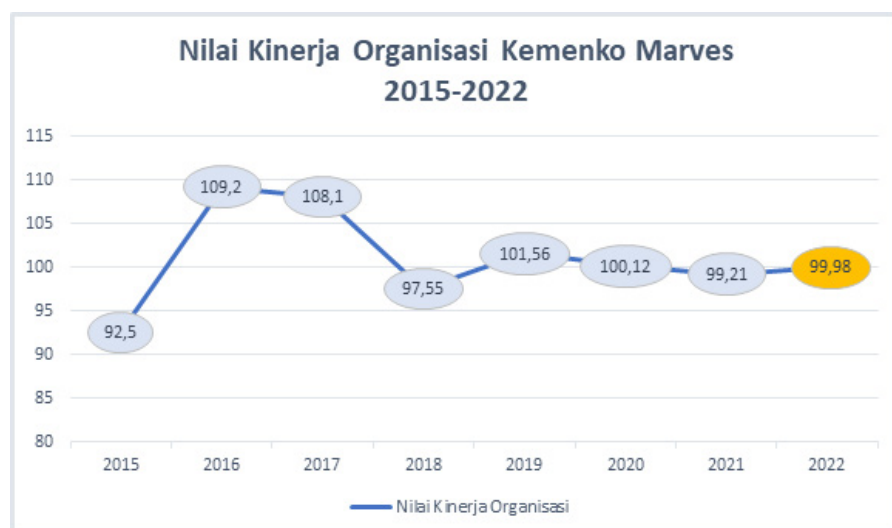
Pengukuran capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Selain itu, akan dilakukan juga perbandingan realisasi IKU dengan target pada Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2021. Nilai kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2022 mengalami peningkatan 0,77 poin dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (tahun 2021).

TABEL 9
NILAI KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN PERSPEKTIF TAHUN 2022 DAN 2021

PERSPEKTIF	BOBOT	NILAI 2022	NILAI 2021
Stakeholder	15%	102,23	106,46
Customer	25%	102,83	102,20
Internal Business Process	40%	100	100
Learning and Growth	20%	94,67	88,45
NILAI KINERJA ORGANISASI		99,98	99,21

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dengan menggunakan perbandingan antara target dengan capaian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka diperoleh data **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2022 adalah sebesar 99,98**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut. Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut.

GRAFIK 2
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) KEMENKO MARITIM TAHUN 2015 S.D 2021



Jika dilihat lebih detail, selama tahun 2022, terdapat 2 IKU berstatus kuning, 9 IKU berstatus hijau, dan 6 IKU berstatus biru. Secara detail, Terkait penghitungan NKO, sesuai dengan Permenko Marves Nomor 1/2021, dalam penghitungan capaian IKU ditetapkan maksimal 120. Namun untuk dapat memantau perkembangan capaian setiap triwulannya, dalam aplikasi Sistem Kinerja Maritim (SIK-M) dicantumkan angka riil capaian IKU tanpa ada pembatasan nilai maksimal. Penjelasan capaian IKU secara lengkap untuk setiap sasaran pada subbab C. Analisis Kinerja.

TABEL 10
TARGET KINERJA KEMENKO MARVES TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022
SS.1 Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	1 Efektifitas Kepemimpinan Maritim	Nilai	≥ 3
SS.2 Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	2 PDB Maritim	%	6,99
SS.3 Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	3 Indeks Daya Saing Global (IDSG)* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjukkan kinerja investasi	Nilai	64,6
SS.4 Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	4 Indeks Kedaulatan Maritim	Nilai	3
SS.5 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	5 Indeks Kinerja Logistik* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjukkan kinerja investasi	Nilai	3,3
	6 Indeks Disparitas Ekonomi	Nilai	~0,17
SS.6 Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	7 Indeks Kesehatan Laut	Nilai	70
	8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,7
SS.7 Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	9 PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjuk-kan kinerja investasi	Nilai	16,79
	10 Tingkat Komponen dalam Negeri* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjuk-kan kinerja investasi	Nilai	46
SS.8 Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	11 Indeks Kapabilitas Inovasi* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjukkan kinerja investasi	Nilai	39,5
SS.9 Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	12 Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	%	100
SS.10 Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	13 Persentase Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	%	100
SS.11 Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional	14 Indeks Profesionalitas ASN	%	81

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2022
SS.12	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik	15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	Nilai	80
SS.13	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi	16	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,1
SS.14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	17	Opini BPK	Predikat	WTP

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mendorong terwujudnya target pembangunan bidang kemaritiman dan investasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, pencapaian target tersebut juga didorong melalui pelaksanaan arahan langsung dari Presiden.

Salah satu arahan Presiden yang menjadi perhatian adalah untuk terus mendorong masuknya investasi. Tingkat capaian investasi sangat memegang peranan penting untuk mengakselerasi tercapainya seluruh target pembangunan, termasuk di bidang kemaritiman dan investasi. Upaya menarik investasi di semua wilayah terus dilakukan untuk mewujudkan pemerataan penyebaran investasi berkualitas.

Capaian kinerja Kemenko Marves tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

TABEL 11
CAPAAN KINERJA KEMENKO MARVES TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		2022		%
				TARGET	REALISASI	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						102,23
SS.1	Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	1	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	>=3	4	100
SS.2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	2	PDB Maritim	6,99	7,6	108,73
SS.3	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	3	Indeks Daya Saing Global (IDSG)* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjukkan kinerja investasi	64,6	63,29	97,97
CUSTOMER PERSPECTIVE						102,83
SS.4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	4	Indeks Kedaulatan Maritim	3	4	120

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		2022		%
				TARGET	REALISASI	
SS.5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	5	Indeks Kinerja Logistik* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjukkan kinerja investasi	3,3	3,15	95,45
		6	Indeks Disparitas Ekonomi	~0,17	-0,129	100
SS.6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	7	Indeks Kesehatan Laut	70	75,65	108,07
		8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,7	72,42	106,97
SS.7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	9	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjukkan kinerja investasi	16,79	19	113,16
		10	Tingkat Komponen dalam Negeri* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjukkan kinerja investasi	46	49,83	108,33
SS.8	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	11	Indeks Kapabilitas Inovasi* *) Indikator kinerja yang menjelaskan/ menunjukkan kinerja investasi	39,5	27,9	70,63
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE						100
SS.9	Tersedianya Kebijakan/ Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	12	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	100	100	100
SS.10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	13	Persentase Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	100	100	100
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						94,67
SS.11	Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional	14	Indeks Profesionalitas ASN	81	56,82	73,85
SS.12	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik	15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	80	76,78	98,38
SS.13	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi	16	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1	2,68	86,45
SS.14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	17	Opini BPK	WTP	WTP	120
CAPAAN TAHUN 2022						99,98

Keterangan: Capaian dihitung berdasarkan bobot sesuai IKU, SS dan Perspektif. Digunakan nilai capaian maksimal 120%
*) Indikator kinerja yang menjelaskan/menunjukkan kinerja investasi

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Kemenko Marves TA. 2022 telah disahkan pada tanggal 17 November 2021, dengan terbitnya DIPA Induk Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2022 dimana Kemenko Marves memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp260.926.167.000,00 (dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Namun, selama periode 2022 Kemenko Marves mendapatkan pagu blokir, melakukan pengajuan usulan pembukaan Automatic Adjustment, dan melakukan pengajuan usulan revisi. Sehingga sampai dengan triwulan IV, total anggaran Kemenko Marves berjumlah Rp345.169.102.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Ribu)

TABEL 12
PAGU ANGGARAN TAHUN 2022 PER PROGRAM

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU AWAL (RP)	TAMBAHAN PAGU ANGGARAN (RP)	JUMLAH PAGU ANGGARAN (RP)	%
I	Program Dukungan Manajemen	173.276.257.000,00	15.396.516.000,00	188.672.773.000,00	54,66
II	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan	87.649.910.000,00	68.846.419.000,00	156.496.329.000,00	45,34
II.1	Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	13.524.070.000,00	59.825.833.000,00	73.349.903.000,00	21,25
II.2	Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	15.026.990.000,00	2.135.470.000,00	17.162.460.000,00	4,97
II.3	Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	13.524.095.000,00	1.960.603.000,00	15.484.698.000,00	4,49
II.4	Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	13.523.980.000,00	1.052.356.000,00	14.576.336.000,00	4,22
II.5	Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.524.295.000,00	2.137.403.000,00	15.661.698.000,00	4,54
II.6	Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	18.526.480.000,00	1.734.754.000,00	20.261.234.000,00	5,87
JUMLAH		260.926.167.000,00	84.242.935.000,00	345.169.102.000,00	100

Sumber: Biro Umum, Tahun 2022

Realisasi anggaran belanja Kemenko Marves pada tahun 2022 sebesar Rp327.357.404.180,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) dari pagu anggaran keseluruhan berjumlah Rp345.169.102.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 94,84%. Secara garis besar terdiri dari 3 jenis belanja, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja pegawai dengan pagu Rp71.047.049.000,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp70.663.883.864,00 (Tujuh Puluh Milyar Enam Puluh Enam Rupiah) atau 99,46%;
- Belanja barang dengan pagu anggaran Rp272.358.913.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp254.963.922.766,00 (Dua Ratus Lima

- Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau 93,61%; dan
- Belanja modal dengan pagu Rp1,763,140,000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.729.597.550,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 98,10%.

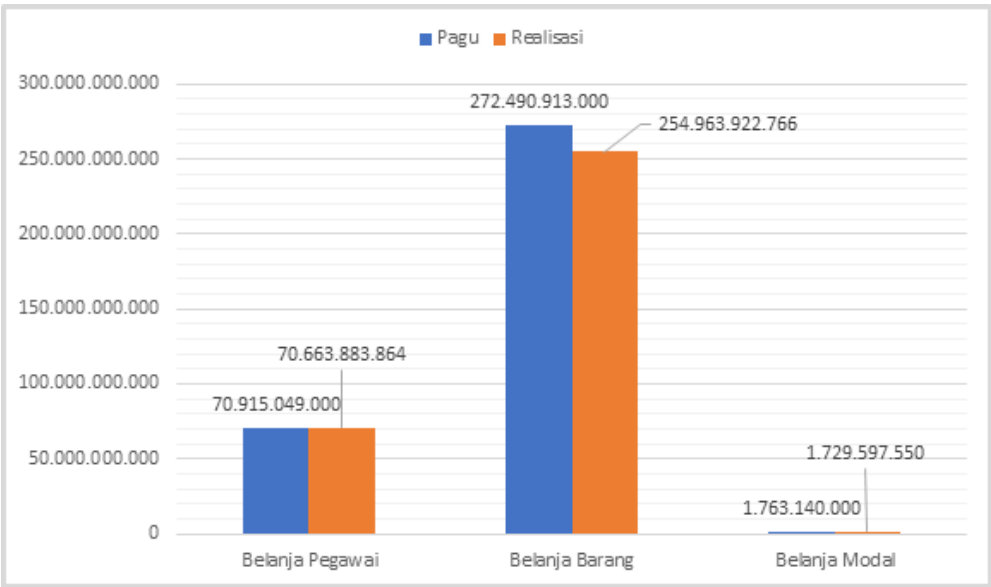
Secara detail pagu anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 13
REALISASI BELANJA TAHUN 2022

DESKRIPSI	PAGU	REALISASI	SISA	%
TOTAL BELANJA	345.169.102.000	327.357.404.180	17.811.697.820	94,84%
51 Belanja Pegawai	70.915.049.000	70.663.883.864	383.165.136	99,46%
52 Belanja Barang	272.490.913.000	254.963.922.766	17.394.990.234	93,61%
53 Belanja Modal	1.763.140.000	1.729.597.550	33.542.450	98,10%

Sumber: Aplikasi SAKTI, Tahun 2022

GRAFIK 3
REALISASI BELANJA TAHUN 2022



Sumber: Aplikasi SAKTI, Tahun 2022 (diolah)

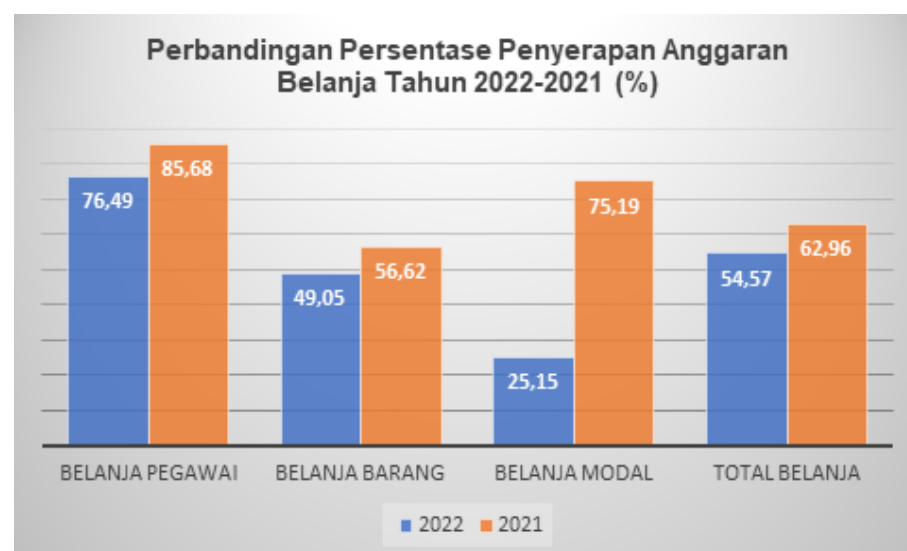
Jika dibandingkan realisasi belanja antara tahun 2022 dengan tahun 2021, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,35% dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2022 sebesar 94,84% sedangkan tahun 2021 sebesar 99,19% hal ini seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 14
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TAHUN 2022 DAN 2021

ANGGARAN PERJENIS BELANJA	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pegawai	70.915.049.000,00	70.663.883.864	99,46%	55.028.210.000,00	61.922.780.014,00	99,35
Barang	272.490.913.000,00	254.963.922.766	93,61%	205.609.387.000,00	196.626.091.977,00	99,13
Modal	1.763.140.000,00	1.729.597.550	98,10%	4.339.869.000,00	9.287.669.944,00	99,95
Total Belanja	345.169.102.000,00	327.357.404.180	94,84%	264.977.466.000,00	262.836.541.935,00	99,19

Sumber: Aplikasi SAKTI, Desember 2022 (diolah)

GRAFIK 4
PERBANDINGAN PERSENTASE REALISASI TAHUN 2022 DAN 2021



Sumber: Aplikasi SAKTI, Desember 2022 (diolah)

Dari tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja tertinggi adalah belanja pegawai dengan realisasi 99,46% atau Rp70.663.883.864,00 (Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sedangkan belanja terendah adalah belanja barang dengan realisasi 93,61% atau Rp254.963.922.766,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Sedangkan rincian perbandingan realisasi anggaran tiap bulan tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.

TABEL 15
DATA PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PER BULAN TA 2022 DAN 2021

BULAN	REALISASI Rp	
	2022	2021
TOTAL ANGGARAN	345.169.102.000,00	264.977.466.000,00
JANUARI	9.983.670.709,00	7.381.421.309,00
FEBRUARI	22.461.615.661,00	21.996.913.375,00
MARET	46.318.518.903,00	44.526.912.284,00
APRIL	77.362.819.335,00	76.460.435.349,00
MEI	94.470.926.617,00	103.686.089.781,00
JUNI	126.094.525.127,00	127.250.798.271,00
JULI	149.928.934.320,00	143.006.196.392,00
AGUSTUS	178.520.018.293,00	157.917.620.611,00
SEPTEMBER	198.697.075.068,00	174.924.932.212,00
OKTOBER	219.504.287.095,00	24.095.044.925,00
NOVEMBER	257.605.120.205,00	292.647.701.000,00
DESEMBER	327.470.836.730,00	35.890.598.345,00

Sumber: Sistem Aplikasi SAKTI, Desember 2022 (diolah)

C. Analisa Kinerja

(1) Stakeholders Perspective

Stakeholder perspective memiliki bobot sebesar 15% dari target capaian total, yang terdiri dari 3 SS dan 3 IKU. Ketiga SS tersebut yaitu: 1) Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang mandiri dan berdaulat, 2) Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional, dan 3) Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur. Sedangkan ketiga IKU tersebut adalah: 1) Efektifitas Kepemimpinan Maritim, 2) PDB Maritim dan Indeks Daya Saing Global (IDSG).

a. SS 1: Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang mandiri dan berdaulat

Sasaran yang ingin dicapai dari SS 1 adalah kondisi Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang mampu berdiri di atas landasan alam dan budaya maritim yang mandiri dan memiliki kedaulatan penuh. Sasaran Strategis ini menggunakan indikator kinerja utama (IKU) Efektivitas Kepemimpinan Maritim.

1). IKU 1 Efektivitas Kepemimpinan Maritim

Efektivitas Kepemimpinan Maritim diharapkan dapat menjadi salah satu ukuran untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Nilai ini merupakan hasil dari penegakan kedaulatan maritim dan penguatan diplomasi Indonesia di bidang kemaritiman.

IKU ini mengalami perubahan dari nomenklatur yang ada di Renstra Kemenko Marves Tahun 2020-2024 yaitu Indeks Kepemimpinan Maritim. Perubahan nomenklatur mempertimbangkan bahwa parameter IKU tidak cukup kriteria untuk disebut indeks.

Penegakan kedaulatan maritim diwujudkan dengan adanya kepastian hukum wilayah Indonesia, terjaganya kepentingan Indonesia, terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim Indonesia. Selanjutnya penguatan diplomasi Indonesia di dunia Internasional diwujudkan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di Organisasi Internasional bidang kemaritiman dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional.

Penghitungan atas IKU ini pada tahun 2022 dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan dari tugas dan fungsi dari Kemenko Marves dalam bidang kedaulatan maritim dan energi. Capaian Tingkat Kedaulatan Maritim diperoleh berdasarkan capaian Tingkat Kepastian Kewilayahan (TKW), Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim (TKKM), dan Tingkat Keselamatan Maritim (TKM). Adapun formula Tingkat Kedaulatan Maritim dihitung dengan menggunakan:

$$\text{TKW (30\%)} + \text{TKKM (35\%)} + \text{TKM (35\%)} = \text{TINGKAT KEDAULATAN MARITIM}$$

Penjelasan dari masing-masing komponen penilaian sebagai berikut:

- Tingkat Kepastian Kewilayahan (TKW) yaitu terwujudnya kepastian hukum kewilayahan Indonesia dan terjaganya kepentingan nasional di luar yurisdiksi Indonesia. TKK ini dibentuk oleh 2 (dua) komponen yaitu Persentase Zona maritim dan regulasi yang telah ditetapkan dan Persentase posisi kepentingan Indonesia yang terakomodir di dalam regulasi perairan dan dasar laut internasional.
- Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim (TKKM) terbentuk dari persentase indikator yang mendukung antara lain peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan maritim, peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan antusias pada pekerjaan di sektor maritim.
- Tingkat Keselamatan Maritim (TKM) terbentuk oleh tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu: keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim.

Dari hasil perhitungan 3 komponen tersebut, selanjutnya dilakukan konversi untuk nilai Tingkat Kedaulatan Maritim sebagai berikut:

TABEL 16
KONVERSI NILAI TINGKAT KEDAULATAN MARITIM

PERSENTASE (%)	NILAI	KETERANGAN
$0 < x \leq 25$	1	Kurang Berdaulat
$25 < x \leq 50$	2	Cukup Berdaulat
$50 < x \leq 75$	3	Berdaulat
$x > 75$	4	Sangat Berdaulat

Efektivitas Diplomasi Maritim diukur dengan tingkat partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di organisasi internasional bidang kemaritiman, dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Selanjutnya, dilakukan konversi sehingga diperoleh nilai Indeks Kepemimpinan Maritim Indonesia.

TABEL 17
KONVERSI INDEKS KEPEMIMPINAN MARITIM INDONESIA

PERSENTASE	NILAI	KETERANGAN
$0 < x \leq 25$	1	Kurang Berdaulat
$25 < x \leq 50$	2	Cukup Berdaulat
$50 < x \leq 75$	3	Berdaulat
$x > 75$	4	Sangat Berdaulat

Capaian atas IKU Efektivitas Kepemimpinan Maritim tahun 2022 dengan realisasi 4 (Sangat Berdaulat) dari target ≥ 3 atau sebesar 100%. Capaian tersebut seperti di bawah ini:

TABEL 18
CAPAIAN KINERJA IKU EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN MARITIM TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 1					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Efektivitas Kepemimpinan Maritim	Low/Exact	≥ 3	4	100%
CAPAIAN (%)					100

Berdasarkan formulasi perhitungan pada manual Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, nilai Efektivitas Kepemimpinan Maritim didapat melalui penjumlahan dari 60% nilai Tingkat Kedaulatan

Maritim dan 40% nilai Efektivitas Diplomasi Maritim. Nilai Efektivitas Kepemimpinan Maritim yang didapat berdasarkan perhitungan pada nomor 2 adalah sebesar **85,48** dalam skala 100 atau sebesar **4 (Sangat Berdaulat)** dalam skala 5. Secara detail perhitungan atas capaian IKU ini terdapat pada lampiran 2 LKj ini. Perhitungan Efektivitas Kepemimpinan Maritim dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 19
PERHITUNGAN EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN MARITIM

INDIKATOR	TARGET	NILAI INDIKATOR	BOBOT	NILAI
Tingkat Kedaulatan Maritim	70	87.70	60%	52.62
Efektivitas Diplomasi Maritim	70	82.14	40%	32.86
				85.48

Adapun perhitungan Tingkat Kedaulatan Maritim adalah sebagai berikut:

TABEL 20
PERHITUNGAN TINGKAT KEDAULATAN MARITIM

INDIKATOR	SUMBER DATA	NILAI INDIKATOR	BOBOT	NILAI
Tingkat Kemanan dan Ketahanan Maritim	Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	92.08	35%	32.23
Tingkat Kepastian Wilayah Indonesia	Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	82.06	30%	24.62
Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia	Asisten Deputi Keselamatan Maritim	88.14	35%	30.85
NILAI TINGKAT KEDAULATAN MARITIM				87.70

Sedangkan perhitungan Efektivitas Diplomasi Maritim adalah sebagai berikut:

TABEL 21
PERHITUNGAN EFEKTIVITAS DIPLOMASI MARITIM

INDIKATOR	SUMBER DATA	NILAI INDIKATOR	BOBOT	NILAI
Partisipasi Aktif Indonesia dalam Forum Maritim Regional dan Global	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	99.86	60%	59.92
Penempatan Wakil Indonesia di Organisasi Internasional Bidang Kemaritiman	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	11.11	20%	2.22
Diterimanya Inisiatif dan Posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	100	20%	20
NILAI EFEKTIVITAS DIPLOMASI MARITIM				82.14

Adapun Partisipasi Aktif Indonesia dalam Forum Maritim Regional dan Global adalah sebagai berikut:

TABEL 22
PARTISIPASI AKTIF INDONESIA DALAM FORUM MARITIM REGIONAL DAN GLOBAL

NO.	FORUM KEGIATAN	KATEGORI	BENTUK KEGIATAN			TOTAL
			MENYELENGGARAKAN	MENGHADIRI	MASUKAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	AIS FORUM	3	0.33	0.33	0.33	0.99
2	BBNJ INTERSESSIONAL MEETING	2	-	0.5	0.5	1
3	HLP SOE	2	-	0.5	0.5	1
4	IMO SUB COMMITTEE ON IIIII	2	-	0.5	0.5	1
5	IMO COUNCIL DAN IMO ASSEMBLY	2	-	0.5	0.5	1
6	MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE (MEPC)	2	-	0.5	0.5	1
7	HUMAN ELEMENT, TRAINING AND WATCHKEEPING (HTW)	2	-	0.5	0.5	1
TOTAL POINT						6.99
NILAI						99.86%

Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Bentuk Kegiatan Partisip Indonesia yang telah ditetapkan}}{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Indonesia di Forum atau Kegiatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{6,99}{7} \times 100\% = 99,86\%$$

Penempatan Wakil Indonesia di Organisasi Internasional Bidang Kemaritiman adalah sebagai berikut:

TABEL 23
PENEMPATAN WAKIL INDONESIA DI ORGANISASI INTERNASIONAL BIDANG KEMARITIMAN

NO.	ORGANISASI INTERNATIONAL BIDANG KEMARITIMAN	POIN
1	INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION	1
2	INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY (ISA)	0
3	SECRETARIAT OF THE PACIFIC REGIONAL ENVIRONMENT PROGRAMME (SPREP)	0
4.	INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA)	0
5.	INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION (IOTC)	0
6.	COMMISSION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA (CCSBT)	0
7.	WESTERN AND CENTRAL PACIFIC FISHERIES COMMISSION (WCPFC)	
8.	INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION (IATTC)	0
9.	INTERNATIOAL COMMISSION FOT CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS (ICCAT)	0
TOTAL		1
NILAI		11.11

Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Penempatan Wakil Indonesia di Organisasi Internasional Bidang Kemaritiman}}{\text{Jumlah Organisasi Internasional Bidang Kemaritiman}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{9} \times 100\% = 11,11\%$$

Sebagai perbandingan tahun 2022 dan 2021 realisasi atas IKU tahun 2022 dan 2021 serta target akhir periode Renstra Kemenko Marves pada tahun 2024 dan target RPJMN 2022 dengan nilai ≥ 3 , seperti terlihat berikut ini.

TABEL 24
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU

CAPAIAN KINERJA SS 1							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		RPJMN 2022
			2022	2021	2022	2024	
1	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	Nilai	4	3	≥ 3	≥ 3	-

Seperti terlihat pada tabel di atas bahwa tercapainya target efektivitas kepemimpinan maritim pada tahun sebelumnya (2021) dapat ditingkatkan pada tahun 2022. IKU ini tidak ada didalam dokumen RPJMN, karena dihitung oleh internal Kemenko Marves yang melibatkan akademisi, pakar, dan praktisi. Hal ini menunjukkan keberhasilan Kemenko Marves dalam mendorong tercapainya kondisi Indonesia menjadi sebuah bangsa yang mampu berdiri di atas landasan alam dan budaya maritim dengan mandiri dan memiliki kedaulatan penuh. Ini artinya, negara mampu menguasai dan mengatur sumber daya maritim yang dimilikinya, mampu mengendalikan campur tangan asing dan memanfaatkannya untuk kemakmuran bangsa dan negara.

Beberapa kegiatan atau isu yang ditangani dan menjadikan *success story* pada tahun 2022 guna mendukung pencapaian efektivitas kepemimpinan maritim yaitu telah berpartisipasi dan sukses dalam berbagai forum internasional terkait kemaritiman diantaranya sebagai berikut:

1. Terlaksananya *Special Ministerial-CEOs meeting* bersama negara-negara berkembang dari Afrika, Amerika Selatan, dan Timur Tengah.
2. Tiga paket perjanjian Singapura-Indonesia yang telah lolos di parlemen yakni, *Flight Indonesia Information Region* (FIR), *Defence Cooperation Agreement* (DCA) atau Perjanjian Kerja sama Pertahanan dan *Treaty on Extradition* (Perjanjian Ekstradisi), ekstradisi buronan.
3. Penandatanganan batas maritim RI dan Vietnam di sela-sela kunjungan Presiden Vietnam ke Indonesia
4. Pertemuan Pakar (*Experts Meeting*) Tim Nasional BBNJ Indonesia secara *hybrid*.
5. Kemenko Marves memfasilitasi pelaksanaan rapat final posisi Pemerintah Republik Indonesia dan diproses sebagai Pedoman Delegasi Indonesia;
6. Seluruh wakil K/L dalam Tim Nasional menghadiri secara langsung di Markas Besar PBB di New York, pada saat pertemuan 5th IGC-BBNJ.

7. *Chair's conclusion of the 6th senior official meeting (som-6) of the Archipelagic And Island States (AIS) forum*

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

Faktor pendukung dari pencapaian IKU ini yaitu kondisi pandemi covid-19 sudah menjadi kondisi endemic sehingga sudah ditarik kembali kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, yang berdampak terlaksananya agenda-agenda kerja pada Tahun 2022. Faktor ini berdampak pada peningkatan total capaian kinerja sebesar 113,46%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yakni sebesar 109,26%. Peningkatan capaian kinerja sebesar 4,2%.

Kendala Pencapaian IKU

- 1) Perjanjian Kerjasama Indonesia-Singapura terkait Flight Information Region (FIR) adalah belum dapat berlaku selama belum diratifikasi oleh peraturan nasional kedua negara;
- 2) Adanya perubahan jadwal pelaksanaan KTT, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain di dalam AIS Forum dan rangkaian kegiatan pendukung lainnya di Indonesia.

Rencana Tindak Lanjut/Inovasi Tahun Mendatang

Rencana tindak lanjut atas pencapaian IKU ini pada tahun mendatang yaitu menginisiasi Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di Forum Internasional, sebagai berikut:

A. Forum IMO antara lain :

1. Mengusulkan perubahan masa jabatan pada Organisasi IMO guna menciptakan organisasi yang progresif.
2. Mengusulkan dilakukannya *impact Assesment* dalam perhitungan indikator intensitas karbon dalam pelayaran guna menciptakan aktivitas maritim yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Mengusulkan penyediaan sertifikat elektronik bagi pelaut untuk menunjang efektivitas aktivitas pelayaran yang moden.
4. Mengusulkan kemudahan dalam memperoleh sertifikat pelaut bagi para pelajar/mahasiswa bidang pelayaran.

B. Forum AIS antara lain :

1. Menegaskan kesungguhan untuk mempererat kerja sama dan melakukan kolaborasi sesuai area kerja sama AIS Forum.
2. Mendorong inovasi dan penguatan pembiayaan program kelautan berkelanjutan terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi biru guna mendukung kesejahteraan Bersama.
3. Menyatakan kesepahaman bersama, dan komitmen memperkuat kelembagaan kerja sama AIS Forum.
4. Menyetujui serta memberikan mandat kepada Indonesia untuk melaksanakan pertemuan pertama tingkat Kepala Negara dari forum negara-negara pulau dan kepulauan.

C. Forum *Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction* (BBNJ)

1. Frasa “archipelagic state” termuat dalam kelima pilar utama pembahasan *further refreshed text International Legally Binding Instrument BBNJ*
2. Forum menerima usulan untuk memuat dan mempertahankan frasa *adjacent coastal state* sebagai upaya perlindungan hak-hak negara pantai
3. Usulan untuk menggunakan frasa “fishing and fishing activities” pada bab terkait *Marine Genetic Resources*
4. Tim Nasional BBNJ, difasilitasi kementerian Luar Negeri, menyusun rencana pertemuan formal maupun informal dengan negara-negara peserta IGC-BBNJ yang teridentifikasi memiliki kesamaan kepentingan dan/atau pandangan dengan Indonesia.

D. Berdasarkan hasil dari *reviu* dan menjadi catatan oleh KemenPANRB, terhadap capaian IKU Efektifitas Kepemimpinan Maritim, dalam penghitungannya agar melibatkan pakar/praktisi/akademisi dalam bidang kedaulatan maritim dan energi yang kompeten sehingga datanya valid. Pada tahun 2023, Kemenko Marves akan menggunakan formulasi penghitungan IKU ini hasil dari kajian tim perumus yang terdiri dari pakar/praktisi/akademisi, yakni:

1. Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H, Laksamana Muda TNI (Purn)
(Akademisi Universitas Pertahanan)
2. Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.,
(Ahli Hukum Internasional Bidang Kemaritiman dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila)
3. Haris Nugroho, S.H., LL.M
(Executive Secretary International Office Universitas Pancasila)
4. I Made Andi Arsana, ST, ME, Ph.D,
(Akademisi Universitas Gadjah Mada)
5. Akhmad Solihin, S.Pi, M.H,
(Akademisi Institut Pertanian Bogor)

Data dukung atas pencapaian IKU Efektifitas Kepemimpinan Maritim terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

b. SS 2: Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional

SS 2 merupakan kondisi ketika pengelolaan semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan di daratan lahan atas yang menggunakan bahan baku dari wilayah pesisir dan lautan yang kuat sebagai penggerak perekonomian nasional telah terwujud. Perwujudan dari SS ini, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama PDB Maritim.

1) IKU 2 PDB Maritim

PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sementara ekonomi kemaritiman dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang secara langsung dan/atau tidak langsung terjadi di kawasan perairan (yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedamanan zona ekonomi eksklusif Indonesia, serta perairan lainnya termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), dan kegiatan di luar kawasan perairan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berasal dari perairan, serta kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan di perairan. Sehingga PDB Maritim adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercakup dalam ekonomi maritim. Data dan informasi statistik berkualitas mengenai kondisi dan kinerja sumber daya dibidang kemaritiman Indonesia digambarkan melalui indikator PDB Kemaritiman. Jika PDB merupakan alat ukur kinerja ekonomi, maka PDB Kemaritiman merupakan alat ukur yang secara khusus mengukur kinerja ekonomi pada sektor maritim. Indikator PDB Kemaritiman disusun berdasarkan prinsip neraca satelit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari neraca utama sebagai dasar penyusunan PDB.

Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dalam Penyusunan PDB Kemaritiman 2017-2021 sebagaimana tercantum pada:

- Nota Kesepahaman Nomor 4/NKB/MARVES/2022 dan Nomor 07/HK.610/NK/06/2022 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik di Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Perjanjian Kerja Sama Nomor 7/PKS/MARVES/2022 dan Nomor 24.07.22/HK.610/PSK/07/2022 tentang Penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) Kemaritiman. Tahun 2017, PDB Kemaritiman telah dirilis untuk periode 2010-2016.

Berbeda dengan PDB Kemaritiman sebelumnya, indikator untuk periode 2017-2021 didasarkan atas *framework sustainable* dengan berfokus pada bagian *Ocean Economy. Framework* tersebut merupakan rekomendasi internasional yang disusun oleh *Ocean Panel Experts dan Institutional Member of Ocean Accounts Partnership* bekerja sama dengan UN-ESCAP. Penyempurnaan pedoman yang digunakan merupakan suatu terobosan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola dan daya saing maritim Indonesia.

Penyusunan PDB Kemaritiman Indonesia didahului dengan penyusunan klasifikasi yang dapat menentukan cakupan dari PDB Kemaritiman. Dalam penyusunan PDB Kemaritiman Indonesia pada periode tahun 2017-2021, terdapat beberapa perbedaan dengan PDB Kemaritiman pada periode tahun 2010-2016. Klasifikasi untuk PDB Kemaritiman periode 2010-2016 yang telah dirilis pada tahun 2017 didasarkan pada UU 32/2004 tentang

Kelautan dan Dutch Maritime Cluster dimana terdapat 9 cluster dengan total cakupan 159 KBLI. Sementara itu, PDB Kemaritiman periode tahun 2017-2021 didasarkan pada *framework Ocean Accounts* tahun 2019 dimana tersusun 12 cluster dengan total cakupan 374 KBLI. Perbedaan ini disebabkan pada tahun penyusunan PDB Kemaritiman 2010-2016 belum terdapat *framework* internasional yang mendasari penyusunan PDB Kemaritiman, sedangkan penyusunan PDB Kemaritiman 2017-2021 menggunakan *framework* yang sudah terstandarisasi secara internasional.

Adapun cakupan 12 cluster kemaritiman berdasarkan aktivitas (KBLI Kemaritiman) dirinci sebagai berikut:

GAMBAR 7
CAKUPAN 12 CLUSTER KEMARITIMAN BERDASARKAN AKTIVITAS



Sumber: KBLI Kemaritiman, 2021

Pada Tahun 2022, PDB maritim ditargetkan sebesar 6,99. Angka ini ditetapkan dengan menggunakan pendekatan penghitungan yang dilakukan oleh BPS sebagai instansi resmi pemerintah melakukan perhitungan PDB maritim. PDB Kemaritiman tahun 2017-2021 menggunakan *framework* yang sudah distandarisasi secara internasional. Nilai nominal PDB Kemaritiman atas harga dasar berlaku selama kurun waktu 2017-2021 cenderung meningkat. Nilai tambah ekonomi kemaritiman pada tahun 2021 mencapai Rp1290.2 triliun atau sebesar 7,6% dibandingkan PDB Nasional. Realisasi capaian IKU 2 tahun 2022, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 25
CAPAIAN KINERJA IKU PDB MARITIM TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 2					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	PDB Maritim	Low/Proxy	6,99	7,6	108,73
CAPAIAN (%)					108,73

Berdasarkan tabel realisasi capaian di atas bahwa besaran PDB atas harga dasar berlaku ini memberikan gambaran tentang kontribusi ekonomi maritim terhadap perekonomian nasional. Kontribusi PDB Kemaritiman 2017 – 2021 terhadap PDB Nasional berada di kisaran 7,4% - 7,94%, dengan puncak pada 2018. Nilai PDB Kemaritiman meningkat dari tahun 2017-2019, namun turun di tahun 2020, dan kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 7,60 persen.

Jika dibandingkan dengan pergerakan nilai PDB Kemaritiman, pergerakan kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia lebih fluktuatif dibanding nilai PDB Kemaritiman Indonesia, hal ini seperti terlihat pada grafik berikut:

GRAFIK 5
NILAI PDB KEMARITIMAN (TRILIUN RP) & KONTRIBUSI PDB KEMARITIMAN (%) TAHUN 2017-2021



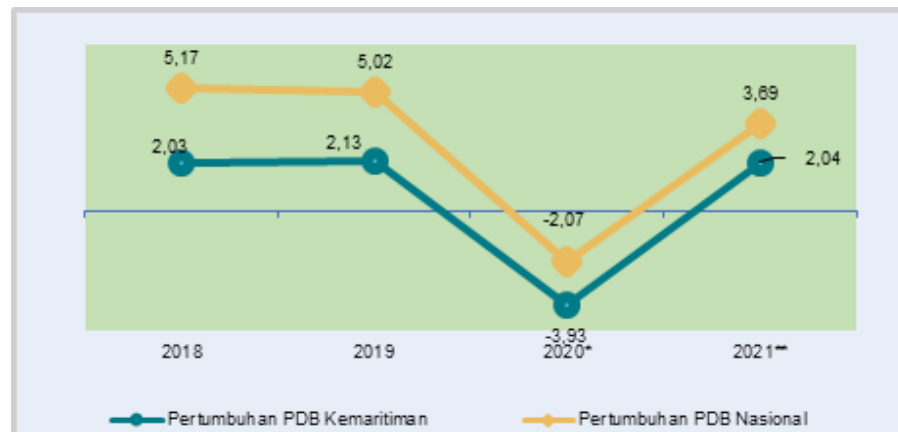
* : angka sementara

** : angka sangat sementara

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan dibidang maritim, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah laju pertumbuhan PDB Kemaritiman. Jika disandingkan dengan perekonomian nasional, laju pertumbuhan PDB Kemaritiman mengikuti tren pertumbuhan PDB Nasional.

Pada tahun 2018, laju pertumbuhan kemaritiman di Indonesia mencapai 2,03%. Akan tetapi, laju pertumbuhan PDB Kemaritiman Indonesia mengalami perlambatan hingga berkontraksi 3,93%. Hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 5,17% kemudian berkontraksi menjadi 2,07% pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 berdampak nyata bukan hanya untuk sektor maritim tetapi juga untuk seluruh sector ekonomi. Pada tahun 2021, seluruh sektor termasuk juga sektor maritim mengalami perbaikan. Laju pertumbuhan untuk PDB Kemaritiman tumbuh hingga 2,04% seiring dengan laju pertumbuhan nasional yang mencapai 3,69%.

GRAFIK 6
PERTUMBUHAN PDB KEMARITIMAN INDONESIA TAHUN 2018-2021 (%)



* : angka sementara

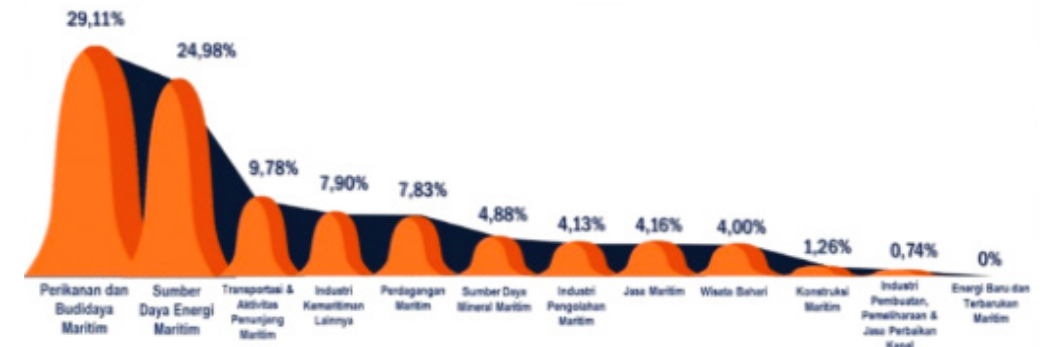
** : angka sangat sementara

Ket : angka sementara dan angka sangat sementara dapat dilakukan revisi t+2 sesuai dengan ketersediaan data

Selama kurun waktu 2017-2021, terdapat tiga *cluster* maritim yang secara konsisten berkontribusi dominan terhadap pembentukan PDB Kemaritiman. Ketiga *cluster* tersebut adalah perikanan dan budidaya maritim, sumber daya energi maritim, serta transportasi dan aktivitas penunjang maritim. Tahun 2017, sumber daya energi maritim menjadi kontributor tertinggi terhadap PDB Kemaritiman yaitu sebesar 27,90%; diikuti oleh perikanan dan budidaya maritim sebesar 25,98%, serta transportasi dan aktivitas penunjang maritim sebesar 9,46%. Sementara untuk *cluster* maritim lainnya berkontribusi sebesar 34,60%.

Seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, *cluster* perikanan dan budidaya maritim terus mengalami peningkatan hingga menjadi kontributor tertinggi terhadap PDB Kemaritiman sebesar 29,11% pada tahun 2021. Kontribusi sumber daya energi maritim terhadap ekonomi maritim turun menjadi 24,98% dan menempati peringkat kedua. *Cluster* transportasi dan aktivitas penunjang maritim tetap berada di peringkat ketiga dengan kontribusi 9,78% pada tahun 2021. Sedangkan untuk *cluster* maritim lainnya berkontribusi sebesar 34,90% untuk tahun 2021.

GRAFIK 7
CLUSTER MARITIM PEMBENTUKAN PDB KEMARITIMAN



Adapun perbandingan target realisasi tahun 2022 dan 2021 atas IKU PDB Maritim serta target sampai akhir Renstra Kemenko Marves tahun 2024 dan target RPJMN 2022 terlihat di bawah ini:

TABEL 26
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU PDB MARITIM

CAPAIAN KINERJA SS 2							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		
			2022	2021	2022	2024	RPJMN 2022
2	PDB Maritim	%	7,6	11,31*	6,99	7,80	7,20

*) Pada Tahun 2021, kondisi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung tidak memungkinkan bagi BPS untuk melakukan survey lapangan, sehingga nilai ekonomi maritim dihitung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pendekatan yang digunakan sama dengan yang dilakukan BPS namun dengan cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berbeda

Realisasi PDB Maritim Tahun 2022 melampaui target RPJMN 2022 sebanyak 0,4 poin. Artinya, kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional pada tahun mendatang dapat dipertahankan/ditingkatkan capaiannya. Belajar dari pengalaman pandemi Covid-19, Indonesia memerlukan *forward looking policy* yang lebih terukur, adaptif dan antisipatif dalam memfasilitasi sektor-sektor ekonomi kemaritiman untuk bisa berjalan lebih efektif dan efisien serta lebih memiliki ketahanan dalam menghadapi potensi krisis dimasa depan. Beberapa *cluster* kemaritiman berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan oleh Kemenko Marves diantaranya:

1. Perikanan Budidaya Maritim

Cluster ini menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap pembentukan PDB Kemaritiman di Indonesia. Kontribusi *cluster* ini terhadap perekonomian sektor maritim adalah 25,98% pada tahun 2017. Besaran kontribusi pada *cluster* ini terus meningkat hingga mencapai 30,13% pada tahun 2020 namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga mencapai 29,11%. Jika dilihat dari indikator laju pertumbuhan,

Perikanan dan Budidaya Maritim memiliki pola laju pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 2018, *cluster* ini mampu tumbuh mencapai 5,25% kemudian terus mengalami perlambatan hingga pada tahun 2020 mencapai 0,67%. Akan tetapi, laju pertumbuhan Perikanan dan Budidaya Maritim semakin membaik yang tumbuh hingga 6,16% pada tahun 2021. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja pada *cluster* ini adalah meningkatnya permintaan pasar luar negeri terhadap komoditas perikanan. Selain itu, berkembangnya platform e-Fishery yang mampu mendorong peningkatan usaha perikanan budidaya karena mempermudah pembudidaya memperoleh pakan ikan.

2. Sumber Daya Energi Maritim

Pada tahun 2017-2018, *cluster* ini menjadi kontributor terbesar terhadap pembentukan PDB Kemaritiman di Indonesia namun bergeser menjadi posisi kedua pada tahun 2019-2021. Kontribusi *cluster* ini terhadap perekonomian sektor maritim adalah 27,90% pada tahun 2017. Sementara kontribusi pada tahun 2021 sebesar 24,98% lebih rendah dibanding tahun 2017. Jika dilihat dari indikator laju pertumbuhan, *cluster* ini terus mengalami kontraksi pertumbuhan. Pada tahun 2018, *cluster* ini terkontraksi mencapai 3,06% kemudian terus mengalami perlambatan hingga pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 7,57%. Akan tetapi, laju pertumbuhan *cluster* ini mulai menunjukkan percepatan meskipun masih terkontraksi sedalam 3,99%. Salah satu faktor yang menyebabkan terkontraksinya pertumbuhan pada *cluster* ini adalah terjadinya penurunan produksi pertambangan minyak bumi akibat penurunan aktivitas operasional usaha hulu minyak dan gas.

3. Transportasi dan Aktivitas Penunjang

Kontribusi *cluster* ini terhadap perekonomian sektor maritim sebesar 9,46% pada tahun 2017. Besaran kontribusi pada *cluster* ini cukup berfluktuasi dimana pada tahun 2020 mencapai 9,78% pada tahun 2021. Jika dilihat dari indikator laju pertumbuhan, *cluster* ini memiliki pola laju pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 2018, *cluster* ini mampu tumbuh mencapai 7,60% kemudian terus tumbuh hingga tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020 laju pertumbuhan *cluster* ini justru terkontraksi hingga 8,05%. Pada tahun 2021, kinerja *cluster* ini semakin membaik ditunjukkan dengan laju pertumbuhan positif sebesar 3,65%. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja pada *cluster* ini adalah peningkatan jumlah penumpang dan barang yang diangkut serta peningkatan volume pengangkutan gas.

4. Perkembangan 9 (sembilan) Cluster Kontributor lainnya Terhadap PDB Kemaritiman Indonesia (Sumber Daya Mineral Maritim; Industri Pembuatan, Pemeliharaan Kapal; Energi Baru dan Terbarukan; Konstruksi Maritim; Wisata Bahari; Jasa Maritim; Industri Pengolahan Maritim; Industri Kemaritiman Lainnya; Perdagangan Maritim)

Perkembangan untuk 9 (sembilan) *cluster* PDB maritim lainnya, capaian kontribusi berkisar antara 0 s.d 7,90%. Ada 2 (dua) *cluster* dengan nilai kontribusi diatas 7% pada 2021, yaitu industri kemaritiman lainnya (7,90%) dan Perdagangan Maritim (7,83%). Terdapat 4 (empat) *cluster* dengan kontribusi masing-masing sebagai berikut: 4,88% untuk *cluster* Sumber Daya Mineral Maritim, *cluster* industri Pengolahan Maritim berkontribusi sebesar 4,13%, *cluster* Jasa Maritim dengan capaian 4,16% dan *cluster* Wisata Bahari menyumbang 4,00%.

Selanjutnya *cluster* konstruksi maritim menyumbang kontribusi 1,26%, dan 2 (dua) *cluster* terakhir dengan capaian dibawah 1%. *Cluster* tersebut adalah *cluster* Industri Pembuatan, Pemeliharaan & Jasa Perbaikan Kapal. Khusus untuk *cluster* Energi Baru dan Terbarukan Maritim belum bisa dihitung capaian kontribusi PDB maritim karena belum ada data terkait pembangkit listrik tenaga arus laut yang sampai saat ini masih belum ada pembangunannya.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU tahun 2022 ini sehingga bisa tercapai dan kontribusi PDB maritim atas PDB nasional, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan *Workshop* penyusunan metadata statistik ke seluruh *Stakeholder* terkait (pengampu data kemaritiman) dengan penyusunan PDB Kemaritiman pada bulan September-Oktober 2022
2. Tim metadata melakukan koordinasi dengan tim terkait, dalam rangka penyusunan Metadata Statistik Kegiatan (MSKeg), Metadata Statistik Variabel (MSVar) dan Metadata Statistik Indikator (MSInd) yang bertujuan untuk mendapatkan metadata statistik sesuai standar.
3. Berdasarkan rancangan tabulasi penyajian PDB Kemaritiman maka telah dilakukan pendampingan terhadap Tim Teknis Penyusunan PDB Kemaritiman agar metadata statistik yang disusun sejalan dengan standar data yang dibentuk yang dilakukan pembahasan pada bulan Oktober-Desember 2022.
4. Pada Desember 2022, Metadata Statistik sudah tersusun sesuai standar, namun belum di input ke dalam aplikasi INDAH oleh produsen data.

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

- Adanya Komitmen antara Kemenko Marves bersama dengan K/L terkait dan BPS untuk menghitung PDB Kemaritiman.
- Belajar dari pengalaman pandemi Covid-19, Indonesia adanya *forward looking policy* yang lebih terukur, adaptif dan antisipatif dalam memfasilitasi sektor-sektor ekonomi kemaritiman untuk bisa berjalan lebih efektif dan efisien serta lebih memiliki ketahanan dalam menghadapi potensi krisis dimasa depan.

Kendala Pencapaian IKU

Dalam penyusunan metadata statistik PDB Kemaritiman kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Sulitnya mengidentifikasi kegiatan statistik yang merupakan penghasil data terkait kemaritiman pada *Stakeholder* terkait, sehingga metadata statistik untuk data set yang digunakan dalam proses perhitungan untuk penyusunan PDB Kemaritiman saat ini belum sepenuhnya dilakukan.
2. Minimnya sosialisasi menyebabkan pemahaman walidata terhadap penyusunan metadata statistik kemaritiman masih terbatas, sehingga kegiatan sosialisasi ini perlu ditingkatkan dalam bentuk *Workshop* agar walidata atau peserta *Workshop* dapat lebih memahami bagaimana penyusunan metadata statistik.

Inovasi Pencapaian IKU

1. Membangun dan menyusun *Dashboard* Satu Data Kemaritiman Indonesia. Desain tersebut telah dikonsultasikan ke *Subject Matter* dan juga ke Kemenko Marves.
2. *Dashboard* sudah diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web INDAH dalam lingkungan development.

Rencana tindak lanjut tahun mendatang

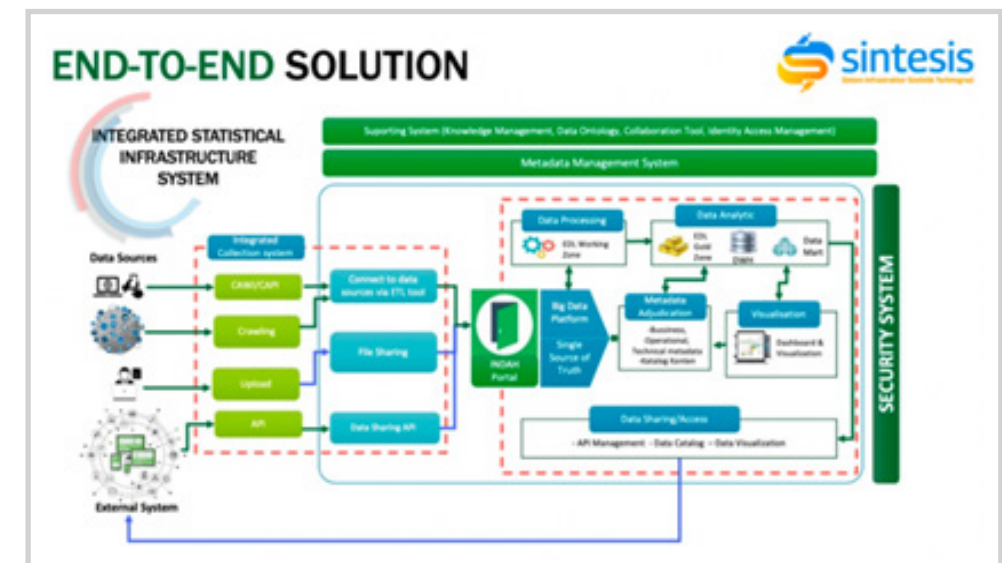
1. Akselerasi pertumbuhan sehingga kontribusi PDB Kemaritiman terhadap PDB Nasional bisa terus meningkat sesuai cita-cita menjadikan ekonomi kemaritiman sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.
2. Melakukan terobosan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan output kemaritiman sehingga harapannya dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi domestik.
3. Pengembangan hilirisasi, tidak hanya terbatas pada produk pertambangan, juga dari produk perikanan dan budidaya maritim yang sangat berpotensi sehingga dapat mendorong kinerja PDB Kemaritiman secara keseluruhan.
4. Peningkatan nilai tambah dari produk sektor primer dari hilirisasi, sehingga pemerataan investasi ke sektor kemaritiman dapat menjadi kunci.
5. Peningkatan pemahaman walidata dalam penyusunan metadata statistik pada tahun mendatang melalui kegiatan sosialisasi dalam bentuk *Workshop*.
6. Mengintegrasikan *Dashboard* satu data kemaritiman Indonesia dengan *Dashboard* oceans accounts (inisiatif yang dikerjakan dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan NORAD Norwegia).
7. Koordinasi lanjutan terkait tata Kelola data mulai dari proses akuisisi data, pengolahan, hingga data dapat divisualisasikan ke dalam *Dashboard*.

8. Pada tahun 2023 akan melakukan update penyusunan standar data dan metadata kemaritiman.
9. Penyempurnaan tata kelola *Dashboard* (akses) pada tahun 2023.
10. Penyempurnaan data dan metodologi PDB Kemaritiman, terutama dengan dukungan survei lapangan dan penyediaan data dari K/L terkait.

Success Story

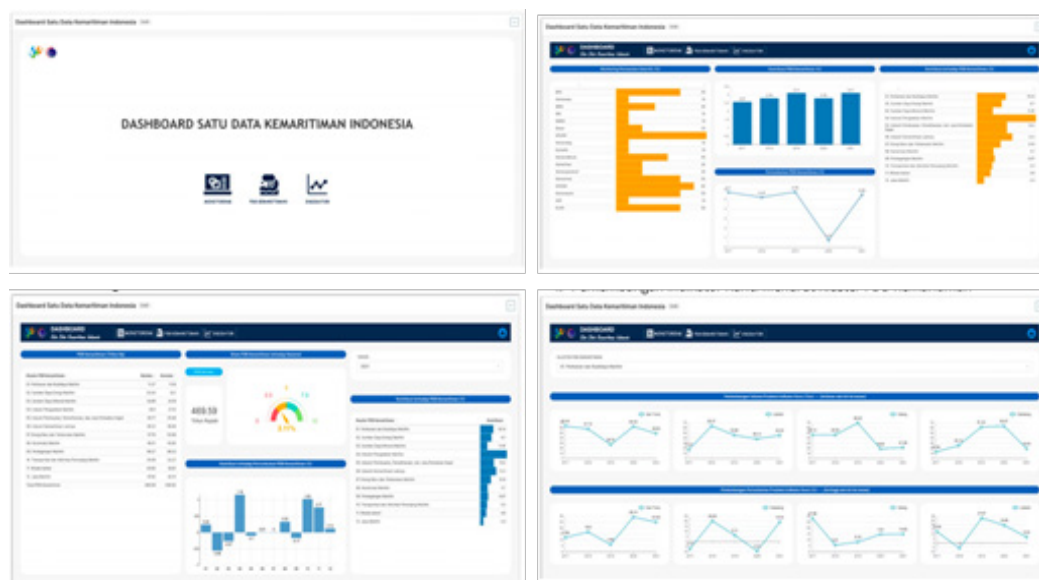
1. Setelah melalui berbagai proses, penyusunan PDB Kemaritiman Indonesia Tahun 2017-2021 telah berhasil diselesaikan sesuai target pada Desember 2022 dengan tabulasi yang dapat dilihat pada Buku Produk Domestik Bruto Kemaritiman Indonesia 2017 – 2022.
2. Penyusunan standar data kemaritiman telah berhasil disusun dan dapat dilihat pada lampiran Buku PDB Kemaritiman Indonesia 2017-2022.
3. Penyusunan metadata kemaritiman telah berhasil disusun, secara lengkap dapat dilihat pada link: <https://1drv.ms/x/s!AmjZFPnFPC3dqHEheZksUrx7eUe?e=42dKbt>
4. Perwujudan *Dashboard* Satu Data PDB Kemaritiman Indonesia juga telah selesai dibangun dan akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna pada platform Indonesia Data Hub (INDAH). Arsitektur aplikasi *Dashboard* satu data kemaritiman Indonesia sebagai berikut:

GAMBAR 8
ARSITEKTUR APLIKASI *DASHBOARD* SATU DATA KEMARITIMAN INDONESIA



Berikut hasil tangkapan layar dari aplikasi *Dashboard* Satu Data Kemaritiman Indonesia:

GAMBAR 9
DASHBOARD SATU DATA KEMARITIMAN INDONESIA



Sumber: Dashboard Satu Data Kemaritiman Indonesia

Data dukung atas pencapaian IKU PDB Maritim terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

c. SS 3: Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur

SS 3 bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi negara dengan jati diri yang kuat sehingga tangguh dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin mengglobal. Jati diri ini ditunjukkan dengan daya saing yang dimiliki sebagai salah satu sumber dari ketahanan negara dalam menghadapi tantangan dalam membangun peradaban bangsa. Peradaban dibangun melalui kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang unggul.

1) IKU 3 Indeks Daya Saing Global

Capaian SS ini diukur dengan IKU Nilai Indeks Daya Saing Global (IDSG) yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF). IDSG menggambarkan kemampuan negara untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi bagi warga negaranya. Hal ini tergantung dari seberapa produktif sebuah negara menggunakan sumber daya yang tersedia.

Menurut *Institute for Management Development* (IMD), daya saing adalah bagaimana suatu bangsa/negara menciptakan dan memelihara suatu lingkungan yang dapat mempertahankan daya saing perusahaan-perusahaannya. IMD fokus pada kinerja ekonomi (*Economic Performance*); efisiensi Pemerintah (*Government Efficiency*); efisiensi Bisnis (*Business Efficiency*); dan infrastruktur (*Infrastructure*). Nilai indeks ini terdiri dari dua belas pilar daya saing

yaitu: Kelembagaan; Infrastruktur yang tepat; Kerangka Ekonomi Makro yang stabil; Kesehatan yang baik dan Pendidikan dasar; Pendidikan dan pelatihan yang lebih tinggi; pasar yang efisien; pasar tenaga kerja yang efisien; pasar keuangan yang maju; kemampuan untuk memanfaatkan keuntungan dari teknologi yang sudah ada; ukuran pasar baik domestik dan internasional; memproduksi barang baru dan berbeda dengan menggunakan proses produksi yang paling canggih; dan inovasi.

TABEL 27
PERINGKAT INDEKS DAYA SAING GLOBAL TAHUN 2019 NEGARA ASEAN

WEF'S GLOBAL COMPETITIVENESS RANKING 2019			
COUNTRY	RANK	SCORE	DIFFERENCE FROM 2018
Singapore	1	84.8	+1
Malaysia	27	74.6	-2
Thailand	40	68.1	-2
Indonesia	50	64.6	-5
Brunei	56	62.8	+6
Philippines	64	61.9	-8
Vietnam	65	61.5	+10
Cambodia	106	52.1	+4
Lao PDR	113	50.1	-1

* Out of 141 economies. Myanmar not included in ranking

Sumber: World Economic Forum

Hingga saat ini, *World Economic Forum* (WEF) tidak melakukan pengukuran IDSG, sehingga capaian IDSG di Tahun 2022 didapatkan dari dokumen *World Competitiveness Booklet* yang dirilis oleh IMD (*Institute for Management Development*). Realisasi untuk IKU Indeks Daya Saing Global sebesar 63,29 dari target 64,6 dengan capaian sebesar 97,97%). Adapun realisasi atas IKU ini terlihat pada tabel berikut:

TABEL 28
CAPAIAN KINERJA IKU INDEKS DAYA SAING GLOBAL 2022

CAPAIAN KINERJA SS 3					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
3	Indeks Daya Saing Global	Low/Proxy	64,6	63,29*	97,97
CAPAIAN (%)					97,97

*Keterangan: Dokumen *World Competitiveness Booklet* yang dirilis oleh IMD, 2022

Peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global, yang dirilis pada bulan Juni tahun 2022 oleh *Institute for Management Development (IMD) World Competitive Year Book 2022* yaitu berada di posisi ke-44 dari posisi 37 di tahun 2021. Sebagai perbandingan peringkat IDSG Indonesia dengan negara Asia Tenggara tahun 2019 seperti tabel berikut ini.

TABEL 29
PERINGKAT INDEKS DAYA SAING GLOBAL INDONESIA TAHUN 2018-2019

TAHUN	PERINGKAT				
	IDSG	PERFORMA EKONOMI	EFISIENSI PEMERINTAHAN	EFISIENSI BISNIS	INFRASTRUKTUR
2018	43	27	N/A	N/A	59
2019	32	25	N/A	N/A	53
2020	40	26	N/A	N/A	55
2021	37	35	26	25	57
2022	44	42	35	31	52

Sumber: *Institute for Management Development (IMD) World Competitive Year Book 2022 (diolah)*

Laporan *IMD World Competitive Year Book 2022* menyebut, dari 63 negara yang dinilai oleh IMD, indeks daya saing Indonesia saat ini menjadi peringkat yang terendah sejak 5 tahun terakhir atau tahun 2018. Adapun peringkat tersebut diukur dari beberapa indikator, yaitu performa ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

Dibeberapa aspek seperti performa ekonomi, Indonesia mengalami penurunan ke posisi-42 dari peringkat sebelumnya yakni 35 pada tahun 2021. Sementara pada indikator efisiensi pemerintahan, urutan Indonesia menurun ke posisi 35 pada tahun 2022 dari peringkat ke-26 pada tahun 2021. Efisiensi bisnis juga merosot ke posisi 31 dari 25 di tahun 2021. Tekanan inflasi memiliki dampak yang lebih besar pada bisnis dan oleh karena itu pada daya saing ekonomi. Peringkat indikator infrastruktur Indonesia mengalami peningkatan dari posisi ke-57 pada tahun 2021 menjadi posisi ke-52 tahun ini. Sejak 5 tahun terakhir, posisi ini merupakan yang tertinggi yang dicapai Indonesia.

Aspek infrastruktur yang mengalami perbaikan peringkat hal ini mengindikasikan bahwa pembenahan ekosistem investasi yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya maksimal. Infrastruktur merupakan salah satu harapan penggerak ekonomi melalui terbukanya lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Sementara itu, infrastruktur juga berkontribusi dalam peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa, serta penurunan biaya logistik yang tentunya akan bermuara pada terciptanya efisiensi ekonomi. Tantangan global lainnya yang berdampak pada daya saing negara, diantaranya adanya invasi Ukraina oleh Rusia dan fokus terhadap pemulihan ekonomi.

GAMBAR 10
PERINGKAT IDSG INDONESIA TAHUN 2018 - 2022



Sumber : *worldcompetitiveness.imd.org*

Sementara itu, posisi pertama peringkat daya saing berusaha ini ditempati oleh Denmark dan kedua adalah Swiss. Negara tetangga Singapura berhasil naik ke peringkat ketiga, setelah tahun lalu merosot ke posisi lima. Hong Kong juga berhasil menempati posisi lima teratas, setelah mengalami guncangan di dalam negeri. Lebih lanjut, India berhasil menempati posisi 37 dan China di peringkat 17 setelah mengalami penurunan 1 peringkat akibat performa ekonominya yang tertekan. Berikut beberapa peringkat IDSG tahun 2022.

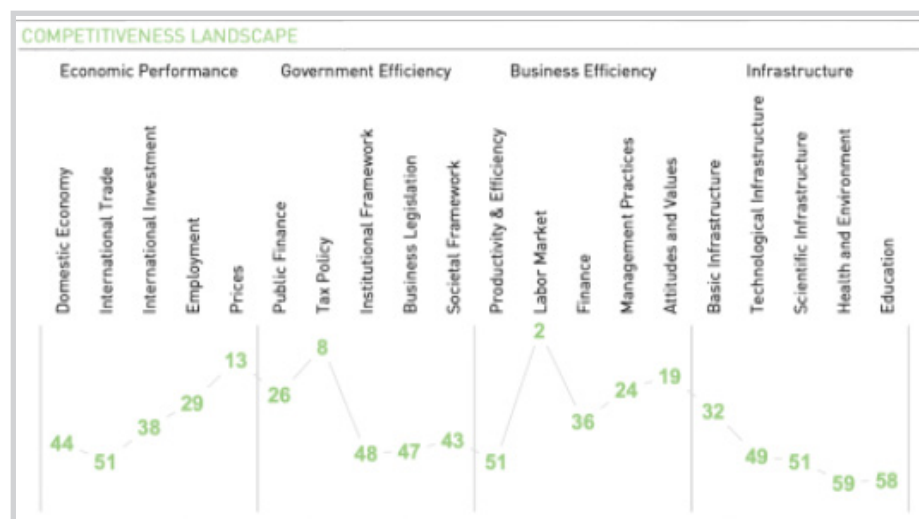
TABEL 30
PERINGKAT IDSG TAHUN 2022 DAN 2021 DAN (PERINGKAT INDONESIA 2016-2022)

PERINGKAT TAHUN 2022	NEGARA	PERINGKAT TAHUN 2021
1	Denmark	3
2	Swiss	1
3	Singapura	5
4	Swedia	2
5	Hongkong	7
6	Belanda	4
7	Taiwan	8
17	China	16
37	India	43
44	Indonesia	37

Sumber: *Institute for Management Development (IMD) World Competitive Year Book 2022 (diolah)*



GAMBAR 11
SKOR MASING-MASING VARIABEL IDSG INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: worldcompetitiveness.imd.org

Faktor turunnya daya saing Indonesia tahun 2022 juga disebabkan oleh ketidakpastian global khususnya krisis komoditas energi dan pangan yang telah mempengaruhi lonjakan inflasi yang tinggi di beberapa negara. Apabila risiko global tersebut tidak terjadi, daya saing Indonesia akan bergerak lebih tinggi karena didukung oleh ketahanan ekonomi yang tinggi yang tercermin dari aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang meningkat dan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2022.

Lima tantangan yang dihadapi Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan rilis dari IMD yaitu: 1) Menetapkan prioritas strategi pembangunan di era pasca-pandemi; 2) Mengawasi sektor keuangan agar lebih berperan aktif dalam pertumbuhan kredit; 3) Mendorong penerapan regulasi yang efektif yang menciptakan daya saing; 4) Penguatan kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan sebagai sumber daya saing masa depan; dan 5) Fokus pada cara untuk memecahkan masalah di bidang telekomunikasi dan energi terbarukan.

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi Tahun 2021 dan target capaian IKU sampai dengan akhir Renstra Kemenko Marves tahun 2024 dan target RPJMN 2022 seperti terlihat pada tabel berikut.

TABEL 31
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU

CAPAIAN KINERJA SS 3							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		RPJMN 2022
			2022	2021	2022	2024	
3	Indeks Daya Saing Global	%	63,29	64,6	64,6	66	-

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU IDSG (sektor infrastruktur) yaitu melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Pengendalian Percepatan Pengembangan Urban Transport Melalui Skema Kerjasama GII
2. Koordinasi lebih lanjut terkait pembangunan pelabuhan dan relokasi rencana Terminal LNG Sidakarya bersama dengan tim dari Gubernur Bali, Walikota Denpasar, Kemenhub, KKP, PLN, dan KLHK.
3. Koordinasi Percepatan Pembangunan Akses Jalan Tol
Koordinasi Penetapan Alur Baru
4. Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Dermaga Lantamal di Makassar
5. Koordinasi Percepatan Pembangunan Dermaga Multipurpose
6. Harmonisasi Ranperpres tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
7. Koordinasi Pembahasan Rperpres Rencana Tata Ruang

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah berkomitmen penuh untuk membantu memberikan dorongan kepada para *Stakeholder* dalam pencapaian IKU ini melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pembangunan Jalan Tol Jogja - Bawen
2. Pembangunan Jalan Tol Solo-YIA-Kulonprogo
3. Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang
4. Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi
5. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1
6. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2
7. Pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau (Ruas Bengkulu-Taba Penanjung)
8. Pembangunan Jalan Trans 3T Pulau Enggano
9. Pembangunan Jalan Trans 3T Pulau Biak
10. Pembangunan Jalan Trans 3T Kei Besar

Kendala dalam pencapaian IKU

Kemenko Marves telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mendukung pencapaian IKU IDSG dalam bidang infrastruktur, namun dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19, WEF (*World Economic Forum*) tidak melakukan pengukuran IDSG. Sehingga data yang digunakan sebagai capaian yakni sebagaimana yang tercantum dalam Laporan IMD "*World Competitive Year Book 2022*".

Rencana tindak lanjut/inovasi pencapaian IKU tahun mendatang

1. Pada tahun 2023 percepatan extraordinary dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada proyek-proyek strategis pemerintah khususnya PSN dan *Major Project* yang terdapat pada Lampiran II RPJMN 2020-2024.
2. Pada tahun mendatang indikator kinerja Indeks Daya Saing Global tidak digunakan lagi, hal ini sesuai dengan masukan dari KemenPANRB pada revaluasi SAKIP tahun 2022 dan hasil diskusi internal Kemenko Marves, bahwa untuk indikator yang berasal dari eksternal/lembaga lain dan data capaiannya sulit didapatkan dapat di drop dan diganti dengan indikator yang sesuai dengan bidang tugas dari Kemenko Marves.
3. Berdasarkan hasil pembahasan oleh internal Kemenko Marves, IKU IDSG pada tahun 2023 dan selanjutnya tidak dimasukkan menjadi IKU Menteri Koordinator. Adapun alasannya karena IKU yang dikeluarkan oleh Lembaga eksternal (*World Economic Forum/WEF*) kendali dari Kemenko Marves terlalu jauh. Hal lainnya yaitu nilai indeks ini dari 12 pilar penilaian, hanya ada 1 yang sesuai dengan bidang yang ada di Kemenko Marves yaitu pilar infrastruktur.

Success Story

Success story atas pencapaian IKU ini sepanjang tahun 2022, Kemenko Marves, telah berhasil mengkoordinasikan dan menyelesaikan beberapa *the bottlenecking* bidang infrastruktur dan transportasi, antara lain:

1. Untuk capaian PSN pada Perpres pengembangan wilayah (Perpres No. 87/2021): 2 (dua) proyek telah selesai dan beroperasi; 10 proyek dalam tahap konstruksi dengan rincian 8 (delapan) proyek ditargetkan selesai maksimal 2024 dan 2 (dua) proyek selesai melewati 2024; 52 proyek masuk dalam tahap penyiapan, dengan rincian; dan 106 proyek masih dalam tahap perencanaan dan diselesaikan melewati tahun 2024
2. Capaian PSN sektor jalan dan jembatan: ada 7 (tujuh) proyek jalan tol telah selesai tahun 2022.
Capaian PSN sektor bendungan: Ada 11 bendungan dan daerah irigasi yang beroperasi dan selesai tahun 2022.
3. Capaian PSN sektor transportasi: Ada 7 (tujuh) proyek sektor pelabuhan, bandara, dan kereta yang beroperasi dan selesai tahun 2022.
4. Penyelesaian pembebasan tanah yang menyebabkan mundurnya penyelesaian jalan tol.

Data dukung atas pencapaian IKU Indeks Daya Saing Global terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

(2) Customer Perspective

Customer perspective memiliki bobot sebesar 25% dari target capaian total. Terdiri dari 5 SS (SS 4 – 12) dan 8 IKU (IKU 4 – 11). Kelima SS tersebut yaitu: 1) Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional, 2) Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis, 3) Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia, 4) Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam, dan 5) Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara. Sedangkan ke-8 IKU tersebut adalah: 1) Indeks Kedaulatan Maritim, 2) Indeks Kinerja Logistik, 3) Indeks Disparitas Ekonomi, 4) Indeks Kesehatan Laut, 5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 6) PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa, 7) Tingkat Komponen dalam Negeri, dan Indeks Kapabilitas Inovasi.

a. SS 4: Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional

Tujuan yang ingin dicapai dari SS 4 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri mengelola lautnya serta aktif di forum internasional. Indeks ini menggambarkan keberhasilan upaya diplomasi melalui penguatan posisi Indonesia dalam perjanjian internasional dan partisipasi aktif di forum-forum internasional (*soft effort*), upaya penegakan keamanan dan keselamatan maritim serta penegakan kedaulatan secara efektif (*effective occupation*) sebagai upaya keras (*hard effort*). Peningkatan peran aktif Indonesia sebagai negara maritim di forum internasional melalui Persentase Inisiasi Gagasan Indonesia yang diterima di Level Internasional serta Persentase Penyelesaian Penanganan Pelanggaran terkait Kedaulatan maritim.

1) IKU 4 Tingkat Kedaulatan Maritim

Penetapan SS dan IKU ini memberikan kontribusi pada agenda pembangunan 7 RPJMN 2020-2024, yakni Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Lebih lanjut dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dengan meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global serta peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara. Selain itu, aspek ini merupakan turunan dari Agenda Pembangunan 1 RPJMN 2020-2024 yakni Memperkuat Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan dengan sasaran peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan.

Indikator ini diwujudkan dengan adanya kepastian hukum wilayah Indonesia, terjaganya kepentingan Indonesia, terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim Indonesia. IKU ini merupakan komponen dari penilaian atas capaian IKU 1 yaitu Efektifitas

Kepemimpinan Maritim pada SS1, sehingga metode penghitungan untuk pencapaian target kinerja sama dengan formula yang digunakan pada IKU 1 tersebut. Penilaian atas IKU tahun 2022 dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves yakni pada Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim, Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan, serta Asisten Deputy Keselamatan Maritim. Hal ini dilakukan atas dasar tugas dan fungsi Kemenko Marves pada bidang kedaulatan maritim dan energi.

a) Tingkat Kepastian Kewilayahan (TKK)

Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan kepastian akan kewilayahannya baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat secara umum merujuk pada regulasi yang tercantum dalam UNCLOS. Untuk itu Kemenko Marves berusaha untuk mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan percepatan penetapan atas titik dasar dan garis pangkal Indonesia, kepastian batas maritim Indonesia, potensi perluasan wilayah melalui ekstensi landas kontinen, serta terbentuknya regulasi nasional terkait penetapan kewilayahan.

b) Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim

Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim terbentuk dari persentase indikator yang mendukung antara lain persentase kualitas ketahanan maritim, persentase optimalisasi keamanan maritim, dan persentase keberhasilan pengelolaan keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

c) Tingkat Keselamatan Maritim

Perwujudan keselamatan maritim diukur dengan indikator Tingkat Keselamatan Maritim. Indikator tersebut adalah indeks komposit yang menggambarkan agregasi dari tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu: keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim.

Tingkat keandalan sarana bantu navigasi pelayaran mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja Pemerintah Indonesia dalam menjamin keselamatan melalui upaya penyelenggaraan keselamatan kenavigasian. Pada indikator tingkat keselamatan pelayaran outcome ideal yang ingin dicapai adalah semua kapal yang berlayar di perairan Indonesia berhasil berlayar dengan selamat atau tanpa insiden dari pelabuhan asal sampai dengan pelabuhan tujuan.

Outcome tersebut mencerminkan optimal atau tidaknya hasil dari upaya Pemerintah Indonesia dalam menjamin keselamatan pelayaran. Selanjutnya pada indikator tingkat penanganan

kecelakaan maritim mencerminkan optimal atau tidaknya peranan dan kehadiran Pemerintah Indonesia dalam menangani kondisi insiden/kecelakaan yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya terlepas dari semua upaya pencegahan yang telah dilakukan.

Adapun formulasi atas capaian dari IKU tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$TKW (30\%) + TKKM (35\%) + TKM (35\%) = \text{TINGKAT KEDAULATAN MARITIM}$$

Selanjutnya, dilakukan konversi sehingga diperoleh nilai Tingkat Kedaulatan Maritim.

TABEL 32
NILAI TINGKAT KEDAULATAN MARITIM

PERSENTASE (%)	NILAI	KETERANGAN
$0 < x \leq 25$	1	Kurang Berdaulat
$25 < x \leq 50$	2	Cukup Berdaulat
$50 < x \leq 75$	3	Berdaulat
$x > 75$	4	Sangat Berdaulat

Berdasarkan formulasi perhitungan pada manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kedaulatan Maritim, diperoleh :

$$\begin{aligned} &\text{Tingkat Kedaulatan Maritim} \\ &(30\% \times 82,06) + (35\% \times 92,08) + (35\% \times 88,14) = 87,70 \\ &= 4 \text{ (Berdaulat)} \end{aligned}$$

Perhitungan secara lengkap terdapat pada Lampiran 5 Lkj ini. Capaian IKU Tingkat Kedaulatan Maritim pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 33
CAPAIAN KINERJA IKU TINGKAT KEDAULATAN MARITIM TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 4					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
4	Tingkat Kedaulatan Maritim	Low/Proxy	3	4	120
CAPAIAN (%)					120

Tercapainya target SS 4 pada tahun 2022 ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu mengelola lautnya dan merupakan negara yang aktif di forum internasional. Nilai Tingkat Kepastian Kewilayahan (TKK) secara kuantitatif diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

TABEL 34
NILAI TINGKAT KEPASTIAN KEWILAYAHAN

NO	KOMPONEN	NILAI	BOBOT	TKK
1	Persentase Zona Maritim dan Regulasi yang telah ditetapkan	78	60%	82,06
2.	Persentase Posisi kepentingan Indonesia yang terakomodir di dalam regulasi perairan dan dasar laut internasional	89	40%	

Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut:

1. Persentase Zona maritim dan regulasi yang telah ditetapkan

TABEL 35
PERSENTASE ZONA MARITIM

NO	ZONA MARITIM	IDENTIFIKASI (0,3)	PENYUSUNAN (0,3)	PENETAPAN (0,4)	JUMLAH
1	Updating Titik Dasar/Garis Pangkal	0,3	0,3	0,25	0,85
2	Penetapan Teluk Yuridis dan Perairan Pedalaman	0,3	0,3	0,05	0,65
3	Penetapan Segmen Batas Maritim	0,3	0,3	0,25	0,85
4	Submisi Ekstensi Landas Kontinen Selatan Jawa dan Nusa Tenggara	0,3	0,3	0,05	0,65
5	Penetapan Regulasi Landas Kontinen	0,3	0,3	0,25	0,85
6	Penetapan Regulasi Nasional terkait KDLI	0,3	0,3	0,2	0,8
TOTAL					4,65

Formula Perhitungan : $\frac{\text{Zona Maritim dan Regulasi yang Telah Ditetapkan}}{\text{Jumlah Zona Maritim yang Perlu Ditetapkan}} \times 100\%$

KOMPONEN	JUMLAH	NILAI
Persentase Zona Maritim dan Regulasi yang telah ditetapkan	4,65	77,5%
Jumlah Zona Maritim yang Perlu Ditetapkan	6	

2. Persentase Posisi kepentingan Indonesia yang terakomodir di dalam regulasi perairan dan dasar laut internasional.

TABEL 36
PERSENTASE POSISI KEPENTINGAN INDONESIA

NO.	KEPENTINGAN INDONESIA	TERAKOMODIR	PROSES
1	<i>Interest of land-based producer</i>	1	
2	<i>The interest of developing state</i>	1	
3.	<i>Environmental protection</i>	1	
4.	<i>Area based management tool/ Regional Environmental Management Planning</i>	1	
5.	<i>Adjacency</i>		1
6.	<i>Access and Benefit Sharing</i>	1	
7.	<i>The interest of developing state</i>	1	
8.	<i>Fish as MGR</i>		0,5
9.	<i>Archipelagic state</i>		0,5

Formula Perhitungan : $\frac{\text{Posisi Kepentingan Indonesia yang Terakomodir}}{\text{Jumlah Posisi Dasar Indonesia}} \times 100\%$

KOMPONEN	JUMLAH	NILAI
Posisi Kepentingan Indonesia yang Terakomodir	8	88,8%
Jumlah Posisi Dasar Indonesia	9	

Nilai Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

TABEL 37
NILAI TINGKAT KEAMANAN DAN KETAHANAN MARITIM

NO	KOMPONEN	NILAI	BOBOT	TKKM
1	Persentase kualitas ketahanan maritim	95	33%	92,08
2.	Persentase optimalisasi keamanan maritim	93,75	33%	
3	Persentase keberhasilan pengelolaan keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	87,5	33%	

Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut:

1) Persentase kualitas ketahanan maritim

TABEL 38
PERSENTASE KUALITAS KETAHANAN MARITIM

NO.	ASPEK KETAHANAN MARITIM	YANG DIKOORDINASIKAN			JUMLAH
		PENINGKATAN KAPASITAS SDM (0.35)	EVALUASI IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL (0.30)	KERJA SAMA (NASIONAL/ REGIONAL/ GLOBAL) (0.35)	
1	Sumber daya pesisir dan kelautan berkelanjutan	0.35 Launching Blue Finance Accelerator Konsultasi Program Pembangunan Biru Indonesia X ASSIST UNDP	0.30 International Conference on Shipping Decarbonization in Indonesia	0.35 • Minutes of Meeting Penyelenggaraan BMD Indonesia Prancis • Keikutsertaan Indonesia pada HLPSOE	1
2	Perlindungan lingkungan kelautan (konservasi dan pelestarian)	0.35 <i>Penyelenggaraan Southeast Asia Forum on Sustainable Capture Fisheries (ASEAF-SFC)</i>	0.30 • Rapat Finalisasi National Action Plan Glolitter • Rapat Koordinasi Hibah Glolitter	0.35 • MoU Kerjasama <i>Sea Cleaner</i> • Rapat Terbatas ATSEA • Rencana Operasi Kapal Mobula 8 dan Kunjungan tinjauan Kapal Mobula 8	1
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam konteks ketahanan maritim	0.35 Submisi Keikutsertaan Indonesia pada Glolitter	0.15 Rapat Koordinasi Tindaklanjutan Usulan Indonesia dalam Menyusun Regional <i>Convention on the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region in the Arafura and Timor Sea</i>	0.35 <i>4th ASEAN India Workshop on Blue Economy</i>	0.85
TOTAL					2.85

Pedoman pemberian nilai:

- Kegiatan berkaitan erat untuk mengoptimalkan aspek = nilai penuh
- Kegiatan berupa supporting untuk mengoptimalkan aspek = nilai setengah penuh
- Kegiatan yang dilakukan tidak berkaitan = 0

Persentase Kualitas Ketahanan Maritim

$$= \frac{\text{Aspek Ketahanan Maritim yang Dikoordinasikan}}{\text{Jumlah Aspek Ketahanan Maritim}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.85}{3} \times 100\%$$

$$= 95\%$$

2) Persentase Optimalisasi Keamanan maritim

TABEL 39
PERSENTASE OPTIMALISASI KEAMANAN MARITIM

NO.	ASPEK PENDUKUNG KEAMANAN MARTIM	YANG TELAH DIOPTIMALKAN			IMPLEMENTASI REGULASI (0.25)	JUMLAH (1)
		PENINGKATAN KAPASITAS SDM (0.25)	EVALUASI IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL (0.25)	KERJA SAMA (NASIONAL/ REGIONAL/ INTERNASIONAL) (0.25)		
1	Penanganan dan pencegahan potensi pelanggaran di pelabuhan	0.25 Draf Protokol Keamanan data dalam Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut	0.125 Rapat Pembubuhan Paraf SOP Penegakan Hukum di Laut	0.25 • Penyelenggaraan API Hub sebagai Saran Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut • Rapat Monev Pertukaran data dan informasi	0.25 Penyelenggaraan FGD Keamanan Pelabuhan dari Ancaman Terorisme	0.875
2	Penanganan dan pencegahan potensi pelanggaran di laut	0.25 • Laporan Penyelenggaraan Pelatihan user Platform IORIS Crimario	0.25 • FGD Keamanan dan Ketahanan Kabel Bawah Laut	0.25 • Penandatanganan MoU Kerjasama Trial Platform IORIS dalam Pengawasan laut • Rapat koordinasi Pemanfaatan Satelit ICEYE untuk pengawasan laut	0.25 • Penyelenggaraan API Hub sebagai Saran Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum diLaut	1

NO.	ASPEK PENDUKUNG KEAMANAN MARTIM	YANG TELAH DIOPTIMALKAN			IMPLEMENTASI REGULASI	JUMLAH
		PENINGKATAN KAPASITAS SDM (0.25)	EVALUASI IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL (0.25)	KERJA SAMA (NASIONAL/ REGIONAL/ INTERNASIONAL) (0.25)		
		Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Area Admin Platform IORIS Crimario	Laporan <i>Enforcement Dialogue</i> (MLED) dan <i>Contact Group on the Sulu and Celebes Seas</i> (CGSCS)	Rapat Penyerahan API Hub dari UNODC ke Pemerintah Indonesia	Kepmenko Polhukam No. 55 tahun 2022 Keterlibatan dalam Forum Keamanan dan Penegakan Hukum di wilayah Perairan Indonesia dan I yah Yurisdiksi Indonesia sebagai tindaklanjut IPP 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Penegakan Hukum di wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	
TOTAL						1.875

Pedoman pemberian nilai:

- Kegiatan berkaitan erat untuk mengoptimalkan aspek = nilai penuh
- Kegiatan berupa supporting untuk mengoptimalkan aspek = nilai setengah penuh
- Kegiatan yang dilakukan tidak berkaitan = 0

Persentase Optimalisasi Keamanan Maritim

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Aspek Keamanan Maritim yang telah Dioptimalkan}}{\text{Jumlah Aspek Pendukung Keamanan Maritim}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.875}{2} \times 100\% \\
 &= 93,75\%
 \end{aligned}$$

3) Persentase Keberhasilan Pengelolaan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

TABEL 40
PERSENTASE KEBERHASILAN PENGELOLAAN KEAMANAN DAN KETAHANAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

NO.	ASPEK KEAMANAN DAN KETAHANAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	YANG DIKOORDINASIKAN			EVALUASI IMPLEMENTASI PRODUK HUKUM (0.25)	JUMLAH (1)
		KETERLIBATAN PEMDA (0.25)	KELOMPOK MASYARAKAT WP3K (0.25)	PRODUK HUKUM (0.25)		
1	Fasilitas pelayanan dasar, sosial dan ekonomi	0.25 Laporan Rapat Pelindungan dan Kesejahteraan Awak Kapal Perikanan	0.25 Laporan SAFE <i>Seas Project Close</i> (Penyelenggaraan Fisher Center di Bitung dan Tegal oleh masyarakat lokal)	0.25 Draf Kepmenko tentang Harmonisasi dan Koordinasi Peraturan Pekerja Sektor Perikanan khususnya yang bekerja di atas kapal ikan	0.25 Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Pekerja Sektor Perikanan khususnya yang bekerja di atas kapal ikan	1
2	Ketahanan ekonomi lokal	0.25 <i>Focus Group Discussion : Seas Labour Conference</i>	0.25 - Laporan FGD Membangun Konsep Ketahanan Maritim Indonesia di WP3K - Laporan Kunjungan Rencana Peninjauan Pelindungan Awak Kapal Perikanan	0.25 MOU Kerjasama <i>SeaCleaner</i>	0.25 Laporan Pertemuan <i>Lunch Meeting</i> pembahasan Pelindungan Awak Kapal Perikanan	1

NO.	ASPEK KEAMANAN DAN KETAHANAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	YANG DIKOORDINASIKAN			JUMLAH
		KETERLIBATAN PEMDA	KELOMPOK MASYARAKAT WP3K	PRODUK HUKUM	
		(0.25)	(0.25)	(0.25)	(1)
3	SDM terampil di sektor maritim dalam konteks Pengawasan Keamanan WP3K	0.125 Laporan Observasi Inspeksi Bersama di Provinsi Sulawesi Utara (Implementasi pelatihan inspeksi bersama oleh FORDA PAKP)	0.25 Rakor Optimalisasi Pokmaswas	0.25 - Laporan SAFE Seas Project Close - Laporan Observasi Inspeksi Bersama di Provinsi Sulawesi Utara (Implementasi SK Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 117 Tahun 2020 tentang Pembentukan FORDA PAKP Sulawesi Utara)	0.625
TOTAL					2.625

Pedoman pemberian nilai :

- Kegiatan berkaitan erat untuk mengoptimalkan aspek = nilai penuh
- Kegiatan berupa supporting untuk mengoptimalkan aspek = nilai setengah penuh
- Kegiatan yang dilakukan tidak berkaitan = 0

Persentase Keberhasilan Pengelolaan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Aspek Keamanan dan Ketahanan WP3K yang Dikoordinasikan}}{\text{Jumlah Aspek Keamanan dan Ketahanan WP3K}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.625}{3} \times 100\% \\
 &= 87,5\%
 \end{aligned}$$

Perhitungan Tingkat Keselamatan Maritim hasil agregasi dari tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu: keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan

maritim. Tahun 2022 diperoleh angka Tingkat Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebesar 94,44%, angka Tingkat Keselamatan Maritim sebesar 99,98% , dan angka Tingkat Penanganan Kecelakaan Maritim sebesar 70%. Dengan demikian angka Tingkat Keselamatan Maritim dihitung sebesar:

$$\begin{aligned}
 \text{TKM} &= \frac{\%B1 + \%B2 + \%B3}{3} \\
 \text{TKM} &= \frac{94,44 + 99,98 + 70}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{TKM} &= \frac{264,42}{3} \\
 \text{TKM} &= 88,14
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data-data di atas, perolehan nilai Tingkat Kedaulatan Maritim (TKM) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{TKM} &= 30\% \text{ TKW} + 35\% \text{ TKKM} + 35\% \text{ TKM} \\
 &= 30\%.82,06 + 35\%.92,08 + 35\%.88,14 = 87,70 \approx \\
 &\quad \mathbf{4 \text{ (Sangat Berdaulat)}}
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, dilakukan konversi sehingga diperoleh nilai Tingkat Kedaulatan Maritim sebesar 4.

Adapun perbandingan capaian indeks ini antara tahun 2022 dan tahun 2021 serta target akhir Renstra Kemenko Marves tahun 2024 dan target RPJMN 2022 seperti terlihat berikut:

TABEL 41
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU INDEKS KEDAULATAN MARITIM

CAPAIAN KINERJA SS 3							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		
			2022	2021	2022	2024	RPJMN 2022
3	Indeks Kedaulatan Maritim	Nilai	4	3	3	3	-

IKU ini tidak ada didalam dokumen RPJMN, karena dihitung oleh internal Kemenko Marves yang melibatkan akademisi, pakar, dan praktisi. Beberapa kegiatan atau isu yang ditangani sepanjang tahun 2022 yang mendukung pencapaian tingkat kedaulatan maritim, Kemenko Marves telah melaksanakan pertemuan maupun tindakan-tindakan diantaranya sebagai berikut:

1. Kemenko Maritim mendorong Pemerintah Indonesia dalam forum pembentukan regulasi internasional yang mengatur pemanfaatan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi Internasional (IGC-BBNJ) telah menyampaikan posisi dasar Indonesia meliputi perhatian khusus terhadap kriteria negara kepulauan dan berkembang, memperhatikan dampak yang akan diterima oleh negara pantai yang berdekatan

dengan wilayah eksploitasi, perhatian terhadap kesetaraan akses dan *benefit sharing*, dan masuknya ikan dalam kriteria sumber daya genetik.

2. *Workshop Platform IORIS untuk Meningkatkan Sistem Pengawasan Maritim dan Maritime Domain Awareness Level Area Admin.*
3. Koordinasi Penyampaian Informasi Perencanaan Tata Ruang Laut Kepada IOC- UNESCO.
4. Koordinasi Perlindungan Pelabuhan di Indonesia dari Ancaman Serangan Teroris.
5. Koordinasi Penanganan Kasus 5 ABK Indonesia kapal UNIPROFIT yang terlantar di Taiwan.
6. Koordinasi Penanganan Kasus 8 ABK WNI Kapal SEA BISE yang terlantar di Dubai.
7. Koordinasi Penyusunan *National Action Plan* dan Hibah Langsung *Glolitter Partnership Program*.
8. *Sinkronisasi Fair Seas Labour Conference (SEA Forum for Fishers).*
9. Koordinasi Operasi Kapal Mobula 8 oleh *The Sea Cleaners* di Perairan Bali.
10. Sinkronisasi *Workshop* EU-Crimario terkait Platform IORIS.
11. Konsolidasi Penyampaian Presentasi Submisi Parsial Ketiga Landas Kontinen Ekstensi Segmen Barat Daya Sumatera dan Penyerahan Dokumen Submisi Parsial Keempat Landas Kontinen Ekstensi Segmen Selatan Jawa dan Selatan Nusa Tenggara kepada UN-CLCS di New York.

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

Faktor pendukung dari pencapaian IKU Tingkat Kedaulatan Maritim tahun 2022 adalah Pandemi Covid-19 sudah menjadi endemi dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sudah tidak diberlakukan, sehingga kegiatan yang menunjang nilai Tingkat Kepastian Wilayah, Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim serta Tingkat Keselamatan Maritim dengan persentase dapat dilaksanakan yakni 87,70% dari 100 yang selanjutnya, dilakukan konversi sehingga diperoleh nilai Tingkat Kedaulatan Maritim sebesar 4 (Sangat Berdaulat).

Kendala Pencapaian IKU

- 1) Hasil monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia menunjukkan bahwa penginputan pada Aplikasi SISMONEV KSP pelaporan telah dilakukan K/L terkait namun masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan dalam pelaporan tersebut;
- 2) Keputusan Republik Indonesia terhadap Peta Penetapan Batas Landas Kontinen Ekstensi Segmen Selatan Jawa dan Selatan Nusa Tenggara yang di berikan pada UN-CLCS PBB di New York harus Merujuk ketentuan aturan dan prosedur UNCLCS, serta jumlah antrean submisi yang ada saat ini, maka seluruh proses pengkajian

hingga diterbitkannya rekomendasi oleh UNCLCS dapat memakan waktu hingga lebih dari sepuluh tahun.

- 3) Adanya Penyelarasan Peraturan Undang-Undang Nasional Bidang Maritim dan Energi yang dikawal oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi antara lain RPP Keamanan Laut, Rperpres RAN Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan, Rperpres Jaknas KKPH, RUU Pengesehan Perjanjian antara RI-Singapura tetang Ekstradisi Buronan, RPP Sumber Daya Air (RPP SDA), Koordinasi Penyusunan RUU Landas Kontinen (DPR) dan Ratifikasi FIR Indonesia-Singapura;
- 4) Adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2022 sebanyak Dua *Cluster*, antara lain:
 - *Cluster* Sumber Daya Energi Maritim terkait Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas yaitu belum adanya inisiasi pembentukan regulasi terkait penerapan Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia dari Kemenko Marves dengan Kementerian teknis terkait, kemudian penerapan CCS di luar WK Migas serta perizinan kegiatan oleh pengembang CCS selain Kontraktor Migas Akomodasi sumber CO2 yang berasal dari industri lain di luar wilayah operasi migas serta adanya peluang kerjasama internasional dalam skema emisi karbon termasuk sertifikasi perdagangan karbon.
 - *Cluster* Energi Baru dan Terbarukan Maritim yaitu dari 12 PSEL yang ditangani Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 2022 menunjukkan ada tiga PSEL yang belum mencapai tahap lelang, lima PSEL sudah mencapai tahap lelang, satu PSEL sudah tahap pendanaan, dua PSEL sudah sampai tahap kontruksi sebesar 78% dan satu PSEL yang meminta meminta difasilitasi pembangunan pengolah sampah dengan teknologi RDF (*Refused Derived Fuel*) dan pembangunan TPS 3R.

Sedangkan Pengembangan Ekonomi Maritim Berbasis Energi Terbarukan (REBED) pada daerah Belitung memerlukan bantuan hibah perahu pariwisata tenaga listrik untuk Kawasan Mangrove Kuale-Sijuk, namun tidak bertahan lama beroperasi karena permasalahan pada baterai storage-nya.

Rencana Tindak Lanjut Tahun Mendatang

1. Percepatan pengesahan Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pelaporan dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 guna mengakomodir atau menindaklanjuti permohonan dari K/L terkait penyesuaian-penyesuaian rencana aksi yang ada.
2. Membentuk Kerjasama dalam bentuk MoU dengan entitas luar negeri untuk pengembangan Maritime Domain Awareness (MDA).

3. Kemenko Marves mendorong Pemerintah RI untuk meratifikasi ketiga perjanjian (FIR, DCA, Ekstradisi) yang telah disepakati Indonesia dan Singapura sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Kemenko Marves mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan penyelenggaraan HLM AIS Forum pada tahun 2023 sebagai bentuk perwujudan peran aktif dan keberlanjutan komitmen Indonesia dalam AIS Forum serta upaya pembangunan citra dan legitimasi kepemimpinan dan diplomasi maritim Indonesia pada tingkatan global demi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
5. Kemenko Marves mendorong terbitnya turunan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
6. Kemenko Marves mendorong Pemerintah Indonesia menyiapkan bahan presentasi untuk submisi segmen selatan Jawa – Nusa Tenggara, dan menyempurnakan dokumen tambahan hasil dari pengolahan survei di area of interest akan dipresentasikan kepada UN-CLCS pada masa sidang UN-CLCS ke 57 di tahun 2023.
7. Selain melakukan berbagai langkah strategis dalam memastikan wilayah kedaulatan dan wilayah berdaulat, guna menjaga kepentingan Indonesia di dunia internasional, Kemenko Marves mendorong Pemerintah Indonesia dan berperan aktif mengkoordinasikan diberbagai forum kemaritiman regional dan global berupaya agar regulasi yang terbentuk dari berbagai forum tersebut dapat mengakomodir kepentingan nasional.
8. Berdasarkan hasil dari reviu dan menjadi catatan oleh KemenPANRB, terhadap capaian IKU Efektifitas Kepemimpinan Maritim, dalam penghitungannya agar melibatkan pakar/praktisi/akademisi dalam bidang kedaulatan maritim dan energi yang kompeten sehingga datanya valid. Pada tahun 2023, Kemenko Marves akan menggunakan formulasi penghitungan IKU ini hasil dari kajian tim perumus yang terdiri dari pakar/praktisi/akademisi, yakni:
 - a. Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H, Laksamana Muda TNI (Purn)
(Akademisi Universitas Pertahanan)
 - b. Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.,
(Ahli Hukum Internasional Bidang Kemaritiman dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila)
 - c. Haris Nugroho, S.H., LL.M
(Executive Secretary International Office Universitas Pancasila)
 - d. I Made Andi Arsana, ST, ME, Ph.D,
(Akademisi Universitas Gadjah Mada)
 - e. Akhmad Solihin, S.Pi, M.H,
(Akademisi Institut Pertanian Bogor)

Success story

Success story atas pelaksanaan dari IKU ini, atas inisiasi dari Kemenko Marves yaitu pada tanggal 22 Februari 2022 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Rancangan Perpres telah disusun dan dikoordinasikan bersama K/L lainnya oleh Kemenko Marves sejak tahun 2021.

Data dukung atas pencapaian IKU Indeks Kedaulatan Maritim terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

b. SS 5 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis

Tujuan dari SS 5 yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan menurunkan biaya pengiriman barang, memangkas disparitas harga bahan pokok antar wilayah, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

Hal ini dapat dilaksanakan diantaranya dengan meningkatkan konektivitas dan kinerja logistik yang akan menjamin kelancaran arus barang. Kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui strategi:

- 1) Menurunkan biaya logistik nasional yang memperlancar arus barang dan berdampak pada pemerataan
- 2) Menyediakan Infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah

Representasi pelaksanaan target SS.5 dilakukan melalui berbagai bidang kemaritiman dengan fokus pada penanganan program Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi serta program Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sasaran strategis 5 (SS.5) dijabarkan dengan 2 indikator kinerja, yaitu; Indeks Kinerja Logistik dan Indeks Disparitas Ekonomi. Capaian kedua indikator kinerja ini pada Tahun 2022 sebagai berikut:

TABEL 42
CAPAIAN KINERJA IKU INDEKS KINERJA LOGISTIK DAN INDEKS DISPARITAS EKONOMI TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 5					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
5	Indeks Kinerja Logistik	Low/Proxy	3,3	3,15	95,45
6	Indeks Disparitas Ekonomi	Low/Exact	~0,17	-0,129	100
CAPAIAN (%)					97,73

1) IKU 5 Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Index/LPI)

Indeks Kinerja Logistik (*Logistic performance Index/LPI*) merupakan alat perbandingan interaktif untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kinerja dalam logistik perdagangan. LPI merupakan indeks kinerja logistik negara-negara di dunia. Kinerja logistik pada tingkat makro atau nasional dievaluasi menggunakan LPI (*Logistics Performance Index*) yang dikeluarkan oleh *World Bank* yang dirilis per dua tahun sekali.

Sistem logistik yang efektif dan efisien tidak hanya menjadi ujung tombak pembangunan industri dan perdagangan nasional namun juga sebagai daya tarik investasi asing. Indeks kinerja logistik merupakan indeks yang dihitung untuk mengetahui permasalahan logistik (*bottleneck logistics*) dalam pengiriman barang antar pulau dan membandingkan indikator daya saing perdagangan antar pulau, khususnya biaya dan waktu antar rute-rute tertentu. Dasar penilaian LPI menggunakan 6 dimensi perdagangan yang diukur sebagai berikut:

IKU ini menggunakan nilai capaian yang dirilis oleh *World Bank*. *World Bank* tidak merilis nilai capaian atas Indeks Kinerja Logistik di Tahun 2022. Dalam dua tahun terakhir (2021 dan 2020) *World Bank* tidak merilis capaian IKU ini, karena masih lebih fokus terhadap pemulihan ekonomi.

GAMBAR 12
DASAR PENILAIAN LPI



Capaian IKU Indeks Kinerja Logistik Tahun 2022 seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 43
PERBANDINGAN REALISASI DAN IKU INDEKS KINERJA LOGISTIK

CAPAIAN KINERJA SS 5					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAAN (%)
5	Indeks Kinerja Logistik	Low/Proxy	3,3	3.15*	95,45
CAPAIAN (%)					95,45

*Tahun 2022 *World Bank* tidak merilis hasil penilaian dari indeks kinerja logistik (*Logistic Performance Index/LPI*) sejak tahun 2018, sehingga data yang digunakan capaian tahun 2018

Logistics Performance Index (LPI) tahun 2018 ini Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2017 yaitu posisi ke 63 dengan skor 2,98. Sejak tahun 2019 *World Bank* tidak melakukan survey, selain nilai LPI yang dirilis setiap 2 (dua) tahunan juga karena pada tahun 2020 adanya pandemi Covid 19, kendati pada tahun 2022 kondisi *pandemic* sudah mulai menurun, namun *World Bank* fokus terhadap pemulihan ekonomi.

Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, ranking LPI Indonesia berada jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat 7, selanjutnya Thailand peringkat 32, diikuti Vietnam berada pada peringkat 39, dan Malaysia di peringkat 41. Data tersebut seperti pada tabel berikut:

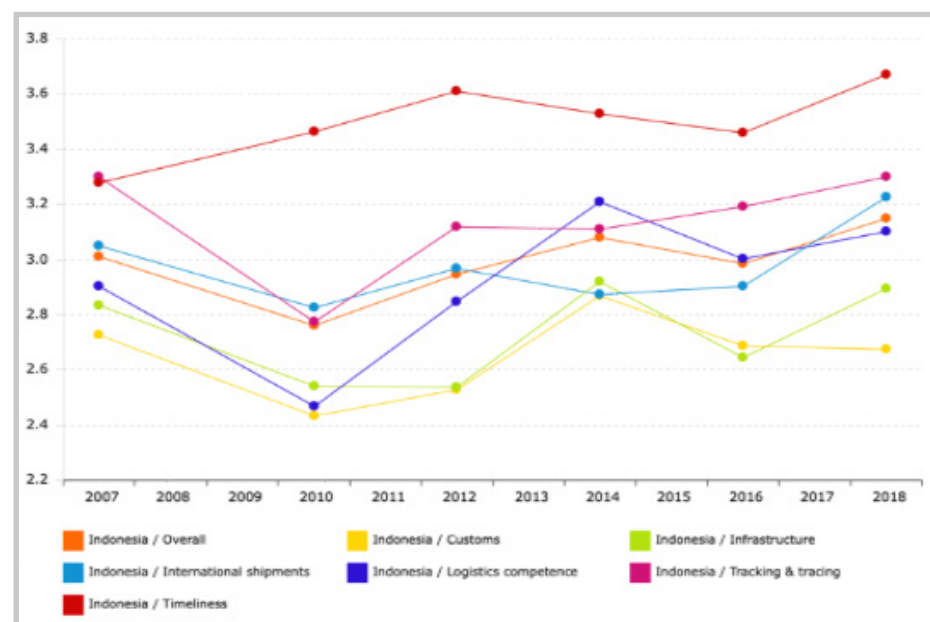
TABEL 44
PERINGKAT LPI NEGARA ASEAN TAHUN 2018

NEGARA	LPI SCORE	LPI RANKING
Singapore	4,00	7
Thailand	3,41	32
Vietnam	3,27	39
Malaysia	3,22	41
Indonesia	3,15	46
Philippines	2,90	60
Brunei Darussalam	2,71	80
Laos PDR	2,70	82
Cambodia	2,58	98
Myanmar	2,30	137

Sumber: *World Bank* 2019.

Skor capaian Indonesia dari seluruh indikator dari tahun 2007 s.d 2018 seperti pada grafik berikut:

GRAFIK 8
SKOR SELURUH INDIKATOR CAPAIAN LOGISTIC PERFORMANCE INDEX INDONESIA TAHUN 2007-2018



Sumber: World Bank, 2019

Adapun perbandingan capaian atas indeks logistik tahun 2022 dan 2021 serta target akhir pada renstra sampai dengan tahun 2024 dan target RPJMN 2022 sebagai berikut:

TABEL 45
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU INDEKS KINERJA LOGISTIK TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 5							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		RPJMN 2022
			2022	2021	2022	2024	
5	Indeks Kinerja Logistik	Nilai	3,15	3,15	3,3	3,5	-

Guna mendorong pencapaian target IKU, beberapa upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- Menguatkan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap 7 K/L teknis di bawah lingkup koordinasinya pada komponen kualitas infrastruktur
- Mengkoordinasikan komponen lain dari indeks ini dengan K/L terkait untuk terus berupaya meminimalisir permasalahan yang ada sampai saat ini, sehingga penilaian dari para responden terhadap Indonesia bisa positif (nilai LPI meningkat)

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala untuk mengetahui permasalahan
- Penyediaan dan penataan Infrastruktur logistik di dalam dan di luar Pelabuhan
- Proses dan hasil koordinasi di bidang infrastruktur dikomunikasikan kepada publik untuk mendapatkan kontrol dan masukan.

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

- Terjalin Koordinasi yang baik antar *Stakeholder*
- Program tol laut telah memiliki 33 trayek mengalami peningkatan jumlah armada angkutan dan jumlah pelabuhan singgah sejak tahun 2019 – 2022
- Telah diluncurkan Sistem Informasi Tol Laut (SITOLAUT) yang memudahkan pembeli dalam melakukan purchase order untuk dapat memilih sendiri penjual, Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan jadwal kapal melalui media elektronik. Selain itu, pemerintah juga lebih mudah dalam melakukan pemantauan.

Kendala Pencapaian IKU

Kemenko Marves telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mendukung pencapaian IKU ini, namun dikarenakan fokus terhadap pemulihan ekonomi, *World Bank* tidak melakukan pengukuran Indeks Kinerja Logistik. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus terkait penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang diantaranya pembangunan infrastruktur jalan antar sentra logistik dengan pelabuhan/bandar udara belum terhubung optimal, komoditas daerah dalam muatan balik belum maksimal, ketersediaan kuota BBM Solar Subsidi dan pengelolaan rute trayek.

Rencana tindak lanjut/inovasi periode selanjutnya

Akan melakukan kolaborasi dengan STRANAS PK untuk pengawasan efektifitas program tol laut.

Pada tahun mendatang indikator kinerja logistic (LPI) tidak digunakan lagi, hal ini sesuai dengan masukan dari KemenPANRB pada reuiu SAKIP tahun 2022 dan hasil diskusi internal Kemenko Marves, bahwa untuk indikator yang berasal dari eksternal/lembaga lain dan data capaiannya sulit didapatkan dapat didrop dan diganti dengan indikator yang sesuai dengan bidang tugas dari Kemenko Marves.

Berdasarkan hasil pembahasan oleh internal Kemenko Marves, IKU Indeks Kinerja Logistik pada tahun 2023 dan selanjutnya tidak dimasukkan menjadi IKU Menteri Koordinator. Adapun alasannya karena IKU yang dikeluarkan oleh Lembaga eksternal (*World Bank*) kendali dari Kemenko Marves terlalu jauh, hal lainnya sejak tahun 2018 *World Bank* tidak merilis nilai indeks ini, sehingga menyebabkan "rendahnya" pencapaian IKU Menko Maritim.

Success story

1. Saat ini telah dibangun sebanyak 14 Depo Gerai Maritim dan telah diluncurkan sistem informasi Gerai Maritim (SIGM) melalui <http://www.geraimaritim.kemendag.go.id> untuk memantau kelancaran arus barang, peningkatan perdagangan antar pulau, dan menjaga ketersediaan barang. Dari 14 depo yang telah dibangun, terdapat 9 (sembilan) depo yang telah dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang yang dikirim sebagai muatan berangkat maupun muatan balik melalui Tol Laut. Dinas Perdagangan setempat sebagai pengelola menyewakan kepada Pelaku Gerai Maritim yang berminat untuk memanfaatkan Depo tersebut.

GAMBAR 13
DEPO GERAI MARITIM



2. Perkembangan jumlah pelaku usaha Gerai Maritim mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
3. Ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No. 53 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan.

Data dukung atas pencapaian IKU Indeks Kinerja Logistik terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

2) IKU 6 Disparitas Ekonomi Antar Wilayah

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai sebaran kontribusi ekonomi pada pulau Jawa dan pulau-pulau luar Jawa yang direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebaran PDRB ini dinilai dapat menggambarkan tingkat pemerataan pembangunan

antar wilayah yang diukur melalui nilai tambah ekonomi yang dihasilkan. Tujuan dari Indeks ini adalah untuk mengukur pemerataan pembangunan ekonomi serta untuk memberi gambaran tentang pembangunan Infrastruktur dan Investasi maritim di Kawasan Jawa dan Kawasan Luar Jawa.

Indeks disparitas ekonomi ini juga dalam upaya mendorong percepatan perizinan berusaha; Meningkatkan daya saing dan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif terutama dalam bidang infrastruktur dan transportasi; Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dasar dan pelayanan dasar; serta Mengoptimalkan pengembangan ekonomi berbasis komoditas lokal.

IKU ini menggunakan data PDRB yang dirilis BPS setiap tahunnya, namun penghitungan indeks ini dilakukan oleh internal Kemenko Maritim. Hal ini didasari oleh tugas dan fungsi Kemenko Marves bidang investasi. Sebaran PDRB ini dinilai dapat menggambarkan tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah yang diukur melalui nilai tambah ekonomi yang dihasilkan. Target pada Perjanjian Kinerja 2022 yaitu ~0,17 (mendekati 0). Indeks Disparitas Ekonomi diformulasikan sebagai berikut:

INDEKS DISPARITAS EKONOMI

(PDRB Luar Pulau Jawa-PDRB Pulau Jawa)
(PDRB Total) x 100%

RUMUS : $\sqrt{((\sum(Y_i - \bar{Y})^2 f) / n))} / \bar{Y}$

dimana :

Y_i = PDRB perkapita kecamatan
 $\bar{Y}$ = rata-rata PDRB Kota
 n = Jumlah penduduk kecamatan
 f = jumlah penduduk kota

Nilai Produk Domestik Regional Bruto Pulau Jawa pada TA 2022 sebesar 6,948 Triliun dibandingkan dengan PDRB Luar Pulau Jawa sebesar 11,839 Triliun. Sehingga diperoleh nilai Indeks Disparitas sebesar -0,129. Capaian indeks disparitas ekonomi tahun 2022 seperti pada tabel berikut ini.

TABEL 46
CAPAIAN KINERJA IKU INDEKS DISPARITAS EKONOMI TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 5					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
6	Indeks Disparitas Ekonomi	Low/Exact	~0,17	-0,129	100
CAPAIAN (%)					100

Badan Pusat Statistik merilis data PDRB tahun 2022. Data PDRB setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2022 ditampilkan pada Tabel berikut.

TABEL 47
PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN - TAHUN 2022
(DALAM JUTA RUPIAH)

PROVINSI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TAHUNAN	WILAYAH
ACEH	48,128,50379	51,863,18831	53,775,114.08	57,983,213.24	211,750,019.42	LUAR JAWA
SUMATERA UTARA	225,643,669.01	235,346,164.91	244,065,364.40	250,137,894.39	955,193,092.71	LUAR JAWA
SUMATERA BARAT	66,451,714.06	69,994,852.81	73,142,390.14	75,789,682.97	285,378,639.98	LUAR JAWA
RIAU	240,553,314.09	246,377,610.87	249,179,258.32	255,479,408.78	991,589,592.06	LUAR JAWA
JAMBI	63,231,765.73	69,128,533.88	71,401,883.50	72,554,186.06	276,316,369.16	LUAR JAWA
SUMATERA SELATAN	131,700,426.64	149,460,613.32	157,153,921.09	153,288,520.33	591,603,481.38	LUAR JAWA
BENGKULU	20,711,836.38	22,826,142.13	22,633,047.63	23,940,920.90	90,111,947.04	LUAR JAWA
LAMPUNG	95,503,390.44	106,156,329.00	108,714,019.93	103,757,683.55	414,131,422.91	LUAR JAWA
KEP. BANGKA BELITUNG	22,814,463.98	24,107,021.19	23,777,723.18	24,586,224.06	95,285,432.42	LUAR JAWA
KEP. RIAU	72,514,878.61	75,829,522.90	77,464,621.00	83,033,655.02	308,842,677.53	LUAR JAWA
DKI JAKARTA	764,517,832.07	789,668,210.00	802,720,977.87	829,562,893.02	3,185,469,912.96	JAWA
JAWA BARAT	580,228,260.20	600,668,157.99	614,881,393.01	627,004,509.42	2,422,782,320.62	JAWA
JAWA TENGAH	375,555,542.46	384,653,787.15	396,649,230.70	404,040,457.77	1,560,899,018.08	JAWA
DI YOGYAKARTA	39,793,822.02	40,775,134.08	41,840,052.13	43,281,201.70	165,690,209.94	JAWA
JAWA TIMUR	650,757,153.87	678,990,226.04	701,774,514.14	699,385,194.57	2,730,907,068.62	JAWA
BANTEN	177,369,476.79	184,192,425.86	189,764,116.38	195,924,275.54	747,250,294.57	JAWA
BALI	55,473,852.60	61,094,569.65	63,011,105.07	65,653,709.09	245,233,236.42	LUAR JAWA
NUSA TENGGARA BARAT	36,654,725.52	39,215,083.58	40,480,450.62	40,593,794.27	156,944,054.00	LUAR JAWA
NUSA TENGGARA TIMUR	27,182,906.91	29,519,782.13	30,406,430.60	31,607,077.62	118,718,197.25	LUAR JAWA
KALIMANTAN BARAT	61,500,227.00	63,298,660.00	64,496,700.30	66,501,691.66	255,797,278.97	LUAR JAWA
KALIMANTAN TENGAH	46,436,658.50	49,812,431.76	49,875,291.90	53,823,513.75	199,947,895.91	LUAR JAWA
KALIMANTAN SELATAN	52,511,253.65	64,070,153.84	67,094,360.37	67,580,774.56	251,256,542.42	LUAR JAWA
KALIMANTAN TIMUR	186,953,675.76	229,952,925.22	250,847,394.64	253,578,983.89	921,332,979.53	LUAR JAWA
KALIMANTAN UTARA	29,312,279.31	33,690,345.61	36,555,750.54	39,159,806.16	138,718,181.61	LUAR JAWA
SULAWESI UTARA	36,034,557.09	38,349,309.57	39,819,027.65	42,825,461.77	157,028,356.08	LUAR JAWA
SULAWESI TENGAH	70,831,918.11	83,064,109.87	82,007,832.77	87,713,294.72	323,617,155.47	LUAR JAWA
SULAWESI SELATAN	136,506,597.64	151,170,674.45	159,146,114.96	158,321,289.77	605,144,676.81	LUAR JAWA
SULAWESI TENGGARA	35,346,797.45	38,549,110.23	40,827,347.08	44,037,879.45	158,761,134.22	LUAR JAWA
GORONTALO	11,204,852.04	11,847,006.68	12,198,894.92	12,323,680.69	47,574,434.34	LUAR JAWA
SULAWESI BARAT	12,750,861.11	13,615,639.31	13,688,865.38	14,015,614.93	54,070,980.72	LUAR JAWA
MALUKU	12,483,541.46	13,331,866.49	13,738,124.47	14,139,375.77	53,692,908.18	LUAR JAWA
MALUKU UTARA	16,551,658.82	17,386,904.24	17,529,335.13	19,434,711.62	70,902,609.80	LUAR JAWA
PAPUA BARAT	21,892,964.32	22,603,551.16	23,194,429.21	23,600,810.14	91,291,754.84	LUAR JAWA
PAPUA	64,046,429.43	65,757,042.51	64,115,012.71	68,597,333.82	262,515,818.48	LUAR JAWA
TOTAL 34 PROVINSI	4,489,151,806.85	4,756,367,086.74	4,897,972,095.84	5,003,258,725.00	19,146,749,714.45	LUAR JAWA

Provinsi yang termasuk kategori Pulau Jawa adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, sedangkan sisanya merupakan provinsi di luar Pulau Jawa. Untuk itu perhitungan PDRB Jawa dan Luar Jawa diolah pada Tabel 47.

TABEL 48
PDRB PULAU JAWA DAN LUAR JAWA - TAHUN 2022 (DALAM JUTA RUPIAH)

PROVINSI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TAHUNAN
PULAU JAWA	2,588,222,087.41	2,678,947,941.12	2,747,630,284.23	2,799,198,532.02	10,813,998,844.79
LUAR PULAU JAWA	1,900,929,719.45	2,077,419,145.62	2,150,341,811.59	2,204,060,192.98	8,332,750,869.66
TOTAL	4,489,151,806.85	4,756,367,086.74	4,897,972,095.84	5,003,258,725.00	19,146,749,714.45

Sumber: Badan Pusat Statistik, url: <https://www.bps.go.id/indicator/171/534/1/-seri-2010-1-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran.html>

Berdasarkan data yang telah didapatkan dari rilis Badan Pusat Statistik pada Tabel 3 dan formula pada persamaan (1) maka dilakukan penghitungan sebagaimana berikut:

$$\text{Indeks Disparitas Ekonomi} = \frac{\text{PDRB luar Pulau Jawa} - \text{PDRB Pulau Jawa}}{\text{PDRB Total}}$$

$$\text{Indeks Disparitas Ekonomi} = \frac{8,332,750,869.66 - 10,813,998,844.79}{19,146,749,714.45}$$

$$\text{Indeks Disparitas Ekonomi} = \frac{-2,481,247,975.13}{19,146,749,714.45}$$

$$\text{Indeks Disparitas Ekonomi} = -0,129$$

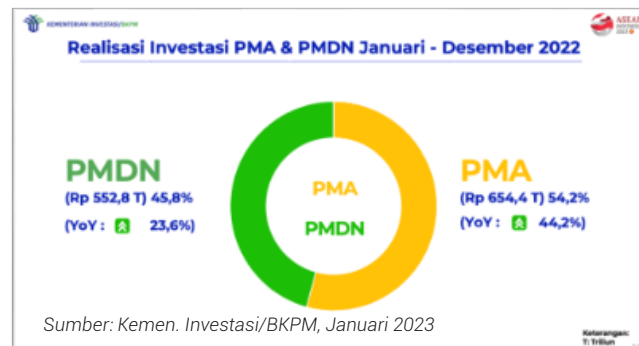
Berdasarkan hasil rilis dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa capaian realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai Rp 1.207 triliun atau melampaui target Rp 1.200 triliun. Sebanyak 54,2% dari realisasi investasi tersebut merupakan penanaman modal asing atau PMA. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, capaian investasi tersebut naik 34% dibandingkan 2021.

Realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman modal Dalam Negeri atau PMDN sebesar Rp 552,8 triliun atau sebesar 45,8%. Jumlah tersebut naik 23,6% dibandingkan sebelumnya. Sementara realisasi PMA mencapai Rp 654,4 triliun atau sebesar 54,2%. Investasi asing tersebut naik 44,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi investasi nasional pada tahun 2022 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat dilihat pada infografis berikut :

GRAFIK 9
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PER TRIWULAN TAHUN 2017 S.D 2022



DIAGRAM 3
REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN JANUARI – DESEMBER 2022



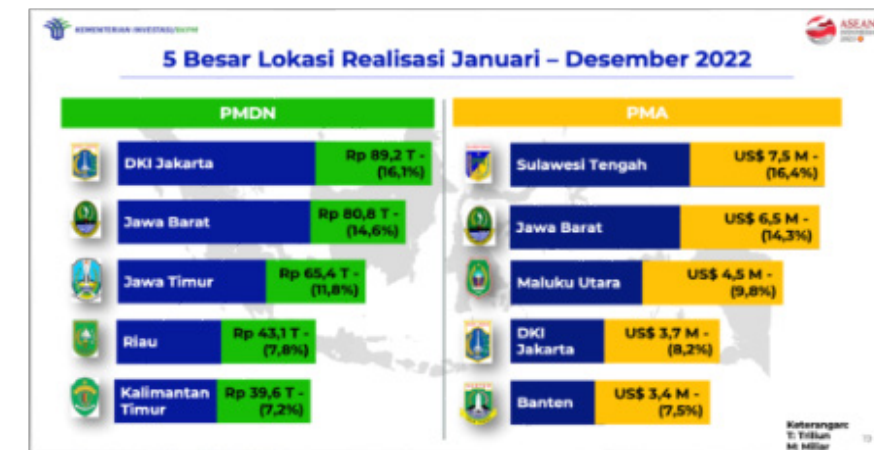
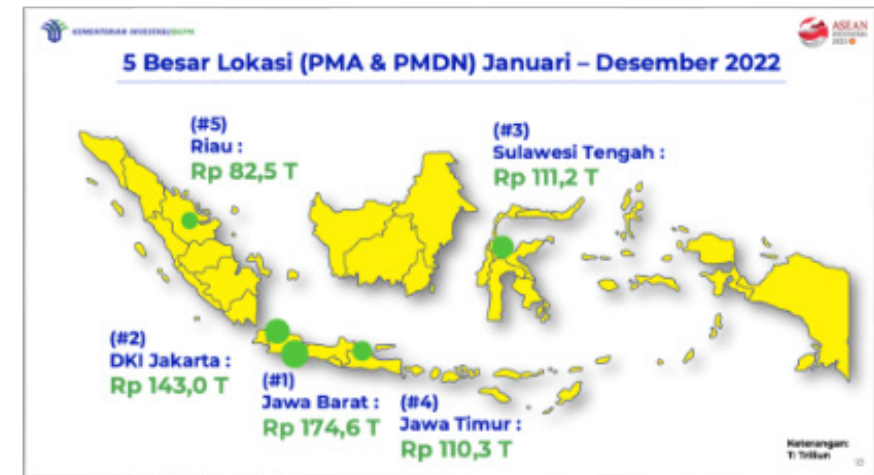
Berdasarkan sebaran wilayahnya, realisasi investasi di Jawa dan luar Jawa pada tahun 2022 tercatat dengan total investasi Rp.1207,2 Trilyun, dengan rincian di Luar Jawa sebesar Rp.636,3 Trilyun (52,7%) dan di Jawa sebesar Rp.570,9 Trilyun (47,3%). Dari data tersebut terlihat bahwa saat ini sebaran investasi di Luar Jawa lebih besar, hal ini terus dilakukan Pemerintah untuk mendorong pemerataan penyebaran investasi berkualitas di luar Jawa.

DIAGRAM 4
REALISASI INVESTASI JAWA-LUAR JAWA JANUARI-DESEMBER 2022



Provinsi dengan realisasi PMA dan PMDN terbesar yaitu Jawa Barat dengan total investasi sebesar Rp.174,6 Trilyun, disusul Provinsi DKI Jakarta Rp143,0 Trilyun. Provinsi di (Luar Jawa) berada di urutan ketiga adalah Provinsi Sulawesi Tengah dengan total investasi sebesar Rp.112,2 Trilyun, selanjutnya di urutan 4 ada Provinsi Jawa Timur dengan total Rp.110,3 Trilyun dan di urutan kelima Provinsi Riau (Luar Jawa) dengan besar investasi Rp.82,5 Trilyun. Infografis lokasi investasi terbesar tahun 2022 sebagai berikut:

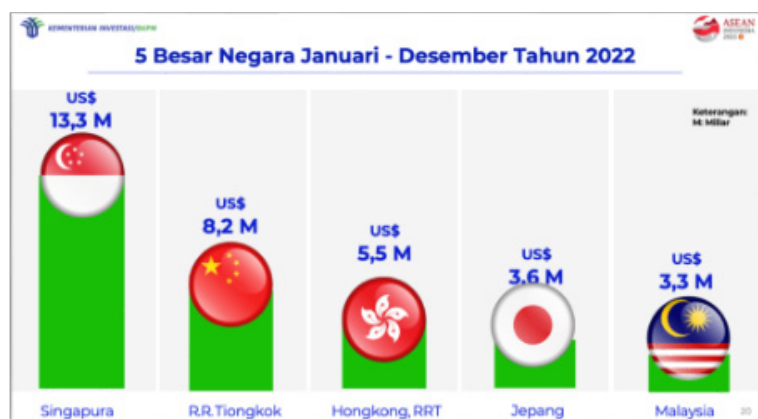
GAMBAR 14
5 BESAR LOKASI (PMA & PMDN) JANUARI – DESEMBER 2022



Sumber: Kemen. Investasi/BKPM, Januari 2023

Lima besar negara dengan investasi terbesar di Indonesia, di urutan teratas Singapura dengan total investasi sepanjang tahun 2022 yaitu US\$13,3 M, selanjutnya RR Tiongkok dengan total investasi US\$ 8,2 M. Hongkong berada di urutan ketiga dengan investasi sebesar US\$5,5 M, urutan keempat dan kelima yaitu Jepang dengan total investasi US\$3,6 M dan Malaysia sebesar US\$3,3 M. Infografis seperti sebagai berikut.

GAMBAR 15
5 BESAR NEGARA INVESTASI DI INDONESIA JANUARI – DESEMBER 2022



Sumber: Kemen. Investasi/BKPM, Januari 2023

Gambaran ini menunjukkan bahwa tugas dari Kemenko Marves sebagai kementerian yang mengkoordinir K/L teknis dalam pembangunan bidang kemaritiman dan investasi untuk mendorong investor dapat berinvestasi di luar Jawa, sehingga sudah tidak ada lagi 'gap' pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa. Selain itu. Dalam pencapaian IKU pada tahun 2022 ini terdapat beberapa faktor pendukung, baik itu dari internal, eksternal serta lainnya.

Perbandingan realisasi dan target IKU Indeks Disparitas Ekonomi tahun 2022 dan 2021 serta target tahun 2022 dan perbandingan dengan target akhir renstra 2024 dan target RPJMN 2022 terlihat pada tabel berikut:

TABEL 49
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU INDEKS KINERJA LOGISTIK TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 5							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		RPJMN 2022
			2022	2021	2022	2024	
6	Indeks Disparitas ekonomi	Nilai	-0,129	-0,157	~0,17	~0	-

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

Pemerintah terus mendorong investasi di luar Jawa. Sejak Triwulan III tahun 2020, realisasi investasi di Luar Pulau Jawa selalu lebih besar daripada realisasi investasi di Pulau Jawa. Hal ini merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur di Luar Pulau Jawa yang masif pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Data Kementerian BKPM penyebaran realisasi investasi di luar Jawa tercatat sebesar Rp636,3 T (52,7%) dan di pulau Jawa sebesar Rp570,9 T (47,3%) atau sebesar 47,1% pada tahun 2023.

Kendala Pencapaian IKU

Data untuk penghitungan IKU ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Investasi/BKPM, sehingga dalam penghitungan indikator ini mengalami kendala apabila lembaga/kementerian tersebut belum merilis realisasi dari PDRB dan data investasi (Jawa/Luar Jawa) baik triwulanan maupun tahunan. Hal lainnya data yang dirilis oleh BPS (PDRB) merupakan "data sementara/sangat sementara", data riil yang dibutuhkan Kemenko Marves akan dirilis BPS 6 bulan bahkan tahun berikutnya setelah LKj Kemenko Maritim disusun dan disampaikan ke KemenPANB.

Rencana tindak lanjut/Inovasi pencapaian IKU periode selanjutnya

Berdasarkan pembahasan internal Kemenko Marves, pada tahun 2023 dan selanjutnya IKU ini tidak dijadikan indikator kinerja Menko Marves, hal ini dilakukan karena IKU ini merupakan pencapaian dari kinerja K/L teknis.

Success story

Sejak 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2022, adanya peningkatan investasi, hal ini dibuktikan dengan lebih besarnya investasi di Luar Jawa dibandingkan dengan Pulau Jawa. Data terkait hal tersebut telah diuraikan pada penjelasan di atas.

Data dukung atas pencapaian IKU Indeks Disparitas Ekonomi terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

c. SS 6: Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia

SS 6 diukur dengan 2 IKU yaitu Indeks Kesehatan Laut Indonesia dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Realisasi tahun 2022 IKU ini seperti terlihat di bawah ini:

TABEL 50
CAPAIAN KINERJA IKU INDEKS KESEHATAN LAUT DAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 6					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
7	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	Low/Exact	70	75,65	108,07
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Low/Exact	67,7	72,42	106,97
CAPAIAN (%)					107,52

1) IKU 7 Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Indeks Kesehatan Laut Indonesia adalah nilai yang menunjukkan parameter kondisi kesehatan laut, dan bagaimana pengelolaannya untuk keberlanjutan laut di masa depan. Tujuan indeks ini adalah mewujudkan ekosistem laut yang sehat serta mengevaluasi program dan kegiatan

yang mendasari pencapaian tujuan tersebut. Indeks ini diharapkan dapat membangun kesadaran serta memberikan informasi kepada pemerintah dalam merumuskan dan menentukan kebijakan untuk mempromosikan laut yang sehat.

Indeks bernilai terendah 0 dan tertinggi 100. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi kesehatan laut. Dalam penilaian OHI dibutuhkan pendekatan penilaian untuk mengevaluasi kondisi laut saat ini secara komprehensif (menyeluruh) mulai dari sisi/perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan alam. Laut yang sehat berdasarkan OHI adalah laut yang dapat bermanfaat bagi manusia secara terus menerus (berlanjut) sampai masa mendatang. Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) dihitung dari hasil akhir pengukuran kesehatan laut berdasarkan dengan variabel pengukuran yang ditetapkan. IKLI merupakan alat pengukuran kondisi kesehatan laut Indonesia yang pengukurannya diadopsi dari ocean health index (OHI).

Tahun 2022 OHI telah merilis skor seluruh negara atas pencapaian hasil penghitungan OHI tahun 2021. Adapun nilai OHI Indonesia tahun 2021 sebagai berikut:

TABEL 51
NILAI OHI INDONESIA PER VARIABEL TAHUN 2022

VARIABELS	SCORE
Food Provision	28,31
Artisanal Fishing Opportunity	93,27
Natural Products	73,71
Carbon Storage	68,93
Coastal Livelihoods and Economies	70,42
Tourism and Recreation	34,80
Sense of Place	58,26
Clean Waters	57,31
Biodiversity	83,14
Coastal Protection	81,17
TOTAL SCORE	64,93

Sumber: OHI_Science.org (diolah)

Untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara, berdasarkan hasil penilaian OHI tahun 2021, nilai OHI Indonesia berada di peringkat 6 dengan skor 64,93. Peringkat pertama ditempati Kamboja dengan skor 72,34, disusul Thailand dengan skor 71,65 dan ketiga Malaysia dengan skor 70,04. Secara lengkap peringkat OHI negara di wilayah Asia Tenggara tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

TABEL 52
NILAI OHI NEGARA DI ASIA TENGGARA TAHUN 2021

PERINGKAT	NEGARA	SCORE
1	Kamboja	72,34
2	Thailand	71,65
3	Malaysia	70,04
4	Myanmar	66,48
5	Brunei Darusalam	66,46
6	Indonesia	64,93
7	Singapura	64,74
8	Philpina	63,31
9	Vietnam	62,51
10	Timor Leste	61,34

Sumber: OHI_Science.org (diolah)

Pencapaian nilai OHI Indonesia dari tahun 2016 s.d 2021 terlihat pada grafik berikut ini.

GRAFIK
10 NILAI OHI INDONESIA TAHUN 2016 - 2021



Sumber: OHI_Science.org (diolah)

Sejak tahun 2020, Indonesia yang dikoordinasikan Kemenko Marves mulai menghitung Nilai IKLI sendiri bersama K/L teknis, dengan melakukan modifikasi metode penghitungan indeks kesehatan laut yang digunakan oleh Halpern Etal (2012). Sepuluh *goals* dari Indeks Kesehatan Laut yang menjadi *variable* penghitungan IKLI meliputi:

TABEL 53
GOALS INDEKS KESEHATAN LAUT

NO	VARIABEL
1	Laut sebagai sumber pangan
2	Laut sebagai penyokong perikanan tradisional (artisanal)
3	Laut sebagai produk bahan alami
4	Laut sebagai penyimpan karbon
5	Laut sebagai perlindungan pesisir
6	Laut sebagai sumber mata pencaharian
7	Laut sebagai penyedia jasa pariwisata dan rekreasi
8	Laut sebagai perlindungan spesies dan tempat ikonis
9	Laut sebagai perairan yang bersih
10	Laut sebagai penunjang keanekaragaman hayati

Sumber: Pedoman IKLI 2020

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, diperoleh nilai IKLI Agregat tahun 2022 sementara sebesar 75,65, skor ini dapat digunakan sementara hingga evaluasi yang dilakukan pada akhir tahun 2023. Estimasi skor IKLI tahun 2022 menggunakan data (sementara) Tahun 2021. Dengan perubahan dan perbaikan data, IKLI Tahun 2021 berubah dari 76,76 (data sementara) menjadi 73,06 (data perbaikan). Dengan data yang diperbaharui maka perkembangan IKLI adalah sebagai berikut, 73,44 (Tahun 2020), menjadi 73,06 (Tahun 2021) dan 75,65 (Tahun 2022), dengan kata lain Indeks IKLI mengalami peningkatan. Nilai IKLI untuk masing-masing variable yaitu:

TABEL 54
PERHITUNGAN IKLI TAHUN 2022

NO	TIPE TUJUAN / VARIABEL	IKLI 2020		IKLI 2021		IKLI 2022
		PLEMINARY DATA 2019	UPDATE DATA 2019	PLEMINARY DATA 2020	UPDATE DATA 2020	DATE 2021
1	Sumber Pangan	7,65	7,81	9,03	9,03	8,88
2	Perikanan Artisanal	7,27	7,73	7,42	7,2	7,63
3	Sumber Produk Alam	8,64	8,16	6,36	6,36	5,92
4	Penyimpanan Karbon	7,66	7,45	8,91	8,76	10,00
5	Perlindungan Pesisir	5,05	4,76	6,01	5,71	6,10
6	Sumber Mata Pencaharian	7,29	7,37	8,13	7,11	7,36
7	Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi	8,07	8,33	5,72	5,45	5,55
8	Perlindungan Spesies dan Tempat Ikonis	8,32	6,06	6,06	5,82	6,78
9	Perairan yang Bersih	5,82	7,23	9,12	7,39	7,43
10	Keanekaragaman Hayati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
TOTAL NILAI AGREGAT		75,79	73,44	76,76	73,06	75,65

Adapun capaian atas IKU IKLI seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 55
CAPAIAN KINERJA IKU INDEKS KESEHATAN LAUT TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 6					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
7	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	Low/Exact	70	75,65	108,07
CAPAIAN (%)					108,07

Adapun yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 guna tercapainya IKU antara lain adalah:

- Melaksanakan sosialisasi IKLI kepada Pemda;
- Melakukan pengukuran IKLI di WPPNRI 711, 715 dan 573;
- Melakukan pengenalan IKLI kepada universitas sebagai pendamping Pemda dan melakukan internalisasi IKLI kepada BPS.
- Menginisiasi agar Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) menjadi salah satu Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Nasional;
- Mendorong pemerintah provinsi lainnya untuk mengadopsi IKLI ke Dalam Renstra (seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI yang mengadopsi IKLI dalam Renstra DKPKP untuk Tahun 2023-2026).

Adapun perbandingan capaian tahun 2022 dan tahun 2021, serta target sampai dengan akhir Renstra Kemenko Marves tahun 2024 dan target RPJMN 2022 seperti terlihat berikut ini:

TABEL 56
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU INDEKS KESEHATAN LAUT

CAPAIAN KINERJA SS 5							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		RPJMN 2022
			2022	2021	2022	2024	
7	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	Nilai	75,65	73,06	70	67	-

Faktor pendukung pencapaian IKU yaitu adanya peran setiap K/L dalam menyediakan data yang akurat. Sedangkan **kendala** pencapaian IKU beberapa walidata tidak mempublikasikan data yang digunakan pada perhitungan IKLI, sehingga terkendala dalam proses pencarian data.

Kendala dalam penghitungan IKU yaitu K/L teknis mitra kerja dari Kemenko Marves “terlambat” dalam menyampaikan hasil perhitungan indikator. Hal ini terjadi karena untuk kegiatan penghitungan IKLI pada tahun 2022 setiap K/L mitra “terlambat” dalam menghitung masing-

masing indikator yang menjadi tanggungjawab penghitungannya, karena setiap K/L belum menganggarkan untuk kegiatan penghitungan IKLI secara terpisah.

Rekomendasi/inovasi untuk pencapaian IKU pada tahun mendatang

1. Diperlukan adanya upaya untuk estimasi skor IKLI berbasis model dinamis, model IKLI yang dinamis perlu dikembangkan dan dianalisis sebagai suatu proses sains;
2. Sebagai suatu indeks kumulatif, peran setiap lembaga untuk menyediakan data yang akurat memang sangat dibutuhkan. Di tingkat nasional, banyak lembaga yang berperan dalam menyediakan data dalam proses estimasi IKLI. Bila saatnya IKLI diestimasi di tingkat daerah maka disarankan agar Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi bertanggung jawab dalam hal ini;
3. Dilakukan finalisasi data untuk mendapatkan Nilai IKLI Agregat Tahun 2022 yang akan dipublikasikan pada awal tahun 2023.

Rencana pada tahun 2023 atas pencapaian IKU antara lain:

1. Publikasi hasil IKLI tahun 2020, 2021, 2022 pada awal tahun 2023.
2. Pengembangan model perhitungan IKLI berbasis model dinamis, sehingga dapat dianalisis sebagai suatu proses sains
3. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menerapkan dan mengimplementasikan IKLI di daerahnya untuk menilai dan mengukur tingkat kesehatan laut di provinsi masing-masing. Salah satu provinsi yang akan menerapkan IKLI tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, yang telah menuangkan Perhitungan IKLI dalam Renstra DKPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.
4. Setiap K/L mitra kerja Kemenko Marves yang terlibat dalam penghitungan IKLI agar menganggarkan untuk kegiatan ini.

Success story dari pelaksanaan pencapaian IKU IKLI yaitu telah tersusunnya pedoman IKLI.

Data dukung atas pencapaian IKU Indeks Kesehatan Laut Indonesia terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

2) IKU 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKLH adalah indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan publikasi resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggambarkan tentang kondisi lingkungan hidup di setiap Provinsi dan Indonesia. Melalui indeks yang diterbitkan sekali setahun ini kita dapat mengetahui seberapa jauh kondisi dan status kualitas lingkungan hidup suatu provinsi dari segi kualitas air, kualitas

udara, kualitas air laut dan tutupan lahan serta kualitas lingkungan hidup Indonesia.

Mulai tahun 2020, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO3, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Tujuan penyusunan nilai IKLH dimaksudkan sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, nilai IKLH digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pada tahun 2021, perhitungan IKLH mulai diterapkan hingga level kabupaten/kota. Indikator untuk menghitung IKLH kabupaten/kota sedikit berbeda dengan indikator untuk menghitung nilai IKLH provinsi dan nasional. Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep *Environmental Quality Index* (EQI) dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Capaian IKLH Tahun 2022 sebesar 72,42 (BAIK) dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 67,7. Terdapat kenaikan sebesar 0,97 Poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan capaian per indeks sebagai berikut:

TABEL 57
RINCIAN CAPAIAN INDIKATOR

NO	INDEKS	Target 2022 (Renstra KLHK)	Target RPJMN 2022	Realisasi
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,88	55,3	53,88
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,30	84,3	88,06
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	63,50	63,5	60,72
4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	59,50	59,5	84,41
IKLH				72,42 (BAIK)

Sumber : Ditjen PPKL, KLHK 2022

Dari 4 indeks yang menjadi pengukuran IKLH pada tahun 2022, indeks kualitas air capaiannya dibawah target RPJMN tahun 2022 yaitu sebesar 2,55 poin. Selain itu, indeks kualitas lahan juga tidak mencapai target RPJMN 2022 yakni sebesar 3,22 poin. Namun demikian, secara keseluruhan capaian IKLH berada pada kategori baik (72,42). Capaian IKU IKLH Kemenko Marves tahun 2022 seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 58
CAPAIAN KINERJA IKU INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 6					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Low/Exact	67,7	72,42	106,97
CAPAIAN (%)					106,97

Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan secara nasional karena terdapat 42 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi terhadap indeks respon daerah pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti *Car Free Day* (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda. Sementara itu, penurunan IKU disebabkan terdapat 14 kab/kota dimana daerah tersebut tidak mengalokasikan anggaran dan SDM secara khusus untuk pengendalian pencemaran udara.

Indeks Kualitas Air mengalami kenaikan karena jumlah kab/kota yang mengalami kenaikan sebanyak 192 kab/kota (4.884 titik pantau) sedangkan yang mengalami penurunan 157 kab/kota (3.881 titik pantau). Kenaikan IKA di 192 kab/kota disebabkan oleh ketersediaan anggaran, implementasi kegiatan seperti pengawasan terhadap industri dan pembinaan terhadap usaha skala kecil.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 34 provinsi yang dipantau dan dievaluasi, ada 27 provinsi yang meningkat mutunya, sementara yang menurun sebanyak 6 provinsi. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaran dan kerusakan di darat (*landbase pollution*).

Pada data Indeks Kualitas Lahan, terdapat 145 kab/kota yang meningkat nilai IKL-nya, sedangkan yang mengalami penurunan sebanyak 116 kab/

kota. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 148.689,35 ha secara nasional.

Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) secara nasional mengalami penurunan dari 67,98 di tahun 2021 menjadi 64,9 di tahun 2022. Penurunan terjadi di 26 kab/kota dengan total selisih perubahan 456.855 ha, 4 kab/kota mengalami kenaikan dengan total selisih perubahan 127.400 ha. Penurunan kualitas ekosistem gambut kualitas ekosistem gambut terjadi antara lain terdapat penambahan kanal artifisial di luar areal dan luasan tutupan lahan. Perbaikan kualitas ekosistem gambut terjadi karena penggunaan hasil inventarisasi skala 1:50.000 sehingga terdapat perubahan status dari Fungsi Lindung menjadi Fungsi Budidaya, dan penambahan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) baru yang berkontribusi terhadap luasan perbaikan. Perhitungan IKEG belum memasukkan komponen intervensi pemulihan yang telah dilakukan, baik melalui perbaikan tata kelola air dan rehabilitasi revegetasi, baik di lokasi konsesi maupun di APL, yang selanjutnya akan dievaluasi melalui Indeks Respons Kinerja Daerah (IRKD).

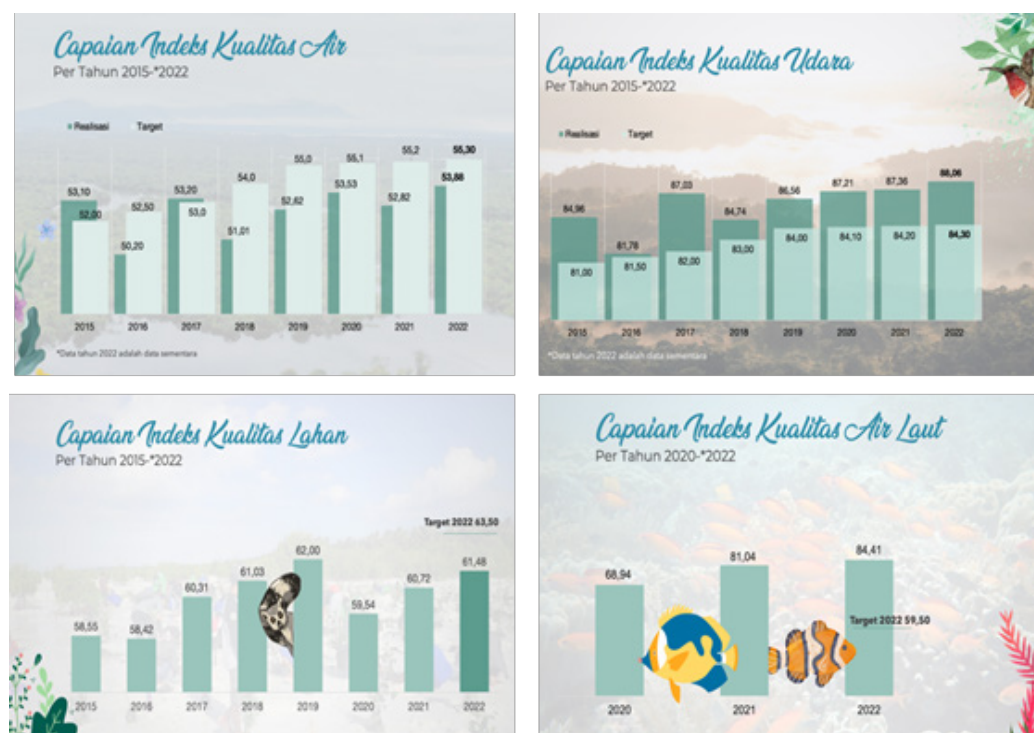
Data yang digunakan untuk penghitungan Indeks Kualitas Air adalah sebanyak 14.245 data, meningkat 33,04% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara menggunakan 5.367 data, meningkat 5,62% dari tahun sebelumnya. Pada Indeks Kualitas Air Laut menggunakan 1.195 data, meningkat 25,79% dari tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022 dimulai pelaksanaan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah untuk meningkatkan IKLH, dengan menggunakan Profil Indeks Respon masing-masing daerah. Profil Indeks Respon diperoleh dari inventarisasi respon Pemerintah Daerah dalam mencapai target IKLH melalui Program Langit Biru, Program Kali Bersih, Program Indonesia Hijau, Program Gambut Lestari dan Program Pantai Lestari.

Inventarisasi respon Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan aspek manajemen, meliputi kebijakan dan peraturan, sumber daya manusia dan perencanaan perbaikan kualitas lingkungan, serta aspek teknis, meliputi implementasi kegiatan, pelibatan pemangku kepentingan, publikasi dan inovasi. Berdasarkan hasil analisis indeks respon tersebut, rata-rata alokasi anggaran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah sekitar 0.01% - 1.19% dari APBD.

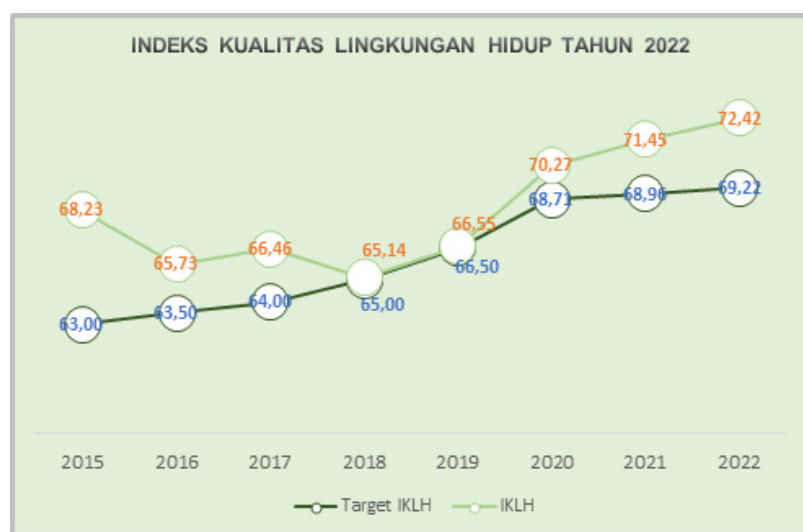
Dalam aspek pengembangan SDM, sebanyak 168 kab/kota telah melakukan pelatihan yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan kepada pegawai lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada aspek implementasi, sebanyak 316 kab/kota telah melakukan pemantauan kualitas lingkungan yang bersumber dari APBD serta 223 kab/kota telah melakukan pengawasan industri. Berikut grafik capaian masing-masing indikator sebagai penunjang indeks kinerja lingkungan hidup:

GRAFIK 11
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR PENUNJANG PENGHITUNGAN IKLH TAHUN 2022 - 2015



Nilai IKLH tahun 2022 mengalami kenaikan 0,97 poin (72,42) jika dibandingkan capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 71,45. Adapun rincian capaian indikator sebagai berikut:

GRAFIK 12
PERBANDINGAN TARGET - CAPAIAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022 - 2015



Sepanjang tahun 2022, upaya yang telah dilakukan Kemenko Marves guna mendorong capaian atas IKU IKLH tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:

- Mendorong dan mengkoordinasikan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
- Penyelesaian Peraturan turunan dari Perpres Dewan SDA Nasional berupa 2 Permenko dan 1 Kepmenko (penguatan dan pengembangan SIH3 tingkat nasional);
- Pengawasan Legalisasi RPP Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) yang merupakan salah satu Quick Win Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves.
- Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemulihan kondisi 5 DAS prioritas (Brantas, Citarum, Ciliwung Cisadane, Asahan Toba), serta Koordinasi Rencana kerja sama Pembersihan Sungai Cisadane.
- Koordinasi tingkat Menteri dengan pembahasan percepatan pelaksanaan program PPK DAS Citarum. Kondisi awal sungai Citarum pada tahun 2018 adalah cemar berat setara IKA 33,43 poin. Pada akhir tahun 2021, menjadi cemar ringan (skor IKA 50,13 poin);
- Penanaman bibit pohon di lahan kritis kerja sama dengan AstraZaneca Indonesia di DAS Citarum dan TN. Tj. Puting sudah mencapai 2,5 juta bibit pohon;
- Dewan SDA Nasional bersama dengan Kemenko Marves menyusun rekomendasi pengelolaan dan pemulihan DAS Nasional utamanya dalam hal percepatan pemulihan lahan kritis DAS.
- Koordinasi antara Kemenko Marves dengan KLHK terkait dengan progress capaian terhadap indikator pendukung IKLH.
- Koordinasi lanjutan untuk analisis data sampel dan input hasil analisis ke aplikasi IKLH.
- Monitoring hasil analisis laboratorium kualitas air laut dari target 752 hasil uji laboratorium.

Perbandingan capaian tahun 2022 dan tahun 2021 serta target sampai dengan akhir Renstra Kemenko Marves tahun 2020-2024 dan target RPJMN 2022 sebagai berikut:

TABEL 59
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

CAPAIAN KINERJA SS 5							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		RPJMN 2022
			2022	2021	2022	2024	
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72,42	71,43	67,7	68,53	-

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

Adapun faktor pendukung atas pencapaian IKU ini adalah:

- Kemenko Marves memiliki peran dan fungsi sebagai koordinator sehingga dapat mendukung pencapaian peningkatan IKLH salah satunya yakni terdapat pada IKU (Indikator Kinerja Utama) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dapat mendukung IKU RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan IKU KLHK.
- Kemenko Marves memiliki Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang fokusnya berhubungan dengan IKLH.
- Kemenko Marves mengkoordinasikan dan mengawal program-program pembangunan Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan naik-turun nya angka IKLH. Bentuknya dapat berupa tagging anggaran pembangunan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.
- Implementasi Indeks Respon Kinerja Daerah
- Konsep Green Leadership yang diimplementasikan pada PROPER 2022

Kendala

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas air.
- Pada kabupaten / kota tidak adanya alokasi anggaran dan SDM secara khusus untuk menangani indeks penyokong IKLH.
- Penambahan kanal artifisial diluar areal dan luasan tutupan lahan, sehingga berpengaruh terhadap target capaian tutupan lahan.

Success story dari pencapaian IKU ini yaitu kesuksesan Program Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Jumlah peserta PROPER mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 607 perusahaan peserta baru.

Data dukung atas pencapaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

d. SS 7: Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam

Tujuan dari SS 7 adalah peningkatan kontribusi ekonomi dari keempat sektor terhadap PDB nasional yang dinilai dapat menggambarkan peningkatan produksi dan nilai tambah dibidang kemaritiman dan investasi dari waktu ke waktu. Keempat sektor dimaksud yaitu Kehutanan dan Penebangan Kayu, Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, serta Pariwisata. SS 7 memiliki 2 IKU yaitu PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa dan Tingkat Komponen dalam Negeri. Capaian tahun 2022 atas SS 7 seperti terlihat di bawah ini:

TABEL 60
CAPAIAN KINERJA IKU PDB SUMBERDAYA ALAM DAN JASA TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 7					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
9	PDB Sumberdaya Alam dan Jasa	Moderate/Proxy	16,79	19	113,16
10	Tingkat Komponen Dalam Negeri	Low/Proxy	46	49,83	108,33
CAPAIAN (%)					110,74

1) IKU 9 PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa

Tujuan dari IKU ini adalah peningkatan kontribusi ekonomi dari keempat sektor terhadap PDB nasional dinilai dapat menggambarkan peningkatan produksi dan nilai tambah dibidang kemaritiman dan investasi dari waktu ke waktu.

Indikator ini diwujudkan dalam persentase jumlah produksi yang dihasilkan di bidang sumber daya alam dan jasa maritim yang meliputi, antara lain: produksi perikanan, hutan mangrove, produk kehutanan, terumbu karang, produksi mineral dan batu bara, produksi jasa yang dihasilkan dari pariwisata dan ekonomi kreatif.

Indikator ini menggabungkan kontribusi (*share*) PDB dari beberapa sektor yaitu perikanan, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan kontribusi ekonomi dari keempat sektor terhadap PDB nasional dinilai dapat menggambarkan peningkatan produksi dan nilai tambah dibidang kemaritiman dan investasi dari waktu ke waktu. Untuk capaian PDB Sektor Sumberdaya Alam berdasarkan data dari rilis BPS tahun 2022 tidak diuraikan secara detail untuk masing-masing subsektor, sehingga dihitung dengan menggunakan agregat kontribusi PDB beberapa sektor PDB.

PDB Sektor Sumberdaya Alam berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, kontribusi PDB Sumberdaya Alam dan Jasa pada tahun 2022 sebesar 19%, nilai tersebut dicapai atas agregat kontribusi subsektor yang menjadi pengukuran pada IKU PDB sumberdaya Alam dan Jasa sebagaimana pada tabel berikut.

TABEL 61
FORMULA PERHITUNGAN PDB SEKTOR SUMBERDAYA ALAM TAHUN 2022

LAPANGAN USAHA		KONTRIBUSI TAHUN 2022 (%)
A. Kehutanan, dan Perikanan		
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,6
3	Perikanan	2,58
B. Pertambangan dan Penggalian		12,22
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	3,0
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	6,62
3	Pertambangan Bijih Logam	1,24
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,36
C. Pariwisata		3,6
TOTAL KONTRIBUSI (%)		19

Sumber: BPS, Tahun 2022 (diolah)

*Angka sementara ** Angka sangat sementara

Adapun perbandingan capaian tahun 2022 dan tahun 2021 serta target tahun akhir Renstra Kemenko Marves tahun 2020 - 2024 seperti di bawah ini:

TABEL 62
CAPAIAN IKU PDB SUMBERDAYA ALAM DAN JASA TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 7					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
9	PDB Sumberdaya Alam dan Jasa	Moderate/Proxy	16,79	19	113,16
CAPAIAN (%)					113,16

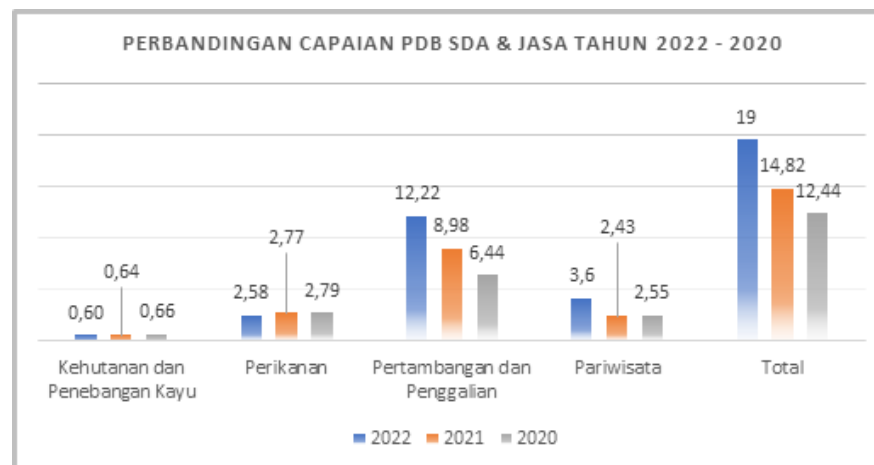
Beberapa sektor PDB Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2022 terus didorong, sehingga dapat mencapai kontribusi sesuai dengan target dari IKU ini, share PDB Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2022 mengalami kenaikan 4,78% dibandingkan tahun 2021. Hal ini seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 63
PERBANDINGAN SHARE PDB SEKTOR SUMBERDAYA ALAM TAHUN 2022 DAN 2021

LAPANGAN USAHA	2022	2021	2020
1 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,6	0,64	0,66
2 Perikanan	2,58	2,77	2,79
3. Pertambangan dan Penggalian	12,22	8,98	6,44
4 Pariwisata	3,6	2,43	2,55
TOTAL	19	14,82	12,44

Sumber: BPS, Tahun 2022 (diolah)

GRAFIK 13
PERBANDINGAN SHARE PDB SUMBERDAYA ALAM DAN JASA TAHUN 2020 S.D 2022



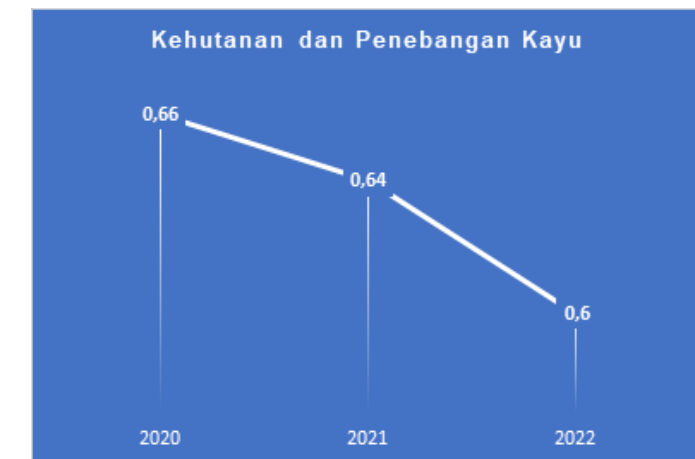
Sumber: BPS, Tahun 2022 (diolah)

Adapun beberapa hal atas capaian kontribusi dan upaya lainnya yang telah dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

A. PDB Kehutanan

Kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun, akar dan getahnya merupakan parameter penunjang PDB sektor kehutanan. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia untuk sektor kehutanan meliputi: (1) KBLI 021, terdiri atas pengusahaan Hutan yang berasal dari pengusahaan Hutan Tanaman, Hutan Alam, dan HHBK; (2) KBLI 022 dalam bentuk penebangan dan pemungutan kayu; (3) KBLI 023 meliputi pemungutan HHBK; dan, (4) KBLI 024 meliputi jasa penunjang kehutanan. Berdasarkan rilis dari BPS pada tahun 2022, PDB sektor kehutanan berkontribusi sebesar 0,6%. Dibandingkan tahun 2021 sektor kehutanan dan penebangan kayu menyumbang 0,64, adanya penurunan 0,04%.

GRAFIK 14
DISTRIBUSI PDB SUB SEKTOR KEHUTANAN



Sumber: BPS, Tahun 2022 (diolah)

Kemenko Marves terus mendorong agar Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan. Khusus untuk PDB Kehutanan terus dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antar K/L terkait khususnya dalam bidang:

- Bidang Pengembangan dan Pemasaran Produk Hutan Produksi
- Bidang Pengembangan Jasa Lingkungan
- Bidang Pengendalian, Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan

Dalam mendorong pemenuhan target ekspor dan pemanfaatan produk kehutanan dalam negeri, Kemenko Marves melakukan koordinasi dengan KLHK, Kemendag, dan Kemenperin. Pada akhir tahun 2022 tercatat kenaikan produksi kayu bulat naik hingga 1,93% dari tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari kendala kontraksi 1,14% karena penurunan produksi

kayu bulat yang disebabkan oleh beban operasional produsen kayu bulat yang terus meningkat, serta sejak Mei awal hingga Agustus, produk turunan kayu (produk industri kehutanan) terkendala sarana ekspor (vessel dan kontainer) sehingga industri mengurangi produksi.

Capaian nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu tahun 2022 sejumlah 14,52 M USD meningkat dari tahun 2021 yang sejumlah 13,56 M USD (Satu Data SIPHL KLHK, 2022). Pencapaian peningkatan tersebut, dapat diraih dengan beberapa program yang turut berkontribusi dalam menaikkan target ekspor produk kehutanan dan pemanfaatan produk kehutanan dalam negeri, antara lain:

1. Koordinasi dalam mendukung perubahan Permendag No. 19 Tahun 2021 guna peningkatan produk ekspor kehutanan;
2. Pemanfaatan HHBK yang salah satunya akan mendorong pemanfaatan bambu hulu-hilir dimulai dengan penyusunan Stranas Bambu;
3. Sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional, target 23% kontribusi EBT di tahun 2025, salah satunya diwujudkan dengan penggunaan co-firing biomassa dengan wood chips dan wood pellet pada PLTU Batubara, dimana telah melakukan kerja sama dengan PT Bukit Asam, Tbk dan PT Indominco Mandiri. *Pilot project* tersebut diharapkan akan menjadi percontohan pemberian nilai tambah pada limbah pertambangan, pemanfaatan APL, pemulihan lahan terdegradasi, serta membangun kemitraan perusahaan kehutanan dan masyarakat dimana PLTU batu bara dapat menyerap (*offtake*) biomassa berbasis kayu secara berkelanjutan melalui penanaman hutan tanaman energi tanaman berdaur cepat.

GAMBAR 16
NILAI PDB KEHUTANAN



Sumber: <https://phl.menlhk.go.id/infografis>

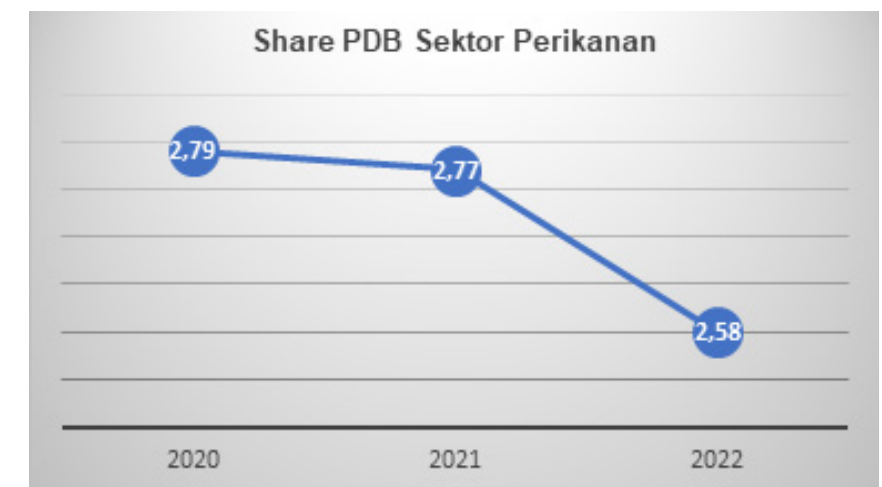
Selain itu, saat ini sedang disusun program interkoneksi data dan informasi produk kehutanan dimana data dari hulu KLHK akan dikolaborasikan dengan industri lanjutan binaan Kemenperin. Interkoneksi data ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi kebutuhan bahan baku serta menjadi salah satu solusi dalam memenuhi ketersediaannya dan mencegah penggunaan kayu ilegal pada industri lanjutan sehingga dapat meningkatkan PDB Kehutanan dan meningkatkan nilai jual produk kehutanan.

B. PDB Perikanan

PDB Perikanan ditentukan oleh produksi sumber daya perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya tersedia dan proses produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan nilai ekspor pada sektor perikanan. Capaian nilai produksi dan nilai ekspor tersebut disesuaikan pada Target RKP 2021. Dengan produksi yang berkelanjutan, maka kebutuhan akan sumber daya perikanan dijamin dapat terpenuhi mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Tahun 2022 PDB dari sub sektor perikanan berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 2,58%. Jika dibandingkan dengan kontribusi tahun 2021, yang berkontribusi sebesar 2,77%, capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,19%. Penurunan tersebut terlihat pada grafik berikut:

GRAFIK 15
DISTRIBUSI PDB SUB SEKTOR PERIKANAN TAHUN 2022



Sumber: BPS, Tahun 2022 (diolah)

PDB sektor perikanan berdasarkan estimasi capaian produksi perikanan pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 6.408.353 ton terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 2.017.975 ton dan perikanan

budidaya sebesar 4.390.378 ton. Produksi perikanan triwulan IV-2022 mengalami penurunan sebesar 0,20 persen dibandingkan dengan **estimasi** produksi perikanan triwulan IV-2021 (y-on-y) dan mengalami peningkatan sebesar 15,05 persen dibandingkan dengan **angka tetap** produksi perikanan triwulan IV-2021 (y-on-y).

Produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 11,58 persen dibandingkan dengan **estimasi** triwulan IV-2021 (y-on-y) dan mengalami peningkatan sebesar 7,14 persen dibandingkan dengan **angka tetap** triwulan IV-2021 (y-on-y). Produksi perikanan budidaya untuk komoditas ikan mengalami peningkatan sebesar 18,88 persen dibandingkan dengan **estimasi** triwulan IV-2021 (y-on-y) dan mengalami peningkatan sebesar 37,82 persen dibandingkan dengan **angka tetap** triwulan IV-2021 (y-on-y). Produksi perikanan budidaya untuk komoditas rumput laut mengalami penurunan sebesar 2,67 persen dibandingkan dengan **estimasi** triwulan IV-2021 (y-on-y) dan mengalami peningkatan sebesar 7,14 persen dibandingkan dengan **angka tetap** triwulan IV-2021 (y-on-y).

Peningkatan produksi perikanan budidaya pada triwulan IV tahun 2022 dibandingkan dengan **angka tetap** triwulan IV tahun 2021 maupun triwulan III tahun 2022 dikarenakan meningkatnya produksi rumput laut di beberapa Provinsi sentra rumput laut yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Maluku dan Jawa Timur dan selain provinsi sentra seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang sudah mulai menggiatkan budidaya rumput laut. Peningkatan tersebut karena kondisi iklim yang cukup baik dan perbaruan bibit rumput laut hasil kultur jaringan yang sudah mulai menyebar luas. Selain itu juga dampak peningkatan harga rumput laut pada akhir semester II 2022.

Sedangkan peningkatan produksi ikan air tawar, seiring dengan telah berproduksinya bantuan sarana dan prasarana untuk budidaya ikan antara lain pabrik pakan ikan dan kolam bioflok serta bantuan benih ikan tawar. Serta peningkatan sentra produksi perikanan budidaya seperti ikan lele dan nila terutama di Provinsi Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Saat ini berkembang juga produksi ikan-ikan endemik lokal seperti gabus, papuyu, toman di wilayah Kalimantan dan sidat yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cilacap.

Produksi perikanan tangkap triwulan IV tahun 2022 dipengaruhi oleh cuaca dan gelombang tinggi di beberapa daerah di Indonesia pada bulan Desember tahun 2022 seperti di PP. Belawan, PP. Karangantu, PP. Palabuhanratu, PP. Prigi, PP. Ternate, dan PP. Sungailiat. Laporan produksi yang didaratkan di pelabuhan perikanan menunjukkan ada peningkatan produksi di beberapa pelabuhan perikanan UPT pusat dan beberapa UPT daerah.

TABEL 64
ESTIMASI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA TRIWULAN IV TAHUN 2022

BIDANG USAHA	TW IV-2021***	TW IV-2022***	SATUAN : TON
			PERTUMBUHAN (PERSEN)
Perikanan	6,421,203	6,408,353	-0.20
Perikanan Tangkap	2,282,259	2,017,975	-11.58
- Laut	2,123,721	1,877,362	-11.60
- PUD	158,538	140,613	-11.31
Perikanan Budidaya	4,138,944	4,390,378	6.07
- Rumput Laut	2,458,633	2,392,877	-2.67
- diluar Rumput Laut	1,680,310	1,997,501	18.88

Sumber: KKP, 2022

Sepanjang tahun 2022, Kemenko Marves terus mendorong pencapaian atas target IKU PDB Perikanan, antara lain melalui pelaksanaan koordinasi kegiatan sebagai berikut:

- Pembentukan Kelompok Kerja yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 167/DII Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja nasional Peningkatan Produksi Industri udang tahun 2020-2024 serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 42/DII Tahun 2022 Tentang Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang Tahun 2022-2024.
- Mengkoordinasikan serta pengendalian terhadap Program Penangkapan Ikan Terukur menerapkan sistem kuota pada setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
- Menginisiasi dan mengkoordinasikan serta pengendalian atas kebijakan penangkapan ikan terukur dengan mempertimbangkan ekologi dan ekonomi yang mencakup nilai kesehatan laut, ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat, peluang investasi dan lapangan pekerjaan;
- Harmonisasi regulasi dan penyelenggaraan tata kelola kelembagaan usaha
- Mendorong dan menyelesaikan *the bottlenecking* atas pembangunan pelabuhan Bau-bau yang letaknya yang sangat strategis.

Succes Story atas upaya yang telah dilakukan Kemenko Maritim dalam mendorong pencapaian IKU PDB sektor Perikanan oleh K/L teknis, dalam hal koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara lain:

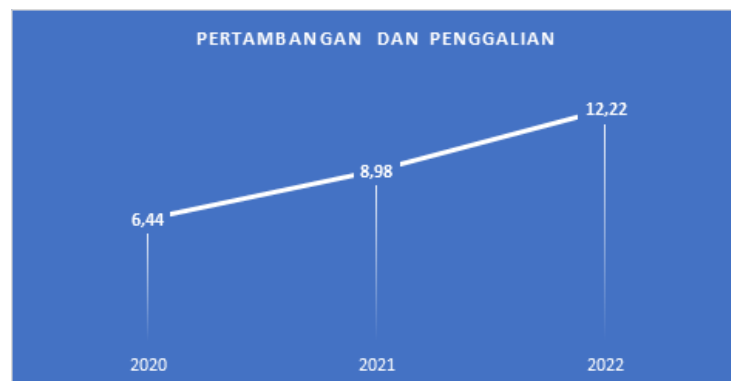
- Produksi Perikanan Budidaya:
 - Pembangunan kluster percontohan sebanyak 10 kawasan telah terealisasi.
 - Bantuan benih, Indukan dan Unit Kebun Bibit telah terealisasi dengan baik.

2. Produksi Perikanan Tangkap dan Nilai Tukar Nelayan:
 - Perizinan yang lebih terukur. Perizinan yang terukur tersebut memastikan bahwa kapasitas penangkapan ikan yang ada saat ini tidak melebihi ambang batas biologis aman yang telah ditetapkan;
 - Penguatan pengawasan kelautan dan perikanan yang berperan penting dalam mencegah adanya praktik IUU Fishing.
 - Faktor ekonomi yang pulih dari pandemi, membuat investasi di bidang perikanan tangkap meningkat;
 - Sistem perizinan yang lebih baik dengan sistem online dan semakin terintegrasi.
3. Nilai Ekspor Perikanan
 - Produksi perikanan tangkap dan budidaya terus meningkat.

C. PDB Pertambangan dan Penggalan

Sepanjang tahun 2022 sektor pertambangan dan penggalan berhasil menyumbang terhadap PDB nasional adalah sebesar 12,22%. Kontribusi ini mengalami kenaikan sebesar 3,24% dibandingkan tahun 2021. Yakni 8,98%, seperti terlihat pada grafik berikut:

GRAFIK 16
KENAIKAN PDB PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN ANTARA TAHUN 2022 DAN 2021



Sumber: BPS, Tahun 2022 (diolah)

D. PDB Pariwisata

Persentase kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada PDB Indonesia mengalami kenaikan. Berdasarkan data BPS, pada sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2022 berkontribusi sebesar 3,6% terhadap PDB nasional. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2021 persentase kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada PDB Indonesia adalah 2,43%. Dibandingkan kontribusi sektor pariwisata yang didukung oleh 2 subsektor tersebut, tahun 2022 mengalami kenaikan 1,17% dibanding tahun 2021. Seperti terlihat pada grafik di bawah ini:

GRAFIK 17
PERBANDINGAN SHARE PDB SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2022-2021



Sumber data: Kemenparekraf, 2022

Adapun perbandingan capaian IKU PDB Sumberdaya Alam dan Jasa tahun 2022 dan 2021 serta target IKU pada akhir Renstra tahun 2024 dan target RPJMN 2022, seperti pada tabel berikut:

TABEL 65
PERBANDINGAN CAPAIAN IKU PDB SUMBERDAYA ALAM DAN JASA

CAPAIAN KINERJA SS 7							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		
			2022	2021	2022	2024	RPJMN 2022
9	PDB Sumberdaya Alam dan Jasa	Moderate/Proxy	19	14,86	16,79	17,73	-

Sepanjang tahun 2022, Kemenko Marves terus mendorong pencapaian atas target IKU PDB Pariwisata, antara lain melalui pelaksanaan koordinasi kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Nasional Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang dihadiri oleh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah setiap semester
2. Koordinasi Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang dihadiri pejabat Eselon I yang diselenggarakan rutin tiap bulan
3. Mengoordinasikan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada 29 September 2022
4. Mendorong Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran pariwisata
5. Mendorong Pemerintah Daerah, Kemenkeu, OJK, dan Perbankan melakukan perluasan akses permodalan untuk mendukung UMKM pendukung pariwisata *onboarding* ke ekosistem digital

6. Mengakselerasi proses penyusunan RPerpres RIDPN Danau Toba dan Borobudur
7. Mendorong penerapan ekonomi biru, hijau, dan sirkular di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas
8. Mengoordinasikan pendirian Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Mengoordinasikan pengembangan *Geopark*
9. Mengoordinasikan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata meliputi:
10. Pemetaan kebutuhan SDM yang difasilitasi pelatihan dan sertifikasi sektor perikanan;
 - Skema peningkatan, penguatan, dan penambahan kompetensi sektor perikanan;
 - Peningkatan alokasi pelatihan dan pemagangan sektor perikanan; dan
 - Peningkatan sarana prasarana di Balai Latihan Kerja

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

Bidang Produksi Perikanan Tangkap dan Nilai Tukar Nelayan:

- Perizinan yang lebih terukur. Perizinan yang terukur tersebut memastikan bahwa kapasitas penangkapan ikan yang ada saat ini tidak melebihi ambang batas biologis aman yang telah ditetapkan;
- Penguatan pengawasan kelautan dan perikanan yang berperan penting dalam mencegah adanya praktik IUU Fishing.
- Faktor ekonomi yang pulih dari pandemi, membuat investasi di bidang perikanan tangkap meningkat;
- Sistem perizinan yang lebih baik dengan sistem online dan semakin terintegrasi.

Kendala dalam Pencapaian IKU

- a) Regulasi yang mengatur integrasi sektor hulu dan hilir produk industri kehutanan, yang berfungsi meningkatkan pengawasan penggunaan kayu sekaligus menjaga ketersediaan bahan baku kayu bagi industri hilir perlu disusun.
- b) Belum terdapat kebijakan mandatori untuk penggunaan kayu legal pada pasar domestik, hal ini mendorong peningkatan PNBP dan kelestarian sumber daya hutan.
- c) Izin impor mesin plywood dalam keadaan tidak baru (BMTB) belum dibuka, untuk meningkatkan penggunaan kayu hutan rakyat, serta mendorong produksi mesin plywood tersebut untuk diproduksi dalam negeri.
- d) Adanya automatic adjustment dan *refocusing* anggaran sebagai antisipasi penanganan covid di 2022, menyebabkan dinamika kebijakan. Program yang telah disusun ditahun sebelumnya perlu di atur ulang agar pencapaian terget dapat tetap terlaksana dengan baik, sekalipun berpotensi mendapatkan hasil yang kurang optimal.

Rencana Tindak Lanjut Periode Selanjutnya

- a) Melanjutkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan menjaga produktifitas dan keberlangsungan usaha, antara lain melalui penguatan insentif kebijakan fiskal.
- b) Percepatan Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya.
- c) Meningkatkan peran dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan berbasis agroforestry dalam rangka peningkatan produktifitas hutan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Perhutanan Sosial antara lain Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan kemitraan, untuk mendukung industri pengolahan hasil hutan dan industri lainnya.
- d) Meningkatkan pelayanan pemanfaatan hutan berbasis digital yang terintegrasi mulai dari Perencanaan, Produksi, Pembayaran PNBP, Peredaran, Pemasaran hingga Ekspor melalui penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SI-PHPL).
- e) Dilakukan Koordinasi pada Level Menteri dengan pembahasan terkait Target Produksi dan Ekspor Udang 2021-2024;
- f) Dilakukan pengembangan budidaya laut (Marikultur) terpadu di Seram Barat;
- g) Akselerasi produksi rumput laut Kab. Maluku Tenggara dan Akselerasi Produksi Rumput Laut di Kab. Tanimbar.
- h) Mendorong dan berkoordinasi melalui kebijakan dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam Perikanan Tangkap untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan melalui Penangkapan Terukur yang dilakukan oleh K/L teknis. Perikanan budidaya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui devisa ekspor, pajak, PNBP, maupun sumber penerimaan substitusi impor.
- i) Mengusulkan jika kedepan terdapat program *refocusing*, untuk perubahan - perubahan yang akan dilakukan perlu berkoordinasi dengan Kemenko Marves, khususnya terkait justifikasi perubahan yang akan dilakukan.
- j) Mendorong K/L teknis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian guna melanjutkan Pengembangan Budidaya untuk Ekspor (Revitalisasi dan Modelling Budidaya Udang; Percontohan Pembenihan dan Budidaya Lobster; Percontohan Pembenihan Kepiting dan Rajungan; Rumput Laut Kultur Jaringan Skala Intermediet).
- k) Mendorong K/L teknis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian guna melanjutkan Pembangunan Kampung Perikanan Budidaya (124 Kampung (Penetapan 2022) dan 90 Kampung Baru (Penetapan 2023))
- l) Mendorong K/L teknis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian guna melanjutkan Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat (Benih, calon induk, bioflok, excavator, KJA HDPE, kincir,

mesin dan bahan baku pakan, kebun bibit rumput laut, rehabilitasi UPR/HSRT, sarpras budidaya ikan lokal, premi asuransi usaha, dan ikan hias).

- m) Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap Program Prioritas Kementerian (Broodstock Center, Produksi Calin di UPT, Produksi Pakan di UPT, Rehab UPT, Upgrade Pabrik Pakan, NSPK, Bimbingan Teknis, Sosialisasi Kebijakan).

Success story

- 1) Produksi Perikanan Budidaya:
 - a. Pembangunan kluster percontohan sebanyak 10 kawasan telah terealisasi.
 - b. Bantuan benih, Indukan dan Unit Kebun Bibit telah terealisasi dengan baik.
- 2) Nilai Ekspor Perikanan; Produksi perikanan tangkap dan budidaya terus meningkat.

Data dukung atas pencapaian IKU PDB Sumberdaya Alam dan Jasa terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

2) IKU 10 Tingkat Komponen Dalam Negeri

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, gabungan barang dan jasa. TKDN Barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Harga barang jadi merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.

TKDN Jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan. Harga jasa keseluruhan dikeluarkan untuk menghasilkan jasa yang hitung sampai di lokasi pengerjaan.

Tujuan dari IKU ini yaitu untuk mengetahui berapa persen TKDN dari produk-produk yang dihasilkan melalui pengembangan produk logam, mesin, elektronika, dan alat angkut dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri berupa barang dan jasa akan membangkitkan industri nasional dan akan menarik banyak investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam jangka panjang hal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam negeri dan membentuk kemandirian dalam berusaha untuk peningkatan ekonomi.

Nilai TKDN menggunakan data yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian. Komponen Dalam Negeri. Nilai ini dihitung dengan menggunakan formula:

Rata-rata nilai TKDN pada produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN

Berdasarkan data pada: <http://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php> jumlah sertifikat TKDN yang diterbitkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 8,254 sertifikat untuk 14.766 produk (1 sertifikat TKDN dapat berisi dari 1 jenis produk) sehingga jumlah keseluruhan sertifikat TKDN yang masih berlaku sampai dengan akhir Desember 2022 sebanyak 21.241 sertifikat untuk 33.401 produk dengan rata-rata nilai TKDN sebesar 49,83%. Adapun jumlah sertifikat seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 66
CAPAIAN JUMLAH SERTIFIKAT TKDN TAHUN 2020 S.D 2022

URAIAN	TARGET RPJMN		CAPAIAN TKDN	
	2022	2020	2021	2022
Sertifikat TKDN	7.000	990	10.417	21.241

Produk dalam negeri memiliki tiga poin utama:

- Perusahaan berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
- Seluruh atau sebagian tenaga kerja berasal dari WNI.
- Seluruh atau sebagian bahan baku/komponen berasal dari dalam negeri.

Target RPJMN terhadap TKDN tahun 2022 sebanyak 7.000 sertifikat, sedangkan capaian tahun 2022 sebanyak 21.241. untuk tahun mendatang, capaian ini tetap dipertahankan/ditingkatkan sehingga dapat memenuhi target TKDN Tahun 2023.

TABEL 67
REKAPITULASI DATA SERTIFIKAT TKDN BERDASARKAN KELOMPOK BARANG TAHUN 2022

NO	KELOMPOK BARANG	JUMLAH SERTIFIKAT (MASIH BERLAKU)	JUMLAH SERTIFIKAT (SELURUHNYA)	PRODUK DENGAN TKDN < 25%	PRODUK DENGAN TKDN 25%-40%	PRODUK DENGAN TKDN > 40%
1.	BAHAN PENUNJANG PERTANIAN	931	1.116	38	116	1.138
2.	MESIN DAN PERALATAN PERTANIAN	465	697	32	225	347
3.	MESIN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN	17	47	8	15	15
4.	MESIN DAN PERALATAN MIGAS	900	1.856	318	676	553
5.	ALAT BERAT, KONSTRUKSI DAN MATERIAL HANDLING	54	108	7	33	18
6.	MESIN DAN PERALATAN PABRIK	80	178	8	44	41
7.	BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI	2.046	2.771	98	269	2.820
8.	LOGAM DAN BARANG LOGAM	1.634	2.694	152	410	1.773
9.	BAHAN KIMIA DAN BARANG KIMIA	1.975	3.556	527	817	1.274
10.	PERALATAN ELEKTRONIKA	1.047	1.299	287	721	639
11.	PERALATAN KELISTRIKAN	2.180	4.690	386	739	2.973
12.	PERALATAN TELEKOMUNIKASI	764	1.622	46	777	96
13.	ALAT TRANSPORT	165	294	8	100	68
14.	BAHAN DAN PERALATAN KESEHATAN	2.795	3.695	233	3.039	2.350
15.	PERALATAN LABORATORIUM	4	8	9	3	1

NO	KELOMPOK BARANG	JUMLAH SERTIFIKAT (MASIH BERLAKU)	JUMLAH SERTIFIKAT (SELURUHNYA)	PRODUK DENGAN TKDN < 25%	PRODUK DENGAN TKDN 25%-40%	PRODUK DENGAN TKDN > 40%
16.	KOMPUTER DAN PERALATAN KANTOR	350	514	40	181	609
17.	PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN KERJA	574	771	10	100	524
18.	PERALATAN OLAHRAGA DAN PENDIDIKAN	302	413	11	155	267
19.	SARANA PERTAHANAN	45	145	4	5	131
20.	BARANG LAINNYA	4.913	5.915	201	1.199	4.884
JUMLAH		21.241	32.389	2.414	9.624	20.539
JUMLAH PRODUK BERSERTIFIKAT TKDN YANG MASIHBERLAKU		33.401	sumber: http://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php			
TKDN RATA-RATA TERTIMBANG		49,83%				

Untuk data realisasi tahun 2022 sebesar 49,83 atau 108,32% dari target tahun 2022 yaitu 46. Adapun target IKU TKDN tahun 2022 sebesar 46, seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 68
REKAPITULASI DATA SERTIFIKAT TKDN BERDASARKAN BERDASARKAN TAHUN TERBIT

TAHUN	JUMLAH SERTIFIKAT	JUMLAH PRODUK
2011	2.042	2.481
2012	1.546	3.140
2013	578	1.285
2014	444	1.103
2015	1.002	2.735
2016	1.441	2.901
2017	949	1.654
2018	1.543	2.714
2019	1.207	3.207
2020	2.549	5.886
2021	11.683	15.105
2022	8.254	14.766

TABEL 69
CAPAIAN KINERJA IKU TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 7					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
10	Tingkat Komponen Dalam Negeri	Low/Proxy	46	49,83	108,33
CAPAIAN					108,33

Sebagai perbandingan realisasi tahun 2022 dan 2021 serta target akhir tahun 2024 dari indikator TKDN sebagai berikut:

TABEL 70
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

CAPAIAN KINERJA SS 7						
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET	
			2022	2021	2022	2024
10	Tingkat Komponen Dalam Negeri	%	49,83	44,9	46	50

Dalam rangka mempertahankan pencapaian IKU TKDN ini, Kemenko Marves merekomendasikan kepada K/L terkait untuk melakukan optimalisasi pelayanan dalam pengoperasian aplikasi P3DN dan mendorong peningkatan sertifikasi TKDN. Dukungan yang dilakukan Kemenko Marves dalam pelaksanaan pemantauan P3DN sepanjang tahun 2022, antara lain yaitu:

- Mendorong kementerian/lembaga/perangkat daerah untuk menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%
- Mendorong pemberian preferensi harga kepada produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar dari 25%, bagi pengadaan di atas Rp1 Miliar. Preferensi harga adalah insentif kelebihan harga yang dapat diterima.
- Mendorong Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terkait Usaha Mikro dan Kecil, yaitu dengan: Menaikan Batasan nilai paket untuk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi menjadi Rp1 Miliar; Kewajiban pengalokasian paling sedikit 40% nilai anggaran belanja Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan untuk melakukan pengawasan, dan evaluasi untuk menilai sejauh mana berjalannya program P3DN.
- Mendorong Penyusunan regulasi TKDN Industri Maritim dalam tahap rancangan awal khususnya pembahasan terkait lingkup regulasi dan usulan formulasi (pembobotan) TKDN industri maritim pada komponen utama, komponen pendukung, riset dan pengembangan, serta proses manufaktur/perakitan
- Melaksanakan koordinasi penyusunan regulasi tentang TKDN industri maritim khususnya formulasi TKDN pada komponen utama, komponen pendukung, riset dan pengembangan, serta proses manufaktur/perakitan dan penyusunan kajian akademis.
- Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi produk dalam negeri;

- h) Mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan.
- i) Pengendalian penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pembangunan IKN dengan alokasi APBN untuk TKDN sebesar 40% dapat menumbuhkan ekonomi Indonesia hingga 1,73% akibat adanya penyerapan tenaga kerja. Nilai pertumbuhan ekonomi ini belum termasuk alokasi dari BUMN dan lainnya.
- j) Pengendalian atas produk impor dilarang apabila TKDN sudah bernilai $\geq 40\%$ atau $\text{TKDN} + \text{BMP} \geq 40\%$ (dengan nilai TKDN minimal 25% dan nilai BMP maksimal 15%), serta PDN dengan TKDN $> 25\%$.
- k) Pengendalian produk dalam negeri ber-TKDN, saat ini sudah terdapat 26.070 produk.
- l) Mendukung penerapan TKDN dalam pengembangan IKN dan merekomendasikan adanya pertemuan rutin membahas hal ini bersama Kementerian Perindustrian dan pihak-pihak yang terkait.
- m) Mendorong regulasi TKDN pada kerja sama bisnis yang terbit tahun 2022

Faktor Pendukung pencapaian IKU, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil.

Kendala

1. Program sertifikasi TKDN gratis yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020 dan 2021 tidak dilanjutkan pada Tahun 2022
2. Dibutuhkan sertifikasi TKDN untuk lebih banyak produk
3. Industri kecil sulit untuk mendapatkan sertifikat TKDN dikarenakan kendala biaya dan persyaratan dokumen yang tidak dapat dipenuhi
4. Penghitungan TKDN industri kecil memerlukan kemudahan namun tetap dapat dipertanggungjawabkan

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian IKU pada tahun mendatang yaitu memperkuat koordinasi dengan *Stakeholders* maupun K/L serta dukungan, terkait guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, agar diberi kemudahan dalam proses sertifikasi TKDN bagi lebih banyak produk dalam negeri serta penyesuaian target TKDN untuk setiap sektor industri dengan kemampuan industri dalam negeri. Di Tahun 2023, IKU ini sudah direviu dan tidak lagi menjadi IKU Menteri.

Success story dari dalam pencapaian kinerja dari IKU ini adalah:

1. Jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku pada Tahun 2022 sebanyak 33.401 produk dengan jumlah sertifikat TKDN sebanyak 21.241 buah.
2. Kemenko Marves bersama dengan Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun

2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri.

3. Untuk Industri Kecil diberikan kemudahan dalam proses pengurusan TKDN dan tidak ada biaya sertifikasi Rp0 (gratis).

Data dukung atas pencapaian IKU Tingkat Komponen Dalam Negeri terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

e. SS 8: Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter, dan Berbudaya Nusantara

Maksud dari SS 8 Menguatnya Jati Diri Indonesia Sebagai Bangsa Bahari adalah bertambah kuatnya jiwa semangat, daya gerak, budaya, ciri khas bangsa Indonesia yang bercirikan/berkaitan dengan kelautan. SS 8 memiliki 1 IKU yaitu Indeks Kapabilitas Inovasi/*Global Innovation Index* (GII). Indeks ini menggunakan data dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO), *Cornell University* dan *INSEAD*.

1) IKU 11 Indeks Kapabilitas Inovasi

Nilai Indeks Kapabilitas Inovasi merupakan hasil survei dengan menggunakan 81 (delapan puluh satu) indikator untuk mengukur kemampuan inovasi dan hasilnya yang dihasilkan oleh suatu negara. Indeks Kapabilitas Inovasi/*Global Innovation Index* (GII) memuat peringkat negara paling inovatif. Inovasi menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Inovasi juga merupakan kunci suatu negara agar tetap bertahan dalam persaingan global. GII bertujuan untuk menyediakan peringkat dan analisis terpercaya yang merujuk pada 132 negara. Selama dekade terakhir, GII telah ditetapkan sebagai referensi terdepan dalam inovasi dan “alat untuk bertindak” bagi ekonomi dalam agenda inovasinya.

GAMBAR 17
7 PILAR PENILAIAN INDEKS INOVASI GLOBAL



GII telah menjadi alat tolok ukur bagi para eksekutif bisnis, pembuat kebijakan, ilmuwan, dan mereka yang mencari wawasan tentang keadaan inovasi di seluruh dunia. Inovasi di setiap negara dinilai dengan menggunakan 7 pilar, mulai dari kriteria institusi, human capital dan research, infrastruktur, kredit, investasi, keterkaitan; penciptaan, penyerapan dan penyebaran pengetahuan; dan keluaran kreatif.

Berdasarkan hasil penilaian indeks inovasi global bagi seluruh dunia menempatkan Indonesia berada pada peringkat 75 dari 132 negara yang dirilis oleh Lembaga *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada bulan Oktober 2022, Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya peringkat Indonesia atas pencapaian GII mengalami lompatan peringkat dari 87 pada tahun 2021 menjadi peringkat 75 pada tahun ini.

Adapun target tahun 2022 adalah 39,5 dengan realisasi 27,9 dengan capaian 70,63, seperti pada tabel berikut:

TABEL 71
CAPAIAN KINERJA IKU INDEKS KAPABILITAS INOVASI TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 8					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
11	Indeks Kapabilitas Inovasi	Low/Proxy	39,5	27,9	70,63
CAPAIAN (%)					70,63

Nilai atas indeks ini pada tahun 2022 menunjukkan adanya kenaikan 0,8 poin jika dibanding dengan realisasi tahun 2021 dengan nilai 27,1. Namun demikian masih jauh dari target IKU tahun 2022. Beberapa pilar penilaian GII mengalami kenaikan seperti diuraikan di bawah ini.

Tabel berikut menunjukkan peringkat Indonesia selama tiga tahun terakhir, mencatat bahwa ketersediaan data dan perubahan kerangka model GII mempengaruhi perbandingan peringkat GII dari tahun ke tahun. Interval kepercayaan statistik untuk peringkat Indonesia di GII 2022 adalah antara peringkat 70 dan 76.

TABEL 72
PERINGKAT GII INDONESIA (2020 – 2022)

GIIR	GII	INNOVATION INPUTS	INNOVATION OUTPUTS
2020	85	91	76
2021	87	87	84
2022	75	72	74

Sumber: WIPO 2022

Indonesia membuat lompatan besar, mencapai posisi terbaiknya sejak 2012, ketika berada di peringkat 100. Tahun ini, telah membuat peningkatan

penting dalam hubungan Inovasi dan aset tidak berwujud, berkinerja baik dalam indikator seperti Keuangan untuk perusahaan rintisan dan peningkatan (4th), *State of cluster development* (9th), kolaborasi R&D Universitas-industri (13th), dan *corporate Intensitas aset tidak berwujud* (13). Sebagai gambaran posisi Indonesia untuk indeks inovasi global dari tahun 2013-2022 sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

GRAFIK 18
PERBANDINGAN PERINGKAT GII INDONESIA (2023-2022)

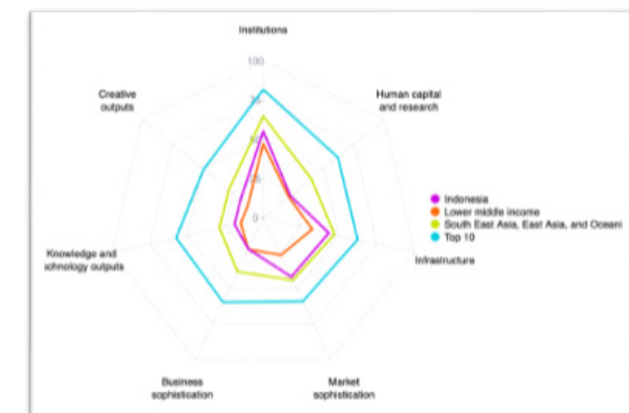


Sumber: WIPO 2022 (diolah)

Indonesia berkinerja lebih baik dalam input inovasi daripada output inovasi pada tahun 2022. Tahun ini Indonesia menempati peringkat ke-72 dalam input inovasi, lebih tinggi dari tahun 2021 dan 2020. Untuk output inovasi, Indonesia menempati urutan ke-74. Posisi ini lebih tinggi dari 2021 dan 2020.

Indonesia menempati urutan ke-9 di antara 36 kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Indonesia menempati urutan ke-13 dari 17 ekonomi di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania. Berikut skor 7 (tujuh) pilar GII untuk Indonesia:

GAMBAR 18
SKOR 7 (TUJUH) PILAR GII UNTUK INDONESIA



Sumber: WIPO 2022

Kemenko Marves mendorong atas pencapaian Global Innovation Index (GII) untuk pilar infrastruktur. Capaian pilar infrastruktur Indonesia tahun 2022 sebesar 43,4 berapa pada peringkat ke 68, seperti terlihat pada gambar berikut:

GAMBAR 19
7 (TUJUH) PILAR PENILAIAN GII INDONESIA
TAHUN 2022



TABEL 73
PENILAIAN GII PILAR INFRASTRUKTUR INDONESIA
TAHUN 2022

		Skor	Rank
Infrastructure		43.4	68
3.1 Information and communication technologies (ICTs)		72.5	66
3.1.1 ICT access*		89.2	54
3.1.2 ICT use*		57.8	79
3.1.3 Government's online service*		68.2	72
3.1.4 E-participation*		75.0	57
3.2 General infrastructure		34.3	48
3.2.1 Electricity output, GWh/mn pop.		1,052.9	96
3.2.2 Logistics performance*		51.2	44
3.2.3 Gross capital formation, % GDP		31.5	18
3.3 Ecological sustainability		23.2	79
3.3.1 GDP/unit of energy use		13.4	34
3.3.2 Environmental performance*		28.2	119
3.3.3 ISO 14001 environmental certificates/bn PPP\$ GDP		0.7	75

Sumber: WIPO 2022

TABEL 74
PERINGKAT INDONESIA ANTAR NEGARA ASIA TENGGARA PADA INDEKS INOVASI GLOBAL TAHUN 2022

PERINGKAT		NEGARA	SKOR
ASIA TENGGARA	DUNIA		
1	7	Singapura	57,03
2	36	Malaysia	38,7
3	43	Thailand	34,9
4	48	Vietnam	34,2
5	59	Philphina	30,7
6	75	Indonesia	27,9
7	92	Brunei	22,2
8	97	Kamboja	20,5
9	112	Laos	17,4
10	116	Myanmar	16,6

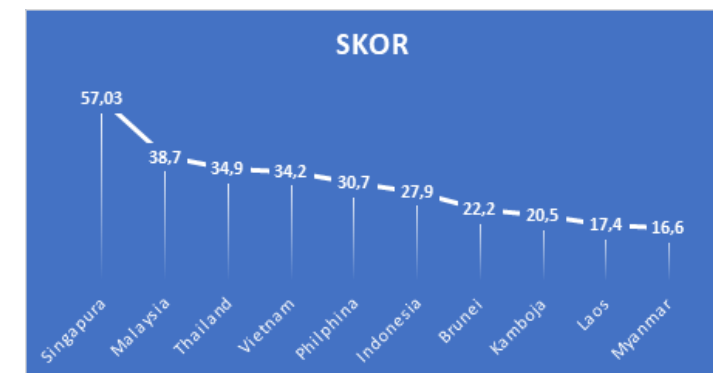
Sumber: WIPO 2022 (diolah)

Beberapa negara di wilayah Asia Tenggara peringkatnya lebih baik dari Indonesia yaitu: Singapura (57,03), Malaysia (38,7), Thailand (34,9) dan Vietnam (34,2), dan Filipina (30,7). Di dalam kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan, Vietnam (ke-48), Filipina (ke-59), Indonesia (ke-75), Kamboja (ke-97) dan Republik Demokratik Rakyat Laos (112) telah membuat kemajuan terbesar selama dekade terakhir, naik lebih dari 20 peringkat. Perekonomian ini juga terus memimpin dalam indikator inovasi utama. Vietnam menempati peringkat 1 dunia dalam impor berteknologi

tinggi, Filipina berada di urutan ke-2 dalam ekspor berteknologi tinggi, dan Indonesia memegang posisi kedua di dunia dalam kebijakan dan budaya Kewirausahaan.

Di luar China dan India, Vietnam (ke-48), dan Filipina (peringkat ke-59) adalah ekonomi berpenghasilan menengah dengan inovasi tercepat hingga saat ini, menggarisbawahi pentingnya mempertahankan upaya inovasi dari waktu ke waktu. Indonesia (peringkat 75), pada gilirannya, menunjukkan potensi inovasi yang menjanjikan. Pada GII 2022, 26 negara unggul dalam inovasi dibandingkan dengan perkembangan negara tersebut, termasuk pendatang baru Indonesia.

GRAFIK 19
SKOR GII NEGARA ASIA TENGGARA TAHUN 2022



Tabel di bawah ini memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan indikator Indonesia pada GII 2022.

TABEL 75
KEKUATAN DAN KELEMAHAN INDIKATOR INDONESIA PADA GII 2022

Strengths			Weaknesses		
CODE	INDICATOR NAME	RANK	CODE	INDICATOR NAME	RANK
1.3.2	Entrepreneurship policies and culture	2	1.2.3	Cost of redundancy dismissal	130
3.2.3	Gross capital formation, % GDP	18	2.1.2	Government funding/pupil, secondary, % GDP/cap	96
4.1.1	Finance for startups and scaleups	4	2.1.4	PISA scales in reading, maths and science	72
4.3.2	Domestic industry diversification	20	2.2.3	Tertiary inbound mobility,%	110
4.3.3	Domestic market scale, bn PPP\$	7	2.3.3.	Global corporate R&D investors, top 3, mn USD	38
5.2.1	University-industry R&D collaboration	13	3.3.2	Environmental performance	119
5.2.2	State of cluster development and depth	9	4.1.3	Loans from microfinance institutions, % GDP	58
6.2.3	Software spending, % GDP	24	5.1.2	Firms offering formal training, %	98
7.1.1	Intangible asset intensity, top 15, %	13	5.2.3	GERD financed by abroad, % GDP	94
7.2.5	Creative goods exports, % total trade	22	6.1.4	Scientific and technical articles/bn PPP\$ GDP	128

Sumber: WIPO 2022

Sebagai perbandingan capaian tahun 2022 dan tahun 2021 serta target akhir Renstra Kemenko Marves tahun 2024 dan target RPJMN 2022 atas indikator ini adalah sebagai berikut:

TABEL 76
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU INDEKS KAPABILITAS INOVASI

CAPAIAN KINERJA SS 8							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		RPJMN 2022
			2022	2021	2022	2024	
11	Indeks Kapabilitas Inovasi	Nilai	27,9	27,21	39,5	41,5	-

Untuk mendukung pencapaian IKU Indeks Kapabilitas Inovasi ini, upaya dan kegiatan yang telah dilakukan Kemenko Marves pada tahun 2022 yaitu:

- Memperkuat kelemahan beberapa indikator penilaian indeks inovasi yang ada pada tahun 2021, serta mempertahankan beberapa indikator penilaian yang menjadi kekuatan pada tahun 2021;
- Mendorong K/L teknis dengan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan agar semakin ditingkatkan serta melaksanakan pemantauan *Major Project* secara berkala;
- Mendorong pelaksanaan kompetisi The Challengers "Inovasi Indonesia", ajang para inovator Indonesia agar rutin diadakan setiap tahun, sebagai ajang menciptakan inovasi baru;
- Mendorong untuk menggelar Focus Group Discussion dalam upaya mengevaluasi Global Innovation Index Indonesia secara berkala.

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif untuk mewujudkan infrastruktur ekonomi kreatif dan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif sehingga dapat mendorong peningkatan sektor ekonomi kreatif.

Kendala dalam pencapaian IKU

- Data dukung atas capaian IKU ini berasal dari lembaga eksternal (*World Intellectual Property Organization/WIPO*) untuk mengukur capaiannya baik itu triwulanan maupun tahunan menunggu rilis dari lembaga tersebut, hal ini menjadi kendala apabila WIPO tidak merilis hasil penilaiannya.
- Dari 7 pilar yang menjadi aspek penilaian, Kemenko Marves hanya 2 aspek yang sesuai dengan tugas/fungsi nya yaitu pilar infrastruktur dan keluaran kreatif, sehingga tingkat kendali untuk pilar lainnya terlalu jauh, sehingga menjadi kendala Kemenko Marves atas capaian IKU ini.

Rencana Tindak Lanjut /Inovasi Periode Selanjutnya

Berdasarkan hasil pembahasan oleh internal Kemenko Marves, IKU Indeks Kapabilitas Inovasi pada tahun 2023 dan selanjutnya tidak dimasukkan menjadi IKU Menteri Koordinator. Adapun alasannya karena IKU yang dikeluarkan oleh Lembaga eksternal (*World Intellectual Property Organization/WIPO*) kendali dari Kemenko Marves terlalu jauh dari 7 pilar aspek penilaian (kriteria institusi, human capital dan research, infrastruktur, kredit, investasi, keterkaitan; penciptaan, penyerapan dan penyebaran pengetahuan; dan keluaran kreatif) hanya infrastruktur dan keluaran kreatif yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenko Marves sehingga untuk mengukur ketercapaian nya mengalami kendala.

Data dukung atas pencapaian IKU Indeks Kapabilitas Inovasi terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

3) Internal Business Process Perspective

Internal Business Process perspective memiliki bobot sebesar 40% dari target capaian total. Terdiri dari 2 SS (SS 9 dan 10) dan 2 IKU (IKU 12 dan 13). Kedua SS tersebut yaitu: 1) Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien dan 2) Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien. Sedangkan ke-2 IKU tersebut adalah 1) Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan dan 2) Persentase Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti.

a. SS 9: Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien

Tujuan dari SS 9 yaitu untuk mengukur efektifitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kemaritiman. Kebijakan Kemaritiman yang Efektif merupakan gagasan atau rancangan ketentuan bidang kemaritiman yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan serta dapat diimplementasikan melalui suatu ketetapan atau lainnya.

1) IKU 12 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan

Indikator ini menggambarkan persentase keberhasilan penyusunan rekomendasi kebijakan guna penyelesaian permasalahan di bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Sumber Daya Maritim, Infrastruktur dan Transportasi, Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Investasi dan Pertambangan yang dihasilkan dan ditetapkan kedalam Rumusan atau Rekomendasi Kebijakan. SS 9 memiliki 1 IKU yaitu Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan. Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan dihitung dengan menggunakan formula:

$$\frac{(\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Menko Marves yang ditindaklanjuti K/L})}{(\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan})} \times 100$$

Rancangan kebijakan yang mendukung IKU ini sebagai berikut:

a) Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama tahun 2018 s.d 2020 sudah mengkoordinasikan penyelesaian beberapa kasus ABK. diantaranya adalah pelarungan ABK Indonesia di Kapal Long Xin 929 berbendera China, penelantaran 12 ABK Indonesia yang bekerja di Kapal *Percamaro Dos* (Panama) di Namibia dll.

Memperhatikan kondisi yang dihadapi pelaut dan awak kapal perikanan tersebut, perlu disusun Rencana Aksi Nasional perlindungan pelaut dan awak kapal perikanan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Tujuan penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan (RAN PAKP) adalah untuk memastikan negara hadir untuk memberikan perlindungan yang layak dan wajar kepada setiap warga negara Indonesia khususnya warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sektor perikanan tangkap baik yang bekerja di dalam negeri mau pun di luar negeri.

Untuk memperkuat penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan (RAN PAKP) telah dilaksanakan *Fair Seas Labour Conference* (SEA Forum for Fishers bulan September 2022, Tindak lanjut *Fair Seas Labour Conference* (SEA Forum for Fishers) akan menjadi forum kerja sama regional/internasional dalam upaya untuk: 1). Meningkatkan perlindungan terhadap pekerja sektor perikanan dan pengolahan produk perikanan khususnya di kawasan Asia Tenggara yang mengedepankan penghormatan hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak; 2). Mendorong ratifikasi konvensi C-188 sebagai perangkat perlindungan terhadap pekerja sektor perikanan bagi negara- negara yang belum meratifikasi.

Sepanjang tahun 2022 untuk pencapaian rancangan kebijakan tersebut, Kemenko Marves telah melaksanakan:

- Koordinasi Penanganan Kasus 5 ABK Indonesia kapal UNIPROFIT yang terlantar di Taiwan
- Koordinasi Penanganan Kasus 8 ABK WNI Kapal SEA BISE yang terlantar di Dubai
- Sinkronisasi *Fair Seas Labour Conference* (SEA Forum for Fishers)
- Validasi rekomendasi kebijakan RAN PAKP oleh Tim Kemenko Marves untuk proses pengesahan sebelum dikirimkan kepada Presiden.

b) Rancangan Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI menilai perlu untuk mengawal kepentingan nasional Indonesia dalam pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia. Proses yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini merupakan bagian dari hak dan kewenangan Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*).

Sesuai ketentuan Konvensi tersebut, negara pihak Konvensi dapat mengajukan klaim perluasan landas kontinen di luar 200 mil laut, hingga sejauh-jauhnya 350 Mil laut, dari garis pangkal apabila diyakini dan dapat dibuktikan secara ilmiah di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB bahwa area yang diklaim merupakan kepanjangan alamiah dari daratan negara tersebut.

Pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil laut untuk melakukan percepatan penyusunan dokumen submisi kepada PBB dan mengawal klaim Indonesia hingga terbitnya rekomendasi final PBB. Tim juga mendapat mandat untuk menyiapkan data teknis (termasuk menyelenggarakan survei) serta membuka komunikasi dengan negara tetangga yang memiliki klaim tumpang tindih/bersebelahan dengan Indonesia. Proses submisi perluasan landas Kontinen Indonesia merupakan salah satu bentuk pembuktian kualitas dan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Pada setiap tahapannya, Indonesia tidak menerima bantuan tenaga ahli ataupun peralatan dari asing.

Guna pencapaian rancangan kebijakan tersebut, tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Kemenko Marves yaitu:

- Konsolidasi Penyampaian Presentasi Submisi Parsial Ketiga Landas Kontinen Ekstensi Segmen Barat Daya Sumatera dan Penyerahan Dokumen Submisi Parsial Keempat Landas Kontinen Ekstensi Segmen Selatan Jawa dan Selatan Nusa Tenggara kepada UN-CLCS di New York yang dilakukan bersama Tim Nasional Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut
- Penyerahan dokumen submisi untuk segmen selatan Jawa-Nusa Tenggara yang dilakukan oleh Pemerintah RI dengan diwakilkan kepada Direktur Division of Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS), UN-DOALOS.
- Koordinasi Tindak Lanjut Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 M aut Indonesia, yakni untuk segmen barat daya Sumatra.

- Penyampaian dokumen submisi parsial keempat Pemerintah RI, untuk segmen selatan Jawa-selatan Nusa Tenggara kepada *United Nations Commission on the Limits Continental Shelf* (UN-CLCS).
- Pertemuan dengan *United Nations Division on Ocean Affairs and Law of the Sea* (UN-DOALOS) dalam rangka konsultasi terkait submisi perluasan landas kontinen di luar 200 Mil laut Indonesia; dan
- Pertemuan bilateral Indonesia dengan Australia guna membahas submisi parsial keempat Indonesia.

c) Rancangan Kebijakan Pengendalian FIR

Realignment Flight Information Region (FIR) merupakan program nasional yang diamanatkan dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mensyaratkan *realignment* tersebut selesai dilaksanakan paling lambat pada tahun 2024. Dalam rangka melakukan percepatan terhadap amanat Undang-Undang dimaksud, Presiden memberi arahan khusus agar perundingan *realignment* FIR dapat diselesaikan untuk kemudian dapat dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Indonesia paling lambat pada tahun 2019. Hal tersebut juga merupakan usaha pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai *sky navigational master* di Asia dengan meningkatkan kapasitas pelayanan FIR di Indonesia.

Indonesia terus mendorong kerja sama terkait *Flight Information Region* (FIR) atau wilayah ruang udara tertentu, yang menyediakan layanan informasi penerbangan dan peringatan penerbangan. Salah satunya dengan Singapura yang sudah mencapai tahap penandatanganan kerangka kerja sama. Indonesia dan Singapura telah sepakat untuk melaksanakan tiga perjanjian kerja sama strategis bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan yang dilaksanakan secara bersamaan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menjembatani Proses *Realignment Flight Information Region Indonesia – Singapura*. Untuk pencapaian rancangan kebijakan tersebut, tahun 2022 Kemenko Marves telah melaksanakan:

- Koordinasi Evaluasi dan Tindak Lanjut Peran Aktif Pemerintah RI dalam *5th Session of the Session of the Intergovernmental Conference - Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction* (IGC-BBNJ)
- Penandatanganan (oleh Presiden RI dan PM Singapura) dokumen kerjasama strategis yakni: (1) Persetujuan tentang Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia - Singapura (*realignment flight information region* - FIR); (2) Perjanjian tentang Ekstradisi Buronan (*extradition treaty*); dan (3) Pernyataan

Bersama (*joint statement*) Menteri Pertahanan RI - Singapura terkait Perjanjian Pertahanan 2007 (*Defense Cooperation Agreement - DCA 2007*).

- Melakukan pertukaran surat (*exchange of letter*) di hadapan kedua Kepala Negara.

Adapun rekomendasi Kemenko Marves untuk tercapainya *Realignment Flight Information Region* (FIR) adalah sebagai berikut:

- Pemerintah RI agar segera meratifikasi ketiga perjanjian (FIR, DCA, Ekstradisi) yang telah disepakati Indonesia dan Singapura sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Selain mendorong percepatan ratifikasi ketiga perjanjian tersebut di level nasional, khusus untuk isu FIR, Pemerintah RI sebaiknya mulai melakukan diskusi kepada pihak eksternal;
- Beberapa hal yang bisa dilakukan di antaranya diskusi informal serta pendekatan kepada ICAO dan negara anggota, terutama Malaysia sebagai negara yang akan terpengaruh dengan *realignment* yang disetujui oleh Indonesia dan Singapura. (terlampir kertas kerja kegiatan FIR)

d) Rancangan Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan prioritas pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut diperjelas bahwa untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian energi, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip: 1) Memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian; 2) Meminimalkan penggunaan minyak bumi; 3) Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan 4) Menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional.

Untuk pencapaian rancangan kebijakan tersebut telah dilaksanakan:

- Sinkronisasi Progres Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) DKI Jakarta melalui *Intermediat Treatment Facility* (ITF) pada Layanan Wilayah Barat
- Mendorong Pemprov. DKI Pemprov. untuk melakukan Revisi Peraturan Gubernur mengenai penunjukan langsung BUMD (Perseroda) sebagai pengembang PSEL/ITF Layanan Wilayah Barat.
- Konsolidasi Peninjauan Lapangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung Bali

- Konsolidasi Persiapan Lelang Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Semarang
- Sinkronisasi dan Klarifikasi terkait Penyelesaian Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) antara PT PLN (Persero) dan Perusahaan Umum Jasa Tirta
- Koordinasi Diskusi Tindak Lanjut dan Kunjungan Lapangan terkait Perekonomian Maritim berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Kabupaten Belitung
- Koordinasi Persiapan *Show Case Solar Panel* Terapung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang Belitung Sebagai Peserta *Development Working Group* (DWG) Presidensi G20 Indonesia 2022
- Sinkronisasi Progres Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) DKI Jakarta melalui *Intermediate Treatment Facility* (ITF) pada Layanan Wilayah Barat

e) Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer;

Guna pencapaian rancangan kebijakan tersebut telah dilaksanakan:

- Telah dilakukan rapat tindak lanjut terkait pembahasan FS dengan BRIN secara Bilateral dua kali
- Koordinasi yang diselenggarakan oleh BRIN guna konfirmasi persiapan pembuatan FS
- Koordinasi lanjutan BRIN untuk mengetahui update perkembangan dalam rangka pembuatan FS dari koordinasi tersebut di sepakati bahwa BRIN akan menambahkan kajian ekonomi terkait penggunaan teknologi Iradiasi

f) Rancangan Kebijakan Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik; P3DN:

Beberapa pokok permasalahan terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri saat ini, diantaranya:

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN perlu disempurnakan dikarenakan perubahan nomenklatur di Kementerian/Lembaga, serta penambahan anggota dari lebih banyak pemangku kepentingan untuk optimalisasi program P3DN;
- Tim P3DN belum terbentuk secara lengkap di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Badan Usaha lainnya;
- Daftar barang ber-TKDN belum digunakan sebagai acuan tunggal oleh seluruh Kementerian/Lembaga;

- Produk impor masih mendominasi tampilan pada e-katalog;
- Dorongan K/L/PD/BUMN/BUMD/Badan Usaha untuk mengedukasi vendor, mitra untuk mensertifikasi produknya belum optimal;
- Sistem informasi dalam pengajuan impor barang sudah menggunakan sistem online namun belum terintegrasi dengan Sistem P3DN di Kementerian Perindustrian sehingga seringkali terjadi impor barang yang masuk dalam kategori barang wajib

Capaian 2022:

- Koordinasi penyusunan kebijakan penyusunan tim P3DN internal melalui penerbitan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tim P3DN lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- Koordinasi optimalisasi program kerja Tim Nasional P3DN dengan mengakomodir perubahan nomenklatur di Kementerian/Lembaga, serta penambahan anggota Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN dari lebih banyak pemangku kepentingan melalui penerbitan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN
- Rekomendasi kebijakan untuk mengatur pengadaan barang/jasa yang mendukung produsen dalam negeri yang diwujudkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan P3DN dan Produk UMKM dan Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional;
- Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan industri kecil, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil yang memberikan kemudahan dalam proses pengurusan TKDN baik persyaratan, dokumen, maupun biaya sertifikasi Rp 0 (gratis)
- Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 belum mengakomodir industri baru sehingga didorong untuk dilakukan Revisi. Saat ini telah dilaksanakan pembahasan revisi PP 2015-2035 sebagai dasar penyempurnaan Perpres KIN hingga rapat pleno.
- Telah dilaksanakan Business Matching P3DN tahap 1 sampai dengan tahap 3 yang diikuti oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah & 10 BUMN terbesar

Rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 52 Tahun 2022 kepada seluruh anggota Pokja

Timnas P3DN melalui Kickoff Pokja Timnas P3DN serta penyusunan SOP dan program kerja untuk optimalisasi fungsi Pokja Timnas P3DN

- Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan implementasi P3DN pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah BUMN, dan proyek strategis di sektor energi (PLN dan Pertamina);
- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Sistem P3DN agar perencanaan, pelaporan, pemantauan dilakukan secara terintegrasi dan online;
- Koordinasi penyelesaian revisi melalui harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035

KBLBB

Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang membuat industri KBLBB nasional kurang dapat bersaing, yaitu:

- Diperlukan kebijakan teknis/Peraturan Menteri sebagai bentuk peraturan turunan dari Perpres Nomor 55 Tahun 2019, khususnya peraturan dari K/L teknis terkait.
- Diperlukan penyusunan langkah-langkah kebijakan strategis untuk mendukung optimalisasi program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB), diantaranya mengenai:
 - 1) Penyusunan kebijakan insentif kredit kepemilikan KBL BB oleh perbankan;
 - 2) Penyusunan kebijakan konversi kendaraan konvensional menjadi mesin bermotor listrik berbasis baterai;
 - 3) Penyusunan kebijakan/peta jalan transformasi kendaraan berjenis konvensional menjadi KBL BB dengan mengembangkan insentif bagi KBL BB dan disinsentif untuk kendaraan konvensional hingga tahun 2024;
 - 4) Penyusunan kebijakan/roadmap pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum/ SPKLU dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum/ SPBKLU) beserta jenis insentif yang diberikan/ditetapkan;
 - 5) Penyusunan pengembangan insentif daerah yang dapat digunakan oleh pimpinan daerah sebagai pedoman untuk memaksimalkan insentif di daerahnya.

Capaian 2022

- Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/ atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai perwujudan agar Pemerintah memberikan contoh baik, sekaligus pasar inisial bagi industri baru KBLBB untuk mencapai skala keekonomian.

- Koordinasi regulasi tentang Spesifikasi khusus KBL berbasis baterai, tata cara perhitungan TKDN untuk KBL berbasis baterai, mekanisme impor CKD/IKD, mekanisme impor CBU (jangka waktu dan jumlah tertentu) untuk mendukung investasi dan pengembangan industri KBLBB dalam negeri melalui penerbitan: beberapa Peraturan dari K/L teknis terkait.
- Koordinasi pengendalian kebijakan melalui revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 yang saat ini dalam proses harmonisasi. Revisi tersebut meliputi standarisasi baterai, skema bisnis SPKLU, pengaturan tarif, dan pengembangan aplikasi IT integrator;
- Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan insentif fiskal KBLBB di tingkat pusat baik insentif pembelian KBLBB maupun kebijakan bea masuk CKD 0% MFN;
- Koordinasi pengendalian kebijakan pelaksanaan penggunaan KBLBB di Pemerintah Daerah, melalui dorongan kebijakan kepada Kementerian Dalam Negeri, dengan Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.7/8299/SJ tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/ atau Kendaraan Perorangan Dinas Pemerintahan Daerah.

Rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian kebijakan insentif fiskal KBLBB berupa insentif pembelian dan pembebasan bea masuk CKD 0%;
- Monitoring dan evaluasi penggunaan KBLBB di lingkup K/L/PD/ BUMN/D;
- Perumusan kebijakan perluasan program konversi sepeda motor untuk mendukung target Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) sepeda motor konversi sebanyak enam juta unit pada Tahun 2025.
- Perumusan kebijakan mengenai infrastruktur Pengisian Daya (SPKLU dan SPBKLU)

g) Rancangan Kebijakan Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian.

Dirgantara

Isu strategis:

Kondisi saat ini sebagai salah satu industri alat transportasi, industri dirgantara belum dapat berkembang karena belum adanya rencana induk yang merupakan peta jalan dari ekosistem industri kedirgantaraan yang terintegrasi, ehingga rantai pasok industri ini belum dapat saling bersinergi serta belum terpetakannya pengembangan industri kedirgantaraan dalam negeri.

Selain itu, dengan adanya perubahan organisasi LAPAN dan BPPT menjadi BRIN, terdapat kendala anggaran untuk melanjutkan pengembangan industri dirgantara, khususnya pengembangan Pesawat N-219 Amphibi dan PSN Puna Male.

Ekosistem industri sarana dan prasarana kereta api nasional juga masih belum banyak berkembang. Beberapa komponen utama kereta api seperti struktur *carbody*, *boogie*, *control system* hingga eksterior dan interior masih banyak menggunakan produk impor.

Secara khusus, permasalahan yang dihadapi oleh perkeretaapian, diantaranya:

- Masih besarnya ketergantungan pada produk impor terutama komponen berteknologi tinggi seperti sistem propulsi dan kontrol;
- Keterbatasan kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan komponen terutama dalam hal pemenuhan spesifikasi teknis, kualitas dan kapasitas produksi;
- Kurangnya insentif bagi industri dalam hal penelitian dan pengembangan produk dan teknologi.

Capaian 2022:

- Penyusunan Kajian akademik terhadap roadmap industri dirgantara: kajian telah selesai bulan Agustus 2022 dan telah disampaikan sebagai masukan terhadap roadmap dirgantara yang dibuat oleh Bappenas;
- Pemantauan penyelesaian pembangunan rolling stock LRT Jabodebek; dan
- Pengendalian kebijakan pengembangan ekosistem industri kereta api dalam negeri melalui:
 - 1) Koordinasi Monitoring Pengadaan trainset KRL Jabodetabek: Untuk pemenuhan kebutuhan jangka panjang, PT Kereta Commuter Indonesia perlu melakukan pengadaan kereta produksi dalam negeri melalui PT INKA untuk meningkatkan ekosistem perkeretaapian dalam negeri selain pengadaan kereta bukan baru untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang dilaksanakan saat ini.
 - 2) Koordinasi Pengembangan rem blok komposit kereta api dalam negeri. Melalui program ini, PT Kereta Api Indonesia selaku pengguna dapat meningkatkan penggunaan komponen kereta api dalam negeri seperti yang sedang dikembangkan oleh beberapa industri dalam negeri seperti PT Indo Bintang Mandiri serta Koperasi Batur Jaya.

Rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Koordinasi hasil kajian akademik roadmap industri dirgantara bersama Bappenas & para pemangku kepentingan terkait;
- Koordinasi perumusan kebijakan drone di Indonesia;
- Kebijakan implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

Koordinasi pengembangan penelitian dan inovasi komponen sarana dan prasarana perkeretaapian Nasional

h) Rancangan Kebijakan Industri Galangan dan Komponen Kapal

Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang membuat industri maritim nasional kurang dapat bersaing, yaitu:

- Industri Maritim masih belum memiliki dasar hukum kebijakan sesuai amanat Pasal 27 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai industri maritim dan jasa maritim akan diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- Perbaikan daya saing (*upgrading*) industri galangan kapal dalam negeri, meliputi:
 - 1) Masih sangat bergantungnya Industri Perkapalan Nasional pada pengadaan kapal APBN dan BUMN.
 - 2) Populasi industri pendukung masih terbatas.
 - 3) Kemampuan penguasaan teknologi dan manajemen produksi masih perlu ditingkatkan.
- Masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sejalan dengan pengembangan industri galangan kapal nasional:
 - 1) Bea masuk impor kapal sebageian besar 0% sedangkan bea masuk komponen kapal di atas 5%
 - 2) Kebijakan impor kapal bukan baru.
Dukungan pembiayaan bagi industri perkapalan.
- Fasilitas Produksi: sebagian besar galangan kapal memiliki fasilitas produksi yang mampu membangun kapal dengan ukuran s/d 1.000 GT dan alat produksi pada umumnya berusia tua.

Capaian 2022:

- Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Industri Maritim, meliputi pembahasan penyusunan drafting per pasal dan pembahasan masukan dari para pemangku kepentingan untuk Bab TKDN, SDM, Pembiayaan, Pendanaan & Permodalan Industri, serta Riset & Pengembangan;
- Koordinasi penyusunan regulasi turunan RPP Industri Maritim sesuai kebutuhan dalam pengembangan industri meliputi:
 - 1) Koordinasi kebijakan Klasifikasi dan Standar Pelayanan Minimal Galangan Kapal; dan
 - 2) Koordinasi kebijakan TKDN Industri Maritim melalui:
 - Perbaikan daya saing (*upgrading*) industri galangan kapal dalam negeri khususnya kemampuan penguasaan teknologi, melalui program pelatihan teknis di bidang pembuatan kapal (*Shipbuilding Industry Modernization Project*) yang

dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan asosiasi industri (IPERINDO), yang diikuti oleh 16 industri galangan kapal dalam negeri.

- Koordinasi Dukungan pembiayaan bagi industri perkapalan dalam negeri melalui pemanfaatan fasilitas skema khusus (insentif fiskal) bagi industri galangan kapal serta pelaporan produksi melalui SIINAS. Yang telah dilaksanakan di 2 (dua) provinsi yaitu: Provinsi Kepulauan Riau, yang diikuti oleh 62 industri galangan dan komponen kapal; Provinsi Sulawesi Utara, yang diikuti oleh 12 industri galangan Kapal.
- Koordinasi Program Sertifikasi TKDN industri maritim: Pada tahun 2022 telah dilaksanakan sertifikasi TKDN untuk 41 produk industri maritim meliputi produk paint and coating, pelumas, fender, bahan bakar, life jacket dan penunjang lainnya dengan nilai TKDN 7,44% sampai dengan 71,94%. Industri yang difasilitasi pengembangannya melalui sertifikasi TKDN Tahun 2022 sejumlah 12 perusahaan diantaranya: PT PPG Coating Indonesia, Pertamina, PT. Comac Maritim Industri, dan PT. Surya Segara Safety Marine.

3) Koordinasi penyusunan Regulasi Industri Penutupan Kapal.

Rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Percepatan penyelesaian kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Industri Maritim dan regulasi turunannya;
- Koordinasi kebijakan dalam mendukung industri galangan kapal nasional, termasuk diantaranya insentif, pembiayaan, pelatihan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia industri perkapalan, dan usulan program revitalisasi galangan kapal;
- Peningkatan TKDN Pembangunan Kapal Negara termasuk Kapal BUMN.

i) Rancangan Kebijakan Penanganan Sengketa Nikel (Indonesia vs Uni Eropa).

Pada tanggal 22 November 2019, Indonesia secara resmi menerima surat dari Uni Eropa perihal permohonan konsultasi dalam kerangka penyelesaian sengketa di *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO). Permintaan konsultasi ini merupakan langkah awal dari Uni Eropa dalam proses sistem penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 1 dan 4 *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU). Sengketa ini diregister di DSB WTO, dengan nomor register DS 592: *Indonesia - Measures Relating to Raw Materials*.

Uni Eropa menggugat Indonesia terkait dengan kebijakan di bidang pertambangan mineral, khususnya pengenaan restriksi ekspor,

pembangunan smelter, kewajiban penjualan di dalam negeri dan export licensing requirements atas produk-produk mineral untuk pembuatan besi baja. Selain itu, Uni Eropa juga mempermasalahkan kewajiban pembuatan smelter untuk produk mineral nikel, chromium, dan batu bara serta kewajiban export licensing untuk produk *metal waste and scraps*, batu bara, dan kokas.

Pokok gugatan lainnya yang diajukan oleh Uni Eropa yaitu terkait dengan kebijakan Indonesia yang memberikan skema pengecualian bea impor untuk perusahaan yang melakukan pembentukan dan pembaharuan pabrik, termasuk dengan perpanjangan periode pengecualian pengenaan pajak atas penggunaan mesin, instalasi dan peralatan lain yang masuk dalam konteks kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut, upaya yang dilakukan Kemenko Marves Bersama dengan *Stakeholder* lainnya yaitu:

- Pertemuan konsultasi DS 592 oleh Indonesia dan Uni Eropa diadakan pada Januari 2020, di Kantor WTO, Jenewa, Swiss.
- Pada Januari 2021, Uni Eropa resmi mengajukan pembentukan Panel untuk memeriksa kasus tersebut dan memberikan *Panel Ruling and Recommendation* atas kasus ini. Selanjutnya, Membentuk Panel untuk kasus DS 592 pada Januari 2021.
- Sidang pertama atas kasus DS 592: *Indonesia - Measures Relating to Raw Materials* ini, dimulai pada tanggal 15 - 19 November 2021.
- Pemeriksaan kasus DS 592: *Indonesia - Measures Relating to Raw Materials* oleh Panel dilanjutkan pada tanggal 22-23 Maret 2022.
- Koordinasi Penyelesaian Sengketa DS592: *Indonesia - Measures Relating To Raw Materials* (pada bulan Agustus dan September 2022)
- Focus Group Discussion (FGD) Membahas Dampak Ekonomi Sengketa Nikel Indonesia Dengan Uni Eropa.

Kebijakan Indonesia pada prinsipnya tidak bertentangan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota WTO. kebijakan Indonesia ini ditujukan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia guna pengentasan kemiskinan dan peningkatan nilai tambah, bukan serta merta melarang ekspor produk mineral dan batubara.

Indonesia memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Uni Eropa terkait dengan kebijakan hilirisasi Nikel, melalui mekanisme konsultasi yang difasilitasi DSB WTO.

Keputusan:

Pada bulan November 2022, laporan Panel telah disirkulasikan ke seluruh anggota WTO, dalam laporannya Panel menyampaikan bahwa kebijakan

pelarangan ekspor nikel dan domestic processing requirement (DPR) yang diberlakukan oleh Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal XI:1 dan XI:2 (a) GATT 1994, dikarenakan ketentuan pelarangan atau pembatasan tersebut tidak bersifat sementara (*temporary*).

Selain itu, Panel juga menilai bahwa kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan Pasal XX (d) GATT 1994, dikarenakan kebijakan pelarangan dan pembatasan ekspor nikel tersebut tidak diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang dimana peraturan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan GATT 1994.

Tahun 2022, penghitungan capaian kinerja didasarkan kepada progres pencapaian IKU. Sesuai Penetapan Kinerja pencapaian kinerja output tahun 2022 diperoleh dari rata-rata capaian seluruh rancangan kebijakan yang dikoordinasikan Kemenko Marves kepada K/L. Capaian progress atas IKU 12 s.d tahun 2022 sebagai berikut:

TABEL 77
CAPAIAN KINERJA IKU PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 9					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
12	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	Moderate/Proxy	100%	100%	100
CAPAIAN (%)					100

Perbandingan capaian IKU ini pada tahun 2022 dan tahun 2021, serta target sampai akhir tahun 2024 dan target RPJMN 2022, seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 78
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN

CAPAIAN KINERJA SS 9							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		
			2022	2021	2022	2024	RPJMN 2022
12	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	%	100%	100%	100%	100%	-

Upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian IKU 12, diantaranya sebagai berikut:

- Menyelesaikan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan penyusunan kebijakan;
- Memperkuat sistem koordinasi dengan instansi dan pihak terkait untuk mempercepat proses penyusunan kebijakan;
- Melaksanakan monitoring secara regular sehingga permasalahan segera teridentifikasi dan diberikan solusi pemecahannya.

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

- Komunikasi yang telah terjalin dengan baik dengan instansi terkait dalam penyusunan kebijakan.
- Kebijakan transformasi jabatan struktural ke fungsional yang mendukung penyusunan kebijakan yang lebih berkualitas.

Kendala dalam pencapaian IKU

Penetapan rekomendasi kebijakan memerlukan waktu yang relative panjang, karena diperlukan kajian/telaahan dan tinjauan lapangan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dengan K/L teknis maupun *Stakeholder* lainnya atas isu yang dijadikan pembahasan untuk sebuah rekomendasi.

Inovasi Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU ini dilakukan kajian/telaahan secara paralel dengan terus berkoordinasi bersama *Stakeholder* terkait baik K/L teknis maupun Lembaga eksternal lainnya.

Rencana Tindak Lanjut Periode Selanjutnya

Di Tahun 2023, IKU ini dilebur dengan IKU 13 Persentase Hasil Pengendalian yang Ditindaklanjuti menjadi Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti.

Success story

Sepanjang tahun 2022 beberapa rekomendasi kebijakan telah ditetapkan dan disampaikan ke Menko Marves.

Adapun data dukung atas pencapaian IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

SS 10: Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien

Maksud dari SS 10 adalah terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman di K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves. SS10 memiliki 1 IKU yaitu Persentase Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti.

1) IKU 13 Persentase Hasil Pengendalian yang Ditindaklanjuti

Indikator ini menggambarkan persentase tindaklanjut rumusan kebijakan terhadap permasalahan kebijakan bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Sumber Daya Maritim, Infrastruktur dan Transportasi, Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Investasi dan Pertambangan yang dihasilkan dan ditetapkan kedalam Rumusan tindaklanjut Kebijakan. IKU Persentase Hasil Pengendalian yang Ditindaklanjuti dihitung dengan menggunakan formula:

$$\frac{(\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Menko Marves yang ditindaklanjuti K/L})}{(\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan})} \times 100$$

Rancangan rekomendasi kebijakan yang mendukung pencapaian IKU sebagai berikut:

a) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Indikator Kesehatan laut Indonesia

Diperoleh nilai IKLI Agregat Tahun 2022 sementara sebesar 75,65, skor ini dapat digunakan sementara hingga evaluasi yang dilakukan pada akhir Tahun 2023. Estimasi skor IKLI Tahun 2022 menggunakan data (sementara) Tahun 2021, demikian juga estimasi IKLI Tahun 2021 diperbaiki dengan data perbaikan (updated) Tahun 2020, kemudian estimasi IKLI Tahun 2020, menggunakan data Tahun 2019 dan tidak mengalami perubahan.

Dengan perubahan dan perbaikan data, IKLI Tahun 2021 berubah dari 76,76 (data sementara) menjadi 73,06 (data perbaikan). Dengan data yang diperbaharui maka perkembangan IKLI adalah sebagai berikut, 73,44 (Tahun 2020), menjadi 73,06 (Tahun 2021) dan 75,65 (Tahun 2022), dengan kata lain IKLI mengalami perbaikan meskipun dengan peningkatan skor yang tidak signifikan. Rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Diperlukan adanya upaya untuk estimasi skor IKLI berbasis model dinamis, model IKLI yang dinamis perlu dikembangkan dan dianalisis sebagai suatu proses sains.
- Sebagai suatu indeks kumulatif, peran setiap lembaga untuk menyediakan data yang akurat memang sangat dibutuhkan. Di tingkat nasional, banyak lembaga yang berperan dalam menyediakan data dalam proses estimasi IKLI. Bila saatnya IKLI diestimasi di tingkat daerah maka disarankan agar Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi bertanggung jawab dalam hal ini.
- Dilakukan finalisasi data untuk mendapatkan Nilai IKLI Agregat Tahun 2022 yang akan dipublikasikan pada awal tahun 2023.

b) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Energi Baru Terbarukan (EBT)

"Proyek Rantai Pendingin Tenaga Surya Untuk Ekonomi Hijau di Indonesia (*Solar Cold Chains for a Green Economy in Indonesia, SOCOOL*)" telah disepakati pada tanggal 23 Juni 2021 oleh kedua Pemerintah sebagai bagian dari Perjanjian Kerjasama Teknis yang ditandatangani tahun 2019. Konsep proyek akan dikembangkan dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dari pihak Indonesia (diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves) dan pihak Jerman (diwakili oleh GIZ, KFW, Kedutaan Jerman, dan Kementerian Federal Kerjasama

Ekonomi dan Pembangunan, BMZ). Proyek SOCOOL akan dibangun di atas kerjasama pembangunan Indonesia-Jerman yang ada di sektor energi terbarukan dan pendinginan.

Proyek ini direncanakan untuk dilaksanakan selama 4 tahun dimulai pada triwulan 4 tahun 2022. Konsep dibawah ini merupakan sketsa singkat proyek SOCOOL sebagai dokumen masukan untuk negosiasi G2G yang akan diselenggarakan pada 16-18 November 2021. Pengembangan sketsa proyek yang lebih rinci dan proposal lengkap akan dilaksanakan tahun 2022 dan selanjutnya akan mencakup sebuah scoping mission pada paruh pertama tahun 2022.

Pilihan kebijakan yang telah disampaikan ke Deputi adalah Peningkatan Sarana & Prasarana Sistem Rantai Dingin berupa dukungan terkait pembangunan Ice Slurry Maker dan PLTS Atap Cold Storage dan Perluasan rantai pendingin tenaga surya berdasarkan rencana induk dan strategi nasional dalam topik logistik, ketenagalistrikan dan dekarbonisasi.

Hal selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah Kemenko Marves akan mendorong K/L Teknis terkait atas pilihan-pilihan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut

c) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Sejak 2017 hingga 2021 sektor ekspor perikanan Indonesia terus mengalami tren positif dengan terus naik dengan kenaikan 6,08% dan nilai pada tahun 2021 mencapai USD 5.718 miliar. Sektor ekspor yang mendominasi ialah dengan produk perikanan jenis udang, tuna-tongkol-cakalang, rumput laut, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting.

Sepuluh negara tujuan ekspor dengan volume hasil perikanan terbesar pada tahun 2021 yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Sedangkan berdasarkan nilai ekspor hasil perikanan, sepuluh terbesar negara tujuan ekspor pada tahun 2021 yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Thailand, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Italia, Hongkong, dan Singapura. Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor hasil perikanan dengan volume terbesar pada tahun 2021 sebesar 428.056.174 kilogram, sedangkan Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor hasil perikanan dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar USD 2.532.864.431.

Atas dasar hal tersebut, pilihan kebijakan yang telah disampaikan adalah Sinergi antara Otoritas Perpajakan dan Cukai dengan *Stakeholder* Perikanan dan Kelautan dan Percepatan Penyelesaian Perundingan Sektor Perdagangan Dengan Uni Eropa. Hal selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah

- Kemenko Marves mendorong K/L terkait untuk memaksimalkan klinik ekspor yang digagas oleh Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu, sehingga terbangun pemahaman bahwa ekspor itu mudah di kalangan pelaku usaha dan terbantu dengan asistensi klinik ekspor tersebut.
- Melaksanakan koordinasi untuk penyelesaian perundingan kerjasama ekonomi dengan negara-negara tujuan dengan tujuan untuk mendapatkan perlakuan tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak ada tarif, serta memperoleh perjanjian kesetaraan produk dengan negara tujuan
- Mendorong Optimalisasi sarpras rantai dingin seperti cold storage yang dijadikan buffer stock produk KP dan Pasar Ikan Modern sebagai sarana pemasaran ikan yang bermutu dengan harga terjangkau.

d) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu sampai Hilir yang terintegrasi

Variabel harmonisasi sistem jaminan mutu produk KP adalah dari sertifikasi, fasilitas penunjang mutu dan petugas mutu. Sistem jaminan mutu produk perikanan yang akan ditujukan untuk ekspor harus memiliki bukti berupa sertifikasi bahwa produk tersebut terjamin kualitasnya, termasuk penanganan dalam produksinya. Namun, kendala yang dihadapi adalah jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah supplier ikan, petambak, dan kapal ikan yang telah tersertifikasi CPIB dan CBIB. Hal tersebut menyebabkan UPI tetap menerima pasokan bahan baku dari sumber-sumber yang belum memiliki sertifikasi jaminan mutu.

Dalam penerapan sistem jaminan mutu pada produk kelautan dan perikanan, perlu ditunjang oleh saran dan pra-sarana yang memadai. Faktor tersebut mencakup fasilitas pendaratan ikan di pelabuhan perikanan, fasilitas kebersihan, dan sanitasi. Secara garis besar, masih banyak ditemukan kekurangan fasilitas penunjang di lokasi-lokasi pelabuhan perikanan, misalnya sarana bangunan yang mulai rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kurangnya sarana pendukung kebersihan, serta fasilitas sanitasi yang kurang baik.

Faktor pendukung lainnya yang memegang peran penting adalah kecukupan jumlah petugas mutu yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil survei dan rapat koordinasi yang telah dilakukan, sebagian besar lokasi aktivitas perikanan masih kekurangan petugas mutu. Jumlah petugas mutu berpengaruh pula pada efektivitas kegiatan di lapangan, apabila petugas mutu kurang, maka akan banyak hasil perikanan yang tidak teruji kualitas mutunya.

Atas permasalahan tersebut, pilihan kebijakan yang telah disampaikan adalah pelaksanaan sertifikasi, pelaksanaan peningkatan kapasitas

dan kompetensi petugas mutu dan pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan sarana dan pra-sarana penunjang mutu

Hal selanjutnya yang dilaksanakan adalah akan mendorong K/L terkait untuk optimalisasi solusi untuk permasalahan tersebut.

e) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dasar

Beberapa isu strategis dalam Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dasar khususnya dalam rangka pemenuhan infrastruktur dasar Jalan Trans Pulau 3T antara lain:

- Infrastruktur dasar pendukung. Kurang memadainya/ terbatasnya Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, sumber daya air, jaringan telekomunikasi dan elektrifikasi 24 jam di Pulau 3T.
- Status Jalan Nasional. Dari 18 Pulau 3T (MP) terdapat 2 Pulau yang Jalannya belum berstatus Jalan Nasional antara lain P. Enggano dan P. Kei Besar. Pembangunan Jalan Trans Pulau 3T perlu mendapat perhatian bersama dalam rangka memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Sehingga bangunan/ kualitas Jalan yang ada dapat dilakukan perbaikan-perbaikan atau bahkan penggantian konstruksi yang lebih baik dan mapan sehingga dapat bertahan dan melayani pengguna jalan dalam kurun waktu yang lebih lama Bahan Konstruksi lokal. Identifikasi Potensi Pulau 3T sangat penting dalam menentukan bahan konstruksi untuk pembangunan jalan yang spesifik lokasi dan harus sesuai dengan karakteristik Pulau maupun kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat setempat;
- Strategi pendanaan. Rendahnya kapasitas fiskal Pemda di daerah 3T dan terbatasnya alokasi DAK bidang jalan. Perlu mencari alternatif pembiayaan melalui berbagai sumber pendanaan yaitu kebijakan afirmasi (khususnya pada koridor-koridor strategis) melalui APBN, APBD dan peningkatan alokasi DAK bidang jalan dan mendorong pembiayaan melalui alternatif skema pembiayaan selain DAK (Program Hibah Jalan Daerah);
- Kolaborasi Pemda dan Pusat. Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) bersama masyarakat, sangat signifikan dalam pencapaian keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Pulau 3T untuk mewujudkan fungsi Pertahanan dan Keamanan (Kedaulatan), Ekonomi (Kesejahteraan), dan Ekologi (Keberlanjutan).

Partisipasi masyarakat lokal. Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur (Jalan Trans Pulau 3T) diupayakan dengan partisipasi Masyarakat melalui program Padat Karya (sekali

sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN), serta seoptimal mungkin menggunakan Produk Dalam Negeri, seperti: Aspal Buton, teknologi perkerasan jalan, dan lainnya.

- Kontrak Multy Years Jalan Trans P. Enggano. Pembangunan Jalan Trans Pulau 3T (P. Enggano) Tanggal 7 September 2022 telah di tandatangani Kontrak oleh PT. Rodatekindo Purajaya untuk Pembangunan Jalan Trans P. Enggano sepanjang 32,624 Km dan Pembangunan Jembatan sepanjang 0,196 Km dengan total anggaran Rp. 188.205.727.326 dengan kontrak multi years (2022-2024). Target penanganan pada tahun 2022 sepanjang 4,078 km, target pada tahun 2023 sepanjang 24,468 km dan target pada tahun 2024 sepanjang 4,078 km.

f) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan

Beberapa isu strategis dalam Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan antara lain:

- Rusun Perkotaan. Capaian *Major Project* rumah susun perkotaan dengan target 1 juta rumah susun perkotaan di tahun 2024. Pada TA 2022 telah tercapai 4.055 unit terdiri rusun Lembaga Pendidikan Keagamaan berasrama 934 unit (23%), rusun mahasiswa 1.039 unit (25%), rusun ASN/TNI/Polri 839 unit (20%), dan rusun MBR/pekerja 1.287 unit (32%).
- Infrastruktur PSN Sektor Jalan. Jalan Tol terintegrasi tanggul laut Semarang-Demak, Jalan Tol Bengkulu – Taba Penanjung, Jalan Tol Jogja Bawen, Jalan Tol Solo-YIA-Kulonprogro, Jalan Tol Serang-Panimbang dan Jalan Tol Cinere-Jagorawi.
- Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Seksi III (Bengkulu-Taba Penanjung) - Sudah beroperasi
- Jalan Tol Taba Penanjung–Bengkulu memiliki main road yang terbentang sepanjang 17,6 km, dan merupakan bagian dari Tol LubukLinggau–Curup–Bengkulu yang total panjangnya mencapai 96 km. Seksi Tol Taba Penanjung–Bengkulu ini mulai dibangun pada September 2019 lalu. Jalan tol ini memiliki 2 gerbang tol, 2 simpang susun/junction, 21 jembatan, dan direncanakan memiliki 1 rest area. Adapun kecepatan rencana pada jalan tol ini adalah 80 km/jam
- Diterbitkannya surat dari Utama Karya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Informasi Kesiapan Operasi Atas Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Bengkulu – Taba Penanjung dan Jalan Tol Trans Sumatera Surat;
Diterbitkannya Surat PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga terkait Sertifikat Laik Operasi Jalan Tol Lubuklinggau – Curup – Bengkulu Seksi Bengkulu – Taba Penanjung;

- Terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 988/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Lubuklinggau – Curup – Bengkulu seksi Bengkulu – Taba Penanjung

● Jalan Tol Jogjakarta-Bawen

- 1) Progress pengadaan tanah Seksi VI Kab. Semarang (Desa Kandungan, Desa Bawen dan Desa Doplang) total kebutuhan bidang sebanyak 905 bidang (880.511 m²) dengan realisasi UGK sebanyak 284 bidang (31,38%).
- 2) Progress pengadaan tanah Seksi V yang meliputi Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung (terdiri atas 13 desa dari 3 kecamatan) total kebutuhan bidang sebanyak 1.739 bidang (2.275.736 m²) dengan realisasi UGK sebanyak 5 bidang (0,29%).

Kendala: Pelepasan Hak terhadap bidang-bidang karakteristik khusus seperti sultan ground.

g) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Rekayasa Pantai

Beberapa isu strategis dalam Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Rekayasa Pantai antara lain:

- Percepatan Pembangunan Bendungan (PSN Sektor Bendungan dan Irigasi). TA 2022 sebanyak 10 PSN Sektor Bendungan dan Irigasi yang telah selesai dan siap diresmikan.
- Bendungan Semantok, Bendungan Beringin Sila, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Sadawarna, Bendungan Lolak, Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Bendungan Tamblang dan Bendungan Marga Tiga
- Koordinasi pengamanan daerah aliran sungai akibat erosi (Waduk Mrica dan DAS Serayu)
 - 1) Dilakukan rapat koordinasi pengelolaan SDA di DAS Serayu dan pengelolaan waduk Mrica. Tindak lanjut dari hasil rakor adalah dilakukan observasi lapangan dan pengumpulan data terkait isu penyelamatan DAS serayu (penanganan abrasi) dan sedimentasi waduk Mrica.
 - 2) Koordinasi untuk mengetahui secara langsung akar masalah Kawasan Hulu (Wonosobo, Banjarnegara) dan menemukan alternatif solusi penyelamatan Infrastruktur Waduk Mrica dan DAS Serayu.
 - 3) Koordinasi percepatan pembangunan Bendung Gerak Serayu bersama Dewan SDA Nasional untuk menemukanli permasalahan Kawasan Hilir.
Rekomendasi kebijakan pengelolaan DAS Serayu dan Waduk Mrica sebagai yaitu:

- Diperlukan Rencana Aksi Penanganan Terpadu, yang berlandaskan Kajian Ilmiah untuk Penyelamatan Infrastruktur Waduk Mrica di DAS Serayu, meliputi Kawasan Hulu, Tengah dan Hilir.
- Perlunya dibentuk/ditunjuk Koordinator dalam Rencana Aksi Penanganan Terpadu.
- Penanganan Terpadu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan: Jangka Pendek (Urgent), Jangka Menengah dan Jangka Panjang.

4) Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura

- Koordinasi teknis dan monitoring *Major Project* Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa (Pekalongan) dan implementasi Perpres 79 Tahun 2019 terkait Pengendalian Banjir Rob di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan;
- Normalisasi Sungai Logi, Sungai Banger dimulai tahun 2021 dan berakhir November 2023. Paket I: pengerjaan normalisasi sungai Logi, Kolam Labuh, Kolam retensi dan bendung Gerak. Paket II: normalisasi sungai Banger dan Paket III: Long storage Pantai Samarang.
- Pelaksanaan Pekerjaan Tanggul Sungai Logi: Sudah memasang tanggul sepanjang sungai loji, namun ada kendala masih banyak parkir kapal-kapal penangkapan ikan sepanjang badan sungai Loji. Diharapkan kapal-kapal tersebut direlokasi ke kolam labuh (sekitar 300 kapal) dengan 100 kapal rusak. Kedalaman Sungai dari data eksisting 1.25 – 1.4 meter, sehingga pengerukan -3 meter sudah sangat representative untuk labuh kapal. Rata-rata ukuran kapal 150 GT dengan draft tidak lebih dari 2 meter.
- Paket II: sedang pelaksanaan pengerukan dimulai dari STA 5100 (pantura). Sebelumnya sudah ada jalan eksisting sehingga tidak dimungkinkan untuk membangun tanggul jadi alternatif membangun parapet. Akan dibangun beton parapet dengan lebar sungai 40 meter sampai hulu 70 meter.
- Jalan Tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul laut terpadat di Seksi I Kaliwage – Sayung (10,64 Km). Tanggul laut akan dibangun sepanjang 6,7 Km (paket 1B) pada paket ini 4,33%. lahan siap konstruksi. Jenis konstruksi untuk tanggul laut berupa cerucuk dan matras bamboo, PVD, Geotekstil dan timbunan preloading. Rencana konstruksi paket 1B mulai Desember 2022 sampai dengan November 2025.

5) Pengamanan pesisir dalam mendukung Presidensi G20

Penanganan Abrasi:

- *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC), termasuk pemilik/pengelola Hotel Melia Bali dan Hotel Grand Hyatt Bali melakukan konsultasi dengan Balai Wilayah Sungai Bali-Penida terkait dengan Rekomendasi Teknik penanganan abrasi/kerusakan pantai.
- Terkait dengan anggaran untuk penanganan abrasi, Balai Wilayah Sungai Bali-Penida untuk Permohonan Usulan Revisi DIPA SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bali-Penida TA. 2022.

h) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Sistem Logistik Nasional

Beberapa isu strategis dalam kebijakan pengendalian sistem logistik nasional antara lain:

- Pembahasan metode pengukuran indikator logistik yang masih belum disepakati dan mampu menggambarkan kondisi logistik untuk lingkup nasional;
- *Stakeholder* memiliki kepentingan terkait system logistik nasional sangat banyak dan melibatkan lintas Kementerian/Lembaga terkait maupun pihak swasta dan pemerintah daerah.
- Pengendalian pelaksanaan efisiensi dan efektivitas logistik di Pelabuhan, mengikuti rekomendasi tim Stranas PK memerlukan pengawasan secara langsung dan pemantauan berkala
- Penataan tata ruang logistik nasional tidak bisa hanya mengandalkan system NLE yang telah dibangun Kementerian Keuangan, namun memerlukan bantuan koordinasi dari Kemenko Maritim dan Investasi untuk memenuhi target rencana aksi penataan logistik nasional pada tahun 2024
- Pengawasan dan integrasi program angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dengan perdagangan antar pulau dalam bentuk *manifest domestic*

Telah disampaikan, bahwa besaran angka biaya logistik nasional merupakan angka kajian proyeksi yang dilakukan oleh tim riset Bappenas atau instansi lain yang berkompeten dalam perhitungan ini. Saat ini yang digunakan adalah angka biaya logistik berdasarkan kajian Bappenas pada September 2022 sebesar 22% yang masih mengacu pada angka pada tahun 2020. Angka biaya logistik untuk tahun 2022 terbaru akan dikeluarkan pada tahun 2023 setelah disepakati oleh Kemenko Perekonomian, Bappenas dan Kemenko Marves.

i) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemulihan Lahan Gambut

Kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, telah mengatur segala upaya dan tindakan baik yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta atau unit usaha maupun oleh masyarakat setempat terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan.

Intervensi restorasi gambut melalui tata kelola air sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas tata air di ekosistem gambut agar tetap basah dan dapat mendukung berbagai pemanfaatan. Salah satu infrastruktur perbaikan tata kelola air adalah sekat kanal yang berfungsi untuk memperbaiki dan menutup kebocoran-kebocoran air di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) sehingga ekosistem gambut tetap basah dan mencegah risiko kekeringan yang menyebabkan kebakaran dan penurunan permukaan lahan (*land subsidence*). Jumlah dan desain sekat kanal (dengan atau tanpa spill way) yang akan dibangun disesuaikan kondisi tingkat kerusakan ekosistem gambut dan kanal yang telah terlanjur dibangun memotong kontur. Tahapan kegiatan pemulihan fungsi hidrologis ekosistem gambut melalui pembangunan sekat kanal dilaksanakan mulai dari perencanaan, melalui kegiatan survei lapangan, penyusunan DED dan RAB, serta pembangunan sekat kanal dengan melibatkan masyarakat setempat.

Diperlukan adanya tolak ukur atau parameter keberhasilan untuk menilai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka restorasi berdasarkan KHG Model. Beberapa hal yang menjadi poin untuk indikator keberhasilan KHG Model, diantaranya:

- KHG yang tidak Mudah terbakar
Ada pemangku yang memastikan keseimbangan air
- Revegetasi dilakukan integrasi dengan rehabilitasi hutan dan lahan
- Upaya implementasi bisa berubah perilaku masyarakat termasuk spritual dan budidaya
- Ada dukungan kebijakan dan integrasi antara RTRW, RPJMD dan RPPEG

j) Rancangan Rekomendasi kebijakan Pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor 10 tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan produk kehutanan dan jasa lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan melaksanakan beberapa isu bidang kegiatan, salah satunya isu di bidang pengembangan jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi telah dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah dalam mendorong sasaran strategis pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan terutama dari jasa lingkungan dan HHBK.

Sesuai dengan UU CK, pemanfaatan hutan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung, produksi dan konservasi. Salah satu kegiatan pemanfaatan hutan adalah kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK, dapat dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. Pada tahun 2022, target dalam upaya mendorong usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah 2 lokasi pengembangan jasa lingkungan dan/atau HHBK yang terintegrasi, yakni Kabupaten Belitung yang merupakan lokasi *pilot project* pengembangan wilayah terintegrasi (IAD) berbasis Perhutanan Sosial dengan komoditas utamanya adalah jasa lingkungan wisata alam di HKM Bukit Peramun dan HKM Juru Seberang dan Kabupaten Ngada yang pada tahun ini telah membuat draft masterplan kegiatan pengembangan wilayah terintegrasi (*Integrated Area Development*) dengan bambu sebagai salah satu komoditasnya.

k) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Penanganan Sampah Laut; (A4 D4)

Kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan untuk pencapaian target pengurangan 70% kebocoran sampah ke laut pada 2025.

Pencegahan kebocoran di daerah aliran sungai menjadi kunci penanganan sampah dari hulu hingga hilir, serta pembangunan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dari rumah memiliki peran penting dalam mencegah kebocoran tersebut. Berbagai metode pengelolaan sampah di darat dengan melibatkan *multiStakeholder* sangat dibutuhkan untuk membantu pencapaian target pemerintah pada tahun 2025. Aksi nyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan kerjasama *multiStakeholder* karena setiap masyarakat memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan kebocoran sampah ke laut melalui daerah aliran sungai.

Dalam rangka penanganan sampah laut, Pemerintah telah menetapkan strategi, program serta kegiatan yang sinergis, terukur dan terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik. Strategi tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tahun 2018-2025 dan disahkan melalui Peraturan Presiden RI No.83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Terdapat 5 strategi yang digulirkan pemerintah, yang menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, serta *Stakeholder* terkait penanganan sampah laut. 5 (Lima) strategi tersebut ialah

- Gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan
- Pengelolaan sampah yang bersumber dari darat
- Penanggulangan sampah di pesisir dan laut;
- Mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum
- Penelitian dan Pengembangan.

Dari hasil koordinasi yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa peningkatan kolaborasi 16 Kementerian/Lembaga dan kerja sama *multiStakeholder* dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dan aksi nyata di lapangan dapat menekan volume sampah yang berasal dari darat sebesar 28,5% untuk masuk ke laut. Jika kerja sama ini dapat dilakukan dengan baik dan aksi nyata dapat berjalan secara berkala, diharapkan dapat menurunkan volume sampah yang berasal dari darat untuk masuk ke laut. Berdasarkan kedua hal tersebut, melalui koordinasi dan kolaborasi multipihak, pada Tahun 2022 telah tercapai 100% kesiapan pengendalian kerusakan lingkungan.

I) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan dan Penanganan Limbah

Limbah FABA yang dihasilkan oleh PLTU-PLTU di Indonesia masih berpotensi mencemari lingkungan jika limbah yang dihasilkan tidak segera dilakukan pengelolaan, baik disimpan maupun dimanfaatkan

oleh penghasil limbah. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dimana mengeluarkan FABA dari list Limbah B3.

Dihapusnya FABA sebagai limbah B3 menjadi limbah non B3 terdaftar merupakan peluang bagi PLTU di Indonesia dalam memanfaatkan FABA menjadi material yang memiliki nilai baik ekonomis maupun nilai sosial bagi masyarakat sekitar PLTU. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengeluarkan FABA dari list limbah B3 tidak secara langsung pemanfaatan FABA akan maksimal di lapangan.

Perlu adanya kebijakan pemerintah pusat yakni kementerian PUPR untuk mendorong pemanfaatan FABA sebagai material dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, perumahan, pengamanan bangunan lepas pantai, sehingga pemanfaatan FABA bisa optimal. PLN / PLTU telah melakukan sosialisasi dan terobosan pemanfaatan FABA namun hal ini belum optimal karena volume FABA yang dimanfaatkan masih sangat kecil persentasenya jika di bandingkan dengan volume FABA yang dihasilkan per hari oleh PLTU. PLN/PLTU telah melakukan pemanfaatan dengan membangun jalan setapak, jalan lingkungan, *paving block* dan batako untuk perumahan, tetrapod sebagai konstruksi pengamanan pantai namun hal ini belum maksimal dalam ruang lingkup pemanfaatan faba yang setiap hari di produksi oleh PLN PLTU.

Di beberapa daerah di Indonesia, FABA telah di manfaatkan untuk *paving block* dan batako. Pada PLTU Suralaya Cilegon dan PLTU Tanjung B di Jepara, telah memanfaatkan FABA untuk produk turunan lainnya yakni *Paving block* dan Batako dan telah dipakai untuk membangun beberapa rumah untuk penduduk di sekitar PLTU. Jika ini di kembangkan maka jumlah volume FABA dapat berkurang dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekita PLTU di Indonesia saat ini.

Pilihan kebijakan yang diambil yakni:

- Potensi FABA dengan volume yang cukup banyak di setiap PLTU dapat dimanfaatkan sebagai material lepas untuk mendukung pembangunan jalan, baik jalan toll, jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten, sehingga di perlukan kebijakan dari kementerian PUPR untuk memasukkan material FABA dalam buku material yang di keluarkan oleh Kementerian PUPR
- Dengan memanfaatkan FABA sebagai material lepas dapat memberikan nilai ekonomis dalam perhitungan nilai konstruksi pembangunan jalan, jembatan, tetrapod dibandingkan dengan pemakaian material lainnya 3. Untuk memanfaatkan FABA sebagai material lepas perlu di dukung oleh kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan FABA sebagai potensi material lepas dalam mendukung pembangunan jalan, jembatan, penahan ombak.

m) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu isu global yang masih menjadi sorotan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Indonesia juga menyadari perlunya upaya maksimal untuk efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pengendalian perubahan iklim di Indonesia memerlukan proses nasional dan internasional yang bersifat interaktif dan sinergis. Indonesia telah meratifikasi kerangka kerja konvensi perubahan iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) dengan Undang Undang No.16 tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah diperbaharui dalam dokumen Enhanced NDC sebesar 31,89% dengan Upaya sendiri, sampai dengan 43,20% dengan bantuan internasional. Komitmen penurunan emisi ini dibandingkan dengan skenario tanpa intervensi atau business as usual (BAU).

Dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia, sektor energi menjadi salah satu sector yang memiliki target pengurangan emisi GRK terbesar setelah sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Transisi energi juga menjadi upaya yang secara intens didorong dalam kebijakan Pengendalian perubahan iklim. Indonesia sedang sangat serius mempersiapkan transisi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional yang menggunakan berbagai skema pendanaan, seperti skema *blended finance*, kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat-Jepang untuk mendukung transisi energi di Indonesia melalui program *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Telah dilakukan *Joint Declaration* dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 di Bali pada Bulan November lalu. Telah disusun Kelompok Kerja Dekarbonisasi dan Transisi Energi Nasional yang meliputi bidang energi transisi, finansial, dan penurunan emisi GRK.

Untuk mencapai komitmen ini, pemerintah telah menyiapkan serangkaian kebijakan dan instrumen, termasuk penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 tentang NEK dan NDC yang didalamnya mengatur tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pencapaian target NDC, melalui perdagangan karbon, pajak karbon, pembayaran berbasis kinerja, dan mekanisme lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapasitas nasional.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia diperkirakan sebesar 1.8 GtCO₂e di tahun 2005. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0.4 GtCO₂e dibandingkan tahun 2000. Di sektor energi, yang diharapkan berkontribusi 12,5% dari target 31,89%, akan dikembangkan

melalui: (1) efisiensi energi; (2) energi baru terbarukan; (3) bahan bakar rendah karbon; (4) penggunaan teknologi pembangkitan yang ramah lingkungan; dan lainnya. Hingga Juni 2020, Indonesia telah mampu menurunkan emisi sebesar 63 juta ton CO₂e dari target 67,5 juta ton CO₂e. Bauran energi nasional dirancang untuk mencapai 23% energi baru dan terbarukan (EBT) pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Strategi EBT meliputi panas bumi, air, surya, bioenergi, dan angin. Pengembangan EBT di Indonesia akan dipercepat dan akan dibuka peluang untuk investor berpartisipasi dalam proyek EBT di masa depan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan Langkah-langkah percepatan dengan perencanaan yang matang. Pada Tahun 2022 ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengkoordinasikan dan mendorong langkah percepatan bersama K/L terkait melalui serangkaian rapat koordinasi, pemantauan, kerjasama, dan menyusun berbagai kebijakan untuk pendorong pencapaian target pengurangan emisi GRK Nasional dalam rangka kontribusi Indonesia pada pengendalian perubahan iklim secara nasional dan internasional.

n) Rancangan rekomendasi kebijakan Green Industri pembangunan KIPI Kaltara.

Pentingnya mendorong Indonesia berinvestasi pada ketahanan energi dalam perubahan iklim. Investasi yang harus dilakukan dalam ketahanan perubahan iklim diantaranya *self-protection* dengan masyarakat mengambil langkah proaktif untuk meminimalkan dampak perubahan iklim. Arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada *Groundbreaking* Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara tanggal 21 Desember 2021 menjadi awal dari pembangunan Kawasan Industri Hijau, sebagai berikut:

"Akan muncul dari sini green aluminium, solar panel, industrial silicone. Semuanya akan muncul dari Kalimantan Utara ini, dari kawasan ini. Dan ini kerja sama besar antara Indonesia, investor Indonesia, investor dari China, investor dari Uni Emirat Arab, semuanya akan bergabung. Dan ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia, bukan Kalimantan Utara, bukan Indonesia, tapi dunia karena menyangkut lahan, sampai detik ini, (seluas) 16.400 hektare, dan targetnya adalah 30.000 hektar".

Dasar hukum dari pembangunan Kawasan Industri Hijau ini adalah: 1) Perpres 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN; dan 2) Arahan Presiden ke Menko Marves dalam Sambutan Presiden pada Peresmian Pembukaan Indonesia EBTKE ConEx (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi-Konferensi dan Ekshibisi) Ke-10 Tahun 2021.

Luas dari area KIPI saat ini 9500 Ha serta sedang finalisasi akuisisi lahan tambahan 2500 Ha sehingga total area menjadi 12.000 ha. Area tersebut dimiliki oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (status PSN). Pada area ini yang menjadi investor kunci adalah untuk industri Petrokimia: Tongkun, Xinfenming dan Tsingshan; Alumunium Smelter: Adaro, Lygend, dan Hyundai; sedangkan Baterai materials: Tsingshan dan Huayou Cobalt.

Untuk Kawasan yang dimiliki oleh PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (Status PSN) dengan luas area 4700 Ha dengan investor untuk Pengembangan *end to end* lithium baterai dimulai dari precursor, katoda, anoda, baterai cell dan pack oleh CATL. Kawasan ini menjadi penting dengan alasan sebagai berikut:

- Menghasilkan produk hijau berdaya saing tinggi, kecenderungan investor saat ini ingin berinvestasi di sektor hijau, dan aturan dari negara barat yang menseleksi produk tidak ramah lingkungan.
- Membantu Pemerintah Merealisasikan Bauran Energi (Target EBT 2025 sebesar 23%), kawasan Industri akan menggunakan bauran sumber energi hijau: PLTA (*Hydro*), Biomassa, PLTS
- Menjadi Kawasan Industri yang Menghasilkan Produk2 "Substitusi Impor", sehingga akan menurunkan nilai Impor dan membantu kesehatan neraca dagang Indonesia, berbagai produk petrokimia seperti Bensin Euro V, Solar Euro V, Benzena, Paraksilena, isobutana, Propane. Serta produk2 hilirisasi lain sehingga menurunkan angka kebutuhan impor

Membantu Pemerintah Merealisasikan Penurunan Emisi Karbon; 31,89% sendiri, dan 43,20% bantuan internasional pada 2030, menghasilkan produk yang penting bagi target penurunan emisi karbon: Renewable Fuels, New energy battery, electric truck, ternary cathode, smelter aluminium.

Menjadi Kawasan Industri yang Akan Meningkatkan Nilai Tambah Berbagai SDA Mineral di Indonesia, menjadi motor penggerak hilirisasi berbagai mineral yang banyak terdapat di Indonesia seperti: Nikel, Bauksit, Tembaga, Timah.

Investasi hijau di Kalimantan Utara menemui banyak tantangan karena memerlukan banyak *Stakeholder* untuk maju bersama. Kemenko Marves fokus pada Debottlenecking isu PLTA dan Kawasan Industri, dalam hal ini berperan aktif dalam penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dan berinvestasi.

Capaian tahun 2022 untuk KIPI antara lain adalah Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (**RKKPR**) Kawasan; (ii) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut (untuk *Petrochemical & Aluminium Smelter*); (iii) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kantor pengelola KIPI; (iv) Penggabungan

data RKKPR, Persetujuan Lingkungan dan IUKI; (v) Persetujuan Lingkungan Jetty dan Pembangkit/AMDAL Terintegrasi; (vi) Izin Pembangunan Tersus Alumunium Smelter; (vii) Izin Pembangunan Tersus Petrochemical PT Taikun Petro Chemical.

Tahun 2022 penghitungan capaian kinerja didasarkan pada penghitungan progres pencapaian IKU. Hal ini karena sesuai Penetapan Kinerja pencapaian kinerja output ditargetkan akhir tahun 2022. Penghitungan progress pencapaian IKU diperoleh dari rata-rata capaian seluruh rancangan rekomendasi kebijakan yang menggambarkan seberapa jauh Kemenko Marves telah berhasil mendorong setiap K/L untuk menindaklanjuti setiap kebijakan yang dihasilkan oleh Kemenko Marves. Capaian progress atas IKU 13 tahun 2022 sebagai berikut:

TABEL 79
CAPAIAN KINERJA IKU PERSENTASE HASIL PENGENDALIAN YANG DITINDAKLANJUTI

CAPAIAN KINERJA SS 10					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
13	Persentase Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	Moderate/Proxy	100%	100%	100
CAPAIAN (%)					100

Perbandingan capaian IKU ini tahun 2022 dan tahun 2021 serta target sampai akhir tahun 2024 dan target RPJMN 2022, seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 80
PERBANDINGAN CAPAIAN IKU PERSENTASE HASIL PENGENDALIAN YANG DITINDAKLANJUTI

CAPAIAN KINERJA SS 10							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		
			2022	2021	2022	2024	RPJMN 2022
13	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	-

Faktor pendukung dan upaya yang dilakukan oleh Kemenko Marves sebagai upaya dalam pencapaian IKU-13 sejalan dengan faktor pendorong dan upaya yang diuraikan pada IKU-12. Hal ini karena IKU-13 memiliki relevansi yang sangat erat dengan IKU-12, dimana IKU-13 merupakan tindak lanjut dari IKU-12.

Kendala dalam pencapaian IKU

Rekomendasi kebijakan dari Kemenko Marves yang ditindaklanjuti oleh K/L teknis dalam pelaksanaannya terkendala dalam tingkat kendali, hal ini dikarenakan K/L teknis tidak menyampaikan secara langsung atas capaian dari rekomendasi kebijakan yang disampaikan Kemenko Marves.

Rencana Tindak Lanjut Periode Selanjutnya

Monitoring atas pelaksanaan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti harus terus dilakukan oleh Kemenko Marves, sehingga capaian pelaksanaannya dapat dimonitoring dan dilakukan evaluasi. Di Tahun 2023, IKU ini dilebur dengan IKU 12 Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan menjadi Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti.

Success story

Beberapa kebijakan Kemenko Marves yang ditindaklanjuti oleh K/L teknis dalam hal penyelesaian *the bottlenecking* telah dilaksanakan oleh K/L teknis diantaranya penerapan P3DN; Kendaraan Listrik; penyelesaian pembebasan lahan pada Proyek Strategis Nasional; dll.

Adapun data dukung atas pencapaian IKU Persentase Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

4) Learning and Growth Perspective

Learning and Growth perspective memiliki bobot sebesar 20% dari target capaian total. Terdiri dari 4 SS (SS 11 – 14) dan 4 IKU (IKU 14-17). Keempat SS tersebut yaitu: 1) Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional, 2) Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik, 3) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi, dan 4) Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel. Sedangkan keempat IKU tersebut adalah 1) Indeks Profesionalitas ASN, 2) Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves, 3) Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan 4) Opini BPK.

a SS 11: Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten

Maksud dari SS 11 adalah terwujudnya Pengelolaan ASN di Kemenko Marves yang berkarakter melalui sikap dan perilaku yang menghasilkan output kerja yang unggul. IKU dari SS ini yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

1) IKU 14 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator ini menggambarkan tingkat kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi persyaratan kompetensi manajerial, sosio-kultural dan teknis meningkatkan profesionalitasnya. Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Tujuannya untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN serta sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Dasar hukum pengukuran adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat

profesionalitas ASN mencakup dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin. Data Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian.

Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tingkat profesionalitas pegawai ASN yang terdiri atas identitas pegawai, dimensi, deskripsi, dan indikator beserta petunjuk pengisiannya. Rumus pengukuran indeks profesionalitas ASN sebagai berikut:

JUMLAH TOTAL HASIL PERKALIAN BOBOT INDIKATOR X NILAI MASING-MASING JAWABAN INDIKATOR

Capaian IKU ini sebagaimana pada tabel berikut ini:

TABEL 81
CAPAIAN IKU IP ASN TAHUN 2022 KEMENKO MARVES

CAPAIAN KINERJA SS 11					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
14	Indeks Profesionalitas ASN	Low/Exact	81	59,82*	73,85
CAPAIAN (%)					73,85

*Keterangan: sesuai data aplikasi kepegawaian (BKN). Capaian merupakan hasil pengukuran tahun 2021 (diinput pada tahun 2022).

Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN tahun sebesar 59,82* atau capaian sebesar 73,85% dari target tahun 2022 sebesar 81. Perbandingan atas capaian tahun 2022 dan tahun 2021 serta target akhir Renstra Kemenko Marves tahun 2024 untuk IKU ini seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 82
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU IP ASN

CAPAIAN KINERJA SS 11							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		RPJMN 2022
			2022	2021	2022	2024	
14	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	59,82	56,52	81	81	-

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

Faktor pendukung internal pencapaian IKU yakni adanya kelengkapan dokumen penilaian (*upload* SKP dan sertifikat pelatihan setiap pegawai pada aplikasi MarvesHR).

Kepemimpinan dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi oleh unit kerja turut berperan. Selain itu, kerja sama tim yang baik dalam proses penginputan data ke aplikasi SAPK BKN juga mempengaruhi proses pencapaian IKU. Sementara pada faktor pendukung

eksternal yakni adanya koordinasi terkait tata cara dan batas waktu pengukuran antara Kemenko Marves dengan Direktorat Jabatan ASN BKN.

Kendala dalam pencapaian IKU

- Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengembangan kompetensi sebagai sumber data indikator pengukuran Dimensi Kompetensi dan melaksanakan pengembangan kompetensi dalam bentuk diklat fungsional dan kepemimpinan.
- Adanya penyetaraan jabatan di Kemenko Marves yakni dari Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional mempengaruhi poin pengukuran IP ASN. Hal ini dikarenakan pejabat administrasi yang dialihkan belum mengikuti diklat fungsional.
- Aplikasi yang tersedia tidak menyesuaikan perubahan kebijakan yang ada.

Inovasi Pencapaian IKU

Kepegawaian Biro Umum Kemenkomarves telah melakukan input peremajaan data pegawai pada SAPK, hal ini sebagai langkah yang dilakukan untuk pengukuran IP ASN sesuai dengan ketentuan.

Rencana Tindak Lanjut Periode Selanjutnya

Untuk mencapai target IKU yang telah ditetapkan, perlu dukungan sumberdaya lainnya dalam mengakomodir kebutuhan diklat teknis, diklat fungsional, dan diklat kepemimpinan pegawai. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN ini bisa signifikan jika diiringi oleh kesediaan sumberdaya pendukung setiap tahun untuk melaksanakan diklat wajib sesuai dengan jabatan pegawai yang maksimal. Sehingga diperlukan koordinasi ke DJA Kemenkeu untuk memperoleh persetujuan dalam menyediakan anggaran pengembangan kompetensi dan mengusulkan pegawai Kemenko Marves untuk mengikuti diklat ke instansi penyelenggara

Selain itu, Kemenko Marves kedepannya juga akan melaksanakan pemetaan kebutuhan diklat, memanfaatkan seoptimal mungkin anggaran yang tersedia, dan mendorong BKN untuk menyesuaikan aplikasinya dengan kebijakan yang ada.

Success story

Dimensi Kualifikasi (Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS). Kemenko Marves menduduki nomor 3 kategori kualifikasi tertinggi.

Data dukung atas pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

SS 12: Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik

Tujuan dari SS 12 adalah untuk mewujudkan Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat

yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Kemenko Marves. SS ini didukung oleh IKU Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

1) IKU 15 Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Nilai kemajuan reformasi birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah nilai penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nilai yang digunakan dalam mengukur capaian Indikator ini adalah nilai hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan RB pada tahun berjalan (2022). Adapun capaian atas IKU ini seperti terlihat pada tabel berikut:

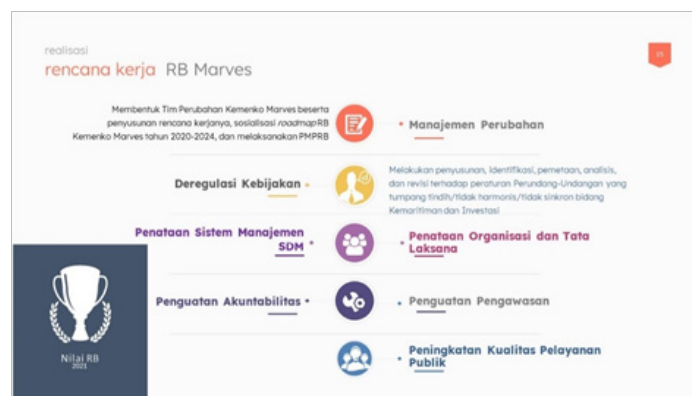
TABEL 83 CAPAIAN IKU NILAI HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (RB) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 12					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	Low/Exact	80	78,70	98,38
CAPAIAN (%)					98,38

Capaian IKU Tahun 2022 berdasarkan surat MenPANRB Nomor: B/671/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 tercapai sebesar 78,70 (BB) dari target 80 (A) atau tercapai 98,38%. Adapun beberapa langkah yang dilakukan saat ini yakni persiapan dokumen penilaian dan pelaksanaan kegiatan pendukung capaian Indeks RB Tahun 2022 untuk dilakukan perhitungan pada tahun 2023. Persentase ini adalah nilai implementasi pengelolaan RB pada 8 area perubahan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu: a) Manajemen perubahan; b) Penataan peraturan perundang-undangan; c) Penataan dan penguatan organisasi; d) Penataan tatalaksana; e) Penataan sistem manajemen; f) Penguatan akuntabilitas; g) Penguatan pengawasan; dan h) Peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves dari tahun 2016-2020 nilainya meningkat sebagaimana pada tabel dan masuk dalam kategori baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Target Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves di tahun 2022 sebesar 80 menjadi target realistis menurut Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam rangka mencapai target tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan realisasi rencana kerja reformasi birokrasi Kemenko Marves sebagai berikut:

GAMBAR 20
RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI KEMENKO MARVES



Adanya *refocusing* anggaran tidak mempengaruhi pencapaian target RB di Kemenko Marves, pelaksanaan kegiatan dengan mengubah metode menjadi online sehingga target yang telah ditentukan dapat tercapai. Hingga saat ini, Kemenko Marves telah melakukan tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Telah menyusun peta keterkaitan antar kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenko Marves;
2. Telah menetapkan standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2014 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 145 tahun 2021;
3. Telah meningkatkan pembangunan Zona Integritas, terlihat dari jumlah unit kerja yang diajukan ke Kemenpanrb untuk memperoleh Zona Integritas;
4. Telah melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis mulai dari tingkat Kemenko Marves/ Pusat hingga unit kerja.

Capaian Nilai RB Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,92 poin dibandingkan dengan Nilai RB Tahun 2021, dimana pada Tahun 2021, Kemenko Marves meraih nilai RB sebesar 76,78. Sedangkan pada Tahun 2022, Kemenko Marves meraih nilai RB sebesar 78,70 dari target 80. Rincian Nilai Hasil Evaluasi RB Kemenko Marves dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 84
RINCIAN HASIL EVALUASI RB KEMENKO MARVES 2022

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	16,35	16,53
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,64	6,18
	III. Reform	30,00	22,93	23,43
	Total Komponen Pengungkit	60,00	44,92	46,14

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,83	7,98
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,10	6,90
3	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,65	8,67
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,28	6,31
	Total Komponen Hasil	40,00	31,86	32,56
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	76,78	78,70

Adapun perbandingan capaian IKU 15 tahun 2022 dan 2021 serta target akhir tahun 2024 dan target RPJMN 2022 seperti pada tabel berikut:

TABEL 85
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU NILAI HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI KEMENKO MARITIM PADA TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 12							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		
			2022	2021	2022	2024	RPJMN 2022
15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	Nilai	76,78	75,18	80	95	-

Pada target RPJMN, terkait Indeks RB yang diukur adalah jumlah instansi yang mendapat nilai 80 keatas (kategori baik), sedangkan yang menjadi target dari Kemenko Marves untuk RB yaitu nilai. Sehingga ada perbedaan dalam cara pengukuran target kinerja.

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

Komitmen Pimpinan menjadi faktor pendukung utama terlaksananya RB di Kemenko Marves. Dalam strategi menuju RB Istimewa, Kemenko Marves konsisten untuk membangun komitmen antara pimpinan dan seluruh pegawai. Selain itu, keterlibatan eselon I yang konsisten melaksanakan RB menjadikannya sebagai kebutuhan organisasi juga mendukung pencapaian nilai RB. Pelaksanaan RB pada tingkat unit kerja Eselon I terus mengalami peningkatan.

Kendala Pencapaian IKU

- Pemahaman terhadap pelaksanaan RB masih kurang dan masih dianggap sebagai tugas tambahan serta hanya sebatas pemenuhan bukti dukung kepada KemenPANRB.
- Pemotongan anggaran yang berdampak pada kegiatan strategis RB yang tidak terlaksana.

Inovasi dan Rencana Tindak Lanjut Periode Selanjutnya

Kemenko Marves terus melakukan langkah perbaikan terhadap pelaksanaan RB, antara lain menindaklanjuti rekomendasi pelaksanaan RB yang dikeluarkan oleh KemenPANRB, serta terus melakukan inovasi-inovasi terutama dalam digitalisasi guna mendukung implementasi SPBE.

Success story

Mendapatkan 3 kategori penghargaan dalam ASN Culture Fest 2022 terkait budaya kerja BerAKHLAK

1. Kategori Best Starter Akuntabel
2. Kategori Best Starter Adaptif
3. Kategori Best Starter Overall tingkat Kementerian

Data dukung atas pencapaian IKU Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

c. SS 13: Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi

Tujuan dari SS 13 adalah 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel; 2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; serta 3) Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

1) IKU 16 Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan. Maksud dari Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang terintergrasi adalah rangkaian proses yang menghubungkan beberapa sistem-sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional di lingkup Kemenko Marves. SS13 didukung oleh IKU Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dasar hukum SPBE adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Beberapa langkah strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendongkrak indeks SPBE Kemenko Marves antara lain telah dibentuk Tim Koordinator dan Tim Asesor yang ditandatangani oleh Sekeretaris Kementerian Koordinator atas nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan pemantapan internalisasi maupun dalam pemenuhan evidence untuk 47 indikator SPBE, indikator-indikator tersebut memiliki nilai interval terendah 1 (satu) dan tertinggi bernilai 5 (lima). Beberapa langkah

telah dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai indikator-indikator tersebut, antara lain:

GAMBAR 21
PELAKSANAAN SPBE DI KEMENKO MARVES



IKU SPBE dihitung dengan formula:

Hasil penilaian dari KemenPANRB yang disampaikan pada akhir tahun 2022

Capaian atas IKU Nilai Penyelenggaraan SPBE telah teralisasi pada tahun 2022 yaitu 2,68 dari target 3,1 atau tercapai 86,%. Capaian atas IKU ini seperti pada tabel berikut ini.

TABEL 86
CAPAIAN KINERJA IKU NILAI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 13					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
16	Nilai Penyelenggaraan SPBE	Moderate/Proxy	3,1	2,68	86,45
CAPAIAN					86,45

Indeks SPBE dinilai oleh Kemenpan RB berdasarkan Permenpan Nomor 59 Tahun 2020, variable Indeks SPBE terdiri atas 4 (empat) Domain, 8 (delapan) aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator penilaian. Pada tahun 2021 Kemenko Marves memperoleh predikat baik dengan nilai indeks SPBE 2,68 (Predikat Baik). Pada tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menargetkan capaian Indeks SPBE di angka 3.1 dalam Skala 4. Indeks SPBE tersebut berdasarkan Keputusan MenPANRB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

GAMBAR 22
CAPAIAN SPBE

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ABDULLAH AZWAR ANAS

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	2,92	Baik
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2,60	Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2,93	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2,68	Baik
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2,90	Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	3,84	Sangat Baik
7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,01	Baik
8	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,32	Baik
9	Kementerian Dalam Negeri	3,63	Sangat Baik
10	Kementerian Pertahanan	2,62	Baik
11	Kementerian Pertanian	3,75	Sangat Baik
12	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,51	Sangat Baik
13	Kementerian Perhubungan	3,33	Baik

Perbandingan capaian tahun 2022 dan 2021 serta target akhir atas IKU 16 pada Renstra Kemenko Marves tahun 2024 dan target RPJMN 2022 sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 87
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU NILAI PENYELENGGARAAN

CAPAIAN KINERJA SS 13							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		
			2022	2021	2022	2024	RPJMN 2022
12	Nilai Penyelenggaraan SPBE	Nilai	2,68	2,8	3,1	4	-

Pada target RPJMN, terkait Indeks SPBE yang diukur adalah jumlah instansi yang mendapat nilai 80 keatas (kategori baik), sedangkan yang menjadi target dari Kemenko Marves untuk SPBE yaitu nilai. Sehingga ada perbedaan dalam cara pengukuran target kinerja. Upaya dan kegiatan yang telah dilakukan Kemenko Marves sepanjang tahun 2022 untuk mencapai IKU Nilai Penyelenggaraan SPBE ini yaitu *Workshop* Penerapan Manajemen SPBE Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

- Komitmen pimpinan merupakan hal yang berpengaruh dalam penerapan sistem
- Ketegasan pimpinan untuk melakukan proses bisnis yang sudah disepakati akan mempermudah penyelenggaraan SPBE

Kendala Pencapaian IKU

- Belum semua indikator memiliki data dukung.
- Kebijakan internal yang diterapkan tidak bisa dipakai sebagai data dukung indeks penilaian SPBE yang terbaru.
- Kesadaran untuk penggunaan dan penerapan teknologi yang masih kurang. Sumber daya manusia yang masih minim pengetahuan untuk penerapan SPBE.

Rencana Tindak Lanjut Periode Selanjutnya

- Menambah pemenuhan data dukung dengan cara konsultasi/ pendampingan dengan tenaga ahli.
- Di Tahun 2023, IKU SPBE tidak lagi menjadi IKU Menteri.
- Update kebijakan tentang SPBE di lingkup Kemenko Marves.
- Peningkatan kapasitas SDM untuk pengawalan SPBE Kemenko Marves
- Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat asistensi percepatan implementasi arsitektur SPBE di internal Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, bekerjasama dengan Kemenko Polhukam, KemenPANRB, Kemen Kominfo dan disinergikan dengan penguatan keamanan sistem Informasi baik dari Kepolisian Republik Indonesia (terkait Cyber security) maupun bekerjasama dengan BSSN.
- Menyelenggarakan Rakor lanjutan dengan berkoordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dan Transportasi, dengan melibatkan 8 (delapan) Kementerian dalam koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman Dan Investasi, dengan tujuan menghasilkan rumusan roadmap inisiatif strategis percepatan dan rencana aksi implementasi SPBE.
- Rencana pengembangan superApps yang dapat dimanfaatkan semua pihak, dimana didalamnya terdapat miniApps yang dikontribusikan oleh setiap K/L. Diharapkan kontribusi K/L dapat membantu penyelesaian permasalahan yang 80% terdapat di daerah, sehingga mempermudah kegiatan berusaha di Indonesia.

Data dukung atas pencapaian IKU Nilai Penyelenggaraan SPBE terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

d. SS 14: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Maksud dari SS ini adalah upaya Kemenko Marves dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik khususnya akuntabilitas keuangan. Instrumen terpenting dari akuntabilitas keuangan adalah keuangan pemerintah dan transparansi, dimana laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah mencerminkan bentuk akuntabilitas. Laporan

keuangan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus diperiksa oleh BPK. Selanjutnya BPK akan mengeluarkan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Jadi, pencapaian Sasaran Strategis ini direpresentasikan dengan IKU Opini Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan.

1) IKU 17 Opini Badan Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang setiap tahun yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan kementerian/ lembaga. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Selain itu, opini menunjukkan pula kualitas tata kelola keuangan pada Kementerian/ Lembaga tersebut.

BPK memiliki standar yang digunakan secara ketat dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Adapun kriteria penilaian opini yang mengacu pada SPKN adalah dengan menilai kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi dan laporan keuangan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. BPK memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*TMT/Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (*TW/Adverse Opinion*).

Kemenko Marves telah memperoleh opini WTP atas laporan keuangan sejak tahun 2016. Sejak berdiri pada tahun 2015, hanya pada tahun 2015 Kemenko Marves mendapat opini WDP atas laporan keuangan dari BPK.

Target IKU opini BPK atas laporan keuangan pada Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPK setiap tahun selalu melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan K/L untuk tahun anggaran sebelumnya. Jadi, target IKU 17 adalah opini untuk laporan keuangan tahun anggaran 2021.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021 Nomor: 8a/LHP/ XVIIIf05/2022 Tanggal : 27 Mei 2022 dinyatakan bahwa Kemenko Marves memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Dengan demikian, capaian ini sesuai dengan target tahun 2022 atau tercapai 100%. Adapun capaian atas IKU ini sebagai berikut:

TABEL 88
CAPAIAN KINERJA IKU OPINI BPK TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 14					
NO	IKU	TINGKAT KENDALI/ TINGKAT VALIDASI IKU	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
17	Opini BPK	<i>Low/Proxy</i>	WTP	WTP	120
CAPAIAN					120

Merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, menurut BPK, laporan keuangan Kemenko Marves menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kemenko Marves tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan pencapaian ini maka Kemenko Marves telah memperoleh opini WTP sebanyak tujuh kali secara berturut-turut sejak tahun 2016. Sejak berdiri pada tahun 2015, hanya pada tahun 2015 Kemenko Marves memperoleh opini WDP atas laporan keuangan.

TABEL 89
PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENKO MARVES

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Apabila dibandingkan antara target dan realisasi pada tahun 2021 dan 2022, maka realisasi kinerja selalu tercapai yakni selalu mendapatkan opini WTP. Sebagai perbandingan antara target PK, target akhir Renstra 2020-2024, dan RPJMN 2022 yakni:

TABEL 90
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET IKU OPINI BPK TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA SS 2							
NO	IKU	SATUAN	REALISASI		TARGET		
			2022	2021	2022	2024	RPJMN 2022
12	Nilai Penyelenggaraan SPBE	Nilai	2,68	2,8	3,1	4	-

Pada target RPJMN, terkait Indeks Opini BPK yang diukur adalah jumlah instansi yang mendapat nilai 93 keatas (WTP), sedangkan yang menjadi target dari Kemenko Marves untuk Opini BPK yaitu nilai. Sehingga ada perbedaan dalam cara pengukuran target kinerja.

Dalam upaya mencapai opini WTP atas laporan keuangan, Kemenko Marves telah melakukan serangkaian kegiatan antara lain melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian data keuangan antar unit kerja di lingkungan Kemenko Marves, memastikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK tahun

sebelumnya, Menyusun sejumlah pedoman dan dasar hukum pengelolaan keuangan, peningkatan kompetensi penyusun laporan keuangan, dan menyusun laporan keuangan (unaudited) dan laporan keuangan (*audited*) serta menyampaikannya tepat waktu.

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam pencapaian opini WTP atas laporan keuangan Kemenko Marves tahun 2021. Pertama, komitmen pimpinan dan seluruh pengelola keuangan di Kemenko Marves yang tinggi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pencapaian opini WTP adalah "harga mati" dalam pelaporan keuangan. Kedua, sistem pengendalian internal dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan di Kemenko Marves yang memadai. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang disusun menyajikan secara wajar posisi keuangan Kemenko Marves per 31 Desember 2021, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Untuk memastikan keandalan laporan keuangan tersebut, Kemenko Marves telah melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Tujuan dari pelaksanaan PIPK adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian internal yang memadai.

Ketiga, tingginya persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK. Per 31 Desember 2021, persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK mencapai lebih dari 90%.

Keempat, meningkatnya peran aktif Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mendeteksi, mengawasi, dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi potensi temuan BPK. Kelima, ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan. Kemenko Marves selalu mematuhi jadwal penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan baik kepada Kementerian Keuangan maupun kepada BPK. Terakhir, koordinasi yang baik dengan seluruh *Stakeholders* pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenko Marves. Selain itu, koordinasi dan konsultasi juga dilakukan secara aktif dengan Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan terkait teknis penyusunan laporan keuangan dan dengan tim pemeriksa BPK terkait kemudahan dalam akses pemeriksaan di lingkungan Kemenko Marves.

Di lain pihak, terdapat pula beberapa kendala dalam pencapaian opini WTP atas laporan keuangan. Pertama, permasalahan aset. Masih ditemukan aset yang tidak dapat ditelusuri, tidak dilabeli Barang Milik Negara, dan terdapat permasalahan dalam pengelolaan persediaan. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis selaku pengelola keuangan, penyusun laporan keuangan, dan ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketiga, pengelolaan kas masih dilakukan secara tunai.

Untuk menjamin keberlangsungan capaian opini WTP atas laporan keuangan maka direncanakan untuk melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut. Pertama, melaksanakan inventarisasi aset agar semua aset dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan aset. Kedua, melaksanakan kegiatan peningkatan

kompetensi teknis dalam pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketiga, memperbaiki pengelolaan kas secara non tunai (*cashless*). Keempat, mempersiapkan standar dan prosedur untuk meningkatkan tata kelola keuangan. Kelima, memaksimalkan penggunaan aplikasi SAKTI mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.

Success story

Dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 Kementerian Keuangan selaku wakil pemerintah memberikan apresiasi kepada entitas pelaporan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan yang telah disusun. Penghargaan WTP Tahun 2021 diberikan kepada 584 entitas pelaporan termasuk Kemenko Marves. Pada kesempatan ini, Kemenko Marves menerima penghargaan untuk kategori WTP minimal 5 kali secara berturut-turut.

GAMBAR 23
PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN OPINI BPK TAHUN 2022



Kedepannya Kemenko Marves berkomitmen untuk dapat mempertahankan opini WTP dengan tetap menjaga akuntabilitas dan kinerja dengan melakukan pengelolaan keuangan yang lengkap, tertib, dan akuntabel. Di samping itu, tercapainya target kinerja opini WTP atas laporan keuangan ini dapat tercapai karena kerja keras dan kerjasama yang dilakukan oleh setiap unit kerja untuk melaksanakan realisasi anggaran dan pelaksanaan keuangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Data dukung atas pencapaian IKU Opini BPK terdapat pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Kemenko Marves sebagai kementerian yang memiliki tugas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian atas 7 K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Marves (KKP, Kemen ESDM, Kemenhub, KLHK, Kemen PUPR, Kemenparekraf, Kemen Investasi/BKPM) sejak tahun 202 sampai dengan tahun 2022 telah mendorong dan melaksanakan beberapa program dan kegiatan *Major Project* dan yang ditugaskan langsung oleh Presiden RI, antara lain sebagai berikut:

1. Dukungan Presidensi G-20 berdasarkan (Keppres No. 18 Tahun 2021)

KTT G20 Indonesia 2022 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 – 16 November 2022, dinilai sukses dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Pasalnya, KTT G20 berhasil mengadopsi dan mengesahkan Deklarasi Pimpinan G20 (*G20 Bali Leaders' Declaration*). Selain deklarasi, Presidensi G20 juga menghasilkan *concrete deliverables* yang berisi daftar proyek kerja sama negara anggota G20 dan undangan. Misalnya, pembangunan PLTS, baterai EV, pembangunan dan revitalisasi pelabuhan, restorasi terumbu karang, renewable energy, infrastruktur biru, dan sebagainya.

Indonesia menjadi wakil Asia Tenggara yang menjadi salah satu poros negara berkembang dalam forum G20 tersebut. Indonesia disebut mampu mendorong solusi berbagai permasalahan, bahkan di tengah krisis dan tantangan global, juga konflik antara Rusia dan Ukraina.

Rangkaian G20 Indonesia mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, laju ekonomi dua kuartal terakhir tumbuh dan naiknya PDRB sejumlah kota. Pemerintah pun terus mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat sejak Desember 2021, untuk menyelesaikan seluruh rangkaian KTT G20.

2. Sumber Daya Air Nasional berdasarkan (Perpres No. 53 Tahun 2022)

Air adalah salah satu sumber alam paling penting bagi makhluk hidup namun sering menjadi permasalahan dalam keberadaan, sirkulasi, dan penyebarannya. Selain itu, Air sangat mudah terkontaminasi dengan zat-zat kimia lainnya melalui pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi melalui sistem pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sampai ke generasi mendatang. Untuk menghindari degradasi lebih lanjut, perlu dilakukan upaya pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi para pihak/komitmen para pihak dalam hal ini pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat wilayah sungai. Pada tanggal 20 Desember 2022 telah dilaksanakan Sidang Pleno DSDAN yang menyetujui substansi empat (4) rekomendasi sumber daya air:

- Pelestarian Hutan dan Perlindungan Sumber Air;
- Rasionalisasi Pemanfaatan Air untuk PertanianTanaman Pangan Beririgasi;
- Tinjauan Peran Lubang Biopori dan Sumur Resapan untuk Mitigasi Genangan;
- PengelolaanTerpadu Air Permukaan dan Air Tanah;

Selain itu, dalam Sidang Pleno DSDAN juga menyetujui usulan rencana kerja DSDAN Tahun 2023 dan usulan Keppres anggota DSDAN perwakilan Daerah, serta menetapkan:

- Permenko tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan dalam Sidang DSDAN;
- Kepmenko Panitia Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana Rencana Kerja DSDAN Tahun 2022;
- Kepmenko tentang Tim Pelaksana Pemilihan Anggota DSDAN yang Berasal dari Unsur Non-Pemerintah.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah penyampaian rekomendasi DSDAN kepada Presiden, pengawalan rencana kerja DSDAN Tahun 2023, dan pemilihan anggota DSDAN unsur non-pemerintah.

GAMBAR 24
PELAKSANAAN SIDANG PLENO DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL



3. HDCM RI-RRT berdasarkan Arahan Presiden dalam SKP, 2021

Menko Marves menandatangani MoU Establishing a High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) bersama Wang Yi. Dalam perjanjian tersebut, Luhut dan Menlu China bertindak sebagai Co-Chair HDCM. Hubungan Kerjasama Bilateral antara Indonesia dan China terutama dalam bidang ekonomi saat ini terus meningkat. Berbagai bidang strategis yang disepakati yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam penyediaan vaksin Covid-19, proyek ekonomi besar, pengembangan digital, dan keamanan laut.

GAMBAR 25
PENANDATANGANAN MOU ESTABLISHING A HIGH LEVEL DIALOGUE AND COOPERATION MECHANISM (HDCM)



Selain itu, MoU tersebut juga terkait One Belt One Road (OBOR) antar kedua pihak dan visi Indonesia tentang Poros Maritim Global, terutama dalam mendorong proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Setidaknya terdapat 5 kesepakatan, yaitu Solidaritas Politik, Vaksin COVID-19, Pembangunan Infrastruktur, Kemaritiman, dan Pertukaran Budaya dan Pariwisata.

4) Renaksi Kebijakan Kelautan Indonesia – KKI berdasarkan Perpres No. 34 Tahun 2022

Kebijakan Kelautan Indonesia ditetapkan melalui Perpres No. 16 Tahun 2017. terdiri dari 2 Dokumen (Narasi Kebijakan dan Rencana Aksi Tahun 2016-2019). Dilanjutkan Kembali dengan Perpres No.34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025.

KKI merupakan Kebijakan Pembangunan pada bidang Kelautan dan Kemaritiman. Sebagai tolok ukur visi Poros Maritim Dunia yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden sejak Tahun 2014.

Kemenko Marves berperan sebagai Koordinator sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3), yakni “Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi.” dari 40 K/L Penanggung Jawab Kegiatan dalam Renaksi KKI.

Perpres 34/2022 tentang Renaksi KKI Tahun 2021-2025 ditetapkan pada awal Tahun 2022. Secara agregasi, akan dilakukan penilaian menyeluruh/ dampak yang dilaksanakan masyarakat terhadap pelaksanaan Renaksi KKI pada akhir periode dengan mengukur Kontribusi KKI terhadap 10 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Di setiap tahun akan dilaksanakan Monev pada B06, B09 dan B12. Target tahun 2022 merupakan pelaksanaan monev pertama setelah Perpres ditetapkan.

5) Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia – BBI berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 2021

Program Bangga Buatan Indonesia merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui pengembangan UMKM Indonesia. Gernas BBI diluncurkan secara resmi oleh Presiden pada 14 September 2020. Target Gernas BBI selanjutnya hingga 2023 adalah sebagai berikut: Meningkatkan jumlah UMKM/IKM onboarding menjadi 30juta; Meningkatkan permintaan terhadap produk artisan Indonesia; Meningkatkan peran aktif pemda, topbrands, media, komunitas, dll.

Gerakan aksi afirmasi PDN yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu terobosan yang baik. Inovasi melalui digitalisasi dan konsolidasi belanja melalui e-katalog telah mendukung efisiensi belanja yang dapat menurunkan korupsi dan biaya transaksi.

Pada Tahun 2022, telah diluncurkan produk Kartu Kredit Pemerintah

Domestik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran. Untuk keberlanjutan program ini diperlukan akselerasi beberapa komitmen, yaitu membeli dan menggunakan produk dalam negeri serta komitmen menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik pada awal tahun 2023.

Dasar hukum terkait afirmasi belanja produk dalam negeri diharapkan dapat menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi. Aksi afirmasi ini dilaksanakan untuk mencapai dampak ekonomi di kisaran 1,5-1,7%, dengan penyerapan sampai dengan 2 juta tenaga kerja.

Penurunan indikator jumlah kejahatan dan tingkat risiko kejahatan selama 3 tahun terakhir yang ditangani Polri, menjadi salah satu penopang ketertarikan investor ke Indonesia, sehingga investasi masuk tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tahun 2022 juga menjadi awal perpindahan dari barang impor ke produk dalam negeri sehingga pada 2023, Polri membatasi pembelian produk dalam negeri maksimal 5%.

6) Pengendalian Food Estate berdasarkan Arahan Presiden, Tahun 2021

Sepanjang tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengawal proses pengembangan kawasan Food Estate (FE) di lima lokasi, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua sepanjang tahun 2022. Selain itu, sedang direncanakan peninjauan terhadap FE Nusa Tenggara Timur (Sumba).

Dalam proses pengembangan kawasan Food Estate diperlukan dukungan berbagai sektor lintas K/L untuk penyusunan dokumen-dokumen pendukung, seperti izin lingkungan (KLHS dan AMDAL), analisis kesuburan tanah, tata ruang, dan lain sebagainya. Namun demikian, sesuai dengan hasil Rapat Terbatas Perkembangan Pelaksanaan Program Food Estate di Humbang Hasundutan pada tanggal bulan November 2022, dimandatkan bahwa FE Humbahas (Sumut Tahap I) dan FE Dadahup (FE Kalteng) merupakan dua lokasi yang diprioritaskan. Progres capaian untuk pengembangan FE di dua lokasi prioritas (Sumut & Kalteng) sepanjang tahun 2022 antara lain:

1) FE Sumut:

- Pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan (9,7 Km) dan irigasi (8 embung – 350 Ha); Pembangunan jalan dalam kawasan telah dimulai November 2022 dengan land clearing untuk membentuk trase dan pembangunannya menggunakan DIPA 2023 sepanjang 6,82 KM, sedangkan sisanya 8,84 KM menunggu Dana BUN;
- Pembersihan lahan (401 Ha) dan pengolahan lahan; Land clearing baru mencapai 47% (415 Ha dari target pengembangan 785 Ha), diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran operasional pembersihan dan pengolahan lahan Tahap 1 untuk sisa 400 Ha, yaitu sebesar kurang lebih Rp 2 Milyar;

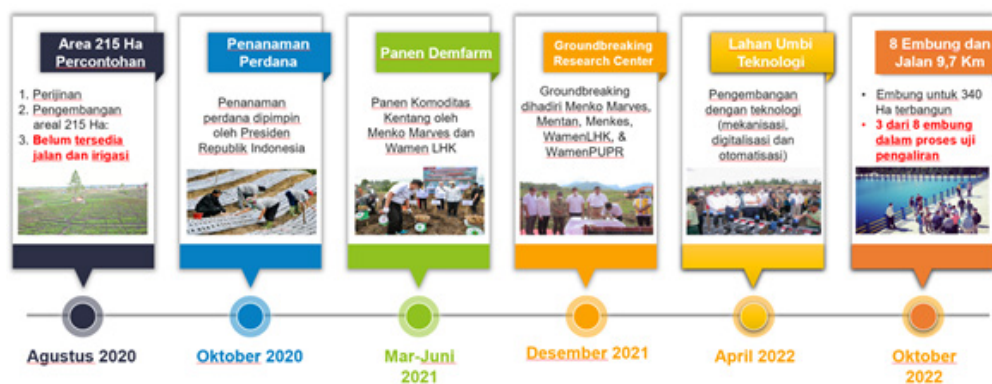
- Tersusunnya Sistem Monev FE Sumut;
- Tersusunnya dokumen perencanaan dan penyiapan lahan 50 Ha di Kab. Pakpak Barat;
- Penyusunan RPerpres Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara.
- Target Penyelesaian Jaringan Sekunder untuk air irigasi tahun 2022 adalah seluas ±203 Ha, sedangkan kekurangannya ±507 Ha akan diselesaikan pada tahun 2023;
- Olah tanam mencapai 165 Ha (21%), terhambat minimnya modal petani dan kurangnya minat petani;
- Sudah terdapat *off-taker*, tetapi beberapa *off-taker* belum mencapai kesepakatan mengenai skema kerja sama dengan kelompok petani di Humbang Hasundutan.

CAPAIAN BUDIDAYA PERTANIAN		
PETANI/KERJASAMA	TERTANAM (HA)	TARGET 2022 (HA)
PT Parnaraya2,2	13,7	
Indofood	-	3,0
Kolaborasi 5 Perusahaan	17,2	17,2
Swadaya/Investor Lokal	46,7	51,7
TOTAL	66,1	85,6

2) FE Kalteng :

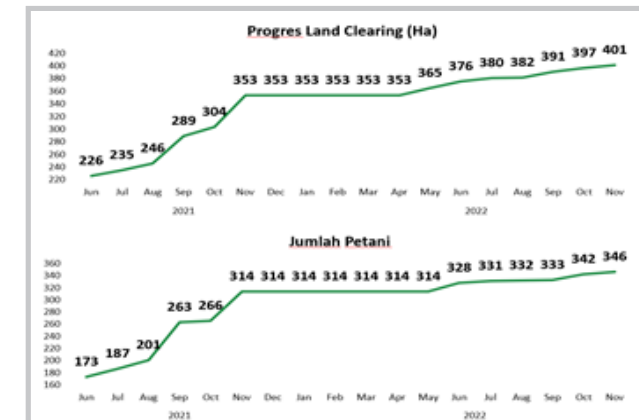
- Pengolahan lahan dan budidaya di Blok A1 (300 Ha), A4 (1.258 Ha), A5 (312 Ha) dan Palingkau (Kemtan);
- Perbaikan beberapa pintu dan saluran irigasi serta *pilot project* di Blok A5 seluas 46 Ha yang akan dikelola oleh BWS (26 Ha) dan Nippon Koi (20 Ha) yang akan melibatkan IPB;
- Pembentukan Satgas Terpadu;
- Penyusunan Perda LP2B oleh Pemkab. Kapuas.

GAMBAR 26
HISTORI PENGEMBANGAN FOOD ESTATE SUMATERA UTARA DI KAB. HUMBANG HASUNDUTAN



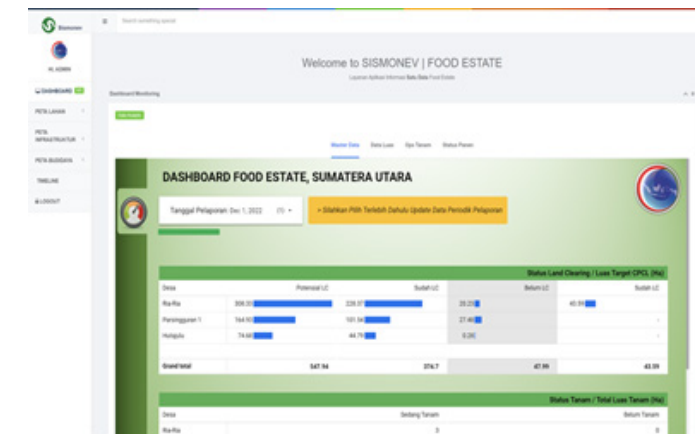
Sumber: Kemenko Marves (2022)

GRAFIK 20
PERKEMBANGAN LAND CLEARING DAN JUMLAH PETANI DI FOOD ESTATE SUMATERA UTARA DI KAB. HUMBANG HASUNDUTAN



Sumber: Kemenko Marves (2022)

GAMBAR 27
TAMPILAN SISMONEV FOOD ESTATE SUMATERA UTARA



Sumber: Kemenko Marves (2022)

GAMBAR 28
KUNJUNGAN LAPANGAN PENGEMBANG FOOD ESTATE DI SUMATERA UTARA (KIRI) DAN KALIMANTAN TENGAH (KANAN)



Sumber: Kemenko Marves (2022)

7) KTT AIS Forum berdasarkan Arahan Presiden, Tahun 2021

AIS Forum adalah organisasi internasional yang dibentuk pemerintah Indonesia. Inisiatif Indonesia ini menjadi bagian dari diplomasi maritim untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memulai inisiasi pembentukan AIS Forum di tahun 2016 bersama *United Nations Development Program* (UNDP) dan berhasil membangun komitmen pembentukan kerja sama antar negara pulau dan kepulauan pada tahun 2017. Sejak awal pembentukan *Archipelagic and Island States Forum* (AIS Forum), Indonesia memiliki peran yang penting dan strategis dalam AIS Forum.

Pada tanggal 22 November 2017, delegasi negara pulau dan kepulauan di kawasan Asia Pasifik yang hadir dalam konferensi AIS sepakat untuk membentuk forum. AIS Forum secara resmi di deklarasikan melalui deklarasi bersama Manado (Manado Joint Declaration) yang di selenggarakan tanggal 1 November 2018.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mendorong terus kepemimpinan Indonesia dalam kolaborasi strategis antara negara-negara dalam kerangka AIS Forum. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, seperti rentannya perubahan iklim yang ekstrem, penangkapan ikan yang serampangan, polusi di berbagai area baik polusi udara, laut dan sebagainya, negeri ini harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Sudah saatnya komunitas global lebih memperhatikan isu dampak perubahan iklim terhadap laut karena laut menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dunia. Tidak boleh ada yang merasa negara kepulauan di ignore (diabaikan) dalam isu kelautan dan perubahan iklim.

Sepanjang tahun 2022, Kemenko Marves telah melaksanakan: Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Keempat Tingkat Menteri Forum Negara Pulau dan Kepulauan (*Archipelagic and Island States Forum*-AIS Forum) di Nusa Dua, Bali, 5–6 Desember 2022.

8) Kereta Cepat Jakarta-Bandung berdasarkan Perpres No. 93 Tahun 2021

Kemenko Marves turut serta langsung dalam koordinasi mengatasi *Cost Overrun* yang berdasarkan review BPKP adalah sebesar USD 1,45 Miliar. *Testing & Commissioning* akan dilaksanakan awal April 2023 dan akan dilakukan selama 3 bulan hingga COD Kemajuan pembangunan proyek di akhir tahun 2022 sebesar 82,17% sementara untuk progres investasi: 91.70%.

9) Kawasan Rebana & Jabar Selatan berdasarkan Perpres 87 Tahun 2021

Secara Khusus dalam Peraturan Presiden no 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan di kawasan REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan, diumana dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada pembangunan perekonomian regional

dan nasional, dilakukan pembangunan di Kawasan REBANA (Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan) dan kawasan Jawa barat bagian Selatan (Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran) perlu mendapat perhatian khusus terutama dalam pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut.

Jawa Barat mempunyai kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada sebaran tumbuh kembangnya Kawasan industri. Tercatat dari 132 kawasan industri yang telah beroperasi, 71 diantaranya berlokasi di Jawa Barat yang menempati kurang lebih 63.100 ha lahan di Jawa Barat. Penyediaan beberapa infrastruktur dasar harus dilakukan dengan koordinasi yang tepat antara lain Penyediaan energi bagi industri dan kelistrikan akan dipenuhi melalui pengembangan potensi energi terbarukan di Kawasan Industri melalui integrasi dengan sektor lain. Capaian hingga tahun 2022 :

- Hasil Validasi 17 Januari 2022, hanya 5 Proyek P1 yang memenuhi kelengkapan dokumen Readiness Criteria oleh BPKP.
- Hasil Validasi tambahan 18 Februari 2022, sebanyak 42 proyek yang memenuhi kelengkapan dokumen Readiness Criteria.
- Sehingga total hasil reuiu Readiness Criteria SEBANYAK 47 PROYEK P1
- Status Selesai (berdasarkan hasil Reuiu BPKP, Klarifikasi K/L, dan Pemda)
 - Pelebaran Jalan Pangkalan Damri – Kiarapayung (Exit Ramp Cisumdawu-Jatinangor)
 - Reaktivasi Jaringan Rel KA Cikajang
 - Pelebaran Jalan Pangkalan Damri-Kiarapayung (Exit Ramp Cisumdawu-Jatinangor)
 - Reaktivasi jaringan KA cikajang

Faktor pendukung tercapainya kegiatan ini yakni terjalin koordinasi yang baik antar *Stakeholder*. Sementara Kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan yaitu:

- Permasalahan terkait Pembebasan lahan
- Kab Subang-belum ada koordinasi lebih lanjut dengan Dinas KP Provinsi Jawa Barat untuk skema pendanaan oleh APBD
- Jumlah wilayah blank spot berdasarkan IDM (2021) di Kawasan Jabar Selatan sebanyak 322 Desa dan Kawasan Rebana sebanyak 148 Desa.
- Terdapat 170 desa di Kawasan Rebana dan Jabar selatan yang telah memiliki infrastruktur digital namun belum mendapatkan literasi digital

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan yakni Koordinasi dan pengendalian terhadap Tahapan Konstruksi yang harus diselesaikan ≤ 2024, dengan rincian:

- a. Pelebaran Ruas Jalan Cipasung-Subang-Cilebak (Kab. Kuningan)-Kutaagung/Dayeuh Luhur (Kab. Cilacap)
- b. Pembangunan Breakwater Pantai Timur Pangandaran
- c. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Seksi 3-6)
- d. Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan
- e. Pengembangan Desa Digital
- f. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Pelabuhanratu
- g. Pengembangan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jatigede
- h. Pengembangan Rumah Sakit Cideres Tipe B

10. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2021

Program ini memiliki rencana aksi berupa Pembangunan Energi Berkelanjutan, dengan rencana aksi jumlah layanan dukungan sektor ketenagalistrikan dalam pencapaian target mitigasi gas rumah kaca sektor energi (rekomendasi); dan Rendah Karbon Pesisir dan Laut. Sementara Kriteria serta ukuran keberhasilan pada tahun 2022 yaitu:

- a. Terdapat 1 Rekomendasi dari Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi sesuai dengan target yang tercantum pada RPJMN Tahun 2020- 2024;
- b. Penurunan Emisi CO₂ Pembangkit sebesar 5,36 Juta Ton sesuai dengan target yang tercantum pada RPJMN Tahun 2020-2024

Hingga saat ini, capaian program berupa Tersusunnya permen turunan untuk implementasi tool NEK yang terdiri dari:

- a. Permen NEK sub sector ketenaga listrikan No 16/2022
- b. Permen NEK sektor Kehutanan
- c. PMK tentang Carbon Tax

Semenjak lahirnya Perpres NEK maka pengaturan perdagangan karbon memiliki payung hukum. Implementasi perdagangan karbon sub-sector ketenagalistrikan dimulai 1 Februari 2023 ini.

11. Penanganan Maluku Lumbung Ikan Nasional - M-LIN berdasarkan Arahan Presiden, Tahun 2021

Capaian:

- a. Masukan terakhir RPerpres Maluku Lumbung Ikan Nasional dari KKP kepada Kemenko Marves sudah diterima pada 27 September 2022.
- b. KKP sudah memasukkan usulan tambahan anggaran tahun 2023 untuk M-LIN sebesar 2 triliun rupiah pada 24 Juni 2022 (masih perlu dilakukan follow up tentang persetujuannya)

Faktor Pendukung ketercapaian program yakni terdapat respon positif oleh KKP dalam mendukung kebijakan M-LIN. Sedangkan kendala yang

dialami yaitu masih belum ada kejelasan apakah Perpres M-LIN akan diterbitkan atau tidak. Menko Marves pernah berpendapat bahwa tidak perlu perpres. Namun masyarakat, DPR dan pemerintah daerah Maluku mendesak supaya ada Perpres LIN.

Pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan fishmarket bertaraf internasional di Ambon dibatalkan setelah dinilai kurang layak feasibility study nya oleh PT SMI. Tahun 2022, KKP bergerak untuk menindaklanjuti dalam mendukung LIN (masih perlu memastikan apakah anggaran disetujui oleh Kemenkeu).

12. Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta berdasarkan Perpres No. 23 Tahun 2021

Tujuan dari kebijakan satu peta yaitu: 1) Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dari *Stakeholder* yang diakibatkan oleh ketidakseragaman data yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah; Percepatan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang didasarkan atas arahan Presiden dengan mendahulukan penyelesaian hak-hak masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian berinvestasi.

Kemenko Marves sebagai Wakil Ketua II Tim KSP yang mengoordinasikan Peta Tematik Kemaritiman. Terkoordinasikannya 53 peta tematik kemaritiman yang memastikan adanya keseragaman dan sinkronisasi antar *Stakeholder*.

13. Penanganan Covid-19 dan PEN berdasarkan Perpres No. 108 Tahun 2020

Tujuan penanganan covid 19 dan PEN yaitu untuk Penanganan Covid yang efektif melalui strategi komunikasi koordinasi antar K/L, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pada akhir tahun 2022, kasus Covid-19 relatif terkendali, kasus harian (<1000) dan kasus kematian (<20) pada tingkat yang rendah. Rawat Inap RS dan BOR juga mengalami penurunan. Inmendagri baru telah disiapkan untuk menggantikan PPKM Level dengan Judul "Strategi Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Masa Transisi Menuju Kondisi Pasca Pandemi".

14. Penanganan 15 Danau Prioritas Nasional berdasarkan Perpres No. 60 Tahun 2021

Tujuannya pelaksanaan program yakni meningkatkan nilai indeks kualitas air sebesar 55,50 pada tahun 2024, mengkoordinasikan penyelamaan 15 Danau Prioritas Nasional yang telah mengalami degradasi sehingga mengancam kelestarian danau-danau tersebut, serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam program ini, Kemenko Marves berperan sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional daerah yang ditetapkan sebagai Pergub atau SK Gubernur. Salahsatu tugas utama yakni mengkoordinasikan Penataan ruang, instrumentasi pengendalian tata ruang danau sedang dilaksanakan oleh ATR/BPN dan PUPR

15 Revitalisasi Tambak Udang berdasarkan Arahan Presiden, tahun 2021

Capaian:

- a. Telah Diterbitkan Crash Program Pokja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang 2022 - 2024 (Kepmenko Bidang Kemaritiman dan Investasi No 42/DII Tahun 2022);
- b. Telah diterbitkan Panduan Perizinan Berusaha Tambak Udang yang telah disimplifikasi untuk mempermudah proses, menyederhanakan jumlah dan prosedur, memberikan kepastian usaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- c. Telah dilaksanakan National Shrimp Action Forum 2022 sebagai wadah untuk formalisasi / launching program Program Pokja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang 2022 - 2024 serta sosialisasi Panduan Perizinan Berusaha Tambak Udang;
- d. Integrasi Sektor Perikanan kedalam Komisi Irigasi di Tingkat Provinsi. Diantaranya yang telah disahkan didalam SK Gubernur yakni:
 - Provinsi Jawa Timur (SK Gubernur Jawa Timur No. 188/497/KPTS/013/2022 Tentang Komisi Irigasi Provinsi Jawa Timur Periode 2022 – 2025);
 - Provinsi Jawa Barat (SK Gubernur Jawa Barat No. 611/KEP.637-DSDA/2022 Tentang Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat); dan
 - Provinsi Sulawesi Selatan (SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 1995/VIII/2020 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pengurus Komisi Irigasi Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2019 – 2024);
 - Berdasarkan Hasil Koordinasi, telah disepakati bahwa PPN untuk Komoditas Udang dibebaskan dari PPN. Komitmen tersebut telah ditindaklanjuti dan telah disahkan didalam PP No. 49 Tahun 2022. Pada Pasal 6 Ayat 2 lampiran (b), Produk hasil Perikanan Budidaya dibebaskan dari PPN;
 - Pengembangan Tambak Udang Estate seluas 70 Ha di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini progress pembangunan fisik telah mencapai 97% (update progress per 9 Desember 2022). Target penyelesaian pembangunan fisik pada awal tahun 2023; Bank BRI Regional Jawa Timur dan Bank Jawa Timur telah berkomitmen untuk mendukung penyaluran KUR pada sektor Perikanan dan Kelautan. Komitmen tersebut telah diformalkan melalui MoU dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - Sinkronisasi Program Revitalisasi Irigasi Pertambakan Rakyat antara DJPB KKP dan DSDA PUPR. Penyusunan DED Kawasan telah diselesaikan dan diserahterimakan oleh DJPB KKP kepada DSDA PUPR pada acara NSAF 2022. Pekerjaan fisik akan dimulai oleh DSDA PUPR pada tahun 2023;

Faktor pendukung tercapainya IKU yakni komitmen kuat dari sebagian K/L yang terlibat. Hal ini tertuang secara konkrit dari kebijakan dan program yang diimplementasikan. Sementara kendala yang dihadapi antara lain:

- Konflik kepentingan oleh sebagian K/L, terkait kebijakan simplifikasi perizinan;
- Tenggat waktu proses penyusunan DED oleh KKP sedikit mundur dari target, terkait program sinkronisasi revitalisasi irigasi;
- Akibat *refocusing* anggaran disebagian unit kerja K/L yang terlibat, beberapa program berpotensi tidak bisa terlaksana pada proses implementasinya;
- Preferensi penyaluran KUR oleh sector perbankan masih ke sector perdaagangan, sedangkan ke sector perikanan masih minim;

Tindak lanjut berikutnya yakni akan dilakukan monev secara menyeluruh, komprehensif dan detail, khususnya terkait dampak dan pencapaiannya terhadap outcome pembangunan yang sudah ditetapkan;

16. Pengendalian Program Tol Laut berdasarkan Perpres No.27 Tahun 2021

Tol laut adalah salah satu cara pemerintah untuk memangkas atau menghilangkan biaya logistic yang terlalu tinggi, meskipun sampai saat ini keberadaan ongkos logistic masih tinggi, tetapi secara langsung negara berupaya agar daerah daerah tertinggal atau terluar dapat menikmati biaya logistic semurah mungkin. Biaya logistik ditekan serendah mungkin karena biaya logistic sangat mempengaruhi harga barang sehingga secara langsung akan mempengaruhi tingkat perekonomian di daerah.

Biaya logistik yang tinggi akan menyebabkan kenaikan nilai inflasi jika inflasi tinggi maka hal ini akan mengurangi investor atau daya tarik kepada investor yang akan investasi menjadi kecil atau rendah. Adanya tol laut diharapkan untuk menciptakan pembangunan industri-industri baru di luar pulau jawa sehingga pada akhirnya bentuk ideal dari tol laut nantinya adalah kapal mampu mengisi palka muatan saat berangkat maupun kembali ke pelabuhan asal. Capaian tahun 2022 :

- a. Program tol laut telah memiliki 33 trayek mengalami peningkatan jumlah armada angkutan dan jumlah pelabuhan singgah sejak tahun 2019 – 2022 (rincian data sudah diberikan berupa ND)
- b. Telah diluncurkan Sistem Informasi Tol Laut (SITOLAUT) yang memudahkan pembeli dalam melakukan purchase order untuk dapat memilih sendiri penjual, Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan jadwal kapal melalui media elektronik. Selain itu, pemerintah juga lebih mudah dalam melakukan pemantauan.
- c. Saat ini telah dibangun sebanyak 14 Depo Gerai Maritim dan telah diluncurkan sistem informasi Gerai Maritim (SIGM) melalui <http://www.geraimaritim.kemendag.go.id> untuk memantau kelancaran arus barang, peningkatan perdagangan antar pulau, dan menjaga ketersediaan barang. Perkembangan jumlah pelaku

- d. Usaha Gerai Maritim mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata peningkatan pelaku usaha sebesar 28,35%.

Tindak lanjut :

- a. Menetapkan Trayek Tol Laut baru berdasarkan usulan trayek dari *Stakeholders* yang telah diterima oleh Kementerian Perhubungan.
- b. Kolaborasi dengan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam melakukan pengawasan.
- c. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan.
- d. Mendorong peningkatan muatan balik dengan peran aktif Pemerintah Daerah.
- e. Meningkatkan kualitas jaringan internet di daerah 3TP agar bisa digunakan dengan baik sehingga para pelaku usaha dapat mengakses aplikasi SITOLAUT, SIGM dan aplikasi lain yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang.

17. Pengendalian PEN-ICRG berdasarkan PP No. 23 Tahun 2020

Capaian dari pelaksanaan program ini yaitu Jumlah Struktur (Unit): Nusa Dua: 40.686 Pandawa: 17.495 Sanur: 13.116 Serangan: 10.985 Buleleng: 13.486 Total: 95.768 Luas Area Restorasi 743.000 M2. Meningkat dari target 50 Ha to 74.3 Ha atau sebesar 146% Memperkerjakan 10,171 orang

Faktor Pendukung:

Pariwisata bahari di Bali yang telah mendunia menjadi paket unggulan untuk menarik turis manca negara. Bali dikenal juga sebagai surga bawah laut dunia yang memanjakan para divers dunia. Beberapa event internasional terkait diving juga acap kali digelar di Bali. Namun tidak dipungkiri, Terumbu karang di Bali merupakan kawasan segitiga karang (CTI) yang memiliki keanekaragaman karang yang tinggi (Turak et al 2008).

Kendala:

Kerusakan terumbu karang di perairan Bali juga kerap terjadi akibat berbagai faktor. Kondisi Alam dan pemilihan lokasi yang rentan ataupun ekstrim dalam pengembangan terumbu karang, perlindungan terumbu karang kepada pihak ketiga yang bertujuan untuk melindungi wilayah laut beserta ekosistemnya dari kerusakan. Peran Aktif Masyarakat untuk pengelolaan khususnya pasca ICRG agar tetap lestari

Tindak Lanjut:

- a. Proses Rencana Penanggulangan Eks KRI sebagai terumbu karang di Perairan Bali
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif yaitu keterlibatan masyarakat sebagai garis terdepan dalam pengelolaan ICRG secara berkelanjutan sangat diperlukan. Disamping itu melalui program ini

diharapkan akan muncul aktivitas ekonomi kreatif yang baru di mana masyarakat setempat sebagai pemeran utama dalam merencanakan, melaksanakan dan menjaga keberlangsungan ICRG.

18. Penyelesaian Landas Kontinen Indonesia (TNP-LKI) berdasarkan Arahan Presiden tahun 2021

Sebagai negara pihak UNCLOS, Indonesia berhak memperluas landas kontinen di luar 200 M. Hal ini menambah wilayah hak berdaulat dasar laut yang mengandung berbagai sumber daya (mineral, migas, biologis) strategis yang bisa dimanfaatkan di masa mendatang. Output dari kebijakan ini adalah Submisi 3 segmen perluasan landas kontinen Indonesia di segmen utara Papua, barat daya Sumatra, dan selatan Jawa-Nusa Tenggara dengan total luas sejumlah 657.886,6 km² atau kurang lebih setara dengan sepertiga dari total luas daratan Indonesia. Progress capaian Proses submisi tiga segmen telah tersampaikan oleh PBB. Dalam proses pembahasan lanjutan di Komisi Batas Landas Kontinen PBB.

19. Pengendalian Blue Infrastructure Terintegrasi berdasarkan Perpres No.109 Tahun 2020

Tujuan program yakni Mengintegrasikan konsep blue infrastructure yang terintegrasi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas Strategis (*major project*). Pada program ini, Kemenko Marves berperan sebagai Ketua DAU yang mempunyai tugas fungsi pengendali. Output program berupa:

- a. Sosialisasi konsep blue infrastructure melalui tulisan karya ilmiah/kajian yang berjudul "Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Biru (*Blue Infrastructure*) dalam Pengamanan Pesisir Terpadu yang Menyejahterakan". Tulisan karya ilmiah/kajian ini dimuat dalam buku berjudul "Pengembangan Konsep Maritim 2045";
- b. Mensosialisasikan konsep blue infrastructure melalui forum diskusi antar *Stakeholder* dan akademisi (Blue Infrastructure Network Initiative-BINI Webinar Series Session I-V)
- c. Mensosialisasikan konsep *blue infrastructure* melalui forum internasional "*The 4th ASEANIndia Workshop on Blue Economy dan Joint Task Force on Connectivity Development between Aceh and Andaman-Nicobar*" di India

20. Pengendalian Pelaksanaan MP Jalan Trans Pulau 3T dan Jalan Tol Nasional berdasarkan Perpres No.109 Tahun 2020

Sesuai dengan penugasan Presiden kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah khususnya pembangunan Jalan Trans pada 18 pulau Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Bahwasanya semua *Major Project* (Jalan Trans Pulau 3T) harus selesai Q1 tahun 2024 atau selambat-lambatnya sebelum Oktober 2024 sudah operasional. Untuk itu, maka peran koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian harus dilaksanakan lebih intensif bersama para pihak terkait.

Pembangunan Infrastruktur konektivitas (jalan) untuk menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Strategi pengembangan infrastruktur (dasar) untuk menunjang perekonomian pada 18 Pulau 3T dapat disinergikan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun antar kegiatan Infrastruktur prioritas strategis (*major project*) RPJMN 2020-2024.

Untuk itu diperlukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan jalan sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonominya. Isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan jalan, terutama jalan adalah kurang memadainya bangunan Jalan yang ada sehingga memerlukan perbaikan-perbaikan atau bahkan penggantian konstruksi yang lebih baik dan mapan sehingga dapat bertahan dan melayani pengguna jalan dalam kurun waktu yang lebih lama.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas *Delivery Assurance Unit* (DAU) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024. Deputi bidang infrastruktur dan transportasi mengkoordinasikan pemenuhan Infrastruktur dasar terutama Jalan Trans pada 18 Pulau 3T (*major project*). Isu utama yang ditangani adalah:

- a. Kurang memadainya/ terbatasnya Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, sumber daya air, jaringan telekomunikasi dan elektrifikasi.
- b. Bangunan/ kualitas Jalan yang ada memerlukan perbaikan-perbaikan atau bahkan penggantian konstruksi yang lebih baik dan mapan sehingga dapat bertahan dan melayani pengguna jalan dalam kurun waktu yang lebih lama; dan
- c. Rendahnya kapasitas fiskal Pemda di daerah 3T dan terbatasnya alokasi DAK bidang jalan.

Secara khusus, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam pembangunan jalan trans pada 18 Pulau 3T antara lain: Lokasi yang jauh (*remote area*); Akses konektivitas dari dan menuju pulau 3T; Distribusi logistik; Akses penerangan/ kelistrikan; dan Jaringan telekomunikasi. Capaian Tahun 2022:

- a. Dokumen kajian readiness criteria telah dilakukan dan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. Usulan dan analisis Strategi pendanaan dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan yaitu kebijakan afirmasi (khususnya pada koridor-koridor strategis) melalui APBN, APBD dan peningkatan alokasi DAK bidang jalan dan mendorong pembiayaan melalui alternatif skema pembiayaan selain DAK (Program Hibah Jalan Daerah). (2).

Khusus jalan Trans Pulau Enggano, BPJN Bengkulu mengusulkan agar penanganan Jalan Trans di Pulau Enggano Ruas Banjarsari – Malakoni – Kayu Apuh sepanjang 32,82 Km yang membutuhkan dana alokasi fisik sebesar Rp 183.080.649.000 (nilai estimasi);

- c. Pada September 2022 telah ditandatangani Kontrak oleh PT. Rodatekindo Purajaya untuk Pembangunan Jalan Trans P. Enggano sepanjang 32,624 Km dan Pembangunan Jembatan sepanjang 0,196 Km dengan total anggaran Rp. 188.205.727.326 dengan kontrak multi years (2022-2024). Target penanganan pada tahun 2022 sepanjang 4,078 km, target pada tahun 2023 sepanjang 24,468 km dan target pada tahun 2024 sepanjang 4,078 km.
- d. Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) bersama masyarakat, sangat signifikan dalam pencapaian keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Pulau 3T untuk mewujudkan fungsi Pertahanan dan Keamanan (Kedaulatan), Ekonomi (Kesejahteraan), dan Ekologi (Keberlanjutan)
- e. Pembangunan Jalan Trans Pulau 3T perlu mendapat perhatian bersama dalam rangka memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, khususnya pada Pulau Enggano yang belum terdapat akses Jalan Nasional.
- f. Identifikasi Potensi Pulau 3T sangat penting dalam menentukan bahan konstruksi untuk pembangunan jalan yang spesifik lokasi dan harus sesuai dengan karakteristik Pulau maupun kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat setempat.
- g. Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur (Jalan Trans Pulau 3T) diupayakan dengan partisipasi Masyarakat melalui program Padat Karya (sekali sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN), serta seoptimal mungkin menggunakan Produk Dalam Negeri, seperti: Aspal Buton, teknologi perkerasan jalan, dan lainnya.

21. Pengendalian Penanganan DAS Citarum berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2018

Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dengan Rencana Aksi Pembangunan Fasilitas pengolahan air limbah di DAS Citarum dengan kriteria keberhasilan yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum. Saat ini telah terbangun dan beroperasi Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum sebanyak 10 unit yang berlokasi di Kota Bandung, Subang, Bandung Barat dan Cianjur.

22. Percepatan Program KBLBB berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2019

Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang membuat industri KBLBB nasional kurang dapat bersaing, yaitu:

- a. Diperlukan kebijakan teknis/Peraturan Menteri sebagai bentuk peraturan turunan dari Perpres Nomor 55 Tahun 2019, khususnya peraturan dari:

- Kementerian Perindustrian terkait Spesifikasi khusus KBL berbasis baterai, tata cara perhitungan TKDN untuk KBL berbasis baterai, mekanisme impor CKD/IKD, mekanisme impor CBU (jangka waktu dan jumlah tertentu);
 - Kementerian Keuangan terkait Insentif Fiskal dan Non Fiskal;
 - Kementerian Dalam Negeri terkait Insentif pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - Kementerian ESDM terkait tarif tenaga listrik;
 - Kementerian Perhubungan terkait pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan dan pengujian;
- b. Diperlukan penyusunan langkah-langkah kebijakan strategis untuk mendukung optimalisasi program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB), diantaranya mengenai:
- Penyusunan kebijakan insentif kredit kepemilikan KBL BB oleh perbankan;
 - Penyusunan kebijakan konversi kendaraan konvensional menjadi mesin bermotor listrik berbasis baterai;
 - Penyusunan kebijakan/peta jalan transformasi kendaraan berjenis konvensional menjadi KBL BB dengan mengembangkan insentif bagi KBL BB dan disinsentif untuk kendaraan konvensional hingga tahun 2024;
 - Penyusunan kebijakan/roadmap pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum/SPKLU dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum/SPBKLU) beserta jenis insentif yang diberikan/ditetapkan;
 - Penyusunan pengembangan insentif daerah yang dapat digunakan oleh pimpinan daerah sebagai pedoman untuk memaksimalkan insentif di daerahnya.

Capaian 2022:

- a. Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai perwujudan agar Pemerintah memberikan contoh baik, sekaligus pasar inisial bagi industri baru KBLBB untuk mencapai skala keekonomian.
- b. Koordinasi regulasi tentang Spesifikasi khusus KBL berbasis baterai, tata cara perhitungan TKDN untuk KBL berbasis baterai, mekanisme impor CKD/IKD, mekanisme impor CBU (jangka waktu dan jumlah tertentu) untuk mendukung investasi dan pengembangan industri KBLBB dalam negeri melalui penerbitan:

- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle);
 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Terurai Tidak Lengkap; dan
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2022 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Rakyat Tiongkok
- c. Program konversi sepeda motor dan mobil perlu didorong untuk mendukung target Grand Strategy Energi Nasional (GSEN) konversi 6 juta unit pada Tahun 2025. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Penerbitan regulasi dimaksud juga diikuti dengan Program Konversi sepeda motor ICE menjadi listrik oleh Kementerian ESDM;
 - d. Koordinasi pengendalian kebijakan melalui revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 yang saat ini dalam proses harmonisasi. Revisi tersebut meliputi standarisasi baterai, skema bisnis SPKLU, pengaturan tarif, dan pengembangan aplikasi IT integrator;
 - e. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan insentif fiskal KBLBB di tingkat pusat baik insentif pembelian KBLBB maupun kebijakan bea masuk CKD 0% MFN;
 - f. Koordinasi pengendalian kebijakan pelaksanaan penggunaan KBLBB di Pemerintah Daerah, melalui dorongan kebijakan kepada Kementerian Dalam Negeri, dengan Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.7/8299/SJ tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Pemerintahan Daerah.

Rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian kebijakan insentif fiskal KBLBB berupa insentif pembelian dan pembebasan bea masuk CKD 0%;
- b. Monitoring dan evaluasi penggunaan KBLBB di lingkup K/L/PD/BUMN/D;

- c. Perumusan kebijakan perluasan program konversi sepeda motor untuk mendukung target Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) sepeda motor konversi sebanyak enam juta unit pada Tahun 2025.
- d. Perumusan kebijakan mengenai infrastruktur Pengisian Daya (SPKLU dan SPBKLU)

23. Pengendalian Geopark berdasarkan Perpres No.9 Tahun 2019

Indonesia menjadi negara dengan UNESCO *Global Geopark* terbanyak di Asia Tenggara. Saat ini, terdapat enam UNESCO *Global Geopark* yang tersebar di Sumatera Utara, Belitong, Jawa Barat, NTB, dan Bali. Permasalahan utama adalah belum optimalnya pengembangan *Geopark* di Indonesia untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Saat ini, anggaran pengelolaan UNESCO *Global Geopark* masih terbatas dan belum optimalnya peranan pemerintah daerah untuk mengelola kawasan strategis tersebut. Tujuan utama adalah untuk mewujudkan pengembangan *geopark* sebagai destinasi berkelanjutan melalui (a) konservasi, (b) edukasi, dan (c) pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kemenko Marves berkomitmen untuk terus mensukseskan pengembangan *Geopark* di Indonesia. Sebagai implementasi atas komitmen tersebut, pada September 2022 telah dilaksanakan kegiatan 1st UNESCO *Global Geopark* Youth Forum di *Geopark* Batur. Kegiatan merumuskan Piagam Batur sebagai bentuk komitmen para pemuda dalam menangani perubahan iklim global.

Hasil Revalidasi dan Validasi Gelombang Tahun 2022, UNESCO telah mengumumkan hasil revalidasi 28 UGGp yakni 25 mendapatkan green card termasuk UGGp di Indonesia: Batur, Rinjani-Lombok, dan Ciletuh-Palabuhanratu. Dewan UGGp mengajukan tujuh aspirasi UGGp termasuk Ijen dan Maros Pangkep ke Dewan Eksekutif UNESCO untuk endorsement.

Koordinasi tindak lanjut persiapan kehadiran asesor UNESCO *Global Geopark* Misi Gelombang Kedua 2022. Poin yang menjadi catatan antara lain adalah Tim UNESCO *Global Geopark* Youth Forum tengah memfinalkan rumusan piagam Batur.

24. Pengendalian Pelaksanaan TP3DN berdasarkan Keppres No. 24 Tahun 2018

Kinerja sektor industri dalam negeri memerlukan dukungan kebijakan iklim usaha yang kondusif, yang dapat dilakukan melalui kebijakan dalam mendorong penciptaan pangsa pasar yang stabil bagi produk hasil industri dalam negeri. Untuk itu, Pemerintah mendorong gerakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hal ini merupakan momentum bagi Industri Dalam Negeri untuk meningkatkan kapasitas dan utilisasi dengan pemenuhan permintaan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, dimana Pemerintah telah mencanangkan Program Substitusi Impor sebesar 35% pada Tahun 2022.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan P3DN, Pemerintah mewajibkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN untuk menggunakan

produk hasil industri dalam negeri. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, maka penggunaan produk hasil industri dalam negeri dapat ditingkatkan, karena adanya kepastian pasar terhadap produk yang mereka produksi, sehingga mampu mendorong perkembangan dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan P3DN telah diselesaikan kebijakan sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tim P3DN lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN

Faktor yang menjadi kendala :

- a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN perlu disempurnakan dikarenakan perubahan nomenklatur di Kementerian/Lembaga, serta penambahan anggota dari lebih banyak pemangku kepentingan untuk optimalisasi program P3DN;
- b. Daftar barang ber-TKDN belum digunakan sebagai acuan tunggal oleh seluruh Kementerian/Lembaga;
- c. Produk impor masih mendominasi tampilan pada e-katalog;
- d. Dorongan K/L/PD/BUMN/BUMD/Badan Usaha untuk mengedukasi vendor, mitra untuk mensertifikasi produknya belum optimal;
- e. Sistem informasi dalam pengajuan impor barang sudah menggunakan sistem online namun belum terintegrasi dengan Sistem P3DN di Kementerian Perindustrian sehingga seringkali terjadi impor barang yang masuk dalam kategori barang wajib

Capaian:

- a. Pemantauan P3DN proyek strategis sejak tahap perencanaan:
 - Pemantauan P3DN Proyek GRR Tuban PT Pertamina (Persero): telah dilaksanakan pemantauan assessment TKDN sampai dengan tahapan EPC Bidding untuk 21.297 item produk, dan pemantauan potensi industri penunjang migas dalam negeri ke PT Barata Indonesia, PT Indal Steel Pipe, PT DSAW, dan PT Tomoe Valve;
 - Pemantauan P3DN pada Proyek PLTS PLN melalui verifikasi Data Proyek dengan Kemampuan Produksi Dalam Negeri: Data Instrumen yang ditelaah untuk pemantauan sebanyak 36 PLTS.
- b. Penyelesaian pelaporan permasalahan dugaan pelanggaran P3DN:
 - Penyelesaian Permasalahan Pipa Offshore 52" pada proyek Pertamina Lawe-lawe, dengan hasil Proyek Pertamina Lawe-lawe tetap menggunakan pipa dalam negeri dimana pipa PT DSAW telah dikapalkan dari Batam sebanyak 1.200 pcs;

- Penyelesaian Permasalahan P3DN pada pengadaan Fender Pelindo, dengan hasil Pengadaan impor telah dibatalkan, dibuat tender baru dengan mensyaratkan TKDN

Tindak lanjut:

- a. Penyusunan SOP (*Standard Operating Procedure*) dan Program Kerja Kelompok Kerja Pemantauan P3DN;
- b. Pemantauan perencanaan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN;
- c. Pemantauan perencanaan pengadaan barang/jasa pada proyek strategis PT. Pertamina dan PT. PLN;
- d. Harmonisasi kebijakan dalam rangka mendukung pemantauan P3DN;
- e. Penyelesaian pelaporan permasalahan dugaan pelanggaran P3DN.

25. Pengendalian Pengembangan 5 DPSP berdasarkan Toba: Perpres No. 49 Tahun 2016

Pemerintah ingin mewujudkan 10 Bali Baru melalui program pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). 10 DPP tersebut merupakan *Major Project* sebagai salah satu agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024. Selanjutnya, dalam mengedepankan fokus pembangunan pariwisata di lima tahun berjalan, ditetapkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Lima DPSP tersebut merupakan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas 15 Juni 2019.

Permasalahan utama adalah belum optimalnya pengembangan lima DPSP sehingga perlu dilakukan langkah-langkah percepatan penanganan isu-isu pengembangan lima DPSP dimaksud. Kemenko Marves secara intens berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. Setiap bulannya, Kemenko Marves juga secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mengakomodir *pending issues* dan memantau progres isu yang harus diselesaikan guna mencapai target pengembangan pariwisata berkualitas.

Borobudur:

- Kemenko Marves telah bersurat kepada KemenPUPR terkait pengalokasian anggaran kegiatan penataan kabel utilitas di SP-1 dan 2 Borobudur pada September 2022.
- BOB bersama dengan Pemkab Magelang c.q. Disporapar telah melaksanakan pendampingan di tiga desa, yaitu Desa Tuksongo, Karanganyar, dan Karangrejo untuk membentuk asosiasi pengelola homestay atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- Percepatan pembebasan status kepemilikan tanah masyarakat yang belum *clean and clear*. Pembayaran tanah akan dilakukan setelah KKPR diterbitkan dan ditargetkan telah mulai dibayarkan seluruhnya pada November 2022.

Danau Toba:

- Narasi bersama promosi kegiatan balap F1 H2O akan dikaitkan dengan program Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI) dan ditargetkan selesai pada November 2022. Lebih lanjut, kampanye besar promosi kegiatan balap F1 H2O telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022.
- Percepatan lahan investasi di lahan otorita, dengan capaian di antaranya: PT Labersa Hutahaeen telah melakukan *cut and fill* lahan untuk pembangunan *water park* dan *theme park*. Adapun *Groundbreaking* dilaksanakan pada Desember 2022.
- Telah diumumkan Surat Keputusan Pemenang Tender Pendayagunaan Aset SR-04 yaitu PT. Tobanta Nauli Indah. Telah dilakukan tahap negosiasi dan pembahasan serta penandatanganan perjanjian kerja sama pada November 2022.

Mandalika

- Pemda Lombok Tengah telah melakukan relokasi warga pada November 2022, dan pembangunan jalan akses Ngolang dan sumber air dilaksanakan oleh ITDC.
- BPDAS Dodokan Moyosari telah memberikan bantuan bibit 120 pohon kepada Pemda Lombok Tengah, seluruh bibit ditanam di sepanjang kawasan rumah khusus beserta dengan pohon mangga hasil swadaya masyarakat.
- Jalan Kuta - Keruak, pengerjaan pelebaran jalan sudah selesai dilakukan, dan Kemenhub memfasilitasi pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Kemenparekraf menyampaikan hasil pemetaan dan identifikasi kebutuhan masing-masing desa wisata untuk ditindaklanjuti bersama oleh K/L terkait, sudah teridentifikasi 38 program turunan rencana aksi yang melibatkan berbagai K/L, OPD, dan pihak terkait lainnya. KemenLHK telah menyusun pedoman umum pengelolaan sampah mengacu pada prinsip *less waste event*.

Likupang:

- Masyarakat telah menghibahkan lahan selebar 10 m untuk usulan pembangunan jalan lingkar sepanjang 25,5 km, KemenPUPR melakukan studi kelayakan memetakan kebutuhan infrastruktur yang dibangun.
- Rencana tata ruang Pulau Bangka tengah berproses namun dibutuhkan waktu untuk proses lintas sektor.
- Telah diserahkan lahan seluas 600 m² untuk pembangunan dermaga di Desa Kahuku dan rencana akan dilakukan penambahan seluas 500 m².
- Diperlukan sinergi penerapan PermenLHK P.75/2019 dengan peraturan yang dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan

bupati tentang Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai (kantong plastik, sedotan plastik, dan wadah bahan sterofoam) dan Pengelolaan sampah kawasan. Selanjutnya, diperlukan penyusunan masterplan pengelolaan sampah "*less waste to landfill*" di kawasan Likupang.

26. Penanganan Sampah Laut berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2018

Sampah laut merupakan permasalahan yang perlu segera ditangani secara terintegrasi, karena telah memberi dampak negatif pada sektor pariwisata, lingkungan dan kesehatan manusia. Sampah yang terdapat di kawasan wisata bahari memiliki dampak ekonomi yang cukup besar bagi industri pariwisata itu sendiri. Sampah dapat menurunkan kualitas estetika wisata bahari yang dapat menurunkan jumlah pengunjung sehingga berdampak pada penurunan pendapatan penduduk lokal serta pelaku usaha wisata bahari. Lebih lanjut, upaya pembersihan sampah juga memerlukan biaya yang cukup besar. Menurut studi yang dilakukan *Making Oceans Plastic Free Initiative* pada tahun 2017, sektor pariwisata Indonesia mengalami kerugian sekitar USD 140 juta dengan 55 USD dialami oleh sektor pariwisata di Bali yang diakibatkan oleh pencemaran sampah tas plastik (World Bank. 2021).

Untuk program level Kemenko Maritim sendiri, fokus pada pengelolaan sampah dan pengurangan plastic debris, Penyusunan dan Analisis PDB Kemaritiman untuk formulasi kebijakan. Mengenai pengelolaan sampah plastik dan pengurangan debris, setidaknya ada lima (5) langkah aksi yang dilakukan Kemenko Maritim yakni, *Assesment terhadap hotspot dari marine plastic debris* dan kota dari sumber sampah tersebut, Design kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah di perkotaan untuk memastikan tidak ada leakage sampah ke lautan, Pengurangan pembuangan sampah dan plastik dari kegiatan operasi di laut, Pengurangan dari sampah, plastic dan polutan lainnya yang sudah ada di lautan, serta Pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan manusia.

Sesuai amanat Perpres Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang diterbitkan pada akhir September 2018. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Menteri LHK sebagai Ketua Harian serta anggota lainnya berasal dari 16 Kementerian/Lembaga teknis lainnya. Dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan Perpres tersebut, telah dilakukan penghitungan pengurangan sampah laut yang secara total sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebesar 15%. Kondisi ini harus terus dijaga untuk mencapai target penanganan sampah laut hingga 70% pada tahun 2025. Untuk capaian di tahun 2021 telah didapatkan data sebesar 28,5% sedangkan terkait data terbaru hingga saat ini masih dalam proses perhitungan oleh Tim Koordinasi Nasional. Beberapa capaian hingga saat ini yaitu:

- Tercapainya kolaborasi dengan Sungai Watch untuk penanganan sampah di sungai dengan jaring sampah di Bali
- Telah disusun Record of Discussion (RoD) antara Kemenko Marves dengan KOICA untuk implementasi penanganan sampah dengan metode jaring sampah dan capacity building di Kab. Tangerang.
- 105 jaring sampah telah terpasang di Bali dan berhasil mengangkat 350ton sampah plastic.

Sementara kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan yaitu Fenomena Tumpahan Minyak di Perairan Kepri dan Masih sering terjadi pembuangan minyak (*oil spill*) di laut yang berdampak pada kerusakan pesisir/pantai di sekitar Batam dan Bintan. Maka sebagai tindak lanjut akan dilakukan beberapa kegiatan seperti:

- Perlu memaksimalkan pengawasan di perairan serta penguatan penegakan hukum secara terpadu.
- Perlu penguatan kerjasama dengan negara tetangga (Malaysia dan Singapura) terkait *data sharing* untuk antisipasi dan penanganan kejadian;
- Penanganan Sampah Plastik ke Laut (Aksi Nyata);
- Penanganan Pencemaran Minyak di Laut (Perpres 109/2006).

27. Pengendalian Penyelesaian Masalah Minyak Goreng berdasarkan Arahan Presiden dalam Ratas

Produsen Minyak Goreng diberikan insentif berupa hak ekspor atas produksi dan pendistribusian Minyakita hasil DMO CPO. Mulai berlaku 23 Oktober 2022. (insentif kemasan: 0,5 & insentif regional (1-1,5) Realisasi Penggunaan B30 : 9.15 Juta Ton/Tahun (19.5%) Target: B35 : 10.95 Juta Ton/Tahun (23%) atau B40 : 11.85 Juta Ton/Tahun (25%).

Sebagian besar perkebunan sawit Indonesia termasuk perkebunan milik rakyat sudah mengikuti prinsip-prinsip yang berkelanjutan. Penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) atau Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan menjadi salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk menghasilkan CPO yang ramah lingkungan.

Salah satu kriteria untuk bisa mendapatkan sertifikat ini adalah tidak menebang atau mengalihkan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit baik oleh korporasi maupun perorangan. Saat minyak sawit menjadi komoditas yang dicari oleh dunia, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan lebih adaptif dan supportif, termasuk di dalam negeri. Sehingga produksi minyak sawit Indonesia semakin berkelanjutan.

28. Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Hewan Ternak jelang Idul Adha Tahun 2022

Penambahan kasus harian mulai mengalami penurunan, namun kasus aktif masih meningkat. Realisasi vaksin untuk Provinsi Aceh, Kep. Riau, Bangka Belitung dan DKI Jakarta dan Bali sudah mencapai lebih dari 90%.

29. Investasi Industri Hijau

Pentingnya mendorong Indonesia berinvestasi pada ketahanan energi dalam perubahan iklim. Investasi yang harus dilakukan dalam ketahanan perubahan iklim diantaranya *self-protection* dengan masyarakat mengambil langkah proaktif untuk meminimalkan dampak perubahan iklim. Arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada *Groundbreaking* Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara tanggal 21 Desember 2021 menjadi awal dari pembangunan Kawasan Industri Hijau, sebagai berikut:

“Akan muncul dari sini green aluminium, solar panel, industrial silicone. Semuanya akan muncul dari Kalimantan Utara ini, dari kawasan ini. Dan ini kerja sama besar antara Indonesia, investor Indonesia, investor dari China, investor dari Uni Emirat Arab, semuanya akan bergabung. Dan ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia, bukan Kalimantan Utara, bukan Indonesia, tapi dunia karena menyangkut lahan, sampai detik ini, (seluas) 16.400 hektare, dan targetnya adalah 30.000 hektar”

Dasar hukum dari pembangunan Kawasan Industri Hijau ini adalah: 1) Perpres 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN; dan 2) Arahan Presiden ke Menko Marves dalam Sambutan Presiden pada Peresmian Pembukaan Indonesia EBTKE ConEx (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi-Konferensi dan Ekshibisi) Ke-10 Tahun 2021.

Luas dari area KIPi saat ini 9500 Ha serta sedang finalisasi akuisisi lahan tambahan 2500 Ha sehingga total area menjadi 12.000 ha. Area tersebut dimiliki oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (status PSN). Pada area ini yang menjadi investor kunci adalah untuk industri Petrokimia: Tongkun, Xinfenming dan Tsingshan; Alumunium Smelter: Adaro, Lygend, dan Hyundai; sedangkan Baterai materials: Tsingshan dan Huayou Cobalt.

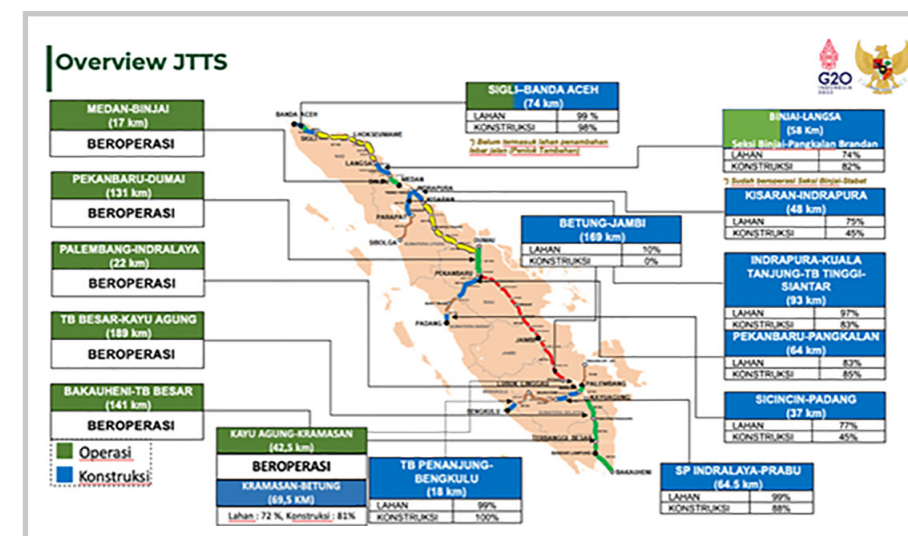
30. Percepatan Investasi Tol Sumatera

Melalui Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015, Pemerintah membangun dan mengembangkan Jalan Tol Trans- Sumatera. Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km dan akan beroperasi penuh pada 2024. Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sepanjang kurang lebih 2.828 km digulirkan dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional di regional Sumatera

Pulau Sumatera memainkan peran penting dalam perekonomian negara, dengan potensi alam dan komoditas berlimpah (karet, minyak kelapa

sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam) pada tahun 2015 Sumatera menyumbang 22,21% produk domestik bruto (PDB) Indonesia, terbesar kedua setelah Jawa (BPS). Status dari Progress percepatan investasi tol Sumatera Tahun 2022, sebagai berikut:

GAMBAR 29
OVER VIEW JTTS S.D TAHUN 2022



31. Koordinasi Percepatan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

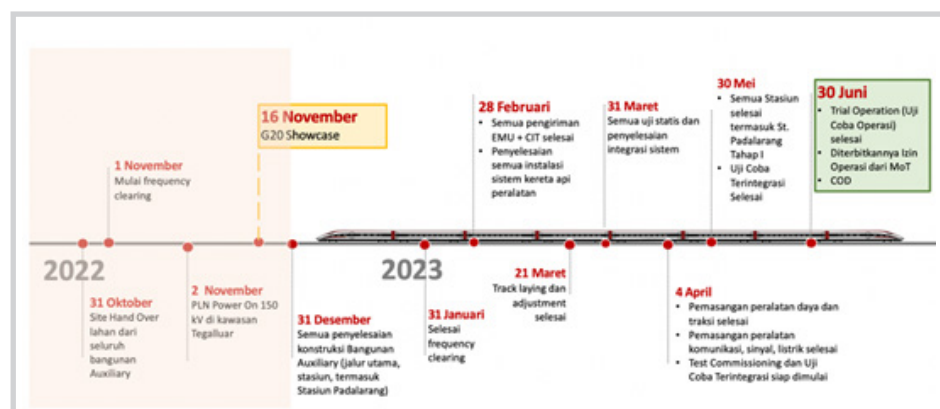
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Progress tahun 2022 sebagai berikut:

TABEL 91
PROGRES PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG

Overall Progress	: 82,17%
Construction Progress Investment	: 91,70% (weight 75%) (Actual progress claimed by EPC Contractor)
Physical	: 82,44% (Actual progress verified by Supervision Consultant)
Permit	: 15,00% (weight 5%)
Land	: 99,20% (weight 10%)
Acquisition	: Mainline 99,97 % of 6.345.856 m2; Land for 69,27 % of 163.239 m2 Auxiliary
O&M Readiness	: 27,21% (weight 10%)

**catatan: Ballasted: 1km/day; Ballastless: 4,5km/day; Track Laying work is still waiting for the Work of Casting Yard #4 to Jakarta; Auxiliary building based on building construction progress*

GAMBAR 30
KEY MILESTONES MENUJU COD JUNI 2023



32. Proyek LRT Jabodebek

Light Rail Transit (LRT) sebagai angkutan massal yang kini dalam tahap pembangunan di Indonesia, dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundangan yang ada. Karenanya, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Pasal 115 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkereta apian, telah diatur mengenai kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota untuk menetapkan trase jalur kereta api sesuai dengan kewenangannya. Bahwa Perkereta apian Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi merupakan program prioritas nasional yang akan dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Progres keseluruhan proyek sampai akhir tahun 2022: 87.22%. Adapun isu yang ada pada tahun 2022 yaitu:

- Target Penyelesaian Proyek Schedule terakhir yang secara resmi disampaikan oleh *Stakeholder* proyek LRT adalah COD bulan Juli 2023.
- Per November 2022, sudah tidak ada perubahan lagi pada *Test Case* sehingga *Software Development* CID 6.0 sudah bisa dimulai. *Official Release Software* CID 6.0 untuk LP 1 sudah 100% sementara untuk LP2 88%, LP3 62%, dan Depot 24%

- Integrasi Stasiun Halim LRT dan Stasiun Halim KCIC mengalami deviasi progress *actual* yang cukup besar
- TCMS-OBCU *Communication Test* untuk ke-27 trainset sudah 100%, sedangkan TCMS-OBCU *Function Test* untuk trainset 19 dan 23 mencapai 93%

E. Prestasi Kemenko Marves

Di tahun 2022, Kemenko Marves meraih beberapa penghargaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penghargaan pada kategori Kementerian, "Terpopuler di Media Cetak 2021".
- 2) Penghargaan untuk Media Sosial terbaik (Silver Winner)
- 3) Penghargaan Website Terbaik (Bronze Winner).
- 4) Peringkat I kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT untuk Kementerian Kecil
- 5) Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik I Tahun 2022 Kategori Kementerian.
- 6) Memperoleh Sinergitas Awards
- 7) Memperoleh Hasil WTP dari Opini BPK atas Laporan Keuangan selama 5 tahun berturut-turut.
- 8) Penghargaan ASN Culture Fest 2022 (Best Starter Overall Indeks BerAKHLAK) dari KemenPANRB
- 9) Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2022 (Tiga Tahun Berturut-turut | Nilai tahun 2022: 97,12)

Dokumentasi Penghargaan:

GAMBAR 31
PENGHARGAAN ASN CULTURE FEST 2022 (BEST STARTER OVERALL INDEKS BERAKHLAK)
DARI KEMENPANRB



GAMBAR 32
OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN DARI BPK



GAMBAR 33
SINERGITAS AWARDS



GAMBAR 35
PENGHARGAAN YANG DITERIMA KEMENKO MARITIM TAHUN 2022



GAMBAR 34
MENERIMA PENGHARGAAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TERBAIK I



GAMBAR 36
PENGHARGAAN ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF TAHUN 2022



F. Inovasi

Inovasi yang dilakukan oleh Kemenko Marves dalam mendukung dan memudahkan pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

TABEL 92
INOVASI KEMENKO MARVES

NO	INOVASI	MANFAAT	KETERANGAN
1	Aplikasi Administrasi dan Monitoring Kehadiran Pegawai MARVES CORE	Administrasi dan monitoring kehadiran pegawai serta presensi elektronik berbasis mobile, sehingga memudahkan pegawai kemenko marves.	- Bidang Efisiensi: Dalam proses seperti keseragaman pencatatan dan keseragaman data. - Mulai Berlaku: 1 Agustus 2021 (SE No. 13 tahun 2021) - Efisiensi Anggaran: Negara tidak perlu menganggarkan uang untuk membeli lisensi tahunan. Biaya aplikasi Rp. 125 Jt, efisiensi yang sebelumnya untuk Zoho \$99 per UKE 2 dan google suite \$3.6/org/bln - Peningkatan Layanan: Kemudahan monitoring pegawai di setiap unit kerja, kemudahan tracking agenda (hingga notifikasinya) - Penerima Manfaat: Seluruh pegawai Kemenko Marves
2.	Aplikasi publikasi dan dokumentasi Produk Hukum JDIH WEBSITE DAN MOBILE	Publikasi dan dokumentasi produk hukum yang dapat diakses oleh publik	- Bidang Efisiensi: Layanan Hukum - Mulai Berlaku: September 2020 - Efisiensi Anggaran: Sistem JDIH telah memfasilitasi layanan hukum secara keseluruhan dari mulai perancangan, advokasi dan informasi hukum sehingga tidak perlu mengeluarkan kembali anggaran untuk pembangunan sistem sejenis karena sudah terfasilitasi dalam satu layanan di sistem JDIH Marves - Peningkatan Layanan: Untuk meningkatkan layanan sistem, JDIH Marves tersedia juga di aplikasi iOS dan android untuk memudahkan dalam mengakses layanan yang disediakan. Selain itu juga untuk meningkatkan layanan peraturan yang disediakan disajikan dalam bentuk berita, informasi grafis dan videografis Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami isi dari suatu Peraturan. - Penerima Manfaat: Pegawai Internal Kemenko Marves, Stakeholder, Instansi Pemerintah, Masyarakat (Nasional dan Internasional), Swasta dll.
3.	Aplikasi pengelolaan data pegawai MARVES HUMAN RESOURCES	Pengelola data kepegawaian berbasis aplikasi (seperti pengurusan kepangkatan, berkala dan pensiun) sehingga memudahkan dalam menjaga dokumen pegawai dan proses pengurusan administrasi kepegawaian.	- Bidang Efisiensi: Pelayanan Kepegawaian dokumen yang diperlukan untuk layanan kepegawaian cukup dari marves hr tidak perlu berkali2 diminta ke pegawai ybs. - Mulai Berlaku: Tahun 2020 - Efisiensi Anggaran: Anggaran yang dipergunakan untuk ATK dapat diminimalisir karena dokumen langsung dapat diunduh oleh pegawai - Peningkatan Layanan: Memudahkan dalam menjaga dokumen pegawai dan proses pengurusan administrasi kepegawaian - Penerima Manfaat: Seluruh pegawai Kemenko Marves

NO	INOVASI	MANFAAT	KETERANGAN
4	Aplikasi Pengelolaan Kinerja SISTEM INFORMASI KINERJA – MARITIM	Pengelolaan kinerja berbasis sistem informasi yang dapat memantau capaian kinerja dan data dukung seluruh unit kerja.	- Bidang Efisiensi: Efisiensi dalam hal monev kinerja secara berkala (Triwulan) melalui sistem berbasis IT (yg sebelumnya dengan tatap muka dan menghadirkan banyak peserta dalam suatu kegiatan di hotel) - Mulai Berlaku: Tahun 2017 - Efisiensi Anggaran: Sebelum menggunakan SIK-M anggaran monev kinerja mencapai 400 Juta dalam setahun berupa rapat-rapat yang dilakukan, setelah menggunakan SIK-M anggaran Monev yang dikeluarkan hanya 150 juta dalam setahun karena monev sudah melalui sistem - Peningkatan Layanan: Monev kinerja disertai dengan fitur unggah bukti dukung kinerja - Penerima Manfaat: Unit Kerja Kemenko Marves dan Kemenpan RB selaku evaluator SAKIP
5	Aplikasi pengumpulan bukti dukung RB E-REFORMASI BIROKRASI	Pengumpulan bukti dukung RB terpusat sehingga tersimpan rapi dan berkelanjutan, memudahkan unit kerja untuk mencari bukti dukung, tim penilai internal/inspektorat dalam memberikan penilaian, dan KemenpanRB dalam memeriksa bukti dukung dan penilaian	- Bidang Efisiensi: Efisiensi dalam pengelolaan bukti dukung RB dan penilaian PMPRB yang digunakan oleh unit kerja, Inspektorat dan KemenpanRB karena berbasis aplikasi yang semula manual menggunakan lembar excel dan google drive - Mulai Berlaku: Tahun 2019 - Efisiensi Anggaran: ebelum ada E-RB proses penyiapan bukti dukung bisa melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 4 kali dengan mengundang seluruh operator dan pejabat terkait (@pertemuan bisa mencapai 85 juta rupiah), dan juga perlu filling penyimpanan dokumen yang sangat banyak. Sekarang semua berbasis sistem dan hanya sekali pertemuan untuk pleno. - Peningkatan Layanan: Kemudahan dalam mencari data, ketersediaan data dari tahun ke tahun, tidak perlu tempat penyimpanan dokumen dan dapat diakses oleh seluruh unit kerja dimana saja. - Penerima Manfaat: Internal (Seluruh unit kerja, tim penilai internal/inspektorat) dan eksternal (KemenpanRB selaku evaluator RB) - Telah di duplikasi oleh: BKKBN dan BIG.
6	Aplikasi monitoring dan updating data Anjab ABK E-ORGANISASI	Keseragaman sekaligus memudahkan pelaksanaan monitoring dalam updating data atas pelaksanaan Anjab ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkup Kemenko Marves. Sistem saat ini dalam proses integrasi ke sistem CIASN milik BKN dengan tujuan memudahkan BKN dalam mendapatkan data Kemenko marves.	- Bidang Efisiensi: Tersedianya sistem Informasi yang terhubung dengan penataan organisasi Kemenko Marves sehingga dapat di monitoring dan diupdate dalam penyusunan Anjab ABK, Standar Kompetensi Jabatan, dan Evaluasi Jabatan. - Mulai Berlaku: Tahun 2021 - Efisiensi Anggaran: Tidak perlu lagi menggunakan pihak ketiga, lalu anggaran untuk membangun sistem ini adalah sebesar 100 juta untuk pembangunan dan pengembangan atas penyempurnaan sistem aplikasi e-ORG. - Peningkatan Layanan: Memudahkan penataan organisasi dalam menyusun maupun mengupdate atas Anjab ABK, Standar Kompetensi Jabatan, serta Evaluasi Jabatan masing masing unit secara mandiri dan online melalui aplikasi e-RB - Penerima Manfaat: Seluruh PNS Kemenko Marves

NO	INOVASI	MANFAAT	KETERANGAN
7.	Aplikasi informasi dan penyusunan Monev SOP E-TATA LAKSANA	Sistem informasi yang berfungsi sebagai penyusunan dan monev SOP	- Bidang Efisiensi: Tersedianya layanan penyusunan dan monev serta Informasi SOP secara elektronik di Kemenko Marves yang sebelumnya pengajuan melalui kertas (paper based) - Mulai Berlaku: Desember 2020 - Efisiensi Anggaran: Pada pelaksanaannya pengajuan dan monev sop pada unit kerja dilakukan dengan rapat koordinasi yg dilakukan secara berkala dan menghabiskan anggaran untuk kegiatan fullboard, saat ini dapat dilakukan secara elektronik dengan anggaran yang dikeluarkan sebesar 75 Juta untuk pembangunan dan pengembangan atas penyempurnaan sistem aplikasi e-tala. Peningkatan Layanan: Tracking secara online atas pengajuan dan Monev SOP Unit Kerja - Penerima Manfaat: Internal (seluruh unit kerja) dan eksternal (Publik dapat mengakses SOP yang berlaku di Kemenko Marves)
8	Aplikasi Sarana Pengaduan dan Aspirasi PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI ASPIRASI KEMARITIMAN	Sarana pengaduan dan aspirasi berbasis website yang dapat diakses oleh publik	- Bidang Efisiensi: Sarana aspirasi masyarakat. Mempermudah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada internal Kemenko Marves. - Mulai Berlaku: Tahun 2019 - Efisiensi Anggaran: PESAN tidak memerlukan anggaran khusus, karena sistem Tlnya memanfaatkan website dan dikelola oleh internal Biro Komunikasi. Sementara petugas pengelola aspirasi merupakan pegawai Biro Komunikasi - Peningkatan Layanan: Penyampaian satu pintu tanpa registrasi - Penerima Manfaat: Masyarakat umum (eksternal)
9	Aplikasi pengelolaan anggaran internal SISTEM PENATAUSAHAAN ANGGARAN TERPADU	Sistem pengelolaan anggaran internal	- Bidang Efisiensi: Data dan informasi dalam bidang efisiensi pengelolaan keuangan dan penganggaran - Mulai Berlaku: Tahun 2020 - Efisiensi Anggaran: Efisiensi dari segi waktu karena seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan telah tercover di satu garpu, seperti penginputan otomatis SBM, SPT, berkas pengajuan keuangan, semua tersistem di aplikasi tidak perlu manual. Sehingga waktu yang ada dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya sehingga dapat lebih efektif dan efisien. - Peningkatan Layanan: Kemudahan pada pencatatan anggaran, pengelolaan keuangan, tracking SP2D, pencatatan realisasi hingga kemudahan pemeriksaan BPK perihal kesesuaian berkas. - Penerima Manfaat: Unit Kerja
10	APLIKASI GEOSPASIAL KEMARITIMAN	Menyajikan informasi kebumihan atau aspek keruangan dengan koordinat tertentu seperti peta jalur koridor kabel laut, peta lahan garam indonesia, peta labuh jangkar, peta kawasan konservasi, peta pulau-pulau kecil terluar dll.	- Bidang Efisiensi: Analisa data dan informasi kebijakan berbasis spasial - Mulai Berlaku: Tahun 2018 - Efisiensi Anggaran: Anggaran yang dapat dihemat mencapai Lebih dari 100 juta (asumsi menggunakan pihak ketiga lembaga konsultan profesional) - Peningkatan Layanan: Evidence based policymaking - Penerima Manfaat: Internal (Pimpinan Kemenko Marves) dan eksternal (K/L terkait dan K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves)

NO	INOVASI	MANFAAT	KETERANGAN
11	LAYANAN PENGADUAN PUNGLI PELABUHAN	Layanan yang memungkinkan publik untuk dapat melaporkan kegiatan pungli di pelabuhan	- Bidang Efisiensi: Memberikan kemudahan bagi para korban pungli (seluruh Indonesia) untuk mengadu tanpa harus ke kantor yang memerlukan biaya transportasi. - Mulai Berlaku: Tahun 2020 - Efisiensi Anggaran: Dengan ada layanan ini tidak perlu biaya ke lapangan untuk memantau secara langsung namun cukup mendapatkan laporan melalui sistem dan di monev per triwulan. - Peningkatan Layanan: Kemudahan dalam monitoring kegiatan pelayanan di Pelabuhan. - Penerima Manfaat: Masyarakat, Pihak Swasta dan Pengguna layanan Pelabuhan (terdapat 9 laporan pengaduan). Sesuai dengan SOP yang berlaku, pengaduan dapat disampaikan melalui link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWBsvLXq5hKizJphRDlRwIkZWfZuGF_HU12hLSEtXPPqJsQ/viewform
12	LAYANAN PELAPORAN PENELANTARAN PELAUT DAN AWAK KAPAL PERIKANAN (AKP) INDONESIA	Menyediakan form pelaporan yang dapat digunakan oleh pelaut dan AKP Indonesia untuk melaporkan kasus penelantaran, seperti pelanggaran HAM maupun hak-hak ketenagakerjaan yang dialaminya, baik di luar maupun dalam negeri.	- Bidang Efisiensi: Percepatan penanganan kasus yang dialami pelaut dan AKP Indonesia seperti gaji tidak dibayar, pelanggaran HAM, pelanggaran perjanjian kerja, penyelundupan tenaga kerja, terlanjar di kapal/pelabuhan di luar negeri akibat pembatasan protokol COVID-19, dsb. - Mulai Berlaku: Juli 2020 - Efisiensi Anggaran: Rapat penanganan dilakukan secara terkonsolidasi oleh Kemenko Marves, sehingga masing-masing K/L tidak perlu melakukan rapat sendiri-sendiri secara berulang-ulang. - Peningkatan Layanan: Akselerasi penanganan kasus penelantaran pelaut dan AKP Indonesia yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi penanganan bersama oleh K/L terkait seperti Kemlu, Kemnaker, KKP, Kemhub, dan BP2MI - Penerima Manfaat: Masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai pelaut dan awak kapal perikanan - Laporan: Jumlah pengaduan sebanyak 18 (https://onedrive.live.com/?authkey=%21AK3XcUafUB8pFig&cid=57C84F97A4FABC34&id=57C84F97A4FABC34%2118127&parId=57C84F97A4FABC34%2110856&o=OneUp). Untuk tindak lanjut dilakukan rapat koordinasi Bersama k/l terkait (kemu, perwakilan RI di luar negeri, kemhub, kkp, kemnaker, bp2mi).
13	LAYANAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT	Layanan pengaduan terkait aktivitas di pelayaran rakyat serta microsite pelayaran rakyat juga sebagai layanan informasi (regulasi, data base, dll.) terkait pelayaran rakyat	- Bidang Efisiensi: Pusat informasi, evaluasi dan monitoring angkutan laut pelra - Mulai Berlaku: Tahun 2021 - Efisiensi Anggaran: Anggaran yang dibutuhkan untuk urusan bidang pelayaran rakyat lebih banyak sebelum menggunakan microsite pelayaran rakyat karena membutuhkan koordinasi-koordinasi langsung ke lapangan yang butuh biaya lebih namun sejak ada sistem ini jadi berkurang karena layanan informasi, database dan pengaduan sudah berbasis sistem - Peningkatan Layanan: Kemudahan informasi serta pengaduan terkait angkutan laut pelayaran rakyat - Penerima Manfaat: Bersifat eksternal (pelaku usaha, pengguna jasa pelayaran rakyat dan masyarakat umum)

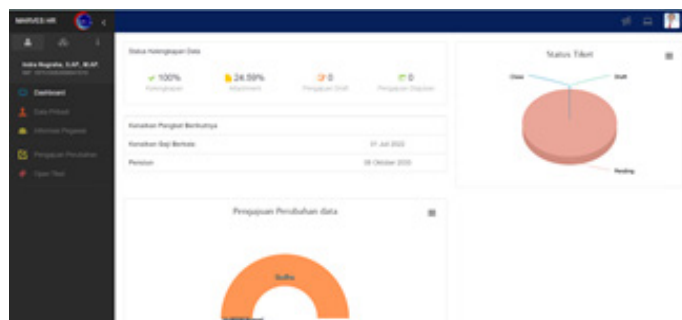
NO	INOVASI	MANFAAT	KETERANGAN
14	Aplikasi mendukung manajemen pengetahuan SISTEM INFORMASI MANAGEMEN PENGETAHUAN	Sistem informasi berbasis website yang mendukung manajemen pengetahuan di kemenko marves, sehingga setiap pegawai dapat mengetahui progres kegiatan dan analisa data dari seluruh unit kerja.	• Bidang Efisiensi: Membuat efisiensi pada bidang analisa kebijakan di lingkup unit kerja Deputy • Mulai Berlaku: Mulai digunakan pada tahun 2020 • Peningkatan Layanan: Sejak digunakan layanan penggunaan data dalam analisa kebijakan meningkat sebesar 70% • Penerima Manfaat: Unit Kerja
15	APLIKASI UNTUK DATABASE SMELTER MELALUI INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM FOR INDOONESIAN MINERAL-DOWSTREAMING STAKEHOLDERS (ICOS FOR IMDS).	• Sinkronisasi data antara KESDM, Kemenperin, dan Kemeninves/BKPM. • Validitas tinggi karena data yang terkumpul merupakan data primer. • Kualitas perumusan bahan kebijakan meningkat karena didukung oleh data yang komprehensif. Data yang terkumpul dapat diguna-pakai oleh seluruh K/L.	• Pada akhir tahun 2022 sudah membuat database smelter menggunakan aplikasi/website yang sudah mencapai finalisasi (Information System) dan akan dilaksanakan tahap sosialisasi. • Menu dari Information System, terdiri dari: Smelter Database; News Room; Download Center; Event Publication; Job Vacancy; Infographic dan Policy Brief Library. Sedangkan pengembangan tahap kedua meliputi: Communication System, terdiri dari: Meeting Invitation; Discussion Forum; Working Group; Reporting Center; dan Other Activities.

Dokumentasi Aplikasi Kemenko Marves:

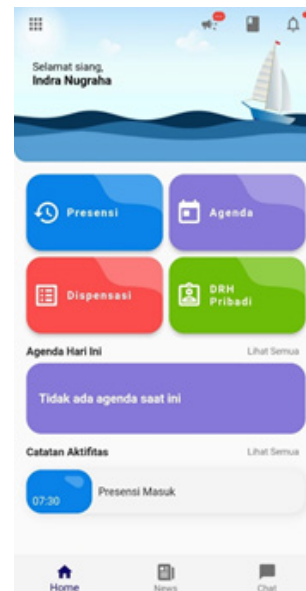
GAMBAR 37
DASHBOARD SIK-MARITIM



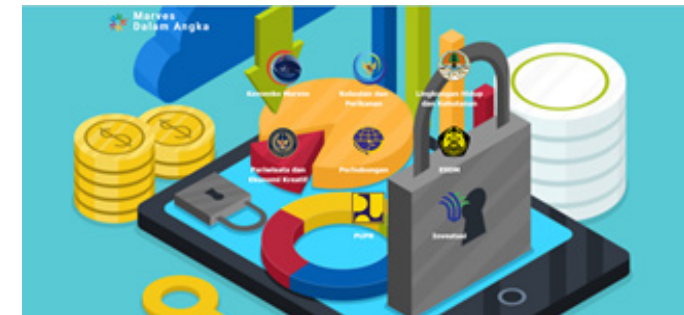
GAMBAR 39
APLIKASI MARVESHR



GAMBAR 38
MARVES CORE



GAMBAR 40
APLIKASI MARVES DALAM ANGKA



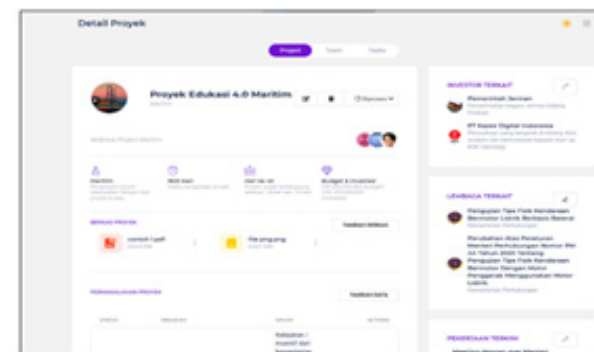
GAMBAR 41
WEBSITE JDIIH MARVES



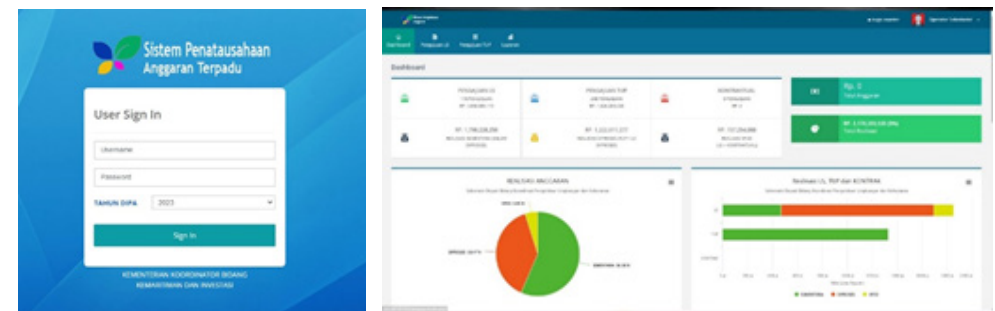
GAMBAR 42
TAMPILAN DASHBOARD APLIKASI SISMONEV FOOD ESTATE



GAMBAR 43
DASHBOARD APLIKASI PCM MARVES



GAMBAR 44 APLIKASI SATU GARPU



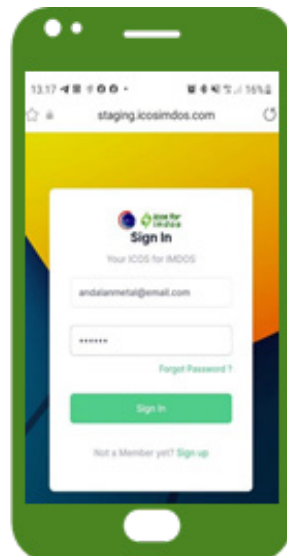
GAMBAR 45
APLIKASI E-RB



GAMBAR 46
APLIKASI E-TALA



GAMBAR 47
APLIKASI UNTUK DATABASE SMELTER MELALUI INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM
FOR INDOONESIAN MINERAL-DOWNSTREAMING STAKEHOLDERS (ICOS FOR IMDOS)



G. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisa Sumber Daya Anggaran

Pagu anggaran Kemenko Marves TA. 2022 telah disahkan pada tanggal 17 November 2021, dengan terbitnya DIPA Induk Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2022 dimana Kemenko Marves memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp260.926.167.000,00 (dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Namun, Kemenko Marves mendapatkan pagu blokir sebesar Rp11.036.120.000,00 (Sebelas Miliar Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Jenis blokir ini merupakan kode 2 yaitu diperlukan data dukung lainnya untuk membuka blokir tersebut. Akun yang diblokir merupakan akun belanja Jasa Sewa dan akun belanja Jasa Konsultan.

Pada bulan Oktober 2022, Kemenko Marves mengajukan usulan pembukaan blokir *Automatic Adjustment* dalam Hal IV.A DIPA dan revisi anggaran antar komponen belanja operasional untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Selanjutnya, Kemenko Marves mengajukan usulan Revisi administrasi pembukaan blokir AA sebesar Rp19.188.393.000,- (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dalam rangka memenuhi alokasi anggaran detil kegiatan yang direkomendasikan dalam surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor S-433/MK.2/2022, sehingga sampai dengan triwulan IV total anggaran Kemenko Marves berjumlah Rp345.169.102.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Ribu)

Realisasi anggaran belanja Kemenko Marves pada tahun 2022 sebesar Rp327.357.404.180,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) dari pagu anggaran keseluruhan berjumlah Rp345.169.102.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 94,84%.

Dari realisasi anggaran tersebut, capaian kinerja Kemenko Marves sebesar 99,98%. Adapun penjelasan realisasi anggaran terhadap capai IKU adalah sebagai berikut:

A. Stakeholder Perspective

Stakeholder Perspective terdiri dari 3 (tiga) SS, dengan capaian sebesar 102,23%. Capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

1. SS 1: Teguhnya Jati diri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat dengan IKU Efektivitas Kepemimpinan Maritim capaian sebesar 100%. Jumlah pagu pada IKU ini sebesar Rp67.104.852.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Seratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 93
REALISASI IKU PENDUKUNG SS 1

NO	IKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN IKU	EFISIENSI ANGGARAN
1	Efektivitas Kepemimpinan Maritim	Rp67.104.852.000,00	Rp50.998.324.418,00	100%	24%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp16.106.527.582,00 atau sebesar 24%, IKU Efektivitas Kepemimpinan Maritim memiliki capaian kinerja 100%.

- SS 2: Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perencanaan Nasional dengan IKU yaitu PDB Maritim sebesar 108,73%. Jumlah pagu pada IKU ini sebesar Rp2.812.874.000 (Dua Miliar Delapan Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 94
REALISASI IKU PENDUKUNG SS 2

NO	IKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN IKU	EFISIENSI ANGGARAN
2	PDB Maritim	Rp2.812.874.000,00	Rp2.810.874.000,00	108,73%	0,07%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp2.000.000,00 atau sebesar 0,07%, IKU PDB Maritim memiliki capaian kinerja 108,73%.

- SS 3: Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur dengan IKU yaitu Indeks Daya Saing Global (IDSG) sebesar 97,97%. Jumlah pagu pada IKU ini sebesar Rp2.466.144.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 95
REALISASI IKU PENDUKUNG SS 3

NO	IKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN IKU	EFISIENSI ANGGARAN
3	Indeks Daya Saing Global	Rp2.466.144.000,00	Rp2.464.953.056,00	97,97%	0,05%

B. Customer Perspective

Customer Perspective terdiri dari 5 (lima) SS, dengan capaian sebesar 102,83%. Capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

- SS 4: Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional, dengan IKU Indeks Kedaulatan Maritim. Target 2022 atas IKU ini sebesar 3 dengan realisasi 4, capaian atas SS

ini yaitu 120%. IKU ini didukung oleh kegiatan Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dengan besar pagu anggaran Rp67.104.852.000 (Enam Puluh Tujuh Miliar Seratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 96
REALISASI IKU PENDUKUNG SS 4

NO	IKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN IKU	EFISIENSI ANGGARAN
4	Indeks Kedaulatan Maritim	Rp67.104.852.000,00	Rp50.998.324.418,00	120%	24%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp16.106.527.582,00 atau sebesar 24%, IKU Indeks Kedaulatan Maritim memiliki capaian kinerja 120%.

- SS 5: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis, capaian atas SS ini yaitu 97,73% yang terdiri dari 2 IKU yaitu Indeks Kinerja Logistik target tahun 2022 sebesar 3,3 dengan realisasi 3,15 (95,45%). IKU ini didukung oleh kegiatan Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi. Sedangkan IKU Indeks Disparitas Ekonomi capaiannya 100% dari target ~0,17 dengan realisasi -0,17 dan didukung oleh kegiatan Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dan kegiatan Koordinasi Investasi Dan Pertambangan Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 97
REALISASI IKU PENDUKUNG SS 5

NO	IKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN IKU	EFISIENSI ANGGARAN
5	Indeks Kinerja Logistik	Rp966.674.000,00	Rp966.662.386,00	95,45%	0,001%
6	Indeks Disparitas Ekonomi	Rp20.261.234.000,00	Rp20.231.637.833,00	100%	0,14%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp11.614,00 atau sebesar 0,001%, IKU Indeks Kinerja Logistik memiliki capaian kinerja 95,45%. Sedangkan IKU Indeks Disparitas Ekonomi memiliki capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran Rp29.596.167,00 atau sebesar 0,14%.

- SS 6: Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia, capaian SS adalah 107,52% terdiri dari 2 IKU yaitu Indeks Kesehatan Laut Indonesia (Ocean Health Index) dengan realisasi tahun 2022 adalah 75,65 dari target sebesar 70 dengan capaian sebesar 108,07%. IKU ini didukung oleh kegiatan Koordinasi Sumber Daya Maritim. Sedangkan capaian atas IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari target 67,7 terealisasi 72,42 (106,97%) yang didukung oleh kegiatan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 98
REALISASI IKU PENDUKUNG SS 6

NO	IKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN IKU	EFISIENSI ANGGARAN
7	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	Rp1.045.768.000,00	Rp1.041.006.661,00	108,07%	0,45%
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rp2.758.224.000,00	Rp2.737.419.983,00	106,97%	0,75%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp4.761.339,00 atau sebesar 0,45%, IKU Indeks Kesehatan Laut Indonesia memiliki capaian kinerja 108,07%. Sedangkan IKU Indeks Disparitas Ekonomi memiliki capaian kinerja 106,97% dengan efisiensi anggaran Rp20.804.017,00 atau sebesar 0,75%.

- SS 7: Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam, capaian atas SS 7 adalah 110,74% dengan 2 IKU yaitu PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa dari target tahun 2022 16,79 terealisasi 19 (113,16%) yang didukung oleh kegiatan Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Sedangkan IKU Tingkat Komponen Dalam Negeri dari target 46 dengan realisasi 49,83 (108,33%) didukung oleh kegiatan Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi. Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 99
REALISASI IKU PENDUKUNG SS 7

NO	IKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN IKU	EFISIENSI ANGGARAN
9	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa	Rp6.790.349.000,00	Rp6.778.487.494,00	113,16%	0,17%
10	Tingkat Komponen Dalam Negeri	Rp656.411.000,00	Rp653.705.501,00	108,33%	0,41%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp11.861.506,00 atau sebesar 0,17%, IKU PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa memiliki capaian kinerja 113,16%. Sedangkan IKU Tingkat Komponen Dalam Negeri memiliki capaian kinerja 108,33% dengan efisiensi anggaran Rp2.705.499,00 atau sebesar 0,41%.

- SS 8: Menguatnya Jati diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara dengan IKU Indeks Kapabilitas Inovasi. Target tahun 2022 atas IKU ini adalah 39,5, dengan realisasi 27,9 sehingga capaian nya sebesar 70,63%. IKU ini didukung oleh kegiatan Koordinasi Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 100
REALISASI IKU PENDUKUNG SS 8

NO	IKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN IKU	EFISIENSI ANGGARAN
11	Indeks Kapabilitas Inovasi	Rp15.661.698.000,00	Rp15.572.642.514,00	70,63%	0,56%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp89.055.486,00 atau sebesar 0,56%, IKU Indeks Kapabilitas Inovasi memiliki capaian kinerja 70,63%.

C. Internal Business Process

Internal Business Process terdiri dari 2 (dua) SS, dengan capaian 100%. Capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

- SS 9: Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien capaian 100% dari IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan target tahun 2021 100% dengan realisasi 100%. IKU ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu dari seluruh unit kerja Deputi. Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 101
REALISASI IKU PENDUKUNG SS 9

NO	IKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN IKU	EFISIENSI ANGGARAN
12	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	Rp7.381.069.000,00	Rp7.319.890.403,00	100%	1%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp61.178.597,00 atau sebesar 1%, IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan memiliki capaian kinerja 100%.

- SS 10: Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien, dengan IKU Persentase Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti tercapai 100%, dari target 100% dengan realisasi 100%. IKU ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu dari seluruh unit kerja Deputi. Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 102
REALISASI IKU PENDUKUNG SS 10

NO	IKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN IKU	EFISIENSI ANGGARAN
13	Persentase Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	Rp11.049.401.000,00	Rp11.011.814.045,00	100%	0,34%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 37.586.955,00 atau sebesar 0,34%, IKU Persentase Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti memiliki capaian kinerja 100%.

D. Learning and Growth

Learning and Growth terdiri dari 4 (empat) SS, capaian kinerja yang diperoleh adalah 89,05%. Capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

- 1. SS 11: Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional dengan IKU Indeks Profesionalitas ASN capaian tahun 2022 sebesar 73,85% dari target sebesar 81 realisasi 59,82. IKU ini didukung oleh kegiatan Layanan Manajemen SDM Internal.
- 2. SS 12: Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik dengan IKU Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves yaitu dari target 80 realisasi 78,70 (98,38%). IKU ini didukung oleh kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.
- 3. SS 13: Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi dengan dengan IKU Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dari target 3,1 pada akhir tahun 2022 telah terealisasi 2,68, capaian atas IKU tersebut adalah 86,45%. IKU ini didukung oleh kegiatan Layanan Data dan Informasi.
- 4. SS 14: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dengan IKU Opini BPK tercapai 120%, hal ini dibuktikan dengan realisasi WTP dari target yang dicanangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021 Nomor: 8a/LHP/XVII/05/2022 Tanggal: 27 Mei 2022 dinyatakan bahwa Kemenko Marves memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2021. IKU ini didukung oleh kegiatan Layanan Keuangan. Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 103
REALISASI IKU PENDUKUNG SS 11-14

NO	IKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN IKU	EFISIENSI ANGGARAN
14	Indeks Profesionalitas ASN	Rp1.975.710.000,00	Rp1.959.829.499,00	73,85%	0,80%
15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	Rp698.347.000,00	Rp698.266.692,00	98,38%	0,01%
16	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rp162.900.000,00	Rp114.900.000,00	86,45%	29,46%
17	Opini BPK	Rp1.607.999.000,00	Rp1.607.014.276,00	120%	0,06%

Secara keseluruhan perbandingan capaian IKU dengan realisasi sumberdaya anggaran seimbang. Capaian kinerja adalah sebesar 99,98% dan tingkat serapan anggaran sebesar 94,84%.

2. Penyederhaan Birokrasi (Delayering)

Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat proses reformasi birokrasi dengan penyederhanaan jabatan struktural, serta pelaksanaan PermenPANRB No. 17 Tahun 2021, dalam penyetaraan jabatan dengan mengalihkan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi senantiasa melakukan penguatan tata kelola sehingga semakin efektif dan efisien, salah satunya dalam bentuk organisasi yang semakin ramping, simpel dan melayani masyarakat melalui inovasi dan penerapan teknologi dan informasi dengan baik.

Bentuk efisiensi penggunaan sumber daya organisasi dalam mendukung penguatan tata kelola yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain:

a. Penyederhanaan Birokrasi (Delayering)

Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan kebijakan nasional, pada tahun 2022 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan implementasi *delayering* sebagai berikut:

- 1) Kepala Bagian Tata Usaha pada unit Deputi dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Analis
- 2) Kepala Bagian Keuangan dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
- 3) Kepala Bagian Data dan Informasi dialihkan menjadi Pranata Komputer
- 4) Kepala Bagian Administrasi Umum dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Arsiparis
- 5) Kepala Bagian Program dialihkan menjadi jabatan fungsional perencana
- 6) Kepala Bidang substantif pada unit kerja dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai dan simplifikasi proses pelayanan. Selanjutnya, *delayering* pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari sisi struktur organisasi telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dari sisi penyetaraan jabatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 200 Tahun 2021, Nomor 201 Tahun 2021 dan Nomor 204 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

3. Implementasi Aplikasi

Beberapa aplikasi yang diimplementasikan di lingkungan Kemenko Marves yakni SIK-MARVES (e-SAKIP MARVES), Marves Core, Marves HR, MARVES Dalam Angka, JDIH (Jaringan Dokumen Informasi Hukum) Kemenko Marves, Aplikasi Monitoring *Food Estate*,

Sistem Informasi Pemantauan dan Manajemen Program Investasi Strategis (*Project Control Monitoring/PCM*), dan Satu Garpu. Adapun efisiensi yang telah dirasakan dengan adanya implementasi beberapa aplikasi tersebut di antaranya:

1. Pengembangan Marves Core dilaksanakan untuk menunjang budaya *digital workplace* di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui keseragaman proses, sentralisasi penyimpanan data, dan nantinya dapat dilakukan analisis terhadap data. Hal ini tentunya dapat menimbulkan efisiensi baik dari proses maupun biaya pengembangan *digital platform* di Unit Eselon I dalam hal duplikasi aplikasi.
2. Selain bersifat digitalisasi, Marves Core juga dikembangkan dengan prinsip simplifikasi proses bisnis, sehingga dapat menyederhanakan birokrasi serta mempercepat proses dan waktu penyelesaian tugas. Sebagai contoh, integrasi antara presensi kehadiran dengan dengan pengukuran kinerja pegawai. Selain itu, akan mempermudah pelaporan dan pengisian logbook dikarenakan perekaman tugas secara otomatis setiap harinya.
3. Efisiensi waktu pelaksanaan tugas dan fungsi. Penggunaan modul Marves HR yang dapat diakses kapan saja sangat membantu proses pelaksanaan tugas dan fungsi data kepegawaian. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan ketika seorang pejabat/pegawai berada di kantor, sekarang dapat dilakukan kapan saja bahkan ketika seorang pejabat/pegawai tersebut sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor.
4. SIK-MARVES kembali mengembangkan pada modul Fase II menjadi e-SAKIP MARVES, hal ini dilakukan sebagai implementasi dalam mengintegrasikan aplikasi dari mulai perencanaan-pengukuran kinerja-pelaporan kinerja.
5. Marves Dalam Angka merupakan penyajian data sektoral pada kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Marves yang dinamis.
6. Sistem JDIH telah memfasilitasi layanan hukum secara keseluruhan dari mulai perancangan, advokasi dan informasi hukum sehingga tidak perlu mengeluarkan kembali anggaran untuk pembangunan sistem sejenis karena sudah terfasilitasi dalam satu layanan di sistem JDIH Marves.
7. Sistem Monitoring *Food Estate* (Sismonev FE) sedang dikembangkan untuk mempermudah monitoring program FE. Sismonev ini dikembangkan untuk mengintegrasikan data tabular dengan data spasial untuk melaporkan progres capaian penyiapan lahan, infrastruktur serta budidaya.
8. PCM (*Project Control and Monitoring*) dapat mempercepat respon dan identifikasi permasalahan dalam realisasi program dan *project* dan *single-screen reference* untuk memudahkan koordinasi lintas bidang. *Dashboard* ini juga berfungsi untuk menampilkan informasi cepat untuk keseluruhan program investasi strategis dan memberikan referensi lebih lanjut ke dalam pemantauan proyek.
9. Satu Garpu berpengaruh terhadap efisiensi anggaran dari segi waktu karena seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan telah tercover di satu garpu, seperti penginputan otomatis SBM, SPT, berkas pengajuan keuangan, semua tersistem di aplikasi tidak perlu manual. Sehingga waktu yang ada dapat

digunakan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

10. E-RB memudahkan dalam pengelolaan bukti dukung RB dan penilaian PMPRB yang digunakan oleh unit kerja, Inspektorat dan KemenpanRB karena berbasis aplikasi yang semula manual menggunakan lembar excel dan google drive. Selain itu berpengaruh pula terhadap efisiensi anggaran, karena proses penyiapan bukti dukung lebih efektif dan hanya memerlukan sekali pertemuan untuk pleno.

Selain implementasi Aplikasi yang dibuat oleh Internal Kemenko Marves, dalam pelaksanaan tugas Kemenko Marves juga menggunakan beberapa aplikasi dari eksternal, seperti SRIKANDI, SAKTI, E-Monev BAPPENAS, KRISNA, dan SMART DJA yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kinerja.

4. Konsolidasi Perangkat Infrastruktur TIK dan Perangkat Pengguna

Pada tahun 2022, Biro Komunikasi sebagai Unit TIK Pusat telah melaksanakan program konsolidasi perangkat infrastruktur TIK Kemenko Marves (server, storage, jaringan, dan lain-lain untuk common application) dan perangkat pengguna Kemenko Marves (Personal Computer dan tablet). Namun, karena adanya peraturan terbaru (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional), sehingga Kemenko Marves melakukan penyesuaian regulasi yang baru.

Seluruh kebutuhan infrastruktur TIK serta perangkat pengguna pada unit eselon I dikonsolidasikan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Dengan adanya konsolidasi ini diharapkan unit eselon I dapat berfokus dalam pengembangan aplikasi utama (*core application*) dan tidak lagi menganggarkan kebutuhan belanja infrastruktur TIK atas common application dan perangkat pengguna. Kebutuhan dimaksud disampaikan secara berjenjang melalui Unit TIK masing-masing unit Eselon I, untuk selanjutnya diusulkan ke unit TIK Pusat.

Melalui konsolidasi ini juga dapat menghilangkan adanya kemungkinan redundansi penganggaran belanja TIK serta menghilangkan *idle capacity* infrastruktur TIK karena hasil pengadaan dapat digunakan oleh seluruh unit eselon I (*sharing resource*). Selain itu, konsolidasi juga memungkinkan terciptanya standarisasi spesifikasi dan harga perangkat. Jika pengadaan diadakan oleh masing-masing unit eselon I secara mandiri, dapat mengakibatkan keberagaman harga untuk satu perangkat TIK yang sama dan dapat berpotensi menjadi temuan auditor.

Hal lain yang menjadi manfaat konsolidasi adalah memungkinkan terciptanya economies of scale dikarenakan kapasitas infrastruktur TIK yang dikonsolidasikan cukup besar dan terjadi penghematan biaya karena pembelian yang dilakukan dalam jumlah besar. Dari sisi pengadaan, adanya konsolidasi menghemat sumber daya waktu dan manusia, untuk pengelolaan infrastruktur TIK dan lisensi yang digunakan untuk operasional TIK di Kemenko Marves proses pengadaan diadakan secara terpusat yang langsung di kelola Biro Komunikasi.

Berikut ini merupakan data anggaran belanja TIK tahun 2022 per unit Eselon I:

TABEL 104
ANGGRARAN BELANJA TIK UNIT ESELON I KEMENKO MARVES TAHUN 2022

NO.	UNIT ESELON I	ANGGARAN BELANJA TIK (Rp.)
1	Sekretariat Kemenko	475.396.505,-
2	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	-
3	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	-
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	-
5	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
6	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	-
TOTAL		475.396.505,-

Sumber: Biro Komunikasi, 2022

5. Efisiensi Anggaran

Perencanaan dan penganggaran TA 2022 juga ditandai dengan upaya penyempurnaan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dalam sistem penganggaran melalui redesain sistem penganggaran. Hasil evaluasi selama ini menuntut untuk dilakukan perubahan dan perbaikan guna mewujudkan penerapan konsep *money follow program*.

Melalui proses redesain sistem penganggaran ini, telah dilakukan reviu atas program-program dalam struktur anggaran *existing*. Restrukturisasi program dilakukan melalui identifikasi tugas dan fungsi utama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Unit-unit eselon I yang menjalankan tugas dan fungsi sejenis digabung menjadi satu untuk menjalankan satu Program. Dengan restrukturisasi ini, jumlah Program hasil redesain akan menjadi lebih sedikit, namun lebih fokus dan lebih mencerminkan program-program riil yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tahun 2022, Kemenko Marves melakukan penghematan sebesar Rp16.004.226.079 yaitu dari kegiatan AIS Forum dan Peran Indonesia di Forum Internasional. Untuk AIS Forum karena adanya instruksi dari presiden kegiatan yang sedianya dilaksanakan tahun 2022, diundur menjadi tahun 2023. Sehingga anggarannya tidak dipakai di tahun 2022. Sedangkan pada Peran Indonesia di Forum Internasional, terjadi penghematan penyelenggaraan kegiatan sebesar Rp 2.768.202.447,00.

Restrukturisasi Program juga dilakukan dalam rangka memisahkan antara Program yang bersifat teknis (yang selanjutnya disebut dengan Program Teknis) dengan Program yang bersifat generik (yang selanjutnya disebut Program Dukungan Manajemen). Selain restrukturisasi program, dilaksanakan simplifikasi struktur informasi kinerja anggaran, sehingga level struktur anggaran menjadi lebih ringkas. Sebelumnya, struktur pada sistem penganggaran memiliki tingkatan yang relatif panjang dan rumit. Proses simplifikasi struktur anggaran ini dilakukan dengan cara *delaying* struktur anggaran yang ada. Kriteria Penghematan Anggaran pada tahun 2021, meliputi:

- Belanja Birokrasi, yaitu Belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, pembangunan Gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/ mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan;
 - Penghematan Tahap 1 sebesar Rp20.035.000.000;
 - Penghematan Tahap 2 sebesar Rp6.265.950.000;
 - Penghematan Tahap 3 sebesar Rp3.843.374.000;
 - Penghematan Tahap 4 sebesar Rp19.474.627.000.

6. Implementasi Kebijakan SDM

Beberapa tindakan yang dilakukan untuk pertumbuhan pegawai antara lain sebagai berikut:

- Rekrutmen ASN Tahun Anggaran (TA) 2022
Rekrutmen ASN TA 2022 di Kemenko Marves sebanyak 75 orang untuk mengisi formasi kebutuhan pada unit kerja eselon I di lingkungan Kemenko Marves.

UNIT KERJA	FORMASI	CPNS DITERIMA
Setmenko	26	25
D1	7	7
D2	8	7
D3	6	6
D4	13	13
D5	5	5
D6	12	12
JUMLAH	77	75

Redistribusi pegawai merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan SDM melalui optimalisasi jumlah SDM yang telah tersedia di internal Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Melalui redistribusi pegawai diharapkan alokasi sumber daya khususnya sumber daya manusia dapat lebih tepat, sehingga formasi jabatan yang lowong dapat terisi sesuai kebutuhan organisasi dan aspirasi karier pegawai. Redistribusi pegawai antar unit eselon I dilaksanakan melalui mekanisme Internal *Job Vacancy* dan mutasi/promosi karena penugasan atau atas permintaan sendiri. Pelaksanaan redistribusi pegawai selama tahun 2022 sebagai berikut:

TABEL 105
RINCIAN REDISTRIBUSI PEGAWAI KEMENKO MARVES 2022

UNIT KERJA	FORMASI	CPNS DITERIMA
1	SETMENKO	
	a. Biro Perencanaan	36
	b. Biro Hukum	34
	c. Biro Umum	53
	d. Biro Komunikasi	39
	e. Inspektorat	20
2	Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	51
3	Deputi Koordinasi Bidang Sumberdaya Maritim	52
4	Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Transportasi	57
5	Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	55
6	Deputi Koordinasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	39

7. Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh pengadaan barang/jasa dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa, Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menganut prinsip yang tercantum pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Jumlah kontrak pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2022 yaitu 11 kontrak pada Deputi 1, 23 kontrak pada Deputi 2, 34 kontrak pada Deputi 3, 17 kontrak pada Deputi 4, 5 kontrak pada Inspektorat, 4 kontrak pada Deputi 5, 26 kontrak pada Deputi 6, dan 91 kontrak pada Setmenko. Dari total kontrak tersebut, terdapat 1 kegiatan yang masih berstatus persiapan (Sewa Ruang Kesekretariatan Event O2O), 7 kegiatan berstatus proses, dan 202 kegiatan yang sudah selesai. Rincian terkait daftar pengadaan barang/jasa per 28 Februari 2023 Kemenko Marves tercantum dalam Lampiran Laporan Kinerja.

8. Efisiensi Ruang Kerja melalui Implementasi Konsep ABW

Dalam rangka pelaksanaan penataan ruang kerja berdasarkan konsep *Activity Based Workplace* (ABW) sebagai bagian dari program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, program Inisiatif Strategis Kemenko Marves, dan Implementasi program Ruang Kerja Masa Depan, dilakukan asesmen penataan ruang kerja di lingkungan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi oleh Tim BMN Biro Umum berserta perwakilan unit kerja unit eselon I. Adapun pembagian ruang kerja sebagai berikut:

TABEL 106
PEMBAGIAN RUANG KERJA

UNIT KERJA	FORMASI	CPNS DITERIMA
1	SETMENKO	4 (Utara)
a.	Biro Perencanaan	5 (Utara)
b.	Biro Hukum	5 (Selatan)
c.	Biro Umum	6 (Selatan) dan 21
d.	Biro Komunikasi	6 (Utara)
e.	Inspektorat	17
2	Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	7
3	Deputi Koordinasi Bidang Sumberdaya Maritim	15
4	Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Transportasi	16
5	Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	8
6	Deputi Koordinasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13
7	Deputi Koordinasi Bidang Investasi dan Pertambangan	19
8	Ruang PPID	1
9	Ruang Rapat	2 dan setiap ruang unit eselon I dan Biro
10	Klinik	21
11	Ruang Gym	21
12	Studio Musik	21
13	Lobby	GF (dasar)
14	Parkir Area	Halaman Lingkungan Kantor & Gd. Parkir bersama BRIN

9. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai

Dari total 416 PNS di lingkungan Kemenko Marves pada tahun 2022, terdiri dari 251 orang laki-laki dan 165 orang perempuan. Tingkat pendidikan sebanyak 20 pegawai (4,78%) merupakan lulusan S3, dan 33,41% (139 pegawai) yang merupakan lulusan S2. Lulusan dengan jumlah tertinggi adalah lulusan S1, yakni mencapai 206 pegawai atau 49,28 % dari total pegawai. Sisanya merupakan lulusan D.IV sebanyak 24 pegawai (5,74%), lulusan D.III sebanyak 26 pegawai (6,22%) dan SLTA 1 pegawai (0,24%). Kemenko Marves ke depan merencanakan peningkatan *grade* calon pegawai dengan menambah formasi ASN dengan gelar S3 dan S2.

Dari usia, pegawai Kemenko Marves terbanyak usia antara 20-29 tahun atau yang biasa disebut dengan generasi milenial dengan jumlah 138 orang (33,17%), usia 30-39 tahun sebanyak 119 orang (28,61%), 92 orang (22,12%) usia antara 40-49 tahun dan usia antara 50-59 tahun sebanyak 67 orang (16,11%).

Dari total 11 Pejabat Tinggi Madya, terdapat 2 pejabat yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat I. Dari keseluruhan 39 Pejabat Tinggi Pratama, terdapat 2 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat I. Sebanyak 5 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat II, 3 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator, dan 2 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas. Dari total 94 pejabat administrator, 22 pejabat telah mengikuti pelatihan administrator (Pim Tk. III) dan 29 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas (Pim Tk. IV). Sedangkan dari total 54 pejabat pengawas, 2 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator (Pim Tk. III) dan 37 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas (Pim Tk. IV).

Adapun data pegawai Kemenko Maritim seperti terlihat pada gambar berikut ini:

TABEL 107
DATA PEGAWAI BERDASARKAN GENDER

GENDER	JPT Non ASN	PNS	CPNS	JUMLAH
Laki-Laki	3	251	38	292
Perempuan	-	164	37	201

TABEL 108
DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	JPT Non ASN	PNS	CPNS	JUMLAH
D-III	-	26	2	28
D-IV	-	24	3	27
S1	-	205	68	273
S2	3	139	2	144
S3	-	20	-	20
SLTA	-	1	-	1

TABEL 109
DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA

USIA	JPT Non ASN	PNS	CPNS	JUMLAH
20-29	-	137	63	200
30-39	1	119	12	132
40-49	2	92	-	94
50-59	-	67	-	67

TABEL 110
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT

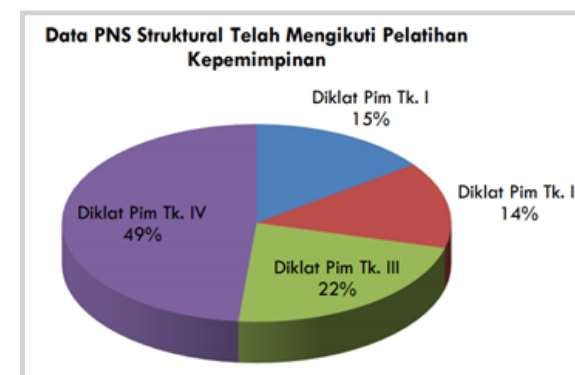
PANGKAT/ GOL. RUANG	PNS	CPNS	JUMLAH
Pembina Utama, IV/e	1	-	1
Pembina Utama Madya, IV/d	18	-	18
Pembina Utama Muda, IV/c	22	-	22
Pembina Tk. I, IV/b	38	-	38
Pembina, IV/a	57	-	57
Penata Tk. I, III/d	32	-	32
Penata, III/c	30	-	30
Penata Muda Tk. I, III/b	40	2	42
Penata Muda, III/a	153	71	224
Pengatur Tk. I, II/d	2	-	2
Pengatur, II/c	22	2	24

TABEL 111
DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN

JABATAN	JPT Non ASN	PNS	CPNS	JUMLAH
Pelaksana	-	131	-	131
Fungsional	-	235	75	310
Eselon IV.a	-	4	-	4
Eselon III.a	-	3	-	3
Eselon II.a	-	35	-	35
Eselon I.b	-	3	-	3
Eselon I.a	3	4	-	7

Adapun jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat fungsional sejumlah 42 pegawai. Selanjutnya, jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan teknis, short course, IELTS *Preparation Course*, bimbingan teknis, *Workshop*, sosialisasi serta seminar baik secara daring ataupun luring yang diselenggarakan oleh Kemenko Marves, Kementerian/ Lembaga lain serta lembaga swasta tercatat sebanyak 452 pegawai. Selanjutnya, data pegawai yang telah mengikuti diklat PIM dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

DIAGRAM 5
DATA PNS STRUKTURAL TELAH MENGIKUTI PELATIHAN KEPEMIMPINAN



Sumber: Biro Umum, 2022 (diolah)



PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan kinerja Kemenko Marves Tahun 2022 menyajikan secara komprehensif informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan Renstra Kemenko Marves pada tahun ketiga periode 2020-2024. Laporan ini menyajikan target yang berhasil dicapai dan target yang belum dapat disajikan pada Tahun 2022.
2. Capaian kinerja Kemenko Marves tahun 2022 adalah sebesar 99,98%. Tahun 2022, terdapat 2 IKU berstatus kuning, 9 IKU berstatus hijau, dan 6 IKU berstatus biru. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,77 poin dimana kinerja Kemenko Marves pada tahun 2021 adalah sebesar 99,21%. Dari 17 IKU, jumlah IKU yang dapat mencapai target adalah sebanyak 11 IKU atau sebesar 64,70%. Sedangkan IKU yang belum mencapai target adalah sebanyak 6 IKU atau sebesar 35,30%.
3. Capaian *Stakeholders Perspective* adalah sebesar 102,23%, sedangkan capaian *Customer Perspective* sebesar 102,83%, *Internal Business Process Perspective* sebesar 100% dan capaian *Learning and Growth Perspective* adalah 94,67%, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 94,84%.
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mendorong terwujudnya target pembangunan bidang kemaritiman dan investasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya.
5. Salah satu arahan Presiden yang menjadi perhatian adalah untuk terus mendorong masuknya investasi. Sepanjang tahun 2022, nilai investasi tercapai sebesar Rp 1.207 triliun melampaui target Rp 1.200 triliun. Sebanyak 54,2% atau Rp654,4 triliun dari nilai investasi tersebut merupakan Penanaman Modal Asing atau PMA, sedangkan 45,8% atau Rp552,8 triliun merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN). Investasi asing tersebut naik 44,2% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan investasi PMDN mengalami kenaikan 23,6% dibandingkan tahun sebelumnya.
6. Berdasarkan sebaran wilayahnya, nilai investasi di Luar Jawa adalah sebesar Rp.636,3 Trilyun (52,7%), sedangkan investasi di Jawa sebesar Rp.570,9 Trilyun (47,3%). Dari data tersebut terlihat, nilai investasi di Luar Jawa lebih besar dibandingkan di Jawa, walaupun dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan.
7. Kemenko Marves telah melakukan berbagai upaya untuk tetap berkinerja optimal dalam pencapaian target kinerja sampai dengan akhir tahun. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan sebagian besar dapat terlaksana dengan baik

B. Langkah Perbaikan Kedepan

Untuk perbaikan tahun 2023, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap capaian kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang ditargetkan pada Tahun 2023.
3. Melakukan perbaikan atas rencana aksi dari program dan kegiatan yang belum tercapai pada tahun 2022 guna pencapaian target kinerja pada Tahun 2023. Diantaranya yakni beberapa indikator kinerja yang tingkat kendalinya terlalu jauh tidak lagi digunakan pada Perencanaan kinerja di Tahun 2023. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil revidi dari KemenPANRB dan pembahasan Internal Kemenko Marves. Beberapa IKU yang tidak lagi digunakan menjadi Indikator Kinerja Menko yakni Indeks Daya Saing Global, Indeks Kapabilitas Inovasi, Indeks Disparitas Ekonomi, Indeks Kinerja Logistik, Indeks Kesehatan Laut, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa, dan Tingkat Komponen dalam Negeri.
4. IKU yang akan digunakan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional, Indeks Kepemimpinan Maritim, Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti, Persentase isu-isu Strategis yang diselesaikan, dan Indeks Reformasi Birokrasi.
5. Perlu dilakukan koordinasi guna peningkatan kualitas capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan pengumpulan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang dan sistematika analisis yang lebih komprehensif.
6. Upaya menarik investasi di semua wilayah terus dilakukan untuk mewujudkan pemerataan penyebaran investasi berkualitas.
7. Laporan Kinerja Tahun 2022 agar dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada Tahun 2023, sehingga target kinerja yang telah diperjanjikan dapat dicapai pada akhir tahun 2023.

Harapannya, laporan kinerja Tahun 2022 ini dapat menjadi umpan balik dalam proses capaian kinerja periode mendatang, sehingga SAKIP di Kemenko Marves dapat berjalan dengan baik. Melalui pelaksanaan SAKIP yang baik diharapkan Kemenko Marves dapat merealisasikan sasaran dan target kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Tujuan akhirnya adalah masyarakat dapat merasakan manfaat yang baik dan signifikan akan keberadaan Kemenko Marves.

LAMPIRAN 1

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2022



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luhut B. Pandjaitan

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi RI,

Luhut B. Pandjaitan (tj)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
Stakeholder Perspective				
SS.1	Teguhnya Jati Diri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	1	Efektivitas Kepemimpinan	>=3
SS.2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	2	Produk Domestik Bruto Maritim	6,99
SS3	Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	3	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	64,6
Customer Perspective				
SS.4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	4	Indeks Kedaulatan Maritim	3
SS5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	5	Indeks Kinerja Logistik	3,3
		6	Disparitas Ekonomi antar Wilayah	~0,17
SS.6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	7	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	70
		8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,7
SS.7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	9	Produk Domestik Bruto dari Sektor Sumber Daya Alam dan Jasa	16,79
		10	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	46
SS.8	Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	11	Indeks Kapabilitas Inovasi	39,5
Internal Business Process Perspective				
SS.9	Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	12	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan	100
SS.10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisen	13	Persentase Hasil Pengendalian yang Ditindaklanjuti	100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
Learning and Growth				
SS.11	Tersedianya Aparatur Sipil Negara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Profesional	14	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	81
SS.12	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Baik	15	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	80
SS.13	Terbangunnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	16	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1
SS.14	Terwujudnya Pengelolaan anggaran yang Akuntabel	17	Tingkat Opini BPK	WTP

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 158.476.257.000
2	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp 102.449.910.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp 260.926.167.000

Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi RI


Luhut B. Pandjaitan

Adapun data dukung lampiran LKj Tahun 2022 Kemenko Marves pada link berikut: <https://bit.ly/DataDukungMarves2022>

LAMPIRAN 2

NOTA DINAS LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN MARITIM



NOTA DINAS NOMOR.004/01.0PR.001/2023

Yth. : Sekretaris Kementerian Koordinator
Dari : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keadalaan Maritim dan Energi
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Efektivitas Kepemimpinan Maritim
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 6 Januari 2023

Menunjuk pada perihal Nota Dinas di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2022 telah menetapkan Efektivitas Kepemimpinan Maritim Indonesia sebagai indikator kinerja pada tingkat pemangku kepentingan. Indikator tersebut adalah indeks komposit yang menggambarkan agregasi dari dua nilai indikator Tingkat Keadalaan Maritim Indonesia dan Efektivitas Diplomasi Maritim Indonesia.
- Berdasarkan formula perhitungan pada manual Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, nilai Efektivitas Kepemimpinan Maritim didapat melalui penjumlahan dari 60% nilai Tingkat Keadalaan Maritim dan 40% nilai Efektivitas Diplomasi Maritim.
- Nilai Efektivitas Kepemimpinan Maritim yang didapat berdasarkan perhitungan pada nomor 2 adalah sebesar **85,48** dalam skala 100 atau sebesar **4,27** dalam skala 5.
- Terselip kami juga sampaikan tabulasi perhitungan Nilai Efektivitas Kepemimpinan Maritim Indonesia sebagai sumber informasi perhitungan pada nomor 3.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Kementerian Koordinator kami ucapkan terima kasih.

Isak Octavianus Manafe
Isak Octavianus Manafe

- Tembusan:
- Deputi Bidang Koordinasi Keadalaan Maritim dan Energi (sebagai laporan)
 - Kepala Biro Perencanaan

- 2 -

Partisipasi Aktif Indonesia dalam Forum Maritim Regional dan Global

No	Forum/Kegiatan	Kategori	Bentuk Kegiatan			Total
			Mengorganisir	Menghadiri	Misukan	
1	2	3	4	5	6	7
1	AS Forum	3	0.33	0.33	0.33	0.99
2	BBNI International Meeting	2	-	0.5	0.5	1
4	HLP SOE	2	-	0.5	0.5	1
5	IMO sub Committee on III	2	-	0.5	0.5	1
6	IMO Council dan IMO Assembly	2	-	0.5	0.5	1
7	MEPC	2	-	0.5	0.5	1
8	HTW	2	-	0.5	0.5	1
Total Point						6.99
Nilai						99.86

Penempatan Wakil Indonesia di Organisasi Internasional Bidang Kemaritiman

No	Organisasi Internasional Bidang Kemaritiman	Point
1	International Maritime Organization (IMO)	1
2	International Seabed Authority (ISA)	0
3	Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP)	0
4	Indian Ocean Rim Association (IORA)	0
5	Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)	0
6	Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)	0
7	Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)	0
8	Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)	0
9	International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)	0
Total		1
Nilai		11.11

Perhitungan Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional

No	Inisiatif dan Posisi Indonesia 2022	Point	Perjanjian Internasional
1	Mengusulkan perubahan masa jabatan pada Organisasi IMO guna menciptakan organisasi yang progresif	1	Forum IMO
2	Mengusulkan dilakukannya impact assessment dalam perhitungan indikator intensitas karbon dalam pelayaran guna menciptakan aktivitas maritim yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	1	
3	Mengusulkan pemberian sertifikat elektronik bagi pelaut untuk menunjang efisiensi aktivitas pelayaran, pemudahan pemberian sertifikat muang bagi para pelajar/mahasiswa bidang pelayaran yang proses pembelajarannya terdampak pandemi	1	
4	Mengusulkan penyediaan sertifikat elektronik bagi pelaut guna menunjang efisiensi aktivitas pelayaran yang modern	1	
5	Mengusulkan kemudahan dalam memperoleh sertifikat pelaut bagi para pelajar/mahasiswa bidang pelayaran yang proses pembelajarannya terdampak pandemi	1	

- 1 -

Perhitungan Efektivitas Kepemimpinan Maritim

Indikator	Sumber Data	Nilai Indikator	Bobot	Nilai
Tingkat Keadalaan Maritim	Deputi Bidang Koordinasi Keadalaan Maritim dan Energi	87.70	60%	52.63
Efektivitas Diplomasi Maritim	Deputi Bidang Koordinasi Keadalaan Maritim dan Energi	82.54	40%	32.86
Nilai Efektivitas Diplomasi Maritim				85.48

Perhitungan Tingkat Keadalaan Maritim

Indikator	Sumber Data	Nilai Indikator	Bobot	Nilai
Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	Akademisi Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	92.08	35%	32.23
Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	Akademisi Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	82.06	30%	24.62
Tingkat keselamatan maritim di Indonesia	Akademisi Deputi Keselamatan Maritim	88.14	35%	30.85
Nilai Tingkat Keadalaan Maritim				85.48

Perhitungan Efektivitas Diplomasi Maritim

Indikator	Sumber Data	Nilai Indikator	Bobot	Nilai
Partisipasi Aktif Indonesia dalam Forum Maritim Regional dan Global	Deputi Bidang Koordinasi Keadalaan Maritim dan Energi	99.86	60%	59.92
Penempatan Wakil Indonesia di Organisasi Internasional Bidang Kemaritiman	Deputi Bidang Koordinasi Keadalaan Maritim dan Energi	11.11	20%	2.22
Dimensi Inisiatif dan Posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional	Deputi Bidang Koordinasi Keadalaan Maritim dan Energi	100	20%	20
Nilai Efektivitas Diplomasi Maritim				82.54

- 3 -

6	Meningkatkan kesungguhan untuk mempererat kerja sama dan melakukan kolaborasi sesuai area kerja sama AIS Forum	1	AIS Forum
7	Mendukung inovasi dan penguatan pembiayaan program kelautan berkelanjutan terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi biru guna mendukung kesejahteraan Berjaya	1	
8	Menyatakan kesepahaman bersama, dan komitmen memperkuat kelembagaan kerja sama AIS Forum	1	
9	Menyetujui serta memberikan mandat kepada Indonesia untuk melaksanakan pertemuan pertama tingkat Kepala Negara dari forum negara-negara pulau dan kepulauan	1	
10	Frasa "archipelagic state" termuat dalam kelima pilar utama pembahasan further refreshed text International Legally Binding Instrument (BBNI)	1	BBNI
11	Forum menerima usulan untuk memuat dan mempertahankan frasa adjacent coastal state sebagai upaya perlindungan hak-hak negara pantai	1	
12	Usulan untuk menggunakan frasa "fishing and fishing activities" pada bab terkait Marine Genetic Resources	1	
Total		12	
Nilai		100%	

Secara lengkap Data Dukung atas capaian IKU pada link:
<https://bit.ly/DataDukungMarves2022>

LAMPIRAN 3

LAPORAN PDB MARITIM



Secara lengkap Data Dukung atas capaian IKU pada link:
<https://bit.ly/DataDukungMarves2022>

LAMPIRAN 4

BUKU LAPORAN INDEKS DAYA SAING GLOBAL



Secara lengkap Data Dukung atas capaian IKU pada link:
<https://bit.ly/DataDukungMarves2022>

LAMPIRAN 5

NOTA DINAS CAPAIAN INDIKATOR KEDAULATAN MARITIM

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email: kamarkommaritim@maritim.go.id

NOTA DINAS
NOMOR.005/D-1.0/PR.00/2023

Yth. : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
Dari : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pemangku Kepentingan
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 6 Januari 2023

Menjuz pada perihal Nota Dinas di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

- Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2022 telah menetapkan Tingkat Kedaulatan Maritim, Perhitungan Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional, dan Indeks Ketahanan Energi sebagai indikator kinerja pada tingkat pemangku kepentingan.
- Berdasarkan formulasi perhitungan pada manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang telah ditetapkan, diperoleh nilai masing-masing indikator sebagai berikut:
 - Tingkat Kedaulatan Maritim mendapatkan nilai **89,47**;
 - Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional mendapatkan nilai **100%**;
 - Indeks Ketahanan Energi mendapatkan nilai **7,66**.
- Terlampir kami sampaikan perhitungan capaian indikator-indikator dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Kementerian Koordinator kami ucapkan terima kasih.

Ishak Octovianus Manafe
Ishak Octovianus Manafe

Tembusan:
1. Kepala Biro Perencanaan

Perhitungan Tingkat Kedaulatan Maritim

Indikator	Sumber Data	Nilai Indikator	Bobot	Nilai
Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	92,08	35%	32,23
Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	88,06	30%	26,42
Tingkat keselamatan maritim di Indonesia	Asisten Deputi Keselamatan Maritim	88,07	35%	30,82
Nilai Tingkat Kedaulatan Maritim				89,47

Perhitungan Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional

No	Inisiatif dan Posisi Indonesia 2022	Poin	Perjanjian Internasional
1	Mengusulkan perubahan masa jabatan pada Organisasi IMO guna menciptakan organisasi yang progresif	1	Forum IMO
2	Mengusulkan dilakukannya impact assesment dalam perhitungan indikator intensitas karbon dalam pelayaran guna menciptakan aktivitas maritim yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	1	
3	Mengusulkan penyediaan sertifikat elektronik bagi pelaut untuk menunjang efisiensi aktivitas pelayaran, pemudahan pemberian sertifikat magang bagi para pelajar/mahasiswa bidang pelayaran yang proses pembelajarannya terdampak pandemi	1	
4	Mengusulkan penyediaan sertifikat elektronik bagi pelaut guna menunjang efisiensi aktivitas pelayaran yang modern	1	
5	Mengusulkan kemudahan dalam memperoleh sertifikat pelaut bagi para pelajar/mahasiswa bidang pelayaran yang proses pembelajarannya terdampak pandemi	1	AIS Forum
6	Menengaskan kesungguhan untuk mempererat kerja sama dan melakukan kolaborasi sesuai area kerja sama AIS Forum	1	
7	Mendorong inovasi dan penguatan pembiayaan program kelautan berkelanjutan terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi biru guna mendukung kesejahteraan bersama	1	
8	Menyatakan kesepahaman bersama, dan komitmen memperkuat kelembagaan kerja sama AIS Forum	1	BBNU
9	Menyetujui serta memberikan mandate kepada Indonesia untuk melaksanakan pertemuan pertama tingkat Kepala Negara dari forum negara-negara pulau dan kepulauan	1	
10	Frasa "archipelagic state" termuat dalam kalimat pilar utama pembahasan further refreshed text International Legality Binding Instrument BBNU	1	
11	Forum menerima usulan untuk memuat dan mempertahankan frasa adjacent coastal state sebagai upaya perlindungan hak-hak negara pantai	1	
12	Usulan untuk menggunakan frasa "fishing and fishing activities" pada bab terkait Marine Genetic Resources	1	
	Total	12	
	Nilai	100%	

Secara lengkap Data Dukung atas capaian IKU pada link:
<https://bit.ly/DataDukungMarves2022>

LAMPIRAN 6

PERPRES NO. 34 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI KKI TAHUN 2021-2025

 SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, perlu disusun Kebijakan Kelautan Indonesia; b. bahwa Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 sebagai bagian dari Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, perlu dilanjutkan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025. Pasal 1 . . .	
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025 A. NARAHISI RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. Pedoman KKI diuraikan dalam Dokumen Nasional KKI sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pedoman tersebut dioperasionalkan melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi KKI dan ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun. Waktu pelaksanaan Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia telah berakhir. Guna melanjutkan upaya-upaya untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, perlu ditetapkan Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025. Visi Poros Maritim Dunia merupakan suatu visi geopolitik sebagai pengerasan manifestasi tujuan nasional sekaligus momentum dalam menerapkan strategi pembangunan nasional berdasarkan kemaritiman. Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, penerbitan Dokumen Nasional KKI dan Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 adalah beberapa dari sejumlah kebijakan kelautan strategis yang telah diterbitkan sebagai kelanjutan upaya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Sesuai . . . SK No 09734 A	

Secara lengkap Data Dukung atas capaian IKU pada link::
<https://bit.ly/DataDukungMarves2022>

LAMPIRAN 7

DAFTAR REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN

NO	RO	URAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	RANCANGAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN PELAUT DAN AWAK KAPAL PERIKANAN	Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	80%	
2	Rancangan Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia	Rancangan Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia	70%	
3	Rancangan Kebijakan Pengendalian FIR	Rancangan Kebijakan Pengendalian FIR		
4	Rancangan Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional	Rancangan Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional	75%	
5	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer	35%	
6	Rekomendasi Kebijakan Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik	Rancangan Kebijakan Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik	60%	
7	Rekomendasi Kebijakan Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian	Rancangan Kebijakan Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian		
8	Kebijakan Industri Galangan dan Komponen Kapal	Rancangan Kebijakan Industri Galangan dan Komponen Kapal		
9	Rancangan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Rancangan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	54%	
10	Rancangan Kebijakan Kekayaan Intelektual	Rancangan Kebijakan Kekayaan Intelektual	25%	
11	Rancangan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rancangan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif	45%	
12	Rancangan Kebijakan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rancangan Kebijakan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	44%	
13	Rekomendasi Kebijakan Dukungan Penanganan Sengketa Investasi dan Perdagangan	Rancangan Kebijakan Penanganan Sengketa Nikel (Indonesia vs Uni Eropa)	75%	
NILAI CAPAIAN TAHUN 2022				

DAFTAR REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DITINDAKLANJUTI

NO	RO	URAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN JASA KELAUTAN	Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Indikator Kesehatan Laut Indonesia	30%	
2	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sistem Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan	Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Energi Baru Terbarukan (EBT)		
3	Rekomendasi Kebijakan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	35%	
4	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	Rancangan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu sampai Hilir yang terintegrasi		
5	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dasar	Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dasar		
6	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	60%	
7	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Rekayasa Pantai	Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Rekayasa Pantai		
8	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Sistem Logistik Nasional	Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Sistem Logistik Nasional	60%	
9	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	Rancangan Rekomendasi kebijakan Pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	75%	
10	Kebijakan Restorasi Kualitas Sumber Daya Air	Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	75%	
11	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Penanganan Sampah Laut	Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Penanganan Sampah Laut	75%	
12	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan dan Penanganan Limbah	Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan dan Penanganan Limbah	60%	
13	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perubahan Iklim	100%	
14	Rekomendasi Kebijakan Investasi Industri Hijau	Rancangan rekomendasi kebijakan Green Industri pembangunan KPI Kaltara	75%	
NILAI CAPAIAN TAHUN 2022				

LAMPIRAN 8

DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA PER 28 FEBRUARI 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
DEPUTI 1 - BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI								
1	Diseminasi Indeks Kedaulatan Maritim	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	73.143.000	73.000.000	Selesai	100%	12-Des-22 S/D 17-Des-22
2	Video Content Dalam Rangka 6th Senior Official Meeting dan 4 th Ministerial Meeting Archipelagic And Island State (Ais Forum)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	136.700.000	135.975.000	Selesai	100%	02-Des-22 S/D 07-Des-22
3	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I - Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	17.764.000	17.759.500	Selesai	100%	01-Des-22 S/D 31-Des-22
4	Rental Equipment	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	199.078.000	199.078.000	Selesai	100%	16-Nov-22 S/D 17-Nov-22
5	Rental Equipment & Vehicles	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	199.856.000	199.856.000	Selesai	100%	16-Nov-22 S/D 17-Nov-22
6	Production And Talent	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	199.634.000	199.634.000	Selesai	100%	16-Nov-22 S/D 17-Nov-22
7	Sewa Alat Pengolah Data Lingkup Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim Dan Kawasan Perbatasan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	377.745.000	79.770.000	Selesai	100%	15-Nov-22 S/D 14-Nov-23
8	Sewa Alat Pengolah Data Lingkup Pegawai Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	377.745.000	75.430.000	Selesai	100%	15-Nov-22 S/D 14-Nov-23
9	Sewa Alat Pengolah Data Lingkup Pegawai Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	377.745.000	79.770.000	Selesai	100%	15-Nov-22 S/D 14-Nov-23
10	Sewa Alat Pengolah Data Lingkup Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	377.745.000	79.770.000	Selesai	100%	15-Nov-22 S/D 14-Nov-23
11	Sewa Alat Pengolah Data dan Scanner D1	pengadaan langsung	belanja barang	377.745.000	43.850.000	selesai	100%	03-Okt-22 S/D 04-Okt-23

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
DEPUTI 2 - BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM								
1	Venue, Food And Beverage Pada Sosialisasi Visi Maritim 2045	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	181.500.000	181.500.000	proses	100%	17-Nov-22 S/D 17-Dec-22
2	Seminar Kit Side Event 020 Pada Presidensi G20	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	181.485.000	181.485.000	selesai	100%	10-Nov-22 S/D 15-Nov-22
3	Sewa Ruang Kesekretariatan Event 020	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	155.000.000	155.000.000	persiapan	5%	07-Nov-22 S/D 17-Nov-22
4	Penyusunan Kajian Potensi Penetapan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Dalam Meningkatkan Ekspor Produk Kelautan Dan Perikanan Sebagai Bagian Dari Adaptasi Indeks Kinerja Logistik (IKLI) Dan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	49.338.800	selesai	100%	27-Okt-22 S/D 12-Dec-22
5	Pencetakan Buku Pedoman Penyederhanaan Perizinan Berusaha Tambak Udang Melalui Oss-Rba	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	65.214.700	65.214.700	selesai	100%	20-Okt-22 S/D 28-Okt-22
6	Penyusunan Policy Paper Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Produk Kelautan Dan Perikanan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	39.250.000	selesai	100%	18-Okt-22 S/D 16-Dec-22
7	Penyusunan Policy Paper Peluang Dan Tantangan Produk Kelautan Dan Perikanan Indonesia Di Pasar Eropa	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	40.000.000	39.250.000	selesai	100%	18-Okt-22 S/D 16-Dec-22
8	Sewa Peralatan Atau Mesin Pengolah Data Dan Informasi Kebijakan (Laptop)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	22.097.900	22.097.900	selesai	100%	10-Okt-22 S/D 09-Okt-23
9	Kajian Multi Stakeholder Platform Implementasi Pengelolaan Perikanan Berbasis WPP	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	100.000.000	selesai	100%	30-Sep-22 S/D 30-Dec-22
10	Belanja Jasa Sewa Peralatan Atau Mesin Pengolah Data Sederhana (Laptop)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	66.293.600	selesai	100%	21-Sep-22 S/D 20-Sep-23
11	Belanja Jasa Sewa Peralatan Atau Mesin Pengolah Data Sederhana (Laptop)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	88.391.500	selesai	100%	21-Sep-22 S/D 20-Sep-23

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
DEPUTI 2 - BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM								
12	Seminar Dan Ekshibisi Pengelolaan Jasa Kelautan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	109.812.000	109.812.000	selesai	100%	01-Sep-22 S/D 30-Sep-22
13	Seminar Dan Ekshibisi Penataan Ruang Laut	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	164.835.000	164.835.000	selesai	100%	01-Sep-22 S/D 30-Sep-22
14	Kunjungan Lapangan Road To Ocean 20	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	129.090.000	127.000.000	selesai	100%	31-Agu-22 S/D 21-Sep-22
15	Sewa Peralatan Pengolah Data Sederhana (Nomor Dibuat Manual)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	66.293.600	66.293.600	selesai	100%	23-Agu-22 S/D 22-Agu-23
16	Belanja Jasa Sewa Peralatan Atau Mesin Pengolah Data Sederhana (Laptop)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	66.293.600	selesai	100%	19-Agu-22 S/D 18-Agu-23
17	Belanja Jasa Sewa Peralatan Atau Mesin Pengolah Data Sederhana (Laptop)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	59.724.000	selesai	100%	05-Agu-22 S/D 05-Jul-23
18	Sewa Peralatan Pengolah Data Sederhana	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	197.164.000	197.164.000	selesai	100%	01-Jul-22 S/D 30-Jun-23
19	Penyusunan Policy Paper Simplifikasi Perizinan Usaha Tambak Dalam Upaya Pengembangan Investasi Pertambakan Udang Nasional	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	51.045.000	51.045.000	selesai	100%	15-Jun-22 S/D 14-Sep-22
20	Penyusunan Policy Paper Pengembangan Klaster Komoditas Unggulan Budidaya Air Payau Berkelanjutan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	51.045.000	51.045.000	selesai	100%	10-Jun-22 S/D 10-Sep-22
21	Penyusunan Policy Paper Pengembangan Rumpuk Laut Terintegrasi (Seaweed Estate) Di Maluku Tenggara	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	51.045.000	51.045.000	selesai	100%	10-Jun-22 S/D 10-Sep-22
22	Kajian Analisa Pemanfaatan Wilayah	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	50.000.000	selesai	100%	01-Mar-22 S/D 31-Dec-22
23	Survei Monitoring dan Evaluasi Program PEN ICRG Di Bali	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	174.784.000	174.784.000	selesai	100%	25-Jan-22 S/D 08-Feb-22

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
DEPUTI 3 - BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI								
1	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Kesekretariatan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	17.000.000	16.950.000	Selesai	100%	01-Dec-22 S/D 30-Dec-22
2	Sewa Alat Pendukung Operasional Kantor Dukungan Kerja Sama High Level Dialog And Cooperation Mechanism (HDCM) RI - RRT	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	182.910.000	182.910.000	Selesai	100%	29-Nov-22 S/D 28-Nov-23
3	Penyusunan Kajian Pendukung Kebijakan Percepatan Pembangunan Jalan Trans Pulau 3t (Terdepan, Terluar, Dan Tertinggal)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	49.000.000	Selesai	100%	07-Nov-22 S/D 30-Dec-22
4	Penyusunan Kajian Pendukung Kebijakan Percepatan Pembangunan Jalan Tol	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	49.000.000	Selesai	100%	07-Nov-22 S/D 30-Dec-22
5	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Hankam (Nov-Des)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	16.950.000	16.950.000	Selesai	100%	07-Nov-22 S/D 30-Dec-22
6	Jasa Lainnya Diklat Bahasa Inggris Ielts Preparation Di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	108.500.000	105.000.000	Selesai	100%	03-Okt-22 S/D 23-Dec-22
7	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Sosial Budaya (Sept Sd Des)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	78.000.000	78.000.000	Selesai	100%	06-Sep-22 S/D 30-Dec-22
8	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Kemaritiman (Sept Sd Desember)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	78.000.000	78.000.000	Selesai	100%	06-Sep-22 S/D 30-Dec-22
9	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Perdagangan (Sept Sd Desember)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	61.200.000	61.200.000	Selesai	100%	06-Sep-22 S/D 30-Dec-22
10	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Ekonomi (Sept Sd Desember)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	54.750.000	54.750.000	Selesai	100%	06-Sep-22 S/D 30-Dec-22
11	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Investasi (Sept Sd Desember)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	54.750.000	54.750.000	Selesai	100%	06-Sep-22 S/D 30-Dec-22
12	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Pertukaran Antar Masyarakat	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	58.350.000	58.350.000	Selesai	100%	06-Sep-22 S/D 30-Dec-22

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
DEPUTI 3 - BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI								
13	Penyusunan Kajian Pendukung Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Rekayasa Pantai	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	97.500.000	Selesai	100%	06-Sep-22 S/D 05-Dec-22
14	Kajian Dan Analisis Potensi Sistem Logistik Nasional	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	200.000.000	49.000.000	Selesai	100%	08-Agu-22 S/D 05-Dec-22
15	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Sosial Budaya (Juni Sd Agustus)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	78.000.000	78.000.000	Selesai	100%	13-Jun-22 S/D 31-Agu-22
16	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Kemaritiman (Juni Sd Agustus)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	78.000.000	78.000.000	Selesai	100%	13-Jun-22 S/D 31-Agu-22
17	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Politik (Juni Sd Agustus)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	65.550.000	65.550.000	Selesai	100%	13-Jun-22 S/D 31-Agu-22
18	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Perdagangan (Juni Sd Agustus)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	61.200.000	61.200.000	Selesai	100%	13-Jun-22 S/D 31-Agu-22
19	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Ekonomi (Juni Sd Agustus)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	54.750.000	54.750.000	Selesai	100%	13-Jun-22 S/D 31-Agu-22
20	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Investasi (Juni Sd Agustus)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	54.750.000	54.750.000	Selesai	100%	13-Jun-22 S/D 31-Agu-22
21	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Hankam (Juni Sd Agustus)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	41.550.000	41.550.000	Selesai	100%	13-Jun-22 S/D 31-Agu-22
22	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tionggok Bidang Pertukaran Antar Masyarakat (Juni Sd Agustus)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	58.350.000	58.350.000	Selesai	100%	13-Jun-22 S/D 31-Agu-22
23	Penyusunan Kajian Evaluasi Program Psn Pada Infrastruktur Pembangunan Spam (Sistem Penyediaan Air Minum)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	97.500.000	Selesai	100%	19-Mei-22 S/D 18-Agu-22
24	Pemantauan dan Pemutakhiran Capaian Isu Strategis Maritim dan Transportasi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	98.000.000	Selesai	100%	12-Mei-22 S/D 26-Dec-22

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
DEPUTI 3 - BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI								
25	Penyusunan Kajian Pendukung Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pulau-Pulau Kecil Terluar	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	97.500.000	Selesai	100%	20-Apr-22 S/D 20-Jul-22
26	Penyusunan Kajian Pendukung Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Resiliensi Terhadap Bencana	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	97.500.000	Selesai	100%	07-Apr-22 S/D 07-Jul-22
27	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tiongkok Bidang Sosial Budaya	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	78.000.000	Selesai	100%	06-Jan-22 S/D 30-Apr-22
28	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tiongkok Bidang Kemaritiman (Mentari)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	78.000.000	Selesai	100%	06-Jan-22 S/D 30-Apr-22
29	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tiongkok Bidang Politik (Jesslyn Katherine)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	65.600.000	Selesai	100%	06-Jan-22 S/D 30-Apr-22
30	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tiongkok Bidang Perdagangan (Savira)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	61.200.000	Selesai	100%	06-Jan-22 S/D 30-Apr-22
31	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tiongkok Bidang Ekonomi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	54.800.000	Selesai	100%	06-Jan-22 S/D 30-Apr-22
32	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tiongkok Bidang Investasi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	54.800.000	Selesai	100%	06-Jan-22 S/D 30-Apr-22
33	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tiongkok Bidang Hankam	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	41.600.000	Selesai	100%	06-Jan-22 S/D 30-Apr-22
34	Kajian Kerja Sama HDCM Indonesia - Tiongkok Bidang Pertukaran Antar Masyarakat (Guan Nan)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	58.400.000	58.400.000	Selesai	100%	06-Jan-22 S/D 30-Apr-22

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
DEPUTI 4 - BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN								
1	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I - Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Dan Kehutanan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	17.800.000	17.759.500	Selesai	100%	01-Dec-22 S/D 31-Dec-22
2	Kajian Rehabilitasi Mangrove Nasional	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	49.900.000	Selesai	100%	01-Nov-22 S/D 30-Nov-22
3	Kajian Land Subsidence Pulau Jawa Dan Kota Strategis Nasional	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	49.900.000	Selesai	100%	01-Nov-22 S/D 30-Nov-22
4	Kajian Penentuan Baseline Emisi Grk Ndc Dan Carbon Budget Di Sektor Energi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	49.950.000	Selesai	100%	01-Nov-22 S/D 30-Nov-22
5	Kajian Pilot Project Kemitraan Pengusahaan Biomassa Dan Batubara Di Kalimantan Timur	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	49.000.000	Selesai	100%	25-Okt-22 S/D 24-Nov-22
6	Sewa Perangkat Pengolah Data Pada Asisten Deputi Pengelolaan Sampah Dan Limbah	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	60.000.000	59.880.000	Selesai	100%	08-Agu-22 S/D 07-Agu-23
7	Penyusunan Naskah Akademik Pembangunan Pusat Herbal-Hortikultura Dan Genomik Menggali Kekayaan Alam Asli Sumut	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	48.000.000	48.000.000	Selesai	100%	01-Agu-22 S/D 31-Agu-22
8	Sewa Perangkat Pengolah Data Pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan Dan Jasa Lingkungan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	99.000.000	98.501.400	Selesai	100%	18-Jul-22 S/D 17-Jul-23
9	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Agronomi Program Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	54.000.000	Selesai	100%	20-Jun-22 S/D 20-Dec-22
10	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Agrososiologi Program Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	54.000.000	Selesai	100%	20-Jun-22 S/D 20-Dec-22
11	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Pengelolaan Tanah Dan Hara Pertanian Program Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	54.000.000	Selesai	100%	20-Jun-22 S/D 20-Dec-22
12	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Sumber Daya Air Program Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	54.000.000	Selesai	100%	20-Jun-22 S/D 20-Dec-22

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
DEPUTI 4 - BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN								
13	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Teknologi Pertanian Program Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	54.000.000	Selesai	100%	20-Jun-22 S/D 20-Dec-22
14	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Teknologi Hasil Pertanian Program Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	54.000.000	Selesai	100%	20-Jun-22 S/D 20-Dec-22
15	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Bioteknologi Program Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	54.000.000	Selesai	100%	20-Jun-22 S/D 20-Dec-22
16	Pengadaan Sewa Laptop Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	198.000.000	198.000.000	Selesai	100%	18-Apr-22 S/D 17-Jan-23
17	Sewa Laptop	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	36.000.000	36.000.000	Selesai	100%	21-Mar-22 S/D 28-Mar-23
INSPEKTORAT KEMENTERIAN								
1	Pengembangan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	75.000.000	74.148.000	Selesai	100%	29-Jul-22 S/D 27-Agu-22
2	Sewa Perangkat Pengolah Data Pada Inspektorat	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	62.959.200	-	Selesai	100%	20-Jul-22 S/D 19-Jul-23
3	Penyusunan Pedoman Kendali Mutu Audit	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	75.000.000	74.342.200	Selesai	100%	16-Jun-22 S/D 15-Jul-22
4	Pengadaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Perlengkapan Lapangan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	98.568.000	Selesai	100%	06-Jun-22 S/D 05-Jul-22
5	Pengadaan Belanja Sewa Perangkat Pengolah Data	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	80.280.000	79.120.800	Selesai	100%	25-Mei-22 S/D 24-Mei-23

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
SETMENKO 1 - BIRO UMUM								
1	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon 1 - Sekretaris Kementerian Koordinator	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	17.760.000	17.759.500	Selesai	100%	01-Dec-22 S/D 31-Dec-22
2	Pengadaan Pekerjaan Pencetakan Kalender TA.2023	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	150.000.000	150.000.000	Selesai	100%	01-Dec-22 S/D 15-Dec-22
3	Penggantian Wire Rope Lift 2	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	259.166.000	198.700.000	Proses	45%	01-Dec-22 S/D 05-Dec-22
4	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Air Bersih	Pengadaan Langsung	Belanja Modal	200.000.000	191.808.000	Selesai	100%	24-Nov-22 S/D 28-Dec-22
5	Pekerjaan Pipa Transfer Air Bersih	Pengadaan Langsung	Belanja Modal	200.000.000	-	Selesai	100%	24-Nov-22 S/D 28-Dec-22
6	Pemasangan Pipa Header Dan Instalasi Listrik Pompa Transfer	Pengadaan Langsung	Belanja Modal	199.819.000	199.819.000	Selesai	100%	24-Nov-22 S/D 28-Dec-22
7	Konstruksi Lantai Beserta Dudukan Tangki	Pengadaan Langsung	Belanja Modal	156.000.000	155.949.000	Selesai	100%	24-Nov-22 S/D 28-Dec-22
8	Renovasi Ruang Sespri Lantai 3	Pengadaan Langsung	Belanja Modal	164.000.000	164.000.000	Selesai	100%	08-Nov-22 S/D 21-Nov-22
9	Jasa Pengamanan VIP Semester II	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	164.000.000	163.980.000	Selesai	100%	01-Jul-22 S/D 31-Dec-22
10	Sewa Gudang BMN Semester II	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	129.937.000	125.622.000	Selesai	100%	01-Jul-22 S/D 31-Dec-22
11	Pantry Storage Ruang Menko	Pengadaan Langsung	Belanja Modal	86.132.000	86.132.000	Selesai	100%	28-Jun-22 S/D 04-Jul-22
12	Pengadaan Box Arsip	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	81.975.000	80.752.500	Selesai	100%	16-Jun-22 S/D 22-Jun-22

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
SETMENKO 1 - BIRO UMUM								
13	Pengadaan Proyektor Menko	Pengadaan Langsung	Belanja Modal	109.000.000	109.000.000	Selesai	100%	10-Jun-22 S/D 16-Jun-22
14	Sewa Kendaraan Operasional Eselon I - Camry (Juni)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	88.797.500	Selesai	100%	02-Jun-22 S/D 30-Jun-22
15	Sewa Kendaraan Operasional Eselon II Innova Venturer - Juni	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	167.648.000	Selesai	100%	24-Nov-22 S/D 28-Des-22
16	Sewa Kendaraan Operasional Innova Venturer - Juni	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	193.440.000	Selesai	100%	24-Nov-22 S/D 28-Des-22
17	Sewa Kendaraan Operasional Eselon II - Crv (Juni)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	92.501.500	Selesai	100%	24-Nov-22 S/D 28-Des-22
18	Sewa Kendaraan Listrik (Juni)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	53.078.200	Selesai	100%	24-Nov-22 S/D 28-Des-22
19	Pengadaan Suplemen Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi (Rhea)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	117.000.000	Selesai	100%	17-Mei-22 S/D 23-Mei-22
20	Sewa Alat Pengolah Data Biro Umum (Keuangan)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	198.580.000	198.080.000	Proses	100%	09-Mei-22 S/D 31-Des-22
21	Sewa Kendaraan Operasional Eselon I - Camry (Mei)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	88.797.500	Selesai	100%	04-Mei-22 S/D 31-Mei-22
22	Sewa Kendaraan Operasional Innova Venturer - Mei	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	193.440.000	Selesai	100%	04-Mei-22 S/D 31-Mei-22
23	Sewa Kendaraan Operasional Eselon II Innova Venturer - Mei	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	167.648.000	167.648.000	Selesai	100%	01-Mei-22 S/D 31-Mei-22
24	Sewa Laptop Windows Dan Gadget	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	243.000.000	199.638.000	Selesai	100%	20-Apr-22 S/D 19-Jan-23

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
SETMENKO 1 - BIRO UMUM								
25	Sewa Laptop Mac	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	162.000.000	143.934.000	Selesai	100%	20-Apr-22 S/D 19-Apr-23
26	Renovasi Rumah Dinas Menteri	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	86.970.000	86.970.000	Selesai	100%	12-Apr-22 S/D 18-Apr-22
27	Camera Thermal Hikvision	Pengadaan Langsung	Belanja Modal	184.520.000	184.520.000	Selesai	100%	11-Apr-22 S/D 14-Apr-22
28	Sewa Kendaraan Operasional Deputi 2 Dan Walpri Menteri Pajero (Apr-Mei)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	55.600.000	Selesai	100%	01-Apr-22 S/D 31-Mei-22
29	Sewa Kendaraan Operasional Eselon II Innova Venturer - Apr	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	167.648.000	167.648.000	Selesai	100%	01-Apr-22 S/D 30-Apr-22
30	Sewa Kendaraan Operasional Innova - Apr	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	193.440.000	Selesai	100%	01-Apr-22 S/D 30-Apr-22
31	Sewa Kendaraan Operasional Eselon II - CRV (Apr-Mei)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	185.003.000	Selesai	100%	01-Apr-22 S/D 31-Mei-22
32	Sewa Kendaraan Listrik (Apr-Mei)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	106.156.000	106.156.000	Selesai	100%	01-Apr-22 S/D 31-Mei-22
33	Sewa Pengharum Ruangan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	180.000.000	143.575.000	Selesai	100%	21-Mar-22 S/D 31-Des-22
34	Sewa Kendaraan Operasional Eselon II Innova - Mar	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	167.700.000	166.137.000	Selesai	100%	01-Mar-22 S/D 31-Mar-22
35	Sewa Kendaraan Operasional Eselon II CRV - Mar	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	92.750.000	91.973.000	Selesai	100%	01-Mar-22 S/D 31-Mar-22
36	Sewa Kendaraan Operasional Innova - Mar	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	193.500.000	191.697.000	Selesai	100%	01-Mar-22 S/D 31-Mar-22

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
SETMENKO 1 - BIRO UMUM								
37	Sewa Bus Antar Jemput Pegawai - Mar	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	112.320.000	Selesai	100%	01-Mar-22 S/D 31-Mar-22
38	Sewa Kendaraan Operasional Eselon I - Camry (Mar-Apr)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	177.595.000	Selesai	100%	01-Mar-22 S/D 30-Apr-22
39	Perapihan Ruang Kerja Sekretariat Hldcm (Indonesia - Tiongkok) Lantai 17	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	197.559.000	Selesai	100%	22-Feb-22 S/D 14-Mar-22
40	Asesmen Tenaga Pendukung Administrasi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	195.750.000	195.640.000	Selesai	100%	14-Feb-22 S/D 16-Feb-22
41	Sewa Bus Antar Jemput Pegawai - Feb	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	112.320.000	Selesai	100%	02-Feb-22 S/D 28-Feb-22
42	Sewa Kendaraan Operasional Innova - Feb	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	193.500.000	191.697.000	Selesai	100%	02-Feb-22 S/D 28-Feb-22
43	Sewa Kendaraan Operasional Eselon II Innova - Feb	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	167.700.000	166.137.000	Selesai	100%	02-Feb-22 S/D 28-Feb-22
44	Sewa Mesin Fotocopy Digital	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	200.000.000	199.921.000	Selesai	100%	03-Jan-22 S/D 31-Dec-22
45	Sewa Gudang BMN	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	103.950.000	103.950.000	Selesai	100%	03-Jan-22 S/D 30-Jun-22
46	Sewa Bus Antar Jemput Pegawai	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	112.320.000	112.320.000	Selesai	100%	03-Jan-22 S/D 31-Jan-22
47	Jasa Pengamanan VIP	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	200.000.000	163.316.000	Selesai	100%	03-Jan-22 S/D 30-Jun-22
48	Sewa Kendaraan Operasional Eselon I - Camry	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	175.995.000	175.995.000	Selesai	100%	03-Jan-22 S/D 28-Feb-22

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
SETMENKO 1 - BIRO UMUM								
49	Sewa kendaraan operasional eselon ii (innova venturer) - jan	pengadaan langsung	belanja barang	166.137.000	166.137.000	selesai	100%	03-Jan-22 S/D 31-Jan-22
50	Sewa kendaraan operasional eselon ii - crv (jan-feb)	pengadaan langsung	belanja barang	185.500.000	183.946.000	selesai	100%	03-Jan-22 S/D 28-Feb-22
51	Sewa kendaraan operasional - innova (jan)	pengadaan langsung	belanja barang	191.697.000	191.697.000	selesai	100%	03-Jan-22 S/D 31-Jan-22
52	Sewa kendaraan operasional deputi 2 dan walpri menteri - pajero (jan-mar)	pengadaan langsung	belanja barang	83.400.000	83.400.000	selesai	100%	03-Jan-22 S/D 31-Mar-22
53	Sewa kendaraan operasional sesmenko - fortuner (jan-des)	pengadaan langsung	belanja barang	163.200.000	163.200.000	selesai	100%	03-Jan-22 S/D 31-Dec-22
54	Sewa kendaraan listrik	pengadaan langsung	belanja barang	158.400.000	157.800.000	selesai	100%	03-Jan-22 S/D 31-Mar-22
SETMENKO 2 - BIRO HUKUM								
1	Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data Biro Hukum	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	60.000.000	60.000.000	Proses	45%	26-Okt-22 S/D 26-Okt-23
2	Workshop Coorporate Culture And Change Management	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	150.000.000	149.577.000	Selesai	100%	23-Sep-22 S/D 07-Okt-22
3	Sewa Perangkat Pengolah Data	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	97.335.000	96.950.000	Selesai	100%	31-Mei-22 S/D 30-Mei-23
4	Penyajian Layanan Informasi Hukum Melalui Video Motion Grafis, Informasi Grafis Dan Desain Buku Tahunan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	150.000.000	149.728.000	Selesai	100%	23-Mei-22 S/D 21-Nov-22

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
SETMIENKO 3 - BIRO PERENCANAAN								
1	Belanja Jasa Sewa Peralatan Atau Mesin Pengolah Data dan Informasi (Laptop)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	199.000.000	198.801.000	Selesai	100%	21-Nov-22 S/D 30-Nov-23
2	Analisis Pengembangan Sik-Marves	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	90.000.000	90.000.000	Selesai	100%	04-Agu-22 S/D 04-Nov-22
3	Sewa Laptop Roren III	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	180.000.000	178.800.000	Selesai	100%	16-Jun-22 S/D 23-Jun-22
4	Sewa Peralatan Kerja Berupa Laptop, Printer, Dan Tablet	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	152.955.000	152.955.000	Selesai	100%	11-Apr-22 S/D 31-Des-22
5	Sewa Peralatan Kerja (ipad)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	165.240.000	165.240.000	Selesai	100%	11-Apr-22 S/D 31-Des-22
6	Sewa Laptop I	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	73.200.000	73.200.000	Selesai	100%	28-Mar-22 S/D 27-Mar-23
7	Sewa Laptop II	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	177.600.000	177.600.000	Selesai	100%	28-Mar-22 S/D 27-Mar-23
8	Sewa Laptop	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	60.000.000	60.000.000	Proses	100%	23-Mar-22 S/D 22-Mar-23
DEPUTI 5 - BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
1	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I - Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	17.760.000	17.759.500	Selesai	100%	01-Des-22 S/D 31-Des-22
2	Sewa Tablet	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.800.000	100.800.000	Proses	100%	01-Des-22 S/D 31-Des-22
3	Sewa Laptop Macbook Pro Apple M1	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	198.720.000	198.720.000	Selesai	100%	20-Jan-22 S/D 02-Feb-22
4	Sewa Macbook Pro Apple M1 Tahap II	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	165.600.000	165.600.000	Selesai	100%	17-Jan-22 S/D 02-Feb-22

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
DEPUTI 6 - BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN								
1	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I - Deputi Bidang Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	17.760.000	17.759.500	Selesai	100%	01-des-22 s/d 31-des-22
2	Penulisan Dan Desain Buku Refleksi Tahun 2021 dan Outlook Tahun 2022	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	150.000.000	149.130.000	Selesai	100%	01-nov-22 s/d 31-des-22
3	Jasa Konsultasi Hukum Penyederhanaan Birokrasi Kepelabuhanan Pada Asisten Deputi Investasi Strategis	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	30.000.000	30.000.000	Selesai	100%	01-nov-22 s/d 31-des-22
4	Jasa Konsultan Penataan Arsip Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	20.000.000	20.000.000	Selesai	100%	04-okt-22 s/d 31-des-22
5	Jasa Konsultansi Bidang Hukum Pada Kajian Proses Bisnis Survey Laut "Peran Dan Tantangan Pelaksanaan Survey Laut"	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	77.050.000	Selesai	100%	01-agu-22 s/d 31-des-22
6	Jasa Konsultansi Legal Perorangan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha Pada Sektor Infrastruktur Sosial Tahap II Perumahan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	99.000.000	69.000.000	Selesai	100%	01-agu-22 s/d 31-des-22
7	Jasa Konsultansi Legal Perorangan Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kinerja Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha Di Bidang Kereta Cepat Jakarta-Bandung	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	48.500.000	Selesai	100%	01-agu-22 s/d 31-des-22
8	Jasa Konsultansi Legal Perorangan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha Pada Sektor Infrastruktur Ekonomi Jalan Tol Di Jawa Barat	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	49.500.000	Selesai	100%	01-agu-22 s/d 31-des-22
9	Jasa Konsultansi Tenaga Pendukung Perorangan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha Pada Sektor Infrastruktur Ekonomi Jalan Tol Di Jawa Tengah	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	40.000.000	37.250.000	Selesai	100%	01-agu-22 s/d 31-des-22
10	Jasa Konsultan Analisis Kebijakan Peningkatan Penyediaan Tenaga Listrik Yang Bersumber Dari Energi Surya (PLTS) Di Indonesia	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	90.000.000	89.950.000	Selesai	100%	01-agu-22 s/d 31-des-22
11	Jasa Konsultan Legal Advisor Pengembangan Dan Monitoring Kebijakan Percepatan Pengadaan Lahan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	49.100.000	Selesai	100%	11-jul-22 s/d 30-sep-22
12	Jasa Konsultansi Dalam Rangka Evaluasi Dan Penyusunan Strategi Eksplorasi Potensi Investasi Di 2 (Dua) Destinasi Pariwisata Super Prioritas Pada Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	91.150.000	Selesai	100%	23-mei-22 s/d 23-agu-22

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
DEPUTI 6 - BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN								
13	Konsultasi Bidang Hukum Investasi Bidang Investasi Strategis	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	65.000.000	62.500.000	Selesai	100%	10-Mei-22 S/D 10-Okt-22
14	Jasa Konsultan Tenaga Ahli Legal Advisor Pengembangan dan Monitoring Kebijakan Percepatan Investasi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	49.050.000	Selesai	100%	08-Apr-22 S/D 30-Jun-22
15	Jasa Konsultansi Terkait Kajian Kebijakan Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Industri Pengguna Produk Cold Rolled Stainless Steel (CRS)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	50.000.000	Selesai	100%	17-Mar-22 S/D 17-Apr-22
16	Jasa Konsultan Penyelesaian Masalah Batu Bara	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	40.000.000	35.875.000	Proses	100%	01-Mar-22 S/D 31-Mar-22
17	Jasa Konsultan Tenaga Ahli Muda/Tenaga Terampil Pengembangan dan Monitoring Kebijakan Percepatan Investasi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	56.350.000	Selesai	100%	04-Feb-22 S/D 31-Des-22
18	Jasa Konsultasi Bidang Hukum Dukungan Pengelolaan Kegiatan Investasi Bidang Jasa Logistik Pada Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	77.050.000	Selesai	100%	04-Feb-22 S/D 30-Jun-22
19	Jasa Konsultan Perorangan Dukungan Pengelolaan Kegiatan Investasi Strategis	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	57.450.000	Selesai	100%	04-Feb-22 S/D 31-Des-22
20	Jasa Konsultansi Perorangan Dukungan Kebijakan Akuntansi Negara	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	57.450.000	Selesai	100%	04-Feb-22 S/D 31-Des-22
21	Jasa Konsultansi Legal Perorangan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha Pada Sektor Infrastruktur Sosial	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	94.250.000	Selesai	100%	04-Feb-22 S/D 30-Jun-22
22	Jasa Konsultansi Legal Perorangan Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	50.500.000	Selesai	45%	04-Feb-22 S/D 30-Jun-22
23	Jasa Konsultansi Legal Perorangan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha Pada Sektor Infrastruktur Ekonomi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	49.500.000	Selesai	100%	04-Feb-22 S/D 30-Jun-22
24	Jasa Konsultansi Administrasi Perorangan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha Pada Sektor Infrastruktur Ekonomi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	50.000.000	38.750.000	Selesai	100%	04-Feb-22 S/D 30-Jun-22

NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
DEPUTI 6 - BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN								
25	Jasa Konsultan Analis Pertambangan Rekomendasi Kebijakan Penatakelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	77.350.000	Selesai	100%	04-Feb-22 S/D 31-Des-22
26	Jasa Konsultan Analis Pertambangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pertambangan Tanpa Izin Dan Penatakelolaan Pertambangan Rakyat	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	77.350.000	Selesai	100%	04-Feb-22 S/D 31-Des-22
SETMENKO 4 - BIRO KOMUNIKASI								
1	Sewa Ruang Pertemuan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan KTT G20	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	92.400.000	92.400.000	Selesai	100%	21-Des-22 S/D 21-Des-22
2	Jamuan Makan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan KTT G20	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	165.770.000	165.770.000	Selesai	100%	02-Des-22 S/D 02-Des-22
3	Jasa Lainnya Showcase Spouse Program Pada KTT G20	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	195.000.000	195.000.000	Selesai	100%	11-Nov-22 S/D 17-Nov-22
4	Pengadaan Jasa Pengemudi Pada KTT G20	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	88.320.000	88.320.000	Selesai	100%	07-Nov-22 S/D 18-Nov-22
5	Belanja Bahan Pengadaan Seragam Panitia KTT G20 Kemenko Marves	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	200.000.000	199.840.000	Selesai	100%	01-Nov-22 S/D 14-Nov-22
6	Sewa Kendaraan Pejabat Eselon II - Biro Komunikasi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	-	78.331.400	Selesai	100%	05-Okt-22 S/D 31-Des-22
7	Penyusunan Video Laporan Presidensi G20	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	200.000.000	198.000.000	Selesai	100%	02-Sep-22 S/D 23-Des-22
8	Pembuatan Buku Laporan Penyelenggaraan G20	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	200.000.000	91.800.000	Selesai	100%	02-Sep-22 S/D 30-Nov-22
9	Sewa Peralatan TIK (Laptop Dan Printer)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	159.600.000	158.640.000	Selesai	100%	05-Agu-22 S/D 04-Agu-23
10	Sewa Laptop - Protokol	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	70.462.000	69.930.000	Selesai	100%	03-Agu-22 S/D 02-Agu-23

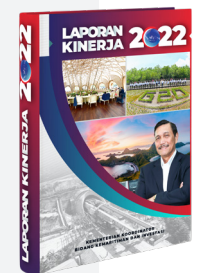
NO	NAMA PEKERJAAN	METODE PBJ	JENIS PBJ	NILAI PAGU	NILAI KONTRAK	STATUS	PROGRES	TANGGAL KEGIATAN
SETMENKO 4 - BIRO KOMUNIKASI								
11	Pengembangan Dashboard Marves Dalam Angka	Pengadaan Langsung	Belanja Modal	150.000.000	150.000.000	Selesai	100%	19-Jul-22 S/D 30-Sep-22
12	Sewa Peralatan Tik (Laptop Dan Printer)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	159.000.000	158.400.000	Selesai	100%	18-Jul-22 S/D 17-Jul-23
13	Sewa Laptop	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	82.800.000	81.800.000	Selesai	100%	18-Jul-22 S/D 17-Jul-23
14	Jasa Konsultasi Perorangan Koordinasi Pelaksanaan Presidensi G20	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	182.000.000	35.000.000	Selesai	100%	01-Jul-22 S/D 30-Nov-22
15	Jasa Konsultasi Perorangan Bidang Publikasi Dan Dokumentasi Juni-November (Hadriani Pudjiarti)	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	182.000.000	35.000.000	Selesai	100%	01-Jul-22 S/D 30-Nov-22
16	Pengembangan Aplikasi PPID Berbasis Web dan Mobile Melalui Integrasi Sistem Pelayanan Publik Elektronik Mengenai Pelayanan	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	200.000.000	99.556.000	Selesai	100%	01-Jul-22 S/D 14-Jul-22
17	Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	100.000.000	98.400.000	Selesai	100%	13-Jun-22 S/D 31-Dec-22
18	Penyusunan Dokumen Manajemen Pengetahuan Spbe	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	48.000.000	48.000.000	Selesai	100%	13-Jun-22 S/D 13-Sep-22
19	Penyusunan Dokumen Manajemen Perubahan SPBE	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	48.000.000	48.000.000	Selesai	100%	13-Jun-22 S/D 13-Sep-22
20	Penyusunan Dokumen Manajemen Aset Tik	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	48.000.000	48.000.000	Selesai	100%	13-Jun-22 S/D 13-Sep-22
21	Pengadaan Sewa Kendaraan Antar Jemput Delegasi UAE Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	784.664.000	154.287.000	Selesai	15%	25-Apr-22 S/D 28-Apr-22
22	Sewa Hotel Delegasi UAE	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	783.664.000	69.000.000	Selesai	100%	25-Apr-22 S/D 27-Apr-22
23	Jasa Konsultasi Perorangan Bidang Publikasi dan Dokumentasi A/N Handriani Pudjiarti	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	182.000.000	28.000.000	Selesai	100%	02-Feb-22 S/D 31-Mei-22
24	Jasa Konsultasi Perorangan Bidang Publikasi dan Dokumentasi A/N Galuh Ruspita	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	182.000.000	42.000.000	Selesai	100%	02-Feb-22 S/D 31-Mei-22
25	Jasa Konsultasi Perorangan Bidang Publikasi Dan Dokumentasi	Pengadaan Langsung	Belanja Barang	84.000.000	6.530.000	Selesai	100%	03-Jan-22 S/D 31-Jan-22
JUMLAH				22.411.770.400	20.840.978.200			

TIM PENYUSUN LKJ KEMENKO MARVES TAHUN 2022

Penasehat : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan

Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Ayodhia G. L. Kalake

Kontributor : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
Jodi Mahardi
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim
M. Firman Hidayat
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
Rachmat Kaimuddin
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
Nani Hendiarti
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Odo R.M Manuhutu
Deputi Bidang Koordinasi Investasi Dan Pertambangan
Septian Hario Seto
Inspektur
Kepala Biro Hukum
Kepala Biro Komunikasi
Kepala Biro Umum
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing
Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap
Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya
Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur
Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi
Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah
Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas
Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air
Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan
Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah
Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA
Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan
Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa
Asisten Deputi Pertambangan
Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi
Asisten Deputi Investasi Strategis
Seluruh Perencana Ahli Madya Unit Kerja Deputi I s.d VI

Penanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan
Arif Rahman

Penyusun : Perencana Ahli Madya
Yetri Fermila
Perencana Ahli Madya
Achmad Murman
Analisis Kebijakan Ahli Madya
Muhammad Ghazali Unus
Analisis Kebijakan Ahli Madya
Samuel Rahallus
Perencana Ahli Muda
Nuzulia Yuaniva
Perencana Ahli Muda
Indra Nugraha
Perencana Ahli Muda
Happy Budi Baswara
Analisis Anggaran Ahli Muda
Teno Sulistyanto
Andini Mey Larasati
Dewi Maharani
Andi Juhandi
Allifah Rindu Febriani
Deby Purnama Sari
Anisa Nurhadaya Pramitha

Editor : Perencana Ahli Muda
Indra Nugraha
Andini Mey Larasati
Anisa Nurhadaya Pramitha

Foto Dokumentasi : **Tim Humas Kemenko Marves**

Design Cover & Isi dan Percetakan : **CV. Multitama Unggul Langgam**

Produksi : **Biro Perencanaan**
Gd. Kemenko Marves Lt.5 Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10340





Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340
INDONESIA
Telp : +62 21 23951100
email : kemenkomaritim@maritim.go.id
www.maritim.go.id



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**



@Kemenko Kemaritiman Dan Investasi



@kemenkomarves



@Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI



@kemenkomarves